



Nangun Sat Kerthi Loka Bali

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Dengan menghaturkan *puja pangastuti angayubagia* dihadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 pada dasarnya dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 selanjutnya digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

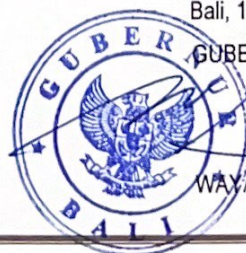
Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas, paradigma penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami pergeseran dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik walaupun masih dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sebagai akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Bali, yaitu : **"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Terimakasih.

Bali, 15 Maret 2023

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	7
d. Jumlah Kabupaten/Kota	7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah	9
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Terdiri Dari Laporan Realisasi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan, Program Dan Jenis Belanja	11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	35
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	35
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	54
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	63
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	75
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	169
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	171
2.1 Capaian Kinerja Makro	171
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	174
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	174
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	223
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	251
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	255

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	365
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali	365
3.1.1 Target Kinerja	365
3.1.2 Realisasi	366
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota	373
3.3 Permasalahan dan Kendala	373
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	373
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	374
4.1 Urusan Pendidikan	375
4.2 Urusan Kesehatan	377
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	382
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	388
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	391
4.6 Urusan Sosial	393
4.7 Program dan Kegiatan	399
4.7.1 Urusan Pendidikan	399
4.7.2 Urusan Kesehatan	399
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum	400
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat	406
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	408
4.7.6 Urusan Sosial	409
BAB VPENUTUP	411

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Bali lahir setelah terjadi penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bali dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Era baru masyarakat Bali diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara Daerah Bali, lembaga Legislasi ini dilantik pada 25 September 1950 di Bali Hotel Denpasar. Sebelum itu, Pemerintahan Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksana Pemerintahan (BPP) di Bali, dengan Ketua BPP adalah AA. Gede Oka (Ketua Dewan Raja Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Daging (urusan ekonomi), dan I Wayan Badra (urusan umum). Baru beberapa hari BPP menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang itu, dibentuklah Panitia Penyelenggaraab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Panitia ini yang membentuk DPR sementara Daerah Bali. Jumlah Anggota DPRD Bali saat itu berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakli dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani, dan orang-orang yang terikat oleh Partai/Organisasi. I Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Ida Bagus Oka, dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri.

Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. AA. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, diadakan pula pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, yaitu I Gusti Made Mudra (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Daging (urusan ekonomi), dan I Gusti Bagus Sugriwa (urusan umum). Bersamaan dengan itu, diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali. Pada Bulan Mei 1951, semua daerah di Bali telah terbentuk DPRD Daerah Bagian (swapraja) serta dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah.

Pasca Pemilu Tahun 1951, munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemberlakuan Undang-Undang ini diikuti

dengan pembentukan Provinsi Bali pada 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali dibentuk, pelaksanaan Pemerintahan di Bali mengalami perubahan, Pemerintah Pusat menunjuk/mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Bagus Oka ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca dibentuknya Provinsi Bali, dan dilantik pada 1 Desember 1958. Setelah diangkatnya pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, terbentuklah DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru terbentuk dan memilih calon Kepala Daerah yang baru. Presiden Soekarno menetapkan AA. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959, jadi AA. Bagus Sutedja merupakan Kepala Daerah definitif pertama Provinsi Bali setelah dibentuk Tahun 1958.

Semula Ibukota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil, tapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-B6 tanggal 23 Juni 1960, Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar, pemidahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali, dan Denpasar menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini.

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 km², terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, layaknya wilayah lain di Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem 839,54 km² (14,89%), dan Tabanan 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat/desa pakraman. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km²)	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Desa Adat
1	Buleleng	1.365,88	9	148	170
2	Jembrana	841,80	5	51	64
3	Tabanan	839,33	10	133	348
4	Badung	418,52	6	62	122
5	Denpasar	127,78	4	43	35
6	Gianyar	368,00	7	70	272
7	Bangli	520,81	4	72	168
8	Klungkung	315,00	4	59	119
9	Karangasem	839,54	8	78	190
BALI		5.636,66	57	716	1.493

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua , yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat/Desa Pakraman di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki

semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat/Desa Pakraman yang memiliki *Pura Kahyangan* Desa lainnya. Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat/Desa Pakraman diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat/Desa Pakraman merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sat Kahyangan* sebanyak 8 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama* Bali), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama* Bali yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Sumber daya alam Bali berupa hutan, tanah, dan air sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain. Di wilayah Provinsi Bali terdapat 4 (empat) danau, 246 (dua ratus empat puluh enam) sungai, 24 (dua puluh empat) gunung yang 2 gunung di antaranya merupakan gunung berapi, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Pegunungan di Bali terbentang di tengah-tengah Pulau Bali yang memanjang dari Barat ke Timur. Hal ini sekaligus menjadikan daratan Pulau Bali menjadi hamparan saujana yang memesona dengan sawah-sawah dan lembahnya yang berundak-undak.

Berdasarkan peruntukannya lahan di Bali terdiri atas lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) seluas 407.534 hektare, lahan bukan pertanian seluas 156.132 hektare, serta kawasan hutan dengan luas 130.686 (23,20%) hektare, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

3. Geologi

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi ini tersebar di Bali bagian barat sampai ke utara, seperti Lokapaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Adapun jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah yang juga tidak peka terhadap erosi lainnya adalah tanah Alluvial, terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu di wilayah Kabupaten Karangasem. Ketiga jenis tanah ini, yakni Andosol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari total luas Pulau Bali.

4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat danau alam, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar dengan luas permukaan 10,22 km².

Danau-danau yang terdapat di Bali merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dengan ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl. Dengan posisinya yang demikian, keempat danau ini merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Total volume air danau seluruhnya sebesar 1.008,10 juta m³, di

mana 80,90% bersumber dari Danau Batur, 11,53% dari Danau Buyan, 4,88% dari Danau Beratan, dan 2,68% dari Danau Tamblingan.

Terdapat pula waduk dan embung yang merupakan danau buatan (*man made lake*) dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan air irigasi, air baku air bersih, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali terdapat lima waduk/embung, yaitu Waduk Palasari, Waduk Gerokgak, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua, dan Embung Seraya dengan total volume air waduk dan embung seluruhnya sebesar 16,08 juta m³. Di samping itu telah selesai pula dibangun Waduk Titab di Kabupaten Buleleng yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku air minum, sarana pariwisata dan perikanan dengan volume tampungan sebesar 10,08 juta m³.

Provinsi Bali merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional, yakni Sungai Bali-Penida terdiri atas 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS). Sistem sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat - timur di tengah-tengah pulau ini. Sungai-sungai yang ada di sebelah selatan pegunungan mengalir ke arah selatan yang umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan sungai yang mengalir ke utara di belahan utara pegunungan.

Menurut Dinas PU Provinsi Bali, terdapat 401 batang sungai dengan panjang 2.776 km, namun yang potensial hanya 66 sungai dengan karakteristik sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Potensi air sungai menurut Sub Satuan Wilayah Sungai di Bali adalah 196,4 m³/detik atau 6.195,3 juta m³/tahun.

Pada tahun 2017, Total Potensi Air sebesar 7,58 milyar m³ atau 239,69 m³/dt yang bersumber dari: Air permukaan/*run off* 6,55 milyar m³/th, mata air 0,73 milyar m³/th dan Air tanah 285,15 juta m³/th. Total ketersediaan air 3,36 milyar m³/th atau 106,64 m³/dt sedangkan total kebutuhan air 3,7 miliar m³/th atau 119,58 m³/dt.

Pada tahun 2018, total potensi air di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 6,84 milyar m³ atau 216,87 m³/dt. Sumber dari potensi air ini terdiri dari air permukaan sebesar 6,55 milyar m³ atau 208,83 m³/dt, dan air tanah sebesar 0,29 milyar m³ atau 9,04 m³/dt. Ketersediaan air bersih sebesar 101,23 m³/dt sedangkan kebutuhan air bersih adalah 119,96 m³/dt.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Sensus 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jembrana	158.730	158.334	317.064
2	Tabanan	231.448	230.182	461.630
3	Badung	274.577	273.614	548.191
4	Gianyar	258.455	256.889	515.344
5	Klungkung	103.657	103.268	206.925
6	Bangli	130.307	128.414	258.721
7	Karangasem	249.495	242.907	492.402
8	Buleleng	398.135	393.678	791.813
9	Denpasar	366.301	359.013	725.314
	Provinsi Bali	2.171.105	2.146.299	4.317.404

Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur, disebutkan bahwa Wilayah:

- 1. Daerah Swapraja Buleleng;
- 2. Daerah Swapraja Jembrana;
- 3. Daerah Swapraja Badung;
- 4. Daerah Swapraja Tabanan;
- 5. Daerah Swapraja Gianyar;
- 6. Daerah Swapraja Klungkung;
- 7. Daerah Swapraja Bangli;
- 8. Daerah Swapraja Karangasem;

1 sampai dengan 8 dimaksud dalam Staatsblad 1946 No. 143, masing-masing dibentuk sebagai daerah-daerah tingkat II, termasuk dalam Daerah tingkat I Bali, dengan diberi nama-nama:

- 1. Daerah tingkat II Buleleng;
- 2. Daerah tingkat II Jembrana;
- 3. Daerah tingkat II Badung;
- 4. Daerah tingkat II Tabanan;
- 5. Daerah tingkat II Gianyar;
- 6. Daerah tingkat II Klungkung;
- 7. Daerah tingkat II Bangli;
- 8. Daerah Tingkat II Karangasem.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur dijelaskan bahwa pada waktu pemerintahan Negara Indonesia Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba serta Timor dan kepulauannya, masing-masing telah merupakan daerah, yaitu: Daerah Bali yang meliputi Swapraja-swapraja Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 59) dibentuklah Propinsi administratif Sunda Kecil yang meliputi daerah-daerah tersebut di atas, Nama Sunda Kecil ini kemudian dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 (telah ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Parlemen pada sidangnya tanggal 6 Pebruari 1958), diubah menjadi "Nusa Tenggara".

Dalam lingkungan Propinsi administratif Nusa Tenggara ini daerah-daerah tersebut tetap berjalan terus sebagai daerah yang berhak mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku baginya yaitu "Daerah-Statuut" yo. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.

Keadaan yang demikian itu akan berubah sama sekali pada saat berlakunya Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Nusa Tenggara ini, di mana keenam daerah tersebut di atas dibubarkan.

Perlu dikemukakan di sini bahwa pada umumnya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1957 Daerah Swapraja menurut pentingnya dan perkembangan masyarakat dewasa ini, dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa atau daerah biasa. Maka di wilayah Nusa Tenggara di mana terdapat Swapraja-swapraja, dengan Undang-undang itu Swapraja-swapraja tersebut yang wilayahnya serta penduduknya cukup besar, dibentuk menjadi daerah tingkat. Swapraja-swapraja yang kecil-kecil dalam Undang-undang ini tidak disinggung-singgung mengenai statusnya, hanya dinyatakan bahwa dibentuk Daerah Swatantra biasa tingkat II yang wilayahnya meliputi beberapa Swapraja yang kecil-kecil itu.

Adapun mengenai Swapraja-swapraja yang masing-masing dibentuk menjadi Daerah Swatantra biasa, hal ini didasarkan atas pernyataan atau kehendak dari Kepala Swapraja itu sendiri atas oleh karena dalam Swapraja itu tidak ada seorang keturunan dan Kepala Swapraja yang bersangkutan, yang dapat menjalankan tugas Kepala Daerah ataupun pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan kepentingan umum.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada umumnya serta Kota Administratif Denpasar pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud di masa mendatang. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Denpasar dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Denpasar menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang. Sehingga pada Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dan menetapkan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 121 sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi Kabupaten, dan Kota. Istilah *Daerah Tingkat I* maupun *Daerah Tingkat II* tidak dipergunakan lagi. Kabupaten Daerah Tingkat II disebut sebagai *Kabupaten* saja, dan Kotamadya Daerah Tingkat II disebut *Kota*. Begitu pula, istilah *Propinsi Daerah Tingkat I* (memakai **p**) diganti dengan istilah *Provinsi* saja (memakai **v**). Penghapusan tingkat berimplikasi pada peningkatan peran mandiri (otonom) dari masing-masing wilayah.

Sehingga sampai dengan saat ini Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten, yaitu : Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- i. Sekretariat Daerah Provinsi;
- ii. Sekretariat DPRD Provinsi;
- iii. Inspektorat Daerah Provinsi;
- iv. Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;

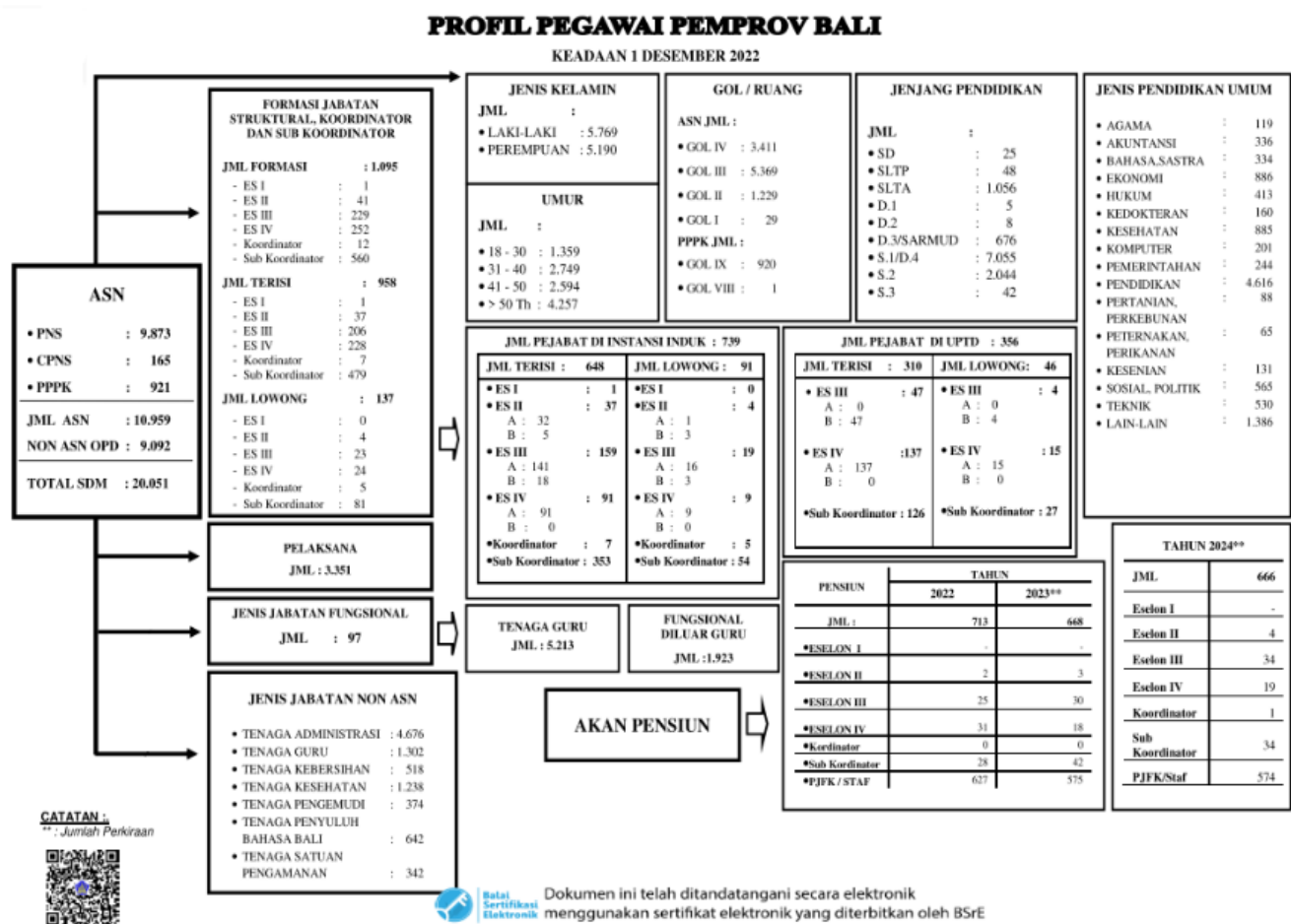
2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Kebudayaan;
 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 12. Dinas Pariwisata;
 13. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat;
 16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 17. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- v. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Badan Penghubung.

Untuk Sekretariat Daerah Provinsi diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari :

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Biro Hukum;
3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
4. Biro Pengadaan Barang/Jasa;

5. Biro Organisasi;
6. Biro Umum dan Protokol.

Adapun jumlah pegawai di Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung semua perangkat daerah dan unit kerja, adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	7.541.821.522.461,00	6.741.065.092.324,98	89,38	0,00
BELANJA OPERASI	4.076.148.648.130,00	3.784.571.890.212,21	92,85	0,00
Belanja Pegawai	1.824.026.422.662,45	1.740.505.196.552,72	95,42	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.838.472.468.547,55	1.684.211.055.814,49	91,61	0,00
Belanja Subsidi	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00
Belanja Hibah	403.159.161.920,00	355.343.676.845,00	88,14	0,00
Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	0,00
BELANJA MODAL	1.800.399.412.612,00	1.450.937.891.715,77	80,59	0,00
Belanja Modal Tanah	770.002.219.242,00	623.659.331.572,00	80,99	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.701.330.422,00	109.109.631.342,47	84,12	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.591.434.404,00	340.652.125.952,30	82,36	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.329.998.625,00	22.635.047.598,00	65,93	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	0,00
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	0,00
BELANJA TRANSFER	1.657.424.586.348,00	1.500.795.531.290,00	90,55	0,00
Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	269.544.177.473,00	88,87	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.945.341.671.769,00)	(871.666.518.111,22)	44,81	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH	1.945.341.671.769,00	1.193.798.304.068,62	61,37	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.050.341.671.769,00	1.293.798.304.068,62	63,10	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	850.341.671.769,00	850.296.343.468,62	99,99	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.945.341.671.769,00	1.193.798.304.068,62	61,37	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	322.131.785.957,40	0,00	0,00

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	2.242.199.410.602,55	1.656.402.521.520,00	0,00	0,00	3.898.601.932.122,55	2.119.157.665.142,83	41.859.566.089,76	0,00	0,00	461.017.231.232,59	(437.584.700.890)	88,78
Pendidikan	1.267.607.559.765,00	184.974.031.681,00	0,00	0,00	1.452.581.591.446,00	1.219.228.611.545,44	28.754.013.569,21	0,00	0,00	1.347.982.625.114,65	(104.598.966.331)	92,80
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.267.607.559.765,00	184.974.031.681,00	0,00	0,00	1.452.581.591.446,00	1.219.228.611.545,44	28.754.013.569,21	0,00	0,00	1.347.982.625.114,65	(104.598.966.331)	92,80
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	419.860.371.697,00	182.421.519.681,00	0,00	0,00	602.281.891.378,00	401.292.832.837,08	26.899.721.540,01	0,00	0,00	528.192.554.377,09	(74.089.337.001)	87,70
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	33.253.350,00	0,00	0,00	0,00	33.253.350,00	31.927.400,00	0,00	0,00	0,00	31.927.400,00	(1.325.950)	96,01
PROGRAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN	29.048.850,00	0,00	0,00	0,00	29.048.850,00	25.094.150,00	0,00	0,00	0,00	25.094.150,00	(3.954.700)	86,39
Kesehatan	549.214.509.573,00	59.275.750.850,00	0,00	0,00	608.490.260.423,00	508.480.209.417,23	57.063.165.786,55	0,00	0,00	565.543.375.203,78	(42.946.885.219)	92,94
Dinas Kesehatan	549.214.509.573,00	59.275.750.850,00	0,00	0,00	608.490.260.423,00	508.480.209.417,23	57.063.165.786,55	0,00	0,00	565.543.375.203,78	(42.946.885.219)	92,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	473.587.634.927,00	55.055.844.450,00	0,00	0,00	528.643.479.377,00	441.494.825.964,33	53.305.608.336,55	0,00	0,00	494.800.434.300,88	(33.843.045.076)	93,60
PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.794.800.854,00	4.219.906.400,00	0,00	0,00	47.014.707.254,00	37.833.809.248,90	3.757.557.450,00	0,00	0,00	41.591.366.698,90	(5.423.340.555)	88,46
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	32.737.513.792,00	0,00	0,00	0,00	32.737.513.792,00	29.061.888.078,00	0,00	0,00	0,00	29.061.888.078,00	(3.675.625.714)	88,77

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	94.560.000,00	0,00	0,00	0,00	94.560.000,00	89.686.126,00	0,00	0,00	0,00	89.686.126,00	(4.873.874)	94,85
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	334.913.303.988,55	1.411.282.600.989,00	0,00	0,00	1.746.195.904.977,55	304.194.838.478,16	55.184.237.120,00	0,00	0,00	459.379.075.598,16	(286.816.829.379)	83,57
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	334.913.303.988,55	1.411.282.600.989,00	0,00	0,00	1.746.195.904.977,55	304.194.838.478,16	55.184.237.120,00	0,00	0,00	459.379.075.598,16	(286.816.829.379)	83,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	31.561.341.305,00	381.572.000,00	0,00	0,00	31.942.913.305,00	30.179.071.143,00	373.065.217,00	0,00	0,00	30.552.136.360,00	(1.390.776.945)	95,65
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYAAIR (SDA)	4.326.503.700,00	36.065.097.200,00	0,00	0,00	40.391.600.900,00	4.108.774.861,00	33.387.118.450,00	0,00	0,00	37.495.893.311,00	(2.895.707.589)	92,83
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	31.150.974.381,55	5.858.731.550,00	0,00	0,00	37.009.705.931,55	29.792.851.575,66	5.384.418.779,00	0,00	0,00	35.177.270.354,66	(1.832.435.577)	95,05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMAIR LIMBAH	11.148.098.400,00	1.834.785.150,00	0,00	0,00	12.982.883.550,00	10.587.770.324,00	1.834.785.150,00	0,00	0,00	12.422.555.474,00	(560.328.076)	95,68
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	223.213.298.124,00	796.078.998.578,00	0,00	0,00	1.019.292.296.702,00	199.204.305.199,00	38.720.516.951,00	0,00	0,00	837.924.822.150,00	(181.367.474.552)	82,21
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	30.107.265.692,00	569.752.393.511,00	0,00	0,00	599.859.659.203,00	27.102.612.520,00	74.451.271.823,00	0,00	0,00	501.553.884.343,00	(98.305.774.860)	83,61
PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	1.932.264.698,00	1.311.023.000,00	0,00	0,00	3.243.287.698,00	1.831.687.127,50	1.033.060.750,00	0,00	0,00	2.864.747.877,50	(378.539.821)	88,33

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.473.557.688,00	0,00	0,00	0,00	1.473.557.688,00	1.387.765.728,00	0,00	0,00	0,00	1.387.765.728,00	(85.791.960)	94,18
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	998.770.806,00	0,00	0,00	0,00	998.770.806,00	970.102.905,00	0,00	0,00	0,00	970.102.905,00	(28.667.901)	97,13
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	368.198.838,00	0,00	0,00	0,00	368.198.838,00	350.338.626,00	0,00	0,00	0,00	350.338.626,00	(17.860.212)	95,15
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	60.779.326.022,00	0,00	0,00	0,00	60.779.326.022,00	59.763.596.642,00	0,00	0,00	0,00	59.763.596.642,00	(1.015.729.380)	98,33
Satuan Polisi Pamong Praja	40.535.014.866,00	0,00	0,00	0,00	40.535.014.866,00	40.095.951.121,00	0,00	0,00	0,00	40.095.951.121,00	(439.063.745)	98,92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	22.336.389.692,00	0,00	0,00	0,00	22.336.389.692,00	21.927.948.139,00	0,00	0,00	0,00	21.927.948.139,00	(408.441.553)	98,17
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.198.625.174,00	0,00	0,00	0,00	18.198.625.174,00	18.168.002.982,00	0,00	0,00	0,00	18.168.002.982,00	(30.622.192)	99,83
Badan PenanggulanganBencana Daerah	20.244.311.156,00	0,00	0,00	0,00	20.244.311.156,00	19.667.645.521,00	0,00	0,00	0,00	19.667.645.521,00	(576.665.635)	97,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	18.266.709.256,00	0,00	0,00	0,00	18.266.709.256,00	17.758.293.673,00	0,00	0,00	0,00	17.758.293.673,00	(508.415.583)	97,22
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.977.601.900,00	0,00	0,00	0,00	1.977.601.900,00	1.909.351.848,00	0,00	0,00	0,00	1.909.351.848,00	(68.250.052)	96,55
Sosial	28.317.741.610,00	870.138.000,00	0,00	0,00	29.187.879.610,00	26.169.967.529,00	858.149.614,00	0,00	0,00	27.028.117.143,00	(2.159.762.467)	92,60

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	28.317.741.610,00	870.138.000,00	0,00	0,00	29.187.879.610,00	26.169.967.529,00	858.149.614,00	0,00	0,00	27.028.117.143,00	(2.159.762.467)	92,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	22.621.497.040,00	870.138.000,00	0,00	0,00	23.491.635.040,00	21.725.990.230,00	858.149.614,00	0,00	0,00	22.584.139.844,00	(907.495.196)	96,14
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.150.165,00	0,00	0,00	0,00	42.150.165,00	41.022.200,00	0,00	0,00	0,00	41.022.200,00	(1.127.965)	97,32
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.251.085.435,00	0,00	0,00	0,00	5.251.085.435,00	4.001.854.747,00	0,00	0,00	0,00	4.001.854.747,00	(1.249.230.688)	76,21
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	19.905.370,00	0,00	0,00	0,00	19.905.370,00	19.829.400,00	0,00	0,00	0,00	19.829.400,00	(75.970)	99,62
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.939.600,00	0,00	0,00	0,00	255.939.600,00	255.768.500,00	0,00	0,00	0,00	255.768.500,00	(171.100)	99,93
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.164.000,00	0,00	0,00	0,00	127.164.000,00	125.502.452,00	0,00	0,00	0,00	125.502.452,00	(1.661.548)	98,69
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	875.160.539.834,00	124.466.833.508,00	0,00	0,00	999.627.373.342,00	851.610.517.371,00	93.714.412.564,85	0,00	0,00	945.324.929.935,85	(54.302.443.406)	94,57
Tenaga Kerja	31.367.534.614,00	110.000.000,00	0,00	0,00	31.477.534.614,00	29.651.210.586,00	109.791.000,00	0,00	0,00	29.761.001.586,00	(1.716.533.028)	94,55
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.367.534.614,00	110.000.000,00	0,00	0,00	31.477.534.614,00	29.651.210.586,00	109.791.000,00	0,00	0,00	29.761.001.586,00	(1.716.533.028)	94,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	30.305.105.414,00	110.000.000,00	0,00	0,00	30.415.105.414,00	28.645.587.568,00	109.791.000,00	0,00	0,00	28.755.378.568,00	(1.659.726.846)	94,54
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	704.919.100,00	0,00	0,00	0,00	704.919.100,00	677.812.894,00	0,00	0,00	0,00	677.812.894,00	(27.106.206)	96,15
PROGRAM PENEMPATAN	179.010.100,00	0,00	0,00	0,00	179.010.100,00	153.707.124,00	0,00	0,00	0,00	153.707.124,00	(25.302.976)	85,87

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
TENAGA KERJA												
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	178.500.000,00	0,00	0,00	0,00	178.500.000,00	174.103.000,00	0,00	0,00	0,00	174.103.000,00	(4.397.000)	97,54
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.859.391.875,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.866.391.875,00	1.620.150.664,00	6.904.200,00	0,00	0,00	1.627.054.864,00	(239.337.011)	87,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	736.550.775,00	7.000.000,00	0,00	0,00	743.550.775,00	722.180.328,00	6.904.200,00	0,00	0,00	729.084.528,00	(14.466.247)	98,05
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11.100.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100.100,00	10.120.350,00	0,00	0,00	0,00	10.120.350,00	(979.750)	91,17
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	381.834.000,00	0,00	0,00	0,00	381.834.000,00	167.426.986,00	0,00	0,00	0,00	167.426.986,00	(214.407.014)	43,85
PROGRAM PEMENUHANHAK ANAK (PHA)	653.101.000,00	0,00	0,00	0,00	653.101.000,00	648.562.900,00	0,00	0,00	0,00	648.562.900,00	(4.538.100)	99,31
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUSANAK	76.806.000,00	0,00	0,00	0,00	76.806.000,00	71.860.100,00	0,00	0,00	0,00	71.860.100,00	(4.945.900)	93,56
Pangan	3.540.010.042,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3.640.010.042,00	3.340.064.965,00	99.011.800,00	0,00	0,00	3.439.076.765,00	(200.933.277)	94,48
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.540.010.042,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3.640.010.042,00	3.340.064.965,00	99.011.800,00	0,00	0,00	3.439.076.765,00	(200.933.277)	94,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	625.784.974,00	100.000.000,00	0,00	0,00	725.784.974,00	596.549.189,00	99.011.800,00	0,00	0,00	695.560.989,00	(30.223.985)	95,84
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	1.271.465.438,00	0,00	0,00	0,00	1.271.465.438,00	1.146.559.288,00	0,00	0,00	0,00	1.146.559.288,00	(124.906.150)	90,18

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PANGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	523.099.224,00	0,00	0,00	0,00	523.099.224,00	522.114.854,00	0,00	0,00	0,00	522.114.854,00	(984.370)	99,81
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.119.660.406,00	0,00	0,00	0,00	1.119.660.406,00	1.074.841.634,00	0,00	0,00	0,00	1.074.841.634,00	(44.818.772)	96,00
Pertanahan	162.888.950,00	0,00	0,00	0,00	162.888.950,00	117.907.760,00	0,00	0,00	0,00	117.907.760,00	(44.981.190)	72,39
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	162.888.950,00	0,00	0,00	0,00	162.888.950,00	117.907.760,00	0,00	0,00	0,00	117.907.760,00	(44.981.190)	72,39
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	162.888.950,00	0,00	0,00	0,00	162.888.950,00	117.907.760,00	0,00	0,00	0,00	117.907.760,00	(44.981.190)	72,39
Lingkungan Hidup	11.078.443.553,00	16.416.000,00	0,00	0,00	11.094.859.553,00	9.539.720.949,00	15.373.500,00	0,00	0,00	9.555.094.449,00	(1.539.765.104)	86,12
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.078.443.553,00	16.416.000,00	0,00	0,00	11.094.859.553,00	9.539.720.949,00	15.373.500,00	0,00	0,00	9.555.094.449,00	(1.539.765.104)	86,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	1.263.932.086,00	16.416.000,00	0,00	0,00	1.280.348.086,00	2.185.239.667,00	15.373.500,00	0,00	0,00	2.200.613.167,00	920.265.081	171,88
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	209.579.144,00	0,00	0,00	0,00	209.579.144,00	177.878.004,00	0,00	0,00	0,00	177.878.004,00	(31.701.140)	84,87
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	28.292.800,00	0,00	0,00	0,00	28.292.800,00	26.366.500,00	0,00	0,00	0,00	26.366.500,00	(1.926.300)	93,19

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	209.890.467,00	0,00	0,00	0,00	209.890.467,00	208.227.957,00	0,00	0,00	0,00	208.227.957,00	(1.662.510)	99,21
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.366.749.056,00	0,00	0,00	0,00	9.366.749.056,00	6.942.008.821,00	0,00	0,00	0,00	6.942.008.821,00	(2.424.740.235)	74,11
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	696.702.121,00	0,00	0,00	0,00	696.702.121,00	634.318.126,00	0,00	0,00	0,00	634.318.126,00	(62.383.995)	91,05
Dinas PemberdayaanMasyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	696.702.121,00	0,00	0,00	0,00	696.702.121,00	634.318.126,00	0,00	0,00	0,00	634.318.126,00	(62.383.995)	91,05
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	563.506.377,00	0,00	0,00	0,00	563.506.377,00	501.631.132,00	0,00	0,00	0,00	501.631.132,00	(61.875.245)	89,02
PROGRAM PENCATATANSIPIL	133.195.744,00	0,00	0,00	0,00	133.195.744,00	132.686.994,00	0,00	0,00	0,00	132.686.994,00	(508.750)	99,62
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.063.632.129,00	0,00	0,00	0,00	26.063.632.129,00	24.531.440.054,00	0,00	0,00	0,00	24.531.440.054,00	(1.532.192.075)	94,12
Dinas PemberdayaanMasyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.063.632.129,00	0,00	0,00	0,00	26.063.632.129,00	24.531.440.054,00	0,00	0,00	0,00	24.531.440.054,00	(1.532.192.075)	94,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	14.051.861.577,00	0,00	0,00	0,00	14.051.861.577,00	13.101.340.555,00	0,00	0,00	0,00	13.101.340.555,00	(950.521.022)	93,24
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	114.915.006,00	0,00	0,00	0,00	114.915.006,00	111.541.297,00	0,00	0,00	0,00	111.541.297,00	(3.373.709)	97,06

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	727.309.784,00	0,00	0,00	0,00	727.309.784,00	715.064.910,00	0,00	0,00	0,00	715.064.910,00	(12.244.874)	98,32
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.169.545.762,00	0,00	0,00	0,00	11.169.545.762,00	10.603.493.292,00	0,00	0,00	0,00	10.603.493.292,00	(566.052.470)	94,93
Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana	349.495.851,00	0,00	0,00	0,00	349.495.851,00	327.982.808,00	0,00	0,00	0,00	327.982.808,00	(21.513.043)	93,84
Dinas PemberdayaanMasyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	349.495.851,00	0,00	0,00	0,00	349.495.851,00	327.982.808,00	0,00	0,00	0,00	327.982.808,00	(21.513.043)	93,84
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	349.495.851,00	0,00	0,00	0,00	349.495.851,00	327.982.808,00	0,00	0,00	0,00	327.982.808,00	(21.513.043)	93,84
Perhubungan	30.198.596.618,00	240.496.000,00	0,00	0,00	30.439.092.618,00	28.905.350.463,00	235.519.000,00	0,00	0,00	29.140.869.463,00	(1.298.223.155)	95,74
Dinas Perhubungan	30.198.596.618,00	240.496.000,00	0,00	0,00	30.439.092.618,00	28.905.350.463,00	235.519.000,00	0,00	0,00	29.140.869.463,00	(1.298.223.155)	95,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.600.424.644,00	12.996.000,00	0,00	0,00	21.613.420.644,00	20.781.649.172,00	12.996.000,00	0,00	0,00	20.794.645.172,00	(818.775.472)	96,21
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.764.404.124,00	227.500.000,00	0,00	0,00	6.991.904.124,00	6.339.633.911,00	222.523.000,00	0,00	0,00	6.562.156.911,00	(429.747.213)	93,85
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.616.617.510,00	0,00	0,00	0,00	1.616.617.510,00	1.576.667.540,00	0,00	0,00	0,00	1.576.667.540,00	(39.949.970)	97,53
PROGRAM PENGELOLAAN	217.150.340,00	0,00	0,00	0,00	217.150.340,00	207.399.840,00	0,00	0,00	0,00	207.399.840,00	(9.750.500)	95,51

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PERKERETAAPIAN												
Komunikasi dan Informatika	66.647.281.957,00	118.438.028.600,00	0,00	0,00	185.085.310.557,00	65.391.916.265,00	89.236.597.427,85	0,00	0,00	154.628.513.692,85	(30.456.796.864)	83,54
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	66.647.281.957,00	118.438.028.600,00	0,00	0,00	185.085.310.557,00	65.391.916.265,00	89.236.597.427,85	0,00	0,00	154.628.513.692,85	(30.456.796.864)	83,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	19.384.630.026,00	345.509.000,00	0,00	0,00	19.730.139.026,00	18.796.063.577,00	328.490.000,00	0,00	0,00	19.124.553.577,00	(605.585.449)	96,93
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	31.593.389.965,00	1.377.650.000,00	0,00	0,00	32.971.039.965,00	31.297.202.195,00	1.260.513.610,00	0,00	0,00	32.557.715.805,00	(413.324.160)	98,75
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIINFORMATIKA	15.669.261.966,00	116.714.869.600,00	0,00	0,00	132.384.131.566,00	15.298.650.493,00	87.647.593.817,85	0,00	0,00	102.946.244.310,85	(29.437.887.255)	77,76
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.344.418.533,00	0,00	0,00	0,00	23.344.418.533,00	22.321.546.376,00	0,00	0,00	0,00	22.321.546.376,00	(1.022.872.157)	95,62
Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah	23.344.418.533,00	0,00	0,00	0,00	23.344.418.533,00	22.321.546.376,00	0,00	0,00	0,00	22.321.546.376,00	(1.022.872.157)	95,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	15.541.140.511,00	0,00	0,00	0,00	15.541.140.511,00	14.907.395.284,00	0,00	0,00	0,00	14.907.395.284,00	(633.745.227)	95,92
PROGRAM PELAYANANIZIN USAHA SIMPAN PINJAM	255.064.240,00	0,00	0,00	0,00	255.064.240,00	239.330.844,00	0,00	0,00	0,00	239.330.844,00	(15.733.396)	93,83
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.896,00	0,00	0,00	0,00	118.552.896,00	118.314.446,00	0,00	0,00	0,00	118.314.446,00	(238.450)	99,80
PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.823.253.216,00	0,00	0,00	0,00	5.823.253.216,00	5.500.456.370,00	0,00	0,00	0,00	5.500.456.370,00	(322.796.846)	94,46

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPERLINDUNGAN KOPERASI	468.864.290,00	0,00	0,00	0,00	468.864.290,00	442.710.474,00	0,00	0,00	0,00	442.710.474,00	(26.153.816)	94,42
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)	1.137.543.380,00	0,00	0,00	0,00	1.137.543.380,00	1.113.338.958,00	0,00	0,00	0,00	1.113.338.958,00	(24.204.422)	97,87
Penanaman Modal	18.808.494.422,00	599.187.500,00	0,00	0,00	19.407.681.922,00	17.454.823.084,00	581.755.990,00	0,00	0,00	18.036.579.074,00	(1.371.102.848)	92,94
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.808.494.422,00	599.187.500,00	0,00	0,00	19.407.681.922,00	17.454.823.084,00	581.755.990,00	0,00	0,00	18.036.579.074,00	(1.371.102.848)	92,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	16.001.893.094,00	599.187.500,00	0,00	0,00	16.601.080.594,00	14.795.790.550,00	581.755.990,00	0,00	0,00	15.377.546.540,00	(1.223.534.054)	92,63
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.080.316,00	0,00	0,00	0,00	450.080.316,00	432.125.663,00	0,00	0,00	0,00	432.125.663,00	(17.954.653)	96,01
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	458.026.986,00	0,00	0,00	0,00	458.026.986,00	427.125.693,00	0,00	0,00	0,00	427.125.693,00	(30.901.293)	93,25
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	927.272.138,00	0,00	0,00	0,00	927.272.138,00	909.352.765,00	0,00	0,00	0,00	909.352.765,00	(17.919.373)	98,07
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	792.840.792,00	0,00	0,00	0,00	792.840.792,00	740.262.792,00	0,00	0,00	0,00	740.262.792,00	(52.578.000)	93,37
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	178.381.096,00	0,00	0,00	0,00	178.381.096,00	150.165.621,00	0,00	0,00	0,00	150.165.621,00	(28.215.475)	84,18
Kepemudaan dan Olahraga	58.699.198.455,00	0,00	0,00	0,00	58.699.198.455,00	56.176.363.491,00	0,00	0,00	0,00	56.176.363.491,00	(2.522.834.964)	95,70

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	58.699.198.455,00	0,00	0,00	0,00	58.699.198.455,00	56.176.363.491,00	0,00	0,00	0,00	56.176.363.491,00	(2.522.834.964)	95,70
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.139.905.585,00	0,00	0,00	0,00	1.139.905.585,00	944.315.240,00	0,00	0,00	0,00	944.315.240,00	(195.590.345)	82,84
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0	100,00
Statistik	486.822.218,00	0,00	0,00	0,00	486.822.218,00	458.815.228,00	0,00	0,00	0,00	458.815.228,00	(28.006.990)	94,25
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	486.822.218,00	0,00	0,00	0,00	486.822.218,00	458.815.228,00	0,00	0,00	0,00	458.815.228,00	(28.006.990)	94,25
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	486.822.218,00	0,00	0,00	0,00	486.822.218,00	458.815.228,00	0,00	0,00	0,00	458.815.228,00	(28.006.990)	94,25
Persandian	386.023.636,00	0,00	0,00	0,00	386.023.636,00	380.969.216,00	0,00	0,00	0,00	380.969.216,00	(5.054.420)	98,69
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	386.023.636,00	0,00	0,00	0,00	386.023.636,00	380.969.216,00	0,00	0,00	0,00	380.969.216,00	(5.054.420)	98,69
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	386.023.636,00	0,00	0,00	0,00	386.023.636,00	380.969.216,00	0,00	0,00	0,00	380.969.216,00	(5.054.420)	98,69
Kebudayaan	600.862.293.576,00	4.955.705.408,00	0,00	0,00	605.817.998.984,00	590.203.371.230,00	3.429.459.647,00	0,00	0,00	593.632.830.877,00	(12.185.168.107)	97,99
Dinas Kebudayaan	112.158.261.545,00	3.460.279.408,00	0,00	0,00	115.618.540.953,00	106.164.272.430,00	2.150.685.200,00	0,00	0,00	108.314.957.630,00	(7.303.583.323)	93,68

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	37.674.981.921,00	3.460.279.408,00	0,00	0,00	41.135.261.329,00	35.133.459.681,00	2.150.685.200,00	0,00	0,00	37.284.144.881,00	(3.851.116.448)	90,64
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	68.504.787.802,00	0,00	0,00	0,00	68.504.787.802,00	65.605.721.522,00	0,00	0,00	0,00	65.605.721.522,00	(2.899.066.280)	95,77
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.380.477.902,00	0,00	0,00	0,00	1.380.477.902,00	1.267.722.132,00	0,00	0,00	0,00	1.267.722.132,00	(112.755.770)	91,83
PROGRAM PEMBINAANSEJARAH	336.500.000,00	0,00	0,00	0,00	336.500.000,00	320.656.400,00	0,00	0,00	0,00	320.656.400,00	(15.843.600)	95,29
PROGRAM PELESTARIANDAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	661.513.920,00	0,00	0,00	0,00	661.513.920,00	531.404.996,00	0,00	0,00	0,00	531.404.996,00	(130.108.924)	80,33
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	3.305.307.699,00	0,00	0,00	0,00	3.305.307.699,00	(294.692.301)	91,81
Dinas PemajuanMasyarakat Adat	488.704.032.031,00	1.495.426.000,00	0,00	0,00	490.199.458.031,00	484.039.098.800,00	1.278.774.447,00	0,00	0,00	485.317.873.247,00	(4.881.584.784)	99,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	14.460.785.537,00	1.495.426.000,00	0,00	0,00	15.956.211.537,00	12.983.286.368,00	1.278.774.447,00	0,00	0,00	14.262.060.815,00	(1.694.150.722)	89,38
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	474.243.246.494,00	0,00	0,00	0,00	474.243.246.494,00	471.055.812.432,00	0,00	0,00	0,00	471.055.812.432,00	(3.187.434.062)	99,33
Perpustakaan	444.857.938,00	0,00	0,00	0,00	444.857.938,00	419.865.580,00	0,00	0,00	0,00	419.865.580,00	(24.992.358)	94,38
Sekretariat Daerah	444.857.938,00	0,00	0,00	0,00	444.857.938,00	419.865.580,00	0,00	0,00	0,00	419.865.580,00	(24.992.358)	94,38
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	444.857.938,00	0,00	0,00	0,00	444.857.938,00	419.865.580,00	0,00	0,00	0,00	419.865.580,00	(24.992.358)	94,38
Kearsipan	164.453.346,00	0,00	0,00	0,00	164.453.346,00	134.700.526,00	0,00	0,00	0,00	134.700.526,00	(29.752.820)	81,91

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Sekretariat Daerah	164.453.346,00	0,00	0,00	0,00	164.453.346,00	134.700.526,00	0,00	0,00	0,00	134.700.526,00	(29.752.820)	81,91
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	164.453.346,00	0,00	0,00	0,00	164.453.346,00	134.700.526,00	0,00	0,00	0,00	134.700.526,00	(29.752.820)	81,91
URUSAN PILIHAN	191.607.393.968,00	2.732.888.680,00	0,00	0,00	194.340.282.648,00	179.087.742.776,64	1.470.094.403,00	0,00	0,00	180.557.837.179,64	(13.782.445.468)	92,91
Kelautan dan Perikanan	27.054.693.819,00	1.113.620.000,00	0,00	0,00	28.168.313.819,00	25.923.882.061,64	54.340.499,00	0,00	0,00	25.978.222.560,64	(2.190.091.258)	92,22
Dinas Kelautan dan Perikanan	27.054.693.819,00	1.113.620.000,00	0,00	0,00	28.168.313.819,00	25.923.882.061,64	54.340.499,00	0,00	0,00	25.978.222.560,64	(2.190.091.258)	92,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	22.583.599.791,00	2.000.000,00	0,00	0,00	22.585.599.791,00	22.073.797.301,64	0,00	0,00	0,00	22.073.797.301,64	(511.802.489)	97,73
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DANPULAU- PULAU KECIL	187.815.696,00	1.105.620.000,00	0,00	0,00	1.293.435.696,00	150.748.676,00	48.340.500,00	0,00	0,00	199.089.176,00	(1.094.346.520)	15,39
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	569.284.796,00	0,00	0,00	0,00	569.284.796,00	568.703.896,00	0,00	0,00	0,00	568.703.896,00	(580.900)	99,90
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.193.640.020,00	6.000.000,00	0,00	0,00	3.199.640.020,00	2.635.923.892,00	5.999.999,00	0,00	0,00	2.641.923.891,00	(557.716.129)	82,57
PROGRAM PENGOLAHANDAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	520.353.516,00	0,00	0,00	0,00	520.353.516,00	494.708.296,00	0,00	0,00	0,00	494.708.296,00	(25.645.220)	95,07
Pariwisata	14.005.482.814,00	100.000.000,00	0,00	0,00	14.105.482.814,00	13.453.048.731,00	99.444.545,00	0,00	0,00	13.552.493.276,00	(552.989.538)	96,08
Dinas Pariwisata	14.005.482.814,00	100.000.000,00	0,00	0,00	14.105.482.814,00	13.453.048.731,00	99.444.545,00	0,00	0,00	13.552.493.276,00	(552.989.538)	96,08
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	12.317.107.365,00	100.000.000,00	0,00	0,00	12.417.107.365,00	11.800.571.488,00	99.444.545,00	0,00	0,00	11.900.016.033,00	(517.091.332)	95,84
PROGRAM PENINGKATANDAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	358.469.345,00	0,00	0,00	0,00	358.469.345,00	346.842.212,00	0,00	0,00	0,00	346.842.212,00	(11.627.133)	96,76

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	580.213.291,00	0,00	0,00	0,00	580.213.291,00	572.110.553,00	0,00	0,00	0,00	572.110.553,00	(8.102.738)	98,60
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL	235.133.799,00	0,00	0,00	0,00	235.133.799,00	233.657.198,00	0,00	0,00	0,00	233.657.198,00	(1.476.601)	99,37
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	514.559.014,00	0,00	0,00	0,00	514.559.014,00	499.867.280,00	0,00	0,00	0,00	499.867.280,00	(14.691.734)	97,14
Pertanian	77.072.698.985,00	75.798.500,00	0,00	0,00	77.148.497.485,00	72.235.638.802,00	24.816.200,00	0,00	0,00	72.260.455.002,00	(4.888.042.483)	93,66
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	77.072.698.985,00	75.798.500,00	0,00	0,00	77.148.497.485,00	72.235.638.802,00	24.816.200,00	0,00	0,00	72.260.455.002,00	(4.888.042.483)	93,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	49.377.457.653,00	50.000.000,00	0,00	0,00	49.427.457.653,00	47.742.700.765,00	0,00	0,00	0,00	47.742.700.765,00	(1.684.756.888)	96,59
PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.958.790.905,00	25.798.500,00	0,00	0,00	20.984.589.405,00	18.670.303.901,00	24.816.200,00	0,00	0,00	18.695.120.101,00	(2.289.469.304)	89,09
PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	936.817.188,00	0,00	0,00	0,00	936.817.188,00	833.754.802,00	0,00	0,00	0,00	833.754.802,00	(103.062.386)	89,00

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.382.868.026,00	0,00	0,00	0,00	3.382.868.026,00	2.617.214.499,00	0,00	0,00	0,00	2.617.214.499,00	(765.653.527)	77,37
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.295.861.869,00	0,00	0,00	0,00	2.295.861.869,00	2.250.947.991,00	0,00	0,00	0,00	2.250.947.991,00	(44.913.878)	98,04
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	120.903.344,00	0,00	0,00	0,00	120.903.344,00	120.716.844,00	0,00	0,00	0,00	120.716.844,00	(186.500)	99,85
Kehutanan	45.067.884.011,00	354.580.000,00	0,00	0,00	45.422.464.011,00	42.299.777.603,00	279.229.760,00	0,00	0,00	42.579.007.363,00	(2.843.456.648)	93,74
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.067.884.011,00	354.580.000,00	0,00	0,00	45.422.464.011,00	42.299.777.603,00	279.229.760,00	0,00	0,00	42.579.007.363,00	(2.843.456.648)	93,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.634.277.142,00	354.580.000,00	0,00	0,00	39.988.857.142,00	36.938.137.617,00	279.229.760,00	0,00	0,00	37.217.367.377,00	(2.771.489.765)	93,07
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.895.944.786,00	0,00	0,00	0,00	4.895.944.786,00	4.859.442.693,00	0,00	0,00	0,00	4.859.442.693,00	(36.502.093)	99,25
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	399.999.900,00	0,00	0,00	0,00	399.999.900,00	379.846.830,00	0,00	0,00	0,00	379.846.830,00	(20.153.070)	94,96
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	137.662.183,00	0,00	0,00	0,00	137.662.183,00	122.350.463,00	0,00	0,00	0,00	122.350.463,00	(15.311.720)	88,88
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	186.047.592,00	0,00	0,00	0,00	186.047.592,00	185.977.992,00	0,00	0,00	0,00	185.977.992,00	(69.600)	99,96

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Perdagangan	20.450.663.129,00	1.088.890.180,00	0,00	0,00	21.539.553.309,00	18.040.976.712,00	1.012.263.399,00	0,00	0,00	19.053.240.111,00	(2.486.313.198)	88,46
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.450.663.129,00	1.088.890.180,00	0,00	0,00	21.539.553.309,00	18.040.976.712,00	1.012.263.399,00	0,00	0,00	19.053.240.111,00	(2.486.313.198)	88,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	19.131.889.703,00	1.088.890.180,00	0,00	0,00	20.220.779.883,00	16.850.583.083,00	1.012.263.399,00	0,00	0,00	17.862.846.482,00	(2.357.933.401)	88,34
PROGRAM PERIZINANDAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	334.463.198,00	0,00	0,00	0,00	334.463.198,00	252.028.155,00	0,00	0,00	0,00	252.028.155,00	(82.435.043)	75,35
PROGRAM PENINGKATANSARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	95.778.800,00	0,00	0,00	0,00	95.778.800,00	81.663.505,00	0,00	0,00	0,00	81.663.505,00	(14.115.295)	85,26
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	8.483.820,00	0,00	0,00	0,00	8.483.820,00	8.370.700,00	0,00	0,00	0,00	8.370.700,00	(113.120)	98,67
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	673.991.540,00	0,00	0,00	0,00	673.991.540,00	654.868.661,00	0,00	0,00	0,00	654.868.661,00	(19.122.879)	97,16
PROGRAM PENGGUNAANDAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	206.056.068,00	0,00	0,00	0,00	206.056.068,00	193.462.608,00	0,00	0,00	0,00	193.462.608,00	(12.593.460)	93,89
Perindustrian	7.769.923.618,00	0,00	0,00	0,00	7.769.923.618,00	6.948.440.875,00	0,00	0,00	0,00	6.948.440.875,00	(821.482.743)	89,43
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.769.923.618,00	0,00	0,00	0,00	7.769.923.618,00	6.948.440.875,00	0,00	0,00	0,00	6.948.440.875,00	(821.482.743)	89,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	467.532.276,00	0,00	0,00	0,00	467.532.276,00	432.622.653,00	0,00	0,00	0,00	432.622.653,00	(34.909.623)	92,53
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.166.687.254,00	0,00	0,00	0,00	7.166.687.254,00	6.382.660.374,00	0,00	0,00	0,00	6.382.660.374,00	(784.026.880)	89,06

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL	135.704.088,00	0,00	0,00	0,00	135.704.088,00	133.157.848,00	0,00	0,00	0,00	133.157.848,00	(2.546.240)	98,12
URUSAN PENDUKUNG	416.073.842.188,45	7.641.100.104,00	0,00	0,00	423.714.942.292,45	324.332.651.090,00	7.033.789.717,00	0,00	0,00	331.366.440.807,00	(92.348.501.485)	78,21
Sekretariat Daerah	210.137.618.589,45	6.829.683.778,00	0,00	0,00	216.967.302.367,45	179.204.709.587,00	6.446.312.742,00	0,00	0,00	185.651.022.329,00	(31.316.280.038)	85,57
Sekretariat Daerah	210.137.618.589,45	6.829.683.778,00	0,00	0,00	216.967.302.367,45	179.204.709.587,00	6.446.312.742,00	0,00	0,00	185.651.022.329,00	(31.316.280.038)	85,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	162.087.722.482,45	4.942.003.778,00	0,00	0,00	167.029.726.260,45	138.393.339.760,00	4.740.862.742,00	0,00	0,00	143.134.202.502,00	(23.895.523.758)	85,69
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	326.865.406,00	0,00	0,00	0,00	326.865.406,00	303.912.237,00	0,00	0,00	0,00	303.912.237,00	(22.953.169)	92,98
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.184.010.227,00	0,00	0,00	0,00	2.184.010.227,00	1.651.142.870,00	0,00	0,00	0,00	1.651.142.870,00	(532.867.357)	75,60
PROGRAM KESEJAHTERAANRAKYAT	34.066.894.896,00	0,00	0,00	0,00	34.066.894.896,00	33.483.836.757,00	0,00	0,00	0,00	33.483.836.757,00	(583.058.139)	98,29
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.353.769.888,00	0,00	0,00	0,00	4.353.769.888,00	4.255.452.256,00	0,00	0,00	0,00	4.255.452.256,00	(98.317.632)	97,74
PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN	6.232.816.710,00	0,00	0,00	0,00	6.232.816.710,00	485.147.794,00	0,00	0,00	0,00	485.147.794,00	(5.747.668.916)	7,78
PROGRAM KEBIJAKANDAN PELAYANAN PENGADAAN BARANGDAN JASA	827.163.950,00	1.887.680.000,00	0,00	0,00	2.714.843.950,00	586.446.510,00	1.705.450.000,00	0,00	0,00	2.291.896.510,00	(422.947.440)	84,42
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	58.375.030,00	0,00	0,00	0,00	58.375.030,00	45.431.403,00	0,00	0,00	0,00	45.431.403,00	(12.943.627)	77,83

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Sekretariat DPRD	205.936.223.599,00	811.416.326,00	0,00	0,00	206.747.639.925,00	145.127.941.503,00	587.476.975,00	0,00	0,00	145.715.418.478,00	(61.032.221.447)	70,48
Sekretariat DPRD	205.936.223.599,00	811.416.326,00	0,00	0,00	206.747.639.925,00	145.127.941.503,00	587.476.975,00	0,00	0,00	145.715.418.478,00	(61.032.221.447)	70,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	87.891.030.562,00	721.416.326,00	0,00	0,00	88.612.446.888,00	82.278.891.653,00	587.476.975,00	0,00	0,00	82.866.368.628,00	(5.746.078.260)	93,52
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	118.045.193.037,00	90.000.000,00	0,00	0,00	118.135.193.037,00	62.849.049.850,00	0,00	0,00	0,00	62.849.049.850,00	(55.286.143.187)	53,20
Pembentukan Perda danPeraturan DPRD	11.623.628.318,00	0,00	0,00	0,00	11.623.628.318,00	5.349.580.246,00	0,00	0,00	0,00	5.349.580.246,00	(6.274.048.072)	46,02
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.553.992.906,00	0,00	0,00	0,00	1.553.992.906,00	770.367.414,00	0,00	0,00	0,00	770.367.414,00	(783.625.492)	49,57
URUSAN PENUNJANG	293.957.127.510,00	8.486.265.800,00	7.848.875.371,00	424.586.348,00	1.967.716.855.029,00	273.705.320.266,86	7.460.927.087,69	4.759.779.107,00	500.795.531.290,00	786.721.557.751,55	(180.995.297.277)	90,80
Perencanaan	21.346.007.206,00	795.600.000,00	0,00	0,00	22.141.607.206,00	19.918.388.100,54	643.465.798,58	0,00	0,00	20.561.853.899,12	(1.579.753.307)	92,87
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.346.007.206,00	795.600.000,00	0,00	0,00	22.141.607.206,00	19.918.388.100,54	643.465.798,58	0,00	0,00	20.561.853.899,12	(1.579.753.307)	92,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	16.457.064.247,00	695.600.000,00	0,00	0,00	17.152.664.247,00	15.549.774.052,54	547.801.558,58	0,00	0,00	16.097.575.611,12	(1.055.088.636)	93,85
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.878.680.162,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.978.680.162,00	2.600.553.524,00	95.664.240,00	0,00	0,00	2.696.217.764,00	(282.462.398)	90,52
PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.010.262.797,00	0,00	0,00	0,00	2.010.262.797,00	1.768.060.524,00	0,00	0,00	0,00	1.768.060.524,00	(242.202.273)	87,95

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Keuangan	189.780.569.594,00	5.406.072.600,00	7.848.875.371,00	424.586.348,00	1.860.460.103.913,00	177.297.216.359,32	4.781.780.553,11	4.759.779.107,00	500.795.531.290,00	687.634.307.309,43	(172.825.796.604)	90,71
Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah	49.627.507.129,00	614.339.000,00	7.848.875.371,00	424.586.348,00	1.715.515.307.848,00	44.195.141.039,32	556.168.315,11	4.759.779.107,00	500.795.531.290,00	550.306.619.751,43	(165.208.688.097)	90,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	24.147.427.271,00	614.339.000,00	0,00	0,00	24.761.766.271,00	21.495.714.502,00	556.168.315,11	0,00	0,00	22.051.882.817,11	(2.709.883.454)	89,06
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	21.301.053.256,00	0,00	7.848.875.371,00	424.586.348,00	1.686.574.514.975,00	19.907.035.000,00	0,00	4.759.779.107,00	500.795.531.290,00	525.462.345.397,00	(161.112.169.578)	90,45
PROGRAM PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH	4.179.026.602,00	0,00	0,00	0,00	4.179.026.602,00	2.792.391.537,32	0,00	0,00	0,00	2.792.391.537,32	(1.386.635.065)	66,82
Badan Pendapatan Daerah	140.153.062.465,00	4.791.733.600,00	0,00	0,00	144.944.796.065,00	133.102.075.320,00	4.225.612.238,00	0,00	0,00	137.327.687.558,00	(7.617.108.507)	94,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	123.550.241.243,00	4.791.733.600,00	0,00	0,00	128.341.974.843,00	117.000.180.774,00	4.225.612.238,00	0,00	0,00	121.225.793.012,00	(7.116.181.831)	94,46
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	41.142.340,00	0,00	0,00	0,00	41.142.340,00	34.133.300,00	0,00	0,00	0,00	34.133.300,00	(7.009.040)	82,96
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.561.678.882,00	0,00	0,00	0,00	16.561.678.882,00	16.067.761.246,00	0,00	0,00	0,00	16.067.761.246,00	(493.917.636)	97,02
Kepegawaian	34.254.496.143,00	325.215.000,00	0,00	0,00	34.579.711.143,00	32.804.436.955,00	296.684.994,00	0,00	0,00	33.101.121.949,00	(1.478.589.194)	95,72
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.254.496.143,00	325.215.000,00	0,00	0,00	34.579.711.143,00	32.804.436.955,00	296.684.994,00	0,00	0,00	33.101.121.949,00	(1.478.589.194)	95,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	26.838.364.829,00	325.215.000,00	0,00	0,00	27.163.579.829,00	26.056.705.819,00	296.684.994,00	0,00	0,00	26.353.390.813,00	(810.189.016)	97,02
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.416.131.314,00	0,00	0,00	0,00	7.416.131.314,00	6.747.731.136,00	0,00	0,00	0,00	6.747.731.136,00	(668.400.178)	90,99

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Pendidikan dan Pelatihan	19.204.593.792,00	1.130.000.000,00	0,00	0,00	20.334.593.792,00	15.795.751.487,00	932.695.242,00	0,00	0,00	16.728.446.729,00	(3.606.147.063)	82,27
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.204.593.792,00	1.130.000.000,00	0,00	0,00	20.334.593.792,00	15.795.751.487,00	932.695.242,00	0,00	0,00	16.728.446.729,00	(3.606.147.063)	82,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	13.943.946.018,00	1.130.000.000,00	0,00	0,00	15.073.946.018,00	11.628.567.961,00	932.695.242,00	0,00	0,00	12.561.263.203,00	(2.512.682.815)	83,33
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.260.647.774,00	0,00	0,00	0,00	5.260.647.774,00	4.167.183.526,00	0,00	0,00	0,00	4.167.183.526,00	(1.093.464.248)	79,21
Penelitian dan Pengembangan	21.524.528.949,00	421.379.200,00	0,00	0,00	21.945.908.149,00	20.444.315.137,00	409.497.900,00	0,00	0,00	20.853.813.037,00	(1.092.095.112)	95,02
Badan Riset dan InovasiDaerah	21.524.528.949,00	421.379.200,00	0,00	0,00	21.945.908.149,00	20.444.315.137,00	409.497.900,00	0,00	0,00	20.853.813.037,00	(1.092.095.112)	95,02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	12.749.654.549,00	70.400.000,00	0,00	0,00	12.820.054.549,00	11.993.774.473,00	58.520.700,00	0,00	0,00	12.052.295.173,00	(767.759.376)	94,01
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.774.874.400,00	350.979.200,00	0,00	0,00	9.125.853.600,00	8.450.540.664,00	350.977.200,00	0,00	0,00	8.801.517.864,00	(324.335.736)	96,45
Penghubung	7.846.931.826,00	407.999.000,00	0,00	0,00	8.254.930.826,00	7.445.212.228,00	396.802.600,00	0,00	0,00	7.842.014.828,00	(412.915.998)	95,00
Badan Penghubung	7.846.931.826,00	407.999.000,00	0,00	0,00	8.254.930.826,00	7.445.212.228,00	396.802.600,00	0,00	0,00	7.842.014.828,00	(412.915.998)	95,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	6.599.326.966,00	350.999.000,00	0,00	0,00	6.950.325.966,00	6.229.046.235,00	339.802.600,00	0,00	0,00	6.568.848.835,00	(381.477.131)	94,51
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.247.604.860,00	57.000.000,00	0,00	0,00	1.304.604.860,00	1.216.165.993,00	57.000.000,00	0,00	0,00	1.273.165.993,00	(31.438.867)	97,59
URUSAN PENGAWASAN	26.646.583.592,00	629.921.000,00	0,00	0,00	27.276.504.592,00	26.084.648.022,00	553.094.243,00	0,00	0,00	26.637.742.265,00	(638.762.327)	97,66
Inspektorat	26.646.583.592,00	629.921.000,00	0,00	0,00	27.276.504.592,00	26.084.648.022,00	553.094.243,00	0,00	0,00	26.637.742.265,00	(638.762.327)	97,66

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
Inspektorat	26.646.583.592,00	629.921.000,00	0,00	0,00	27.276.504.592,00	26.084.648.022,00	553.094.243,00	0,00	0,00	26.637.742.265,00	(638.762.327)	97,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	23.821.317.281,00	629.921.000,00	0,00	0,00	24.451.238.281,00	23.405.279.769,00	553.094.243,00	0,00	0,00	23.958.374.012,00	(492.864.269)	97,98
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.773.999.846,00	0,00	0,00	0,00	1.773.999.846,00	1.717.088.288,00	0,00	0,00	0,00	1.717.088.288,00	(56.911.558)	96,79
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.051.266.465,00	0,00	0,00	0,00	1.051.266.465,00	962.279.965,00	0,00	0,00	0,00	962.279.965,00	(88.986.500)	91,54
UNSUR PEMERINTAHANUMUM	30.503.750.435,00	39.882.000,00	0,00	0,00	30.543.632.435,00	27.565.010.867,00	6.600.000,00	0,00	0,00	27.571.610.867,00	(2.972.021.568)	90,27
Kesatuan Bangsa danPolitik	30.503.750.435,00	39.882.000,00	0,00	0,00	30.543.632.435,00	27.565.010.867,00	6.600.000,00	0,00	0,00	27.571.610.867,00	(2.972.021.568)	90,27
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.503.750.435,00	39.882.000,00	0,00	0,00	30.543.632.435,00	27.565.010.867,00	6.600.000,00	0,00	0,00	27.571.610.867,00	(2.972.021.568)	90,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROVINSI	10.935.878.267,00	19.882.000,00	0,00	0,00	10.955.760.267,00	10.015.573.792,00	6.600.000,00	0,00	0,00	10.022.173.792,00	(933.586.475)	91,48
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	612.919.596,00	0,00	0,00	0,00	612.919.596,00	399.968.746,00	0,00	0,00	0,00	399.968.746,00	(212.950.850)	65,26
PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.932.878.744,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.942.878.744,00	149.290.712,00	0,00	0,00	0,00	149.290.712,00	(1.793.588.032)	7,68
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	274.653.544,00	10.000.000,00	0,00	0,00	284.653.544,00	267.016.067,00	0,00	0,00	0,00	267.016.067,00	(17.637.477)	93,80

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022												
Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realis asi					Bertambah/ (Berkurang)	
	Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER			
2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
JUMLAH	4.076.148.648.130,00	1.800.399.412.612,00	7.848.875.371,00	1.657.424.586.348,00	7.541.821.522.461,00	3.801.543.555.536,33	1.452.098.484.105,30	4.759.779.107,00	1.500.795.531.290,00	6.759.197.350.038,63	(782.624.172.422,37)	89,62

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis pemerintah Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

- (1) Alam Bali;
- (2) *Krama* (manusia) Bali; dan
- (3) Kebudayaan Bali.

a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan*, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad*, *telabah*,

jelinjingan) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

- b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan

premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.

- c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas, baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola.

Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
- b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian

tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.

- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi

Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

- b. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.

3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan.
5. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali.

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

Adapun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan urusan, antara lain :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK.
- b) Kompetensi manajerial dan supervise Kepala Sekolah masih kurang.
- c) Belum optimalnya pemahaman peserta didik terhadap nilai nilai kearifan lokal.
- d) Belum optimalnya prestasi, kompetensi, dan profesionalitas peserta didik di tingkat Nasional dan Internasional.
- e) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga Provinsi Bali.
- f) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda.
- g) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
- h) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

2. Kesehatan

- a) Digitalisasi pelayanan kesehatan.
- b) Jaminan kesehatan semesta.
- c) Pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi.
- d) Pengembangan industri kesehatan tradisional Bali.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju pelayanan berstandar internasional.

- f) Penanganan stunting.
- g) Percepatan penanganan dan pengendalian kasus Covid-19.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah.
- b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik.
- c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
- d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi.
- e) Masih rendahnya kasiptas dan daya dukung jalan provinsi.
- f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan.
- g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana.
- h) Penggunaan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.
- i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku.
- j) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.
- k) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi.
- l) Belum ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah.
- m) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan.
- n) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang.
- o) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai.
- b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU).
- c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda/Perkada di Bali..

6. Sosial

- a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan
- b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas Sosial.
- c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
- e) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya.
- f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

7. Bencana

- a) Masih terdapatnya korban baik jiwa harta maupun benda akibat terjadinya bencana.
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- d) Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik.
- e) Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi dan
- f) Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.

B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

- a) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b) Terbatasnya sertifikasi profesi selain sektor pariwisata.
- c) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
- d) Adanya penempatan PMI tidak sesuai aturan .
- e) Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- f) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.

- g) Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- h) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebesar 72,16% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 75,57%.
- b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2020 mencapai 16,36%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 36,55% dari total 7.198 pejabat struktural.
- c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2020 sebesar 67,86% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 65,67%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 80,75% (Data Sakernas, 2020).
- d) Belum semua Perangkat Daerah memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2020 sebesar 48,31% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,69%.
- f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2020 sebesar 48,21% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,79%.
- g) Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 252 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif.
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi.
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal.
- e) Menurunnya kesuburan lahan.
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif.
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil.
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistem pemasaran hasil.
- j) Akses permodalan usahatani terbatas.

- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil.
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal.
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis.
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak.

4. Pertanahan

- a) belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.

5. Lingkungan Hidup

- a) Belum optimalnya pembangunan rendah karbon menuju ekonomi hijau.
- b) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kualitas pelayanan sampah TPA Regional.
- c) Belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan danau, terumbu karang, dan mangrove.
- d) Masih adanya pencemaran air sungai, pantai, laut, mata air, dan udara.
- e) Belum optimalnya pengawasan implementasi regulasi pemanfaatan lahan.
- f) Belum terakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting.
- b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- c) Kondisi prasarana/sarana desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan.
- d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal.
- e) Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan kearifan lokal Bali.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali.

9. Perhubungan

- a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata-rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam.

- b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata-rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari;
- c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan.
- d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal).
- e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

10.Komunikasi dan Informatika

- a) Belum maksimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah.
- b) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal.
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik.
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral.
- e) Rendahnya pengamanan data dan informasi

11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Akses permodalan koperasi dan UKM yang masih terbatas.
- b) Belum optimalnya validasi data KUMKM.
- c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola KUMK.
- d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran koperasi UMKM.
- e) Belum optimalnya jaringan kemitraan KUMKM.

12.Penanaman Modal

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b) Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota.
- e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

13.Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga provinsi Bali.
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda.
- c) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
- d) Prestasi olahraga belum optimal.
- e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

14.Statistik

- a) Belum maksimalnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah.
- b) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal.
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik.
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral.
- e) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

15.Persandian

- a) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

16.Kebudayaan

- a) Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat.
- b) Terbatasnya penggalan, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah.
- c) Perlu dikembangkannya pembinaan lembaga seni.
- d) Perlunya pengoptimalan dalam Penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali serta Busana Adat Bali.
- e) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi lembaga seni.
- f) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- g) Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, sekaligus diisi dengan pelaksanaan kegiatan: Jantra Tradisi Bali dan pelaksanaan Perayaan Budaya Dunia (*Bali World Cultural Celebration*).
- h) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan Festival Seni Bali Jani.

- i) Masih minimnya penyelenggaraan dan/atau memfasilitasi program misi diplomasi kebudayaan ke luar negeri.
- j) Masih minimnya kemitraan lembaga seni dengan PHRI dan ASITA.
- k) Perlu ditingkatkannya kegiatan alih aksara, alih bahasa, dan digitalisasi lontar-lontar Bali.
- l) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan databased mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
- m) Perlu ditingkatkannya usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- n) Perlu ditingkatkannya penguatan dan perlindungan Tari Sakral Bali.

17. Perpustakaan

- a) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.

18. Kearsipan

- a) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat.
- b) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset.
- c) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing.
- d) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip.
- e) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- b. Belum adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zonasi wilayah pesisir.
- c. Masih kurangnya ketersediaan bahan baku ikan untuk produk olahan.
- d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan.

2. Pariwisata

- a) Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali.
- b) Belum optimalnya SDM pariwisata yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- c) Belum optimalnya pemasaran pariwisata.
- d) Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali.
- e) Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan).

- f) Pandemi Covid-19.

3. Pertanian

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif.
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi.
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal.
- e) Menurunnya kesuburan lahan.
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif.
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil.
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistem pemasaran hasil.
- j) Akses permodalan usahatani terbatas.
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil.
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal.
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis.
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak.

4. Kehutanan

- a) Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan.
- b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- c) Masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, dan penebangan liar (illegal Logging).
- d) Masih banyaknya permasalahan tata batas.
- e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
- f) Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
- b) Terbatasnya jumlah SDM yang menangani ESDM.
- c) Terbatasnya kompetensi SDM yang menangani ESDM.
- d) Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
- e) Ketahanan sumber daya air di daerah penurunan kualitas hidup.

6. Perdagangan

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun.

- b) Keterbatasan bahan baku industri.
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing.
- d) Jumlah produksi masih rendah.
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah.
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah.
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk.
- h) Masih banyaknya produk kayu yang belum memiliki SVLK.
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar.
- j) Kurangnya inovasi desain produk.
- k) Kurangnya pendampingan.
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan.
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI.
- n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif.
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian.
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif.
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.

7. Perindustrian

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun.
- b) Keterbatasan bahan baku industri.
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing.
- d) Jumlah produksi masih rendah.
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah.
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah.
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk.
- h) Masih banyaknya produk kayu yang belum memiliki SVLK.
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar.
- j) Kurangnya inovasi desain produk.
- k) Kurangnya pendampingan.
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan.
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI.
- n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif.
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian.
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif.
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a) Biro Hukum

- 1) Pengawasan efektifitas produk hukum Daerah belum optimal.
- 2) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik.
- 3) Kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah.
- 4) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dan
- 5) Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang.

b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan).
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan.
- 3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%- sd 40% dari total APBD).
- 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah.
- 5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.

c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali yang mencakup:
 - Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD.
 - Masih adanya potensi sengketa batas wilayah.
 - Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan *sradha* dan *bhakti* di kalangan Krama Bali.

d) Biro Umum dan Protokol

- 1) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat.
- 2) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset.

- 3) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip.
- 5) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.

2. Sekretariat DPRD

- a) Belum optimalnya memfasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
- b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat.
- c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik dan
- e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi :
 - 1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain.
 - 2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- f) Penambahan sub kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan pada kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang telah dibahas oleh DPRD kepada masyarakat.
- g) Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

- b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.

2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

- a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retirbusi daerah.
- b) Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional samling dan motor untuk optimalisasi razia door to door.
- c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib.
- d) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan pengasaan IT.
- e) Kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan untuk membayar pajak menurun.

3. Kepegawaian

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal.
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal.
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi.

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga.
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya.
- c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta.
- d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai Show Window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.

F. UNSUR PENGAWAS

1. Inspektorat Daerah

- a. Pengelolaan keuangan dan asset sering menjadi temuan.
- b. Penanganan tindak lanjut untuk pemeriksaan SKPD terkait belum maksimal.

- c. Adanya potensi penyelewengan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa.
- d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bansos oleh penerima banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan proposal pekerjaan.
- e. Adanya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan .

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesejahteraan Bangsa

- a. Radikalisme dan Terorisme masih berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali.
- b. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan di masa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di media sosial serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda.
- c. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional.
- d. Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang multi culture secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah.

H. UNSUR KEKHUSUSAN

1. Pemajuan Desa Adat

- a. Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal.
- b. Masih ada desa adat yang menyampaikan LPJ Desa Adat tidak tepat waktu yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun 2021.
- c. Prajuru Desa Adat belum menyusun awig-awig dan perarem sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sehingga registrasi awig-awig dan perarem desa adat belum berjalan maksimal.
- d. Terjadi penurunan LPD dengan kriteria sehat dibandingkan tahun sebelumnya.
- e. Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal.
- f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa adat belum maksimal.
- g. Pendataan subak dan subak abian belum maksimal.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *Krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan *Krama* Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan *Krama* Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, *Krama* (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi *Krama* Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep *Tri Semaya*: *Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan *Krama* Bali, namun sekaligus juga

menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- i. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma Kertih*, *Segara Kertih*, *Wana Kertih*, *Danu Kertih*, *Jana Kertih* dan *Jagat Kertih*.
- ii. Sedangkan secara *sakala*, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) *Krama* Bali :

- i. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara *sakala* maupun *niskala*: *Atma Kertih*, *Danu Kertih*, *Wana Kertih*, *Segara Kertih*, *Jana Kertih*, dan *Jagat Kertih*.
- ii. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri *Krama* Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas *Krama* Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk

kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- iii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar *Krama* Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja *Krama* Bali.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi *Krama* Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi *Krama* Bali.
- 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan *Krama* Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- 1) Penguatan dan pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
- 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- 3) Peningkatan daya saing *Krama* Bali.
- 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
- 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif *Krama* Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan *Krama* Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, maka ditempuh dengan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut:

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Bali Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
	4	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIAANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai	

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
saing tinggi			Enterpreneur	
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA				
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI				
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri		
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI				
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI				
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.		1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
			2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
			3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
			4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH				
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi		1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura
			2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN				

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak			Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global			Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
				rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	
		2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public	
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparat pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
			2	Peningkatan koordinasi antara aparat pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali		Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis		Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah		Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik		Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
				terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Program dijabarkan sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, ter-mapping dalam 38 sasaran dan 24 tujuan. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2019 (sebelum diubah) disajikan pada tabel 6.3A, sedangkan Perubahan Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana yang secara umum memuat penyesuaian indikator, perubahan target dan penyesuaian nomenklatur Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sesuai dengan penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Hal ini bermakna suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi

dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Secara filosofis Perubahan RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah 15 Provinsi Bali 2 (dua) tahun kedepan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Menetapkan pedoman untuk perubahan dokumen perencanaan kabupaten/kota se-Bali;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SABARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKOTING JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHNYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEMUDIPAN KRAMA BALI															
	Tujuan : Terpenuhiya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak															
	Indikator Tujuan : 1 Tingkat Infial Bali	Perentase (%)	3,5% ±1%(yoy)	2,37	-	0,55	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	: 2 Ketersediaan pangan utama	Perentase (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sasaran 1																
	1 Meningkatkan ketahanan pangan bagi Krama Bali	Perentase stok pangan aman	Perentase (%)	20	20	6,278,257,170	20	3,069,883,949	20	17,206,834,392	20	7,759,692,795	20	10,712,757,063	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program 1																
	1 Program Peningkatan Kewemnan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal per kapita per hari	2,647 kkal/kapita/hari	2,650 kkal/kapita/hari	310,406,833	2,648 kkal/kapita/hari	93,466,511	2,649 kkal/kapita/hari	377,296,832	2,440 kkal/kapita/hari	523,099,224	2,450 kkal/kapita/hari	549,254,185	2,460 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	Perentase (%)	76,95 Persen	76,95 Persen	647,384,171	77,45 Persen	370,782,551	77,95 Persen	10,324,905,642	90 Persen	362,608,292	90 Persen	380,738,707	90 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondial Baik dan Siap Pakai	Perentase (%)	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palanija, 26 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palanija, 26 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	3,028,838,505	77 Persen	1,196,150,506	78 persen	939,928,500	-	-	-	79 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Perentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	Perentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	5 persen	1,127,113,210	5 persen	1,183,468,871	5 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Populasi Ternak	ternak	438.131 (jaktuan ternak)	623.915 (jaktuan ternak)	592,416,351	446.893 (jaktuan ternak)	196,592,622	455.831 (jaktuan ternak)	4,384,339,136	-	-	-	455.831 (jaktuan ternak)	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Peningkatan Populasi Ternak	Perentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	0,8 persen	4,157,926,867	1 Persen	4,365,823,210	1 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	97,157,6	95,842	130,926,100	95,973	36,757,678	103,104	187,475,168	105.166,51	469,284,796	107,269.84 ton	1,581,752,539	107,269.84 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17,535.7	16,411	28,079,300	31,862,23	42,960,678	18,609.02	59,475,148	18,981.2	0	19,360.82 Ton	1,476,076,125	19,360.82 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	ton	<10%	<10%	2,269,108,321	55 Ton	556,049,468	70 Ton	170,011,392	-	-	-	-	70 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6 Program Penguasaan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumel	Perentase (%)	95.6	95.6	1,105,262,437	95.7	348,033,519	95.8	188,732,592	-	-	-	-	95.8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumel	Perentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	82 persen	358,701,184	83 persen	376,636,243	83 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	Perentase (%)	8,47 Persen	8,47 Persen	165,825,152	22 Persen	247,070,416	27 persen	574,659,982	3 persen	760,959,222	4 persen	799,007,183	4 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sasaran 1																
	2 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Perentase pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Perentase (%)	5.83	N/A	2,864,505,916	N/A	1,209,481,674	10.11	3,013,277,374	9.60	4,178,150,082	8.58	4,349,944,723	8.58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program 1																
	1 Rehabilitasi Sosial	Perentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	Perentase (%)	1	0.00	0	0.00	2,026,000	31.03	102,666,600	34.48	42,249,870	0.06	7,249,500	0.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perentase Industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Perentase (%)	15216	4.93%	2,835,915,916	1.50%	1,205,823,949	1.50%	2,860,610,864	1.50%	4,087,383,454	1,50%	4,291,752,627	1,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	Perentase (%)	25%	25%	28,590,000	25%	1,631,725	30	49,999,910	30	48,516,758	30%	50,942,596	30%	DinasPerindustrian dan Perdagangan
Sasaran 1																
	3 Meningkatkan rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Perentase (%)	98	N/A	772,665,760	N/A	1,222,265,600	98.60	54,975,044,574	98.80	1,429,125,794	99	1,508,667,894	99	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program 1																
	1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Perentase (%)	8,2%	7,70%	772,665,760.00	2.88 %	1,001,453,400	8.00%	797,921,310	8.00%	372,454,988	6.62%	685,805,088	6.62%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	Unit	N/A	N/A	N/A	4.00	200,812,200	20.00	54,177,123,364	N/A	N/A	-	-	20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Perentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Perentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.00%	1,056,670,806	71%	822,862,806	71%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 1																
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Infial Pangan Bali	Perentase (%)	5.60	N/A	51,487,378	5.65	249,331,442	5,50%±1%(yoy)	338,905,792	5,40%±1%(yoy)	372,795,742	5,40%±1%(yoy)	557,324,000	5,40%±1%(yoy)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SARANAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					REALISASI	Ra	REALISASI	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program : Program Perekonomian dan Pembangunan																
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diintegrasikan	Persentase (%)	N/A	100	51,487,378	100	249,331,442	100	338,905,792	100	372,745,742	100	557,324,000	100	Sekretariat Daerah	
	Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMAJUAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KEBERKAWAJAN PETANI.																
	Tujuan : Peningkatan kesejahteraan petani dan daya saing pertanian																
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB																
	Sasaran : Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal																
	1	Meningkatnya efisiensi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	98.70	9,440,599,015	29	8,158,736,678	31	3,155,878,807	33	3,232,679,057	35	983,658,047	35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : Program Pengendalian Dan Peningkatan Daya Saing Pertanian																
	1	Program Pengendalian Dan Peningkatan Daya Saing Pertanian	Persentase Pemadatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	Persentase	5 Persen	5 Persen	2,526,313,450	4,5 Persen	2,029,353,506	50 Persen	1,074,387,428	5 Persen	2,295,861,869	5 Persen	0	5 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Pasokan Pertanian	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian Yang Dibangun dan Berproduksi	Komoditi	98,524 ton	98,524 ton	2,259,108,321	1 Unit	1,335,057,416	1 Komoditi	852,674,672	-	-	-	1 Komoditi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Pasokan Kawasan Pertanian	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	15 persen	906,817,188	15 persen	983,658,047	30 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Kawasan Pertanian Organik Yang Produktif	kawasan	1 unit, 1 paket, 1 paket, 100 kelompok	1 unit, 1 paket, 1 paket, 100 kelompok	4,645,177,244	1 Kawasan Hidroponik Perikanan dan 1 kawasan pertanian organik	4,794,315,756	1 Kawasan	1,228,816,707	-	-	-	1 Kawasan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sasaran : Meningkatkan kualitas hasil pertanian KIRAMA Bali																
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian KIRAMA Bali	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103.48	104.93	2,335,990,385	93.60	723,386,592	105	4,975,956,176	105.5	4,967,230,306	106	5,215,581,321	106	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	111.44	252,723,870	100.12	48,671,678	117.9	153,571,178	118.5	125,386,916	119.2	290,000,000	119.2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian																
	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Terasa Gumi Banten Yang Produktif	unit	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 row/30.000 phi/1.500 kg/500.000 kg/580.000 row/7.638.500 phi/240.000	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 row/30.000 phi/1.500 kg/500.000 kg/580.000 row/7.638.500 phi/240.000	2,888,302,998	1 Unit	2,081,313,022	1 Unit	2,492,534,282	-	-	-	-	1 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	1 Persen	2,797,491,922	1 Persen	2,937,366,518	2 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase (%)	59 Kewilata/Ha	1 Persen	1,813,315,142	1 Persen	574,202,893	1 Persen	4,553,685,296	1 persen	1,876,082,946	1 Persen	1,969,887,093	5 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Agribisnis Peternakan Yang Baik	kelompok	27 Kelompok	35 Klp	497,683,243	35 Klp	149,183,699	35 Klp	422,270,880	-	-	-	35 Klp	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Persentase Peningkatan Kelompok Yang Menerapkan Lahan Perikanan dan Pengolah Hasil Pertanian	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	3,73 Persen	293,645,438	4,1 Persen	308,327,710	4,1 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	Program Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Pertanian	Jumlah produk perikanan bersertifikat	Sertifikat	134	277	252,723,870	242	48,671,678	149	153,571,178	149	125,386,916	151 SKP	290,000,000	151 SKP	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Sasaran : Meningkatkan kapasitas SDM pertanian KIRAMA Bali																	
3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian KIRAMA Bali	Proporsi anggaran kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	N/A	226,788,139	79.78	77,399,726	77	133,113,344	78	120,903,344	79	126,948,511	79	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Program : Program Penyuluhan Pertanian																	
1	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Bersertifikat	kelompok	3 Orang, 57 Unit	3 Orang, 57 Unit	226,788,139	15 Kelompok	77,399,726	20 Kelompok	133,113,344	-	-	-	-	20 Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Peningkatan Skor Kemangrupaan Kelompok	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	15 persen	120,903,344	16 persen	126,948,511	31 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KIRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.																	
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan KIRAMA Bali																	
Indikator Tujuan : Usur Harapan Hidup (UHH)																	
Sasaran : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh KIRAMA Bali																	
1	Tergencinya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh KIRAMA Bali	Persentase pemadatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh KIRAMA Bali	Persentase (%)	88	88	13,704,412,700	89,5	5,525,355,223	90	3,427,783,144	90.75	128,982,800	91.47	409,807,160	91.47	Dinas Kesehatan	
Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemenuhan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemenuhan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase (%)	0	19	211,860,440	60	62,564,300	60	235,332,210	60	34,422,800	70%	153,431,960	70%	Dinas Kesehatan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelompok/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persentase (%)	0	11,11	3,415,385,317	11,11	790,723,748	44	2,718,397,154	44	94,560,000	56%	147,500,000	56%	Dinas Kesehatan	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Kbf/Kota dengan ketersediaan Obat Esensial	Persentase (%)	85%	83.75	10,077,166,943	80	4,672,067,375	79	479,053,780	81	-	83%	108,875,200	83%	Dinas Kesehatan	
Sasaran : Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan KIRAMA Bali																	
2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan KIRAMA Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	85	85	293,215,711,382	86	167,466,201,462	86	60,703,235,155	86	49,698,162,344	86	178,121,077,362	86	Dinas Kesehatan	
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persentase (%)	49%	37,5	8,160,329,892	47,5	18,485,575,130	60	26,228,837,770	60	32,777,513,792	62%	13,955,010	62%	Dinas Kesehatan	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/Impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN RE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKOTING JAWAB	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023				
						REALISASI	Rn	REALISASI	Rn	TARGET	Rn	TARGET	Rn	TARGET	Rn			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemenuhan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase (%)	85%	87	281,979,472,916	87	148,205,047,912	87	34,101,104,121	87	16,564,940,308	87%	177,733,628,801	87%	Dinas Kesehatan	
	3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategi dan Zoonosis	kasus	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	230 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	3,075,908,574	150 kasus rabies dan 5 kasus flu burung	775,578,420	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	373,293,254	-	-	-	-	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategi dan Zoonosis	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	5 persen	205,708,144	10 persen	373,493,551	10 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sasaran																	
	3 Meningkatkan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat		Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	85	95	20,180,991,832	91.78	14,654,023,578	95	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100	29,079,366,291	100	Dinas Kesehatan	
	Program		Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	Persentase (%)	100%	100	20,180,991,832	100	14,654,023,578	100	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100%	29,079,366,291	100%	Dinas Kesehatan	
	Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.																	
	Tujuan : Terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas																	
	Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah		Tahun		9.72	8.84	-	8.98	-	10.86	-	10.84	-	11.40	-	11.40	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Sasaran																	
	1 Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas		Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	13.27	1,062,517,200	13.33	347,885,970	13.47	299,999,230	13.61	29,048,850	13.75	62,263,900	13.75	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Program		1 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84	82,00	1,062,517,200	85.99	347,885,970	85.50	299,999,230	86.00	29,048,850	86.50	62,263,900	86.50	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	2 Terselenggaranya wajib belajar 12 tahun		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 15-18	Persentase (%)	82.35	82.6	207,979,728,817	82.96	235,558,338,954	82.92	631,019,395,415	83.11	606,545,872,638	83.3	627,465,705,967	83.3	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Program		1 Program Penguatan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Persentase (%)	73.15	73.21	81,862,163,059	82.51	91,136,128,947	100.00	314,418,395,115	100.00	317,588,560,170	100.00	320,347,905,537	100.00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
			Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkeaja di dunia usaha/dunia industri	Persentase (%)	0	52.73	92,804,144,889	47.96	104,706,643,902	46.5	290,407,896,006	47	264,159,362,318	47.50	280,643,714,074	47.50	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	Persentase (%)	15.14	43.46	33,313,420,869	43.73	39,715,566,105	35.35	26,193,104,294	35.45	24,797,950,150	35.55	26,474,086,306	35.55	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PAKSIAN DI DESA ADAT/DESA PAKSIAN.																	
	Tujuan : Terselenggaranya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbudaya kerdusika lokal																	
	Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu		Persentase (%)		2.8	24	-	26	-	72	-	77	-	82	-	82	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk paksian di Desa Adat		Persentase (%)		0.20	N/A	-	N/A	-	3.64	-	4.29	-	4.93	-	4.93	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Sasaran																	
	1 Meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk paksian		Jumlah jajar pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	91	N/A	100	N/A	274	26,058,793,926	290	25,240,077,216	312	288,863,300	312	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Program		1 Program Pengembangan Kurikulum	Persentase penanaman Pustaka Dialek terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	50.87	274,997,750	51.37	233,380,850	51.87	209,722,900	51.87	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	2 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra		Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69.80	25,783,796,176	70.00	25,006,696,366	70.20	79,140,400	70.20	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERKETERANGAN; BERMITU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KEROKO YANG DISUMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI																	
	Tujuan : Terselenggaranya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi																	
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Persentase (%)		74.77	75.38	-	75.90	-	75.51 (75.41-75.61)	-	76.99 (76.61-76.28)	-	77.78 (76.56-80.00)	-	77.78 (76.56-80.00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sasaran																	
	1 Meningkatkan daya saing SDM Krama Bali		Indeks Daya Saing SDM Bali	Persentase (%)	65.45	70.91	13,074,915,878	63.64	834,061,542	69.09	54,149,969,525	69.09	35,336,553,025	74.55	5,274,997,600	74.55	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	Program		1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persentase (%)	34.75	43.99	3,914,345,530	47.93	196,378,600	49.26	149,999,740	0	0	55.21	24,997,800	55.21	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kependidikan		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	77	77	557,943,248	20	146,323,444	79	199,970,300	80	767,258,585	81.00	0	81.00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	3 Program Pengembangan Daya Saing Kecaktraan		Jumlah Medali yang diperoleh Atlet pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Daerah	11	98	8,602,627,080	0	491,379,498	90	52,699,999,485	100	34,069,293,440	110	5,000,000,000	480	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	4 Program Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	1,100,000,000	50	500,000,000	52.00	250,000,000	52.00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	BATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKOTING JAWAB			
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023						
	REALISASI	Rp				REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7	MISI 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KOMPREHENSIF DAN TERDIFERENSIASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.																			
	Tujuan : Terselenggaranya kesejahteraan sosial Krama Bali																			
	Indikator Tujuan : Persentase Kematangan		Persentase (%)	3,91	3,61	-	4,48	-	3,78 (3,90-4,00)	-	4,28 (4,00-4,50)	-	3,78 (3,90-4,00)	-	3,78 (3,90-4,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Sasaran :																			
	1 Meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Indeks kepastian pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	75	20,50	1,769,794,616	N/A	611,262,980	78	2,674,559,055	79	4,952,227,600	80	2,772,273,868	80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	Program :																			
	1 Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterbatasan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	Persentase (%)	16,87	9,58%	1,097,887,616	8,87%	433,855,800	21,87%	2,027,303,470	17,91%	4,650,332,465	17,91%	2,470,381,168	17,91%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	2 Penanganan Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	14,78	14,78%	397,200,000	13,46%	1,955,400	20,62%	380,949,755	100%	255,939,600	100%	255,937,800	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	3 Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase masyarakat miskin yang terdata dan termonitor	Persentase (%)	10,26	1 sepekan	66,250,000	1 sepekan	1,384,500	1 sepekan	51,805,160	100%	3,805,370	100%	3,805,200	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	4 Pemberdayaan Sosial		Persentase Pemasuk Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) dalam penanganan Pemasuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%)	95	2,03	298,447,000	1,37%	174,067,280	22,57%	214,599,670	8,22%	42,150,165	8,22%	42,149,700	8,22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
8	MISI 8 : MEMBANGUN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KEMEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGRI.																			
	Tujuan : Terselenggaranya tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing																			
	Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka		Persentase (%)	1,37	1,97	-	8,63	-	8,63 (8,31 - 6,08)	-	3,19 (2,77-3,61)	-	3,32 (1,90-2,74)	-	3,32 (1,90-2,74)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral				
	Sasaran :																			
	1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	76,56	73,77	2,774,060,510	74,32	598,506,219	76,30	199,999,880	76,55	125,150,500	76,80	125,150,500	76,80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Program :																			
	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan menjadi pasar kerja sesuai kompetensi	Persentase (%)	51,56	63,06	2,774,060,510	10,80	598,506,219	30	199,999,880	30	125,150,500	30	125,150,500	30	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Sasaran :																			
	2 Meningkatkan akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	98,60	98,43	1,022,201,558	94,37	30,227,450	94,37	199,999,700	98,61	179,010,100	97,68	176,010,100	97,68	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Program :																			
	1 Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	9,638	6,918	1,022,201,558	4,380	26,037,750	5,200	100,000,000	0	0	5,950	3,000,000	22,448	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
			Jumlah karyawan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang sesuai kelas Bali	Karyawan	0	0	0	0	4,189,700	1	99,999,700	4	179,010,100	4	173,010,100	9	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
9	MISI 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPREHENSIF, MUTUAS DIANGKAP, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGRI.																			
	Tujuan : Terselenggaranya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan																			
	Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		Persentase (%)	82,26	81,95	-	41,04	-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	38,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral				
	Sasaran :																			
	1 Meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%)	52,26	51,95	811,756,159	41,04	436,115,400	35,00	306,070,200	35,00	178,500,000	35,00	165,748,002	35,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Program :																			
	1 Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persentase (%)	4,74	5,23	530,656,159	5,72	73,550,400	6,22	149,999,600	6,71	27,500,000	7,2	11,279,900	7,2	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
			Persentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Persentase (%)	100	100	381,100,000	10	356,565,000	100	156,070,600	100	151,000,000	100	138,248,002	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	2 Program Hubungan Industrial		Persentase Pemenuhan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHH	Persentase (%)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100	18,220,100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
10	MISI 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PERINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.																			
	Tujuan : Terselenggaranya Pemajuan Kebudayaan Bali																			
	Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju		Jumlah	19,782	19,807	-	19,832	-	19,857	-	19,880	-	19,908	-	19,908	Dinas Kebudayaan				
	Sasaran :																			
	1 Terselenggaranya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemertanian dan pembinaan kebudayaan Bali		1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19,745	19,765	804,179,598	19,785	2,068,235,900	19,805	4,969,905,620	19,825	661,513,920	19,845	694,589,616	19,845	Dinas Kebudayaan			
			2 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	23,585,009,843	47	7,231,219,333	52	30,307,337,786	55	32,835,292,938	60	34,477,057,585	60	Dinas Kebudayaan			
	Program :																			
	1 Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi		Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persentase	5	5%	1,807,153,775.00	4%	553,908,016.00	5%	2,110,490,220.00	5%	336,500,000.00	5%	353,325,000	24%	Dinas Kebudayaan			
	2 Pemajuan Keilmuan dan Tenaga Kebudayaan		Persentase Peningkatan Pemajuan Keilmuan dan Tenaga Kebudayaan	Persentase	5	5%	20,050,050,341.00	3%	3,813,825,805.00	5%	14,244,670,242.00	5%	1,217,138,902.00	5%	1,277,965,847	23%	Dinas Kebudayaan			
	3 Pemajuan Cagar Budaya dan Permusnaan yang Maju		Jumlah Cagar Budaya Dan Permusnaan yang Maju	Jumlah	410	410	804,179,598.00	515	2,068,235,900.00	520	4,969,905,620.00	525	661,513,920.00	1,430	694,589,616	3,400	Dinas Kebudayaan			

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	RONDIS AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN RE										RONDISI AKHIR	PEMANGKAT DAERAH PEMANGKONG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persentase	5	5%	1,718,805,727.00	4%	2,863,485,512.00	5%	13,952,177,324.00	5%	31,381,654,036.00	5%	32,845,736,738	24%	Dinas Kebudayaan
11	MISI 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEBALA DAN NIKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTHI YAITU ATMA KERTHI, DANTU KERTHI, WANA KERTHI, SEGARA KERTHI, JANA KERTHI, DAN JAGAT KERTHI.															
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih															
	Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan		Indeks	72,48 (2017)	N/A	-	N/A	-	73.98	-	73.98	-	74.98	-	74.98	Badan Perencanaan Pengembangan Daerah
	Sasaran :															
	1 Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih	1 Persentase Krana Bali yang mengimplemantasikan nilai-nilai Sad Kertih dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	10.32	33,623,107,431	N/A	14,140,144,554	60	48,503,401,422	70	12,048,570,063	80	9,409,030,164	80	Sekretariat Daerah
		2 Persentase Krana Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kertih secara nikala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	N/A	14,281,717,866	N/A	11,467,527,453	79	24,814,822,433	82	21,038,894,896	85	15,500,000,000	85	Sekretariat Daerah
	Program :															
	1 Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kertih	Indeks	N/A	N/A	14,281,717,866	74	11,467,527,453	76	24,814,822,433	77	21,038,894,896	78	15,500,000,000	78	Sekretariat Daerah
	2 Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan air limbah layak	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	1,898,518,800	89.79%	924,603,004	89.95%	970,833,186	89.95%	Dinas Pekerjaan Umum, Perawatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3 Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84%	88.00%	29,826,358,618.49	78.80%	13,581,064,710.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79%	Dinas Pekerjaan Umum, Perawatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan layanan air minum aman	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	46,098,723,490	92%	6,080,840,047	93%	6,384,882,049	93%	Dinas Pekerjaan Umum, Perawatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemahaman	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase (%)	0.81	3.85	2,324,769,248	1.14	249,615,388	0.2	0	0	0	1.30	1,000,000,000	1.30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	5 Program Pengkajian Hunan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Persentase (%)	5.56	4.11	521,519,137	4.10	76,089,500	3.67	199,952,536	3.04	4,895,944,786	2.41%	122,507,596	2.41%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	6 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah daerah dalam kondisi baik kuantitas volume air darat) dan kualitas bakau (luas air)	Jumlah	4	4	0	4	19,770,000	4	0	4	0	4 daerah	45,838,400	4 daerah	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	7 Program Pengkajian Kelembutan, Peleir dan Peleir-pelir Kecil	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Kawasan	3	3	950,460,428	3	213,604,956	3	306,306,596	4	147,182,196	5 Kawasan	884,968,933	5 Kawasan	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	MISI 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARITANGAN, PAWORGAN, DAN PALEMAHAN.															
	Tujuan : Terwujudnya Pemertuaan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kertih															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali		Persentase (%)	N/A	N/A	-	7.08	-	8.87	-	12.06	-	15.07	-	15.07	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	2 Persentase Subak yang lestari		Persentase (%)	N/A	N/A	-	78	-	78	-	80	-	85	-	85	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	Sasaran :															
	1 Meningkatkan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Persentase desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	99,87	453,889,131,785	99,87	462,462,204,748	99,87	462,348,807,702	100	466,288,950,348	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
		2 Persentase Subak yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	98,50	120,130,000	98,50	407,713,000	98,50	1,064,438,792	100	431,983,892	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	Program :															
	1 Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan pemertuaan, pemertuaan dan pemertuaan	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	99,87	453,889,131,785	99,87	462,462,204,748	99,87	462,348,807,702	100	466,288,950,348	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
		Persentase Subak berdaya dalam kegiatan pemertuaan, pemertuaan dan pemertuaan	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	98,50	120,130,000	98,50	407,713,000	98,50	1,064,438,792	100	431,983,892	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
13	MISI 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BEROBASIS BUDAYA DAN BERPIKIR KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.															
	Tujuan : Berkenbangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas															
	Indikator Tujuan : Meningkatkan Rata-Rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		Hari	10,48 dan 4,90	8,2 dan 4,30	-	2,68 dan 2,01	-	2,68 dan 2,01	-	5,30 dan 3	-	10,9 dan 4,90	-	10,9 dan 4,90	Dinas Pariwisata
	Sasaran :															
	1 Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal	Destinasi	100	0	0	0	0	18	429,877,089	21	2,077,500	31	41,138,200	70	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saling	Persentase (%)	17.53	-	0	-	0	2.56	429,877,089	3.85	2,077,500	5.13	41,138,200	11.54	Dinas Pariwisata
	Sasaran :															
	2 Berkenbangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	130	96	450,997,791	31	185,560,786	0	0	40	356,391,845	50	452,105,784	217	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	Persentase (%)	N/A	-	450,997,791	-	185,560,786	0	0	1	356,391,845	1	452,105,784	2	Dinas Pariwisata

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKONG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023					
					REALISASI	Ra	REALISASI	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
14	MISI 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARTISIPASI BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGARA SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTABALI DENGAN MENGEKSPANSI KREATIVITAS INOVASI																	
	Tujuan : Meningkatkan pasar pariwisata Bali																	
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		Persentase (%)	23.40	23.26	-	18.76	-	18.34	-	20.86	-	25.93	-	25.93	Dinas Pariwisata		
	Sasaran :																	
	1	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah desas sektor pariwisata	USD	9,950,080	9,362,390	1,851,845,326	774,020	313,556,156	1,371,680	254,726,459	2,642,000	272,678,644	3,323,470	286,312,576	17,373,460	Dinas Pariwisata	
			2 Persentase promosi pariwisata melalui media Elektronik dan online/digital	Persentase (%)	10	0	143,592,545	30	100,000,000	40	1,027,236,149	50	307,534,647	60	322,911,380	60	Dinas Pariwisata	
	Program :																	
	1	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase (%)	9.67	6.27	1,996,437,871	-66.43	413,556,156	-29.16	1,281,962,608	37.50	580,213,291	45.45	436,051,688	45.45	Dinas Pariwisata	
15	MISI 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARTISIPASIAN SECARA KOMPREHENSIF																	
	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan																	
	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan		persentase (%)	78	79	-	-	-	81	-	83	-	85	-	85	Dinas Pariwisata		
	Sasaran :																	
	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berujung wisatawan mengunjungi dan menikmati	Persentase (%)	40 dan 60	75 dan 89	401,901,641	-	333,120,554	40 dan 60	556,919,830	40 dan 60	235,133,799	40 dan 60	181,213,096	40 dan 60	Dinas Pariwisata	
	Program :																	
	1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemertabatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Menerima Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase (%)	N/A	-	401,901,641	-	333,120,554	1	556,919,830	3	235,133,799	5	181,213,096	9	Dinas Pariwisata	
	Sasaran :																	
2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	N/A	-	1,087,348,374	-	187,597,167	30	1,213,837,894	30	514,559,014	40	483,354,964	100	Dinas Pariwisata		
Program :																		
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Persentase (%)	N/A	-	1,087,348,374	-	187,597,167	43	1,213,837,894	44	514,559,014	45	483,354,964	45	Dinas Pariwisata		
16	MISI 16 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI POSAT POSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/ROTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.																	
	Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Bali																	
	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)	6.33	5.63	-	-9.33	-	3.00 (2.50-3.50)	-	3.10 (2.70-3.50)	-	5.00 (4.60-5.40)	-	5.00 (4.60-5.40)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Sasaran :																	
	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARDAGITA	Persentase (%)	2.97	2.22	229,699,540	2.64	258,188,800	3.12	349,876,312	3.7	450,080,316	4.39	450,080,316	16.07	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Program :																	
	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	Nilai (Tribun)	20.39	17.72	114849770	9.66	129,094,400	15.56	174,938,156.00	-	-	-	-	-	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Program sesuai Pemendagri 90 Tahun 2019)	Persentase Peningkatan Nilai Investasi/Penanaman Modal di Luar SARDAGITA	Persentase (%)	38.38	7.88	114,849,770	13.69	129,094,400	13.80	174,938,156	14	450,080,316	18	450,080,316.00	18	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Sasaran :																	
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (DKMDa)	Persentase (%)	10	N/A	9,103,254,794	N/A	6,011,828,902	30	8,285,496,464	25	5,086,200,420	30	9,465,017,108	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	N/A		N/A		20		25		30	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3	Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah (Toko)	40	40		40		40		40		40	200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4	Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	N/A		N/A		50		50		50	300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program :																		
1	Program Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama Bali	Persentase (%)	25%	25%	28,590,000	25%	1,631,725	30	49,999,910	30	48,516,758	30%	50,942,596	30%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Ketersediaan Desa yang Aktif	Persentase (%)	100%	100%	9,074,664,784.00	100%	6,010,197,177.00	100%	8,235,496,554	100%	5,037,683,662	100%	9,414,074,512	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
17	MISI 17 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI																	
	Tujuan : Berkeadilan ekonomi masyarakat budaya Bali																	
	Indikator Tujuan : 1. Persentase nilai ekspor produk UKM Branding Bali		Persentase (%)	2	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
2. Persentase UMKM Menuju Digital		Persentase (%)	10	N/A	-	N/A	-	N/A	-	25.25	-	26.5	-	26.5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

MISI		INDIKATOR KINERJA (Tujan/Impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	2019		2020		TARGET TAHUN RE 2021		2022		2023		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKUTUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Sasaran		1															
1 Meningkatkan kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor		1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PERH sektor Industri	Persentase (%)	2	3.36	2,990,177,104	N/A	1,219,328,449	2.03	3,110,610,404	2.04	4,095,867,274	2.05	4,300,660,638	2.05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualitas India 4.0	Persentase (%)	100	25		N/A		25		25		25		200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program		1															
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri		Persentase Industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase (%)	15216	4.93%	2,835,915,916	1.50%	1,205,823,949	1.50%	2,860,610,864	1.50%	4,087,383,454	1.50%	4,291,752,627	1.50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 Program Pengembangan Ekspor		Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Persentase (%)	49.11%	67.42%	163,261,188	64.95%	13,304,300	64.95%	249,999,540	64.95%	8,483,820	64.95%	8,908,011	64.95%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Sasaran		2															
2 Meningkatkan pusat-pusat perkembangan kecil dan menengah Kramas Bali		Jumlah Pusat-pusat perkembangan kecil berbasis koperasi	Jumlah	9	37	7,681,579,218	39	4,736,353,246	17	4,870,113,571	19	5,273,285,126	22	5,416,553,466	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Program		1															
1 Program Peningkatan Sukuksa Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar ber SNI	Jumlah	4	4	0	4	17,852,275	4	50,000,000	4	95,778,800	6	100,567,740	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi		Persentase koperasi / koperasi teman / koperasi sukuk yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Suwasu	Persentase (%)	1.45	2.60	394,330,798	2.54	144,824,549	3.08	583,089,605	3.08	468,864,290	3.13	327,995,940	3.13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3 Program Pemberdayaan UMKM		Persentase UMKM yang bankable	Persentase (%)	0.02	0.03	924,792,710	0.05	501,750,080	0.06	601,178,890	0.12	609,048,900	0.13	639,917,950	0.13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4 Program Pendidikan dan Latihan Perkerjasama		Persentase pengelola BUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Persentase (%)	2.35	0.99	5,856,773,248	0.25	3,766,889,434	0.25	3,992,755,626	0.24	3,844,528,896	0.30	4,073,007,696	0.30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
5 Program Pelayanan Jasa Usaha Samping Pijaya		Persentase koperasi yang bankable	Persentase (%)	146.67	49.02	505,682,462	53.70	305,036,908	59.26	243,089,450	83.33	253,064,240	86.49	275,064,140	86.49	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
18 Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT, DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONVERSI ANTAR WILAYAH UNTUK MEMDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI																	
Tujuan		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkonvergi mendukung pertumbuhan perekonomian baru															
Indikator Tujuan		Indeks konektivitas	Indeks		2,74	2,7	-	2,6	-	2,8	-	2,4	-	2,3	-	2,3	
Sasaran		1															
1 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi		Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	188,041,599,308	63	153,459,383,874	75	101,945,989,552	81.25	296,232,100,702	82	315,234,242,989	82	Dinas Perhubungan	
Program		1															
1 Program pengkayaan perkeretaapian		Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	Jumlah	9	9	1,404,260,520	9	1,855,910,000	10	637,344,840	-	-	-	-	10	Dinas Perhubungan	
		Persentase lintasan koridor wilayah sebagai yang mendapatkan kapasitas pembiayaan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	50	242,150,340	50	1,779,625,888	100	Dinas Perhubungan	
2 Program penyempurnaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	Indeks	N/A	72.07	5,990,059,239	73	5,880,449,401	70	3,640,000,000	75	3,836,802,500	79	3,979,999,540	79	Dinas Perhubungan	
		Tingkat Pelayanan Samping	Tingkat	C	C (bantuan samping bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	752,650,000	C (bantuan samping bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1,956,700,000	C (bantuan samping bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	774,689,960	-	-	-	-	C (bantuan samping bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	Dinas Perhubungan	
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	66.35	561,848,468	72.51	1,685,999,728	72.51	Dinas Perhubungan	
3 Program pengkayaan pelayanan		Persentase Pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	Persentase (%)	40	100	1,607,860,520	100	825,738,000	50	1,546,881,405	-	-	-	-	50	Dinas Perhubungan	
		Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	25	1,366,617,510	50	3,052,701,540	50	Dinas Perhubungan	
4 Program Penyempurnaan Jalan		Persentase jalan provinsi dalam kondisi sangat	Persentase (%)	80.81%	82.66%	178,286,769,069.07	78.25%	142,940,586,473.00	77.98%	95,247,073,347	76.89%	290,224,682,184	78.67%	304,735,916,293	78.67%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
19 Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DATA MANUTIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN																	
Tujuan		Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Kramas Bali dan Wisatawan															
Indikator Tujuan		1 Persentase Penyelesaian pelanggaran antisnarkisme, kenyamanan dan ketertarikan umum	Persentase (%)		100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran		1															
1 Meningkatkan rasa aman dan nyaman Kramas Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas keahluannya.		1 Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,376	#REPI	2,083	#REPI	3,200	#REPI	2,731	#REPI	2,362	#REPI	2,362	Badan Keamanan Bangsa dan Politik	
		2 Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	18,636,071,842	74	18,604,036,375	78	21,406,334,453	80	17,801,725,174	82	20,512,092,644	82	Satuan Polisi Pamong Praja	
		3 Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10.555.415.826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100	1,972,017,200	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Program		1															
1 Program Peningkatan Keamanan		Persentase layanan diinformasi informasi kebetuhan	Persentase (%)	100	100	10.555.415.826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100%	1,972,017,200	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PEMANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB			
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023						
	REALISASI	Rp				REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	Program Peningkatan Keterbacaan dan Keterbacaan Urusan	Presentase Pelaksanaan Perda/Perkada yang diadopsikan secara Yustisi & Non Yustisi	Presentase (%)	543	100	869,815,344	100	207,316,456	100	426,664,816	100	168,518,816	100%	168,518,596	100%	Badan Polisi Pemang Praja			
			Presentase Pelaksanaan K3 (keselamatan, kesehatan, kebidayaan) yang diadopsikan	Presentase (%)	247	235	17,766,256,498	225	18,396,719,919	215	20,979,669,637	100	17,633,206,358	100%	20,343,574,048	100%				
20	MISI 20 : MEMPERTUHKAN KEBUDAYAAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKUALITAS DENGAN MEMPERTUHKAN BUDAYA BUDAYA POLITIK DAN KEBERAGAMAN GENDER DENGAN MEMPERTUHKAN KEHARUKAN BUDAYA BALI.																			
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Modern sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali			Indeks		79.8	81.83	-	77.89	-	81	-	81	-	81	-	81	Badan Keasman Bangsa dan Politik			
Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi																				
2 Indeks pemberdayaan gender			Indeks		63.76	N/A	-	N/A	-	64.78	-	64.9	-	65	-	65	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Sasaran 1 : Meningkatkan peran serta Krama Bali dalam layanan publik dan meningkatkan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis			Presentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	Presentase (%)	70.5	N/A	1,207,806,232	81.84	607,632,950	73.81	11,347,850,916	75.00	16,758,520,384	75	16,768,519,844	75	Badan Keasman Bangsa dan Politik			
Program 1 : Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat			Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Presentase (%)	77.5	81.58	546,363,702	73.43	560,310,150	78	11,303,522,516	78	16,747,420,284	78	16,757,419,744	78	Badan Keasman Bangsa dan Politik			
2 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Presentase Penduduk perempuan yang bekerja	Presentase (%)	98.45	98.85%	661,442,530	67.29%	47,322,800	98.7%	44,328,400	98.75%	11,100,100	98.8%	11,100,100	98.8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
21	MISI 21 : MEMBANGUNAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HILJAI DAN INDAH.																			
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis			Presentase (%)		14.38	N/A	-	N/A	-	15.83	-	15.9	-	16.28	-	16.28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbengruan (KWT)																				
Sasaran 1 : Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan			Days dalam lingkungan	Presentase (%)	16.93	N/A	4,330,563,423	17.29	202,373,923,168	17.46	1,947,627,908,350	17.64	432,377,542,490	17.82	453,247,054,963	17.82	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Program 1 : Program Penyediaan Perumahan Ruang			Presentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Presentase (%)	90%	100%	1,796,170,594	100%	1,011,671,910	93%	1,700,686,923	94%	1,173,557,688	95%	1,232,335,572	95%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
2 Program Pengadaan Sumber Daya Air (SDA)			Presentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Presentase (%)	47.5%	57.46%	2,306,415,901.63	62.47%	48,342,007,150.00	58.06%	61,146,114,606	48.33%	2,901,101,400	48.50%	3,046,156,470	48.50%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
3 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			Presentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Presentase (%)	58%	60%	59,125,764.72	56.31%	152,973,739,408	68%	1,884,568,630,688	72%	427,410,477,402	74%	448,781,001,272	74%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4 Program Pengadaan Daerah Aliran Sungai (DAS)			Presentase perserutan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Presentase (%)	5.02	11.14	148,851,162	7.72	46,514,700	4.89	212,476,130	4.83	892,406,000	4.75%	187,661,648	4.75%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hilai dan indah			Indeks		61.81	63.62	-	71.98	-	72.02	-	72.21	-	72.40	-	72.40	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)																				
Sasaran 1 : Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan			1 Indeks kualitas udara	Indeks	91.98	94.35	3,272,211,015	88.34	5,289,354,310	87.27	13,176,975,014	87.38	4,436,922,123	87.48	2,451,551,688	87.48	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
			2 Indeks kualitas air	Indeks	63.17	63.33		64.33		67.93		68.03		68.13		68.13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
			3 Indeks kualitas lahan	Indeks	38.57	40.79		40.58		41.03		41.49		41.95		41.95	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
			4 Indeks kualitas air laut	Indeks	-	N/A		69.75		61.72		62.24		62.76		62.76	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
			5 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Presentase (%)	8.38	8.57		8.57		10.16		10.82		11.65		11.65	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
			6 Presentase besutan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Presentase (%)	0.40	0.43	1,136,305,480	0.68	227,483,030	0.97	349,905,792	1.2	186,047,592	1.4	36,141,800	1.4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Presentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Presentase (%)	7.21	6.64	272,902,620	0.00	95,585,966	5.47	49,999,800	4.87	28,292,800	4.31%	0	4.31%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2 Program Pemukiman dan Pengawasan Terhadap Isin Lingkungan dan Isin Perindungan dan Pengadaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Presentase ketataan terhadap isin lingkungan	Presentase (%)	100	100	183,306,029	48	123,574,166	65	312,429,344	75	0	90%	0	90%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Presentase pengurusan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Presentase (%)	18	17.60	175,742,410	11.38	217,359,949	24	349,905,612	26	209,890,467	27%	192,344,292	27%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
			Presentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Presentase (%)	73	54.74		51.73		74		73		72%		72%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
4 Program Pengadaan Pemukiman			Presentase pelayanan pengelolaan pemukiman pada TPA Regional	Presentase (%)	100	100	2,638,259,956	100	4,853,834,229	100	12,464,640,258	100	4,198,738,856	100%	2,259,207,396	100%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN RE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					REALISASI	Rn	REALISASI	Rn	TARGET	Rn	TARGET	Rn	TARGET	Rn			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5. Program Pengkajian Energi Terbarukan	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	4.3	4.3	453,478,000	6.39	100,689,600	9	100,000,000	11	186,047,592	13	25,141,800	13	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	6. Program Pengkajian Mineral dan Batubara	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persentase (%)	55	100	682,827,480	97	126,793,430	55	249,905,792	0	0	80	8,000,000	80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	7. Program Pengkajian Aspek Geologi	Persentase Pemantauan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	Persentase (%)	55	100	0	97	0	55	0	0	0	80	8,000,000	80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
22	MISI 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MITRAEL																
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		Indeks	75	N/A	-	N/A	-	80	-	81	-	82	-	82	Sekretariat Daerah	
	Sasaran :																
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	N/A	25,185,286,027	83.17	45,138,060,727	80	42,906,470,846	81	142,459,330,298	82	298,872,739,562	82	Sekretariat Daerah
	Program :																
	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Kelibangan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80%	100%	13,831,215,392	100%	15,214,336,931	75%	10,955,294,050	75%	8,653,925,700	80%	8,425,138,482	80%	Badan Eket dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
	2. Program Pengkajian Aplikasi Informatika		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.22	1.35	7,912,424,098	1.72	8,953,141,482	2.18	12,504,269,221	2.52	116,737,802,736	3	272,574,692,872	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	3. Program Pengkajian Informasi dan Komunikasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	85.87	2,653,011,807	92.20	20,624,758,604	92.50	18,597,363,279	93	15,846,130,310	93.20	16,638,436,826	93.20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4. Program Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	86	86.429	90,020,230	92.98	15,517,200	87	1,065,693,824	87.5	1,047,798,138	88	1,047,798,138.00	88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5. Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Isi data penduduk yang memenuhi KTP-el yang mencapai target	Persentase (%)	88.89	88.89	788,634,730	88.89	345,823,710	100	849,544,290	100	173,673,414	100%	186,673,244.00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan																
	Indikator Tujuan : 1. Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	66.16	68	-	70	-	71	-	72	-	73	-	73	Sekretariat Daerah	
	2. Optasi BPK		Status	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	Inspektorat	
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	76.37	77	-	78	-	79	-	79.5	-	80	-	80	Sekretariat Daerah	
	Sasaran :																
	1. Terevisidnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	75	77	167,411,472,698	79	112,403,682,399	80	1,772,078,367,341	81	1,543,208,413,489	82	1,551,079,244,563	82	Sekretariat Daerah
	Program :																
	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase (%)	82	2%	92,062,373,615	3%	71,159,913,537	5%	77,410,472,010	5%	119,481,630,541	5%	125,185,489,163	20%	Sekretariat DPRD
	2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	613,455,850	100	305,370,321	100	446,371,968	100	486,822,218	100	511,163,329	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	3. Program Pengkajian Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pengub APBD Provinsi serta SK Rencana Anggaran/Ranperda/Ranperbup/Ranperwal Kab/Kota dan Penyusunan Anggaran Tepat Waktu	Persentase (%)	100%	100%	6,030,875,474	100%	5,877,034,388	100%	1,634,947,954,543	100%	1,388,128,627,499	100%	1,389,553,216,617	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4. Program Pengkajian Bawang Miki Daerah		Persentase administrasi pengelidnan bawang miki daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Persentase (%)	100%	100%	1,666,679,154	100%	4,237,945,056	100%	5,842,165,100	100%	3,664,143,602	100%	3,847,350,782	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5. Program Pengkajian Arsip		Nilai Efektivitas Karsipnas	Nilai	67	70	210,903,300	71	152,969,711	61	170,329,148	62	37,476,448	63	950,000,000	63	Sekretariat Daerah
	6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	Persentase (%)	100%	100%	3,754,935,643	100%	575,705,076	100%	8,240,848,784	100%	5,561,454,662	100%	5,386,905,872	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
	7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase (%)	100%	100%	1,198,675,415	100%	1,631,013,717	100%	1,014,250,645	100%	897,059,160	100%	902,876,728	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pertukonolan dan Sumber Daya Alam			Persentase (%)	100%	100%	707,859,835	100%	395,476,272	100%	888,783,862	100%	605,640,162	100%	796,354,480	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kesejahteraan			Persentase (%)	100%	100%	1,346,323,633	100%	592,832,380	100%	1,440,440,380	100%	828,975,475	100%	834,007,528	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
	8. Program Kepegawaian Daerah		Indeks Merit Sistem	Indeks	N/A	0.52	2,088,658,690	0.63	9,860,034,704	0.61	4,109,550,976	0.80	6,399,965,314	0.81	6,399,965,314	0.81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
	9. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	Persentase (%)	100	100	36,804,894,403	100	1,555,906,318	100	16,395,945,624	100	5,482,707,114	100	5,482,707,114	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2019				2020		2021		2022		2023					
	REALISASI				Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang disediakan dalam rangka kepastian hukum	Persentase (%)	100	100%	5,694,443,356	100%	4,052,359,969	100%	4,541,017,574	100%	3,802,769,888	100%	4,266,987,636	100%	Sekretariat Daerah
	11. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	Nilai/Skor	15	11	535,000,000	2,0	430,485,640	2,2	1,893,481,635	2,4	2,226,585,227	2,6	1,850,000,000	2,6	Sekretariat Daerah
	12. Program Pematian Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	Persentase (%)	75	77	1,775,855,520	79	179,593,200	81	574,949,246	83	271,872,406	85.00%	285,466,026	85.00%	Sekretariat Daerah
	13. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	Indeks	70	75	9,051,430,046	80	8,508,818,671	85	7,742,061,400	90	2,016,673,950	95	511,646,000	95	Sekretariat Daerah
	14. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level APIP	Level	3	3	3,180,393,091	3	1,975,101,176	3	4,062,065,081	3	1,774,642,598	Level 3	2,711,256,332	Level 3	Inspektorat
	15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	510,394,472	3	564,439,598	3	1,956,396,465	3	1,099,848,465	Level 3	1,528,791,642	Level 3	Inspektorat
	16. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase (%)	50	54	269,421,198	65	348,781,765	76	401,381,900	87	441,518,760	100	75,060,000	100	Sekretariat Daerah
Sasaran :																
	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0.78	8.69	13,532,907,797	-24.21	15,087,984,744	5.13	17,784,511,876	5.54	17,858,594,072	6.24	4,025,790,853	6.24	Badan Pendapatan Daerah
Program :																
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	57.53	60.48	13,018,034,013	56.35	14,961,578,025	53.01	17,347,082,652	60.62	17,677,422,008	60,62%	3,954,038,853	60,62%	Badan Pendapatan Daerah
	2. Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	5	4.25	514,873,784	5.78	126,406,719	5	437,429,224	5.5	181,172,064	6	71,752,000	6	Sekretariat Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD akan menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali; serta
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang pasrtisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			897.095.177.312			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	685.134.338.069			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 dokumen	28.742.900			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	21 laporan	673.597.000.342			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Laporan BMD yang tersusun tepat waktu	2 dokumen 100 persen	100.000.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 persen	53.724.670			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	1.107.260.405			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	100 persen	2.203.984.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 persen	6.828.766.024			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 persen	1.214.859.728			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	100 persen 40.06 nilai	211.900.839.293			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Atas Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas	50 persen 43 angka	133.279.005.810			
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan	8 sekolah	61.485.124.128	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	20 Ruang kelas	9.045.458.304	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang akan diadakan dan siap digunakan	1 sekolah	4.841.775.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	82 sekolah	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	82 sekolah	57.746.647.928	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina	82 sekolah	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS dengan baik	82 sekolah	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Kejuruan Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	41 angka 47 persen	69.107.756.993			
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	3 sekolah	12.871.556.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan	2 sekolah	1.152.800.000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3 sekolah	603.000.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia	509 siswa	4.835.355.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas	53 sekolah	87.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	670 Guru	49.500.046.158	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina	53 sekolah	57.999.835	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa	43.77 persen 40 angka	9.514.076.490			
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	3 sekolah	1.589.824.884	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	jumlah ruang serba Guna/Aula yang di bangun dan siap digunakan	2 sekolah	987.783.360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang di Rehabilitasi dan siap digunakan	1 sekolah	165.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	6 sekolah	1.094.709.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	jumlah personil peserta didik pendidikan khusus yang tersedia	12 Sekolah	25.642.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu	12 sekolah	40.000.000		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan khusus	12 sekolah	5.550.517.306	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	14 sekolah	39.999.440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	14 sekolah	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	86.00 persen	59.999.950			
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dipindahkan sesuai kebutuhan Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	100 orang 62.89 persen	59.999.950			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			5.024.882.630			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	4.15 persen	249.999.930			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi Jumlah pemuda yang telah mengikuti program penyadaran, berprestasi dan berdaya saing	268 orang 268 orang	249.999.930			
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100 medali	4.274.882.700			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Jumlah kejuaraan Olahrag tingkat provinsi yang diselenggarakan	5 kegiatan 5 kegiatan	4.000.000.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	jumlah atlet yang berpartisipasi pada Kejuaraan Single event dan Multi event tingkat Nasional jumlah atlet yang meraih medali pada Single event dan Multi event tingkat Nasional	450 orang 1210 orang	49.883.040			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina melalui program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase organisasi olahraga yang berprestasi	52 organisasi 20 persen	224.999.660			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			500.000.000			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			500.000.000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.850.544.849			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.980.328.579			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 persen	2.453.385.589			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase adminitrasi umum perangkat daerah yang terlayani	100 persen	88.479.510			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	376.764.480			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 persen	61.699.000			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	35.82 persen 50 persen	870.216.270			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	85 sekolah	529.076.740			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA	88 Sekolah	508.292.140	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	270 Orang	20.784.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	53 sekolah	341.139.530			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK	55 Sekolah	320.455.270	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	270 Orang	20.684.260	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			27.770.870.323			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.469.082.207			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 persen	2.144.359.919			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	43.865.600			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 persen	225.858.688			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 persen	54.998.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51.37 persen	274.997.300			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	8 Kompetensi Dasar	224.998.050			
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah	1 dokumen	130.029.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	jumlah analisis dokumen awal muatan lokal pendidikan menengah	1 dokumen	50.209.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	50 orang	44.759.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang ditetapkan	6 Kompetensi Dasar	49.999.250			
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum Muatan lokal pendidikan khusus	80 orang	49.999.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Khusus
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	70 persen	25.026.790.816			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah tim penyuluh Bahasa Bali Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	687 orang 90 persen	25.026.790.816			
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah gaji penyuluh Bahasa Bali yang dibayarkan	667 orang	25.026.790.816	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Penyuluh Bahasa Bali
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			75.403.015.563			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	24.720.980.420			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	1.19 Persen	42.336.930			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	21.932.317.320			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	1.503.172.670			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 Persen	483.360.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	759.793.500			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85 persen	18.498.806.616			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase layanan UKP, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah sesuai standart	100 Persen	18.452.383.816			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan	2000 penduduk	36.054.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Presentase KLB Provinsi yang ditangani < 18 Jam	100 %	254.787.550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi	33 Fasyankes	65.185.650	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen	722.335.136	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN	1 Dokumen 75 FKTL	17.374.021.480	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e- Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77.77 Persenn	46.422.800			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan e- Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	7 Kabupaten/Kota	46.422.800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Kabupaten/Kota, Fasilitas Kesehatan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	60 persen	32.006.865.427			
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100 Persen	31.994.179.072			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1 Dokumen	31.994.179.072	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya, Tenaga Non Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	100 Persen	12.686.355			
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Aktif yang dibina di Fasyankes Pemerintah	100 %	12.686.355	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan dan Kesehatan Lainnya
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial	81 persen	32.363.100			
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat distribusi cabang farmasi dan rekomendasi izin cabang distribusi alat kesehatan yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	19.643.800			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan PAK Cabang yang Dibina dan Diawasi	30 Sarana	19.643.800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	PBF, PAK, Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat produksi UKOT yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	12.719.300			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah UKOT yang Dibina dan Diawasi	15 Sarana	12.719.300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	UKOT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,5 nilai	144.000.000			
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki rumah tangga ber PHBS > 80%	40 Persen	144.000.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	4 Jenis	144.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.240.251.031			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	6.085.212.131			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	3.943.142.031			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	157.140.400			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.722.411.200			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	262.518.500			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persen	155.038.900			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelatihan sesuai hasil TNA	100 Persen	155.038.900			
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase Peserta Pelatihan yang lulus sesuai hasil TNA	100 % 100 %	155.038.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan dan Kesehatan Lainnya

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			20.485.629.030			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	19.254.191.330			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	14.557.640.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	432.705.150			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 Persen	3.809.957.280			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 Persen	453.888.900			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan	81,5 persen	1.231.437.700			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar	100 Persen	1.231.437.700			
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	1 Unit kerja	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional mintenance center yang dikembangkan	2 kab/kota	200.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat dan bahan laboratorium kesehatan serta peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara	6 jenis	1.001.437.700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.113.661.837			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	3.997.302.637			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	2.370.943.287			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	85.892.590			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.321.771.360			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	218.695.400			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	3 persen	116.359.200			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3 Persen	116.359.200			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	728 Kunjungan	40.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional, Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah kunjungan pelayanan kesehatan tradisional	338 Kunjungan	76.359.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional, Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			192.077.496.881			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara	90 persen	192.077.496.881			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	58.098.114.817			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			419.600.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	48.390.816.064			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.966.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100 Persen	85.000.000.000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			136.847.339.636			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali	81,5 nilai	96.696.101.044			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	71.581.990.642			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.114.110.402			
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100 Persen	24.000.000.000			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	25791 kunjungan	24.000.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RS Jiwa Provinsi Bali
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ODGJ Berat Yang Dilayani	55 persen	40.151.238.592			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 Persen	40.151.238.592			
Pengembangan Rumah Sakit	Sarana, Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 tahun 1 tahun	40.151.238.592	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Rumah Sakit Jiwa, ODGJ
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			77.199.805.146			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara	81 persen	77.199.805.146			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	25.300.896.406			
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	99 Persen	51.898.908.740			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	99 Persen	51.898.908.740	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RS Mata Bali Mandara
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			10.844.092.115			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	9.838.323.515			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	2.655.782.303			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	724.716.700			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.978.999.000			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	4.084.771.712			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	394.053.800			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	95 persen	1.005.768.600			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar	70 Persen	500.000.000			
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah laporan ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi	11 dokumen	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	50 Persen	505.768.600			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase produksi obat dan bahan obat tradisional di P4TO sesuai kebutuhan	70 %	505.768.600	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.257.491.702			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	85 Nilai	2.808.777.586			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	2.014.802.214			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	155.246.280			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %	132.100.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100 %	506.629.092			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100 %	2.448.714.116			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	1 tahun	2.448.714.116			
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat	2 Paket	2.448.714.116	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			34.852.961.471			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	85 Nilai	1.505.775.583			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	1.505.775.583			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100 %	33.347.185.888			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	7 Layanan	33.347.185.888			
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional Yang dikelola dengan baik	5 SPAM	33.347.185.888	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			12.791.635.933			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	85 Nilai	1.643.537.533			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	1.643.537.533			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100 %	11.148.098.400			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik	1 SPALD	11.148.098.400			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Layanan Air Limbah/Sambungan Rumah (SR) pada SPALD Regional	15000 SR	11.148.098.400	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			305.555.052.751			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 nilai	26.052.939.421			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	17 Dokumen	837.099.511			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	21.173.395.176			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	144 orang	21.173.395.176	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	672.808.930			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	114.998.600			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	865.476.448			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	2.389.160.756			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	49 %	3.945.488.440			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	5 Prasarana SDA	255.588.400			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara Jumlah prasarana SDA yang dipelihara (Panjang Pantai) Jumlah prasarana SDA yang dipelihara (saluran pembuang)	4 Embung 118.09 Km 4362 m	255.588.400	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 DI	3.689.900.040			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	1 Dokumen	413.645.216	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditangani dengan rehabilitasi	6400 meter	259.807.828	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	14 DI	3.016.446.996	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	92 %	4.763.398.336			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM	4.763.398.336			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 paket	1.199.246.336	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan SPAM yang disusun sesuai ketentuan	3 paket	152.152.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	2 Paket	3.412.000.000	Kab. Buleleng, Gerokgak, Pengulon Kab. Buleleng, Busungbiu, Subuk Kab. Karangasem, Rendang, Besakih	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72 %	249.366.963.108			
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	27 bangunan	249.366.963.108			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan	4 paket	226.892.660	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen laporan supervisi pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	22 paket	6.010.308.668	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	27 paket	243.129.761.780	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	80.21 % 80.21 %	18.892.769.016			
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	743.34 Km	18.892.769.016			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	320.972.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Kabupaten yang Jumlah Jalan Provinsinya tersertifikat	4 Kabupaten/Kota	600.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan Leger Jalan yang dikelola	1 Dokumen	208.211.568	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	59.506.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran	743.34 Km	404.337.832	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	743.34 Km	14.490.600.101	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/Tanggap Darurat pada Jalan Provinsi yang ditangani	40 Kegiatan	2.749.503.723	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	18 Paket	59.636.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	16,51 %	1.301.489.382			
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	9 Kegiatan	436.365.777			
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	310 Orang 12 Kegiatan	436.365.777	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100 %	865.123.605			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	6 Kegiatan	865.123.605	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	94 %	1.232.005.048			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	2 Dokumen	662.288.032			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	3 Paket	662.288.032	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100 %	237.381.960			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	237.381.960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	5 dokumen	332.335.056			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	1 Dokumen	189.905.752	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	1 Dokumen	142.429.304	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.566.035.214			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi	70 %	1.043.108.826			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket	444.418.538			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai	1 Dokumen	17.430.750	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah susun yang terkelola dengan baik	1 Paket	426.987.788	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			598.690.288			
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	140 Unit	598.690.288	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan kumuh	45 %	522.926.388			
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	8,5 %	522.926.388			
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket	54.075.250	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang dibangun	3 Paket	442.694.688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Penyediaan PSU Permukiman	3 Buku	26.156.450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			124.885.000			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	40 %	124.885.000			
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	124.885.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	124.885.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			41.305.062.225			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5 nilai	23.533.315.943			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	13.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.694.985.919			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	282.386.200			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.074.927.376			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	1.468.016.448			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen	17.771.746.282			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	205 pelanggaran	17.550.171.418			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali Jumlah Obyek Sasaran Pengawasan yang dilaksanakan Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum	1080 Obs 600 Obs 205 Orang/ Badan Hukum	2.437.742.454	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat	2 Dokumen 100 orang 355 orang	37.476.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat	120 orang 120 orang	37.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4 Laporan dan Dokumen	37.476.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia Jumlah Tenaga Satpam yang handal	1 aplikasi 350 orang	14.999.999.620	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	320 kasus	221.574.864			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48 Obs	37.476.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat/Badan Hukum
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	320 Orang/ Badan Hukum	184.098.416	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat/Badan Hukum
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.608.328.954			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,93 Persen	10.608.328.954			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen	5.782.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	8.901.537.922			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	109.308.850			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	13.760.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	318.803.190			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.259.136.992			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.170.533.253			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,93 Persen	8.198.518.953			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	4.131.991.375			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	4.910.350			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	425.493.784			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	3.636.123.444			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100 Persen	1.972.014.300			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupatenn/Kota	426.624.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	9 Kabupaten/Kota	426.624.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			525.390.300			
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	9 Kabupaten/Kota	525.390.300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang	9 Kabupaten/Kota	1.020.000.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Bencana	tersedia dalam penanggulangan bencana					
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik dan tersusunnya peta evakuasi tsunami	9 Menara INA- TEWS	1.020.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			21.299.575.866			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	17.215.674.166			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	7 Dokumen	29.996.700			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1 layanan	14.297.123.826			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7 layanan	143.139.100			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 Layanan	371.247.040			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan	2.374.167.500			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8,22 persen	62.059.670			
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	27 Kelompok dunia Usaha	6.985.020			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	27 Klp. dunia usaha/LKS	6.985.020	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Kelompok dunia usaha
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57 TKSK	55.074.650			
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57 orang	55.074.650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17,91 persen	3.624.286.735			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta	1 layanan	231.999.655			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	100 Orang	31.999.755	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang disabilitas terlantar
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	199.999.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang disabilitas terlantar
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	3 layanan	26.203.555			
Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	40 COTA	26.203.555	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti swasta

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	3 layanan	66.705.455			
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	300 Orang	8.999.600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti swasta
Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	9 Paket	57.705.855	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan		Lanjut usia terlantar dalam panti swasta
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis	1 layanan	3.292.128.200			
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya Jumlah pembayaran perawatan pasien terlantar di RSJ Provinsi Bali	300 Orang 1 Tahun	3.292.128.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gelandangan dan pengemis
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			7.249.870			
Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS	25 orang	7.249.870	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	0	7.535.540			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Jumlah layanan pengelolaan data fakir miskin	2 layanan	7.535.540			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Daerah Provinsi						
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin	1 laporan	7.535.540	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fakir miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	260.019.755			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosial	2 layanan	260.019.755			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	629 orang	260.019.755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Korban bencana alam dan sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8,22 persen	130.000.000			
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN yang terpelihara	1 TMPN	130.000.000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			677.999.900			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98,75 persen	20.000.000			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan	2 layanan	20.000.000			
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik	15 orang	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perempuan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat	100 persen	657.999.900			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
(PHA)	Madya					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan bagi lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak	2 layanan	657.999.900			
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak	12 rekomendasi	657.999.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga penyedia layanan anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9.112.917.938			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	7.892.545.438			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan	1 layanan	5.872.352.618			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial	12 Bulan	5.872.352.618	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur perangkat daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6 layanan	123.765.100			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti	1 Tahun	14.955.100	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	15.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Tahun	85.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	5 jenis	3.810.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Perjalanan Dinas	60 kotak 20 orang/kali	5.000.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan	9.829.600			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	9.829.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 layanan	234.459.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	4 jenis	209.500.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi	100 Persen	24.959.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	3 layanan	1.652.139.120			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara jumlah tenaga pengemudi Tersedianya Bahan bakar minyak/gas untuk kelancaran	4 unit 5 unit 4 orang 1 tahun	203.837.144	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
	oprasional dan pelayanan kantor dan panti			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod		
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa tenaga keamanan Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti	8 orang 1 tahun	344.803.584	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	2. Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan prasaranan perangkat daerah
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor Jumlah tenaga administrasi, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Pengasuh Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun 29 orang 1 Tahun	1.103.498.392	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasaranan perangkat daerah
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17,91 persen	1.220.372.500			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	8 layanan	589.870.000			
Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70 orang	135.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pemberian makanan	70 orang	190.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang	70 orang	21.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	70 orang	5.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	70 orang	32.960.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	70 Orang	74.810.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70 orang	122.100.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70 orang	9.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	5 layanan	630.502.500			
Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130 orang	465.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringann dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	130 orang	10.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130 orang	117.502.500	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	130 orang	8.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti
Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	24 orang	30.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.688.318.267			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	3.680.338.267			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1 layanan	3.152.309.860			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	5 layanan	26.430.300			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 layanan	5.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah	3 layanan	496.598.107			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan	100 persen	7.980.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
	standar					
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	2 layanan	7.980.000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.741.231.714			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	5.616.081.214			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	1 Jenis	4.929.414.386			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 Jenis	31.306.200			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2 Jenis	211.374.092			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	443.986.536			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	30 persen	125.150.500			
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti latihan kerja	560 Orang	125.150.500			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.661.809.936			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	3.510.809.936			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	1 Jenis	3.191.600.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	6 Jenis	31.314.840			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	91.319.096			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	196.576.000			
PROGRAM PENGAWASAN	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di	100 Persen	151.000.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
KETENAGAKERJAAN	bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja					
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	100 Persen	151.000.000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			21.382.327.181			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	21.148.317.081			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	4 Jenis	17.772.344.169			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 Jenis	282.489.200			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	1.176.500.032			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	1.916.983.680			
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan diawasi dan dibina norma ketenagakerjaan	395 Perusahaan	55.000.000			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	11 MW	221.359.392			
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Kapasitas energi bersih dan energi baru terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	11 MW	221.359.392			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			374.858.688			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	100 Persen	212.429.344			
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber- KTP-el per satuan penduduk	99 Persen	212.429.344			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target 0-18 tahun mencapai target	100 Persen	162.429.344			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	77 Persen	162.429.344			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65 Nilai	15.632.733.537			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.06 Persen	290.710.044			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Kinerja Perangkat Daerah						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	13.030.019.729			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	352.926.760			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	9.140.000			
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen	733.536.076			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	1.216.400.928			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25 Desa	174.952.706			
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	3.93 Persen 7.86 Persen	174.952.706			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	66,98 Persen	854.129.984			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	71.7 Persen	854.129.984			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Mandiri	36.32 Persen	7.064.643.712			
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	80 Persen	7.064.643.712			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			480.057.499			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	7 Sektor	480.057.499			
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1350 Orang	480.057.499			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.649.009.115			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,99 Persen	13.249.951.485			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	45.069.750			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.282.805.286			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	7 Dokumen	269.667.775			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	1.200.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	633.948.082			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Dokumen	1.818.460.592			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0.78 Rasio	1.474.293.380			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	100 Persen	812.052.512			
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	75 Persen	50.000.000			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Abdiyasa yang dibina serta Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	1 Paket	612.240.868			
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25 persen	687.382.010			
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kajian Rencana induk Pelabuhan	1 Dokumen	687.382.010			
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50 persen	237.382.240			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penyusunan Studi Larap, FS, Amdal Jalur Keretaapi Sanur- Gunaksa dan Profil Perhubungan Provinsi Bali	4 Dokumen	237.382.240			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.242.290.432			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.904.908.192			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.719.983.456			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	57.827.340			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	42.422.148			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	84.675.248			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0.78 Rasio	337.382.240			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah simpang simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali	14 Simpang	337.382.240			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			5.612.528.739			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.945.853.643			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.530.947.267			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	39.305.240			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	38.100.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	337.501.136			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi Bali	75 persen	3.666.675.096			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP tersedia sesuai standar serta Paket Sarana dan Prasarana Trans SARBAGITA yang terpelihara	2 Dokumen	3.666.675.096			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.173.029.974			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.655.932.174			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.508.455.916			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	98.470.148			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	50 persen	517.097.800			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Paket	517.097.800			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.947.138.677			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.911.778.677			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.402.405.797			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	392.475.080			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	47.049.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1.500.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	68.348.800			
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25 persen	35.360.000			
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	jumlah operasional pelabuhan pengumpan regional	3 Pelabuhan	35.360.000			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			130.129.875.659			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	18.537.184.795			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 dokumen	31.023.910			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 dokumen	13.590.141.485			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan	742.554.000			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	3 paket	54.194.000			
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang dilaksanakan					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	401.135.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 unit	3.718.136.400			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81 indeks	17.178.435.400			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	79 indeks	17.178.435.400			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52 indeks	94.414.255.464			
Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem pemerintah berbasis elektronik	25 aplikasi	94.414.255.464			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			652.111.708			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang valid	100 persen	652.111.708			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisa dan diseminasi	11 sektor	652.111.708			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			602.151.826			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	80 persen	602.151.826			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	283.513.918			
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	318.637.908			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			16.696.592.311			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	15.302.587.195			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	3 Dokumen	80.630.016			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Kinerja Perangkat Daerah	kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	12.830.645.181			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik	6 Layanan	96.895.770			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan	1.335.111.200			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis	959.305.028			
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	83,33 Persen	266.464.240			
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	71 Koperasi	22.516.000			
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan	5 Koperasi	243.948.240			
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	78,89 Persen	118.552.896			
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	142 KSP/USP Koperasi	118.552.896			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,08 Persen	394.224.080			
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	126 Koperasi	394.224.080			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	0,12 Persen	614.763.900			
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	190 UMKM	614.763.900			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.850.252.128			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	1.775.299.232			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1.357.423.276			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	umlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 Layanan	4.416.220			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan	239.452.392			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis	174.007.344			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,25 Persen	74.952.896			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	50 Orang	74.952.896			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			22.658.293.554			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	21.584.015.698			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	46 Dokumen	18.578.758.831			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Persen	458.803.775			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1 Dokumen	114.223.200			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	3 Dokumen	1.536.222.652			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	2 Dokumen	896.007.240			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi/Penanaman Modal di Luar Sarbagita	15 Persen	324.748.896			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Kajian Peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	4 Dokumen	324.748.896			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	22.66 Persen	74.952.896			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Jumlah dokumen Promosi	2 Dokumen	74.952.896			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat	87,5 Persen	599.623.168			
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi	100 Persen	599.623.168			
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi sesuai Kebutuhan	100 Persen	74.952.896			
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	74.952.896			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			54.098.060.751			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	27.236.755.151			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 Dokumen	126.709.696			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen	22.277.153.419			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	763.066.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.524.414.700			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	2.545.411.336			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	18.507.803.586			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali	2500 Orang	2.062.180.678			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477 Orang/Lembaga	7.474.858.428			
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			8.970.764.480			
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen	5.773.849.154			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	518 lembaga/komunitas	5.773.849.154			
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen	492.271.620			
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina	119 Orang/Lembaga	492.271.620			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	2.087.381.240			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	5 Cagar Budaya	150.000.000			
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola	80 Objek	1.937.381.240			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.573.513.536			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	4.573.513.536			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	285.970.400			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	264.413.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	2.607.951.832			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	1.415.178.304			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.954.543.358			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	2.954.543.358			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	271.587.720			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	356.412.000			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.010.553.578			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.315.990.060			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.623.281.332			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	3.623.281.332			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.212.500			
Pengadaan Barang Milik Daerah			18.000.000			
Penunjang Urusan						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.724.068.944			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1.518.999.888			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			483.000.498.840			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	19.467.155.745			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	22.267.800			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses	52 Dokumen	9.224.258.024			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah yang diproses	4096 Dokumen	1.341.046.600			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	15 Unit	2.903.853.209			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah yang diadakan dan siap pakai					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	176 Unit	4.479.089.212			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	66 Unit	1.496.640.900			
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	463.533.343.095			
Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan pembinaan kelembagaan Desa Adat	6652 Dokumen	457.752.498.075			
Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	36 Dokumen	847.705.700			
Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Subak dan Subak Abian	2930 Dokumen 2930 Dokumen	914.533.000			
Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas	2330 Dokumen	4.018.606.320			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			207.381.950			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani Dengan Baik	52 Persentase	197.382.090			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	85 %	197.382.090			
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	21 Persentase	9.999.860			
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	25 Judul	9.999.860			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			24.620.119.825			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	24.455.666.479			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100 %	41.473.448			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100 %	23.006.836.475			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	258.815.800			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	21.620.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	387.002.724			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	739.918.032			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	61 Nilai	164.453.346			
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola	100 %	37.476.448			
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Kearsipan	20 %	126.976.898			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			13.601.256.707			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.863.299.047			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.189.299.561			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	145.389.410			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	2.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	119.365.076			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1.407.245.000			
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 kelompok	149.952.896			
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kesejahteraan petani garam	4 Kelompok	149.952.896			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	105.165,51 Ton	438.052.048			
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	1 Dokumen	438.052.048			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.981,2 Ton	37.476.448			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Data dan Informasi Sebaran Hama Penyakit Ikan	4 Kabupaten	37.476.448			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk perikanan bersertifikat	149 SKP	112.476.268			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan			112.476.268			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemasaran Skala Menengah dan Besar						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.126.097.117			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4.026.097.347			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.461.435.363			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 jenis	36.004.600			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya surat menyurat	12 bulan	81.400.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	4 buah	447.257.384			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			99.999.770			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			99.999.770			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.707.733.838			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.487.737.238			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.934.937.454			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.391.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.600.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			348.808.784			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4.950 Sampel	219.996.600			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			219.996.600			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.185.512.601			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.185.512.601			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.648.271.788			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.247.885			
Pengadaan Barang Milik Daerah			1.200.000			
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.400.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			490.392.928			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.226.440.618			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.226.440.618			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.019.497.882			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.281.060			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.560.780			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			139.100.896			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			16.033.289.677			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	14.007.242.348			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	119.711.704			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	534 Dokumen	12.587.132.632			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	87.428.825			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	7 Jenis	344.140.823			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	868.828.364			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Produk Pariwisata yang Kreatif dan Inovatif	50 Persen	574.721.070			
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	105 DTW	88.584.620			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	1 Dokumen	268.806.254			
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kewenangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan	3 Usaha Pariwisata	217.330.196			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	46.300.000 Rupiah.	587.684.991			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	2754700 Orang	587.684.991			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	0	345.669.254			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	9 Sarana dan Prasarana	195.552.806			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	9 Ekosistem	150.116.448			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	0	517.972.014			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	120 Orang 205 Orang	517.972.014			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.158.311.646			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian	3,73 Persen	252.360.688			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan,	18 kelompok	252.360.688			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.500 kkal/kapita/hari	547.207.024			
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Data Indikator FSVA, Jumlah Buku NBM	2 dokumen	207.386.640			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang di bina	3 unit	339.820.384			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	82 Persen	358.743.934			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji	20 sampel	358.743.934			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			63.295.194.408			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	56.620.464.671			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	619.134.520			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	51.953.083.364			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	4 Jenis	371.283.395			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	2 Jenis	602.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	3 Jenis	3.074.963.392			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen	5.173.750.861			
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	9 Kabupaten/Kota	375.050.142			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Perkebunan	80 %	2.314.382.971			
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Menerima Bibit Ternak dan Kelompok Yang Memahami Kualitas Pakan	42 Kelompok	2.484.317.748			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen	994.572.588			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penataan Prasarana Pertanian	1). Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana,Kawasan dan Komuditas Pertanian, 2). Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani serta 3). Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Kegiatan	994.572.588			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen	373.292.944			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Ternak/Hewan yang dieleminasi	52700 dosis/ekor	315.692.896			
Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2 kali	57.600.048			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	15 Persen	133.113.344			
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok tani	20 Kelompok	133.113.344			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			914.102.549			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	133.756.157			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 jenis	133.756.157			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Padi Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	5 Persen	780.346.392			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	3 jenis	780.346.392			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.636.784.328			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	187.635.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	187.635.000			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	5 persen	1.449.149.328			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kab/Kota	1.449.149.328			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.413.939.704			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	174.200.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	2 Jenis	174.200.000			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	5 Persen	1.239.739.704			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2 jenis	1.239.739.704			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.858.091.570			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	4.400.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jenis	4.400.000			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	1 Persen	2.853.691.570			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih	1 Jenis	1.667.391.740			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 Jenis	1.186.299.830			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.347.200.248			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	177.907.513			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	2 Jenis	177.907.513			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	5 persen	1.169.292.735			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	55 persen	1.169.292.735			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.289.016.707			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	60.200.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa komunikasi sumberdaya listrik air	2 Jenis	60.200.000			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik Yang Produktif	21 Persen	1.228.816.707			
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	1 kawasan	1.228.816.707			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.315.490.508			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	186.820.816			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH JENIS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2 Jenis	186.820.816			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Semen	81 Persen	1.128.669.692			
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	3 Jenis	1.128.669.692			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.086.968.120			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	218.775.296			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 jenis	218.775.296			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner	84.97 Nilai	868.192.824			
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi	10000 sampel	868.192.824			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				867.287.222		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	105.235.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	2 Jenis	105.235.000			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	3 Persen	762.052.222			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Registrasi	2 PSAT	762.052.222			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				802.670.182		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak	10 Persen	802.670.182			
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak danTanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Jenis	802.670.182			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				512.334.707		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	75 persen	212.429.240			
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen IKLH dan IKPLHD Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	2 dokumen 1 dokumen	212.429.240			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	4,87 persen	34.999.800			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 tahun	34.999.800			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	26,73 persen	264.905.667			
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	9 kab/kota	264.905.667			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			15.550.998.027			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	15.207.912.373			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen	40.827.720			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	11.473.344.957			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	624.427.430			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	341.654.104			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	557.643.032			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	2.170.015.130			
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,04 persen	155.609.496			
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun	155.609.496			
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4,83 persen	187.476.158			
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam DaerahKab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun	187.476.158			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			6.715.456.323			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	6.715.456.323			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	6.042.489.091			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	113.879.300			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	63.976.348			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	495.111.584			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			7.539.807.827			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	7.539.807.827			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	6.893.985.500			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	68.594.595			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	58.566.548			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	518.661.184			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			4.465.039.183			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	4.465.039.183			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	4.028.368.833			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	95.108.800			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	143.481.502			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	198.080.048			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			2.463.337.430			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	2.463.337.430			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	2.119.528.312			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	65.426.100			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	61.376.348			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	217.006.670			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			2.128.457.402			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	2.128.457.402			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	1.918.224.654			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	64.939.100			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	39.517.648			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	105.776.000			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			1.941.070.772			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	1.941.070.772			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	1.683.684.022			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	7.368.510			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	17.286.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	232.732.240			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.508.061.856			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	2.284.106.788			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	1.753.683.100			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	73.875.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	456.548.688			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 persen	4.223.955.068			
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	1 tahun	4.223.955.068			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			16.826.896.875			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2 Nilai	15.688.390.291			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	11.784.064.363			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	1.078.958.340			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	864.197.252			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan	1.961.170.336			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.07 Indeks	356.465.798			
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan	7000 Dokumen	356.465.798			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	2 Pasar	99.958.800			
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	8 Pasar	99.958.800			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	3 %	18.363.820			
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	1 Kegiatan 15 Pelaku Usaha	18.363.820			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	546.401.408			
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsumen yang dilindungi	100 %	496.401.448			
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk	49.999.960			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	00 % 30 %	117.316.758			
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan/menyediaka sandang lokal Bali	80 Toko	117.316.758			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.550.287.742			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	1.5 % 00 %	5.350.116.454			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	5.350.116.454			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 %	200.171.288			
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %	200.171.288			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.223.394.450			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2 Nilai	2.122.819.450			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	1.766.863.774			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	192.352.780			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan	53.506.448			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	110.096.448			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	1.5 % 00 %	100.575.000			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	100.575.000			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.157.907.602			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2 Nilai	2.050.437.754			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	1.808.898.038			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan	59.348.420			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	61.196.448			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	120.994.848			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	107.469.848			
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	55 Sertifikat	107.469.848			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH			7.677.057.173			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	82 persen	7.221.648.643			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	4 Dokumen	3.969.600			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	38 Pegawai	6.078.512.271			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			800.964.472			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	5 unit	338.202.300			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 persen	349.999.900			
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			99.999.950			
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			50.000.000			
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 laporan	199.999.950			
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku	70 Persen	105.408.630			
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			55.408.530			
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			50.000.100			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH			63.728.072.535			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	100 Persen	63.728.072.535			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	622.339.420			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	18.354.711.952			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	346.058.557			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.676.987.766			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	9.317.162.628			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	7.071.487.570			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	12 bulan	5.012.003.128			
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Dae	12 bulan	11.919.281.466			
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 bulan	469.974.800			
Fasilitasi Keprotokolan	Dokumen Fasilitasi Keprotokolan	12 bulan	1.938.065.248			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH			26.508.726.898			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77 nilai	7.897.469.795			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	398.686.932			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	5.947.070.588			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	750.118.675			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 paket	801.593.600			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	3,1 nilai/skor	1.169.983.807			
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2 dokumen	279.928.408			
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	502.626.490			
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	1 dokumen	387.428.909			
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	76 nilai	17.441.273.296			
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Dokumentasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 dokumen	6.849.715.526			
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	10.591.557.770			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH			12.264.965.433			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	8.462.195.545			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	4 Dokumen	5.208.500			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	37 Orang	7.303.677.377			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang diselesaikan	1 Tahun	93.696.500			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	83 Unit	1.059.613.168			
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	3.802.769.888			
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	393 Produk Hukum	1.748.481.856			
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	34 Bantuan Hukum	2.054.288.032			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH			7.060.141.874			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali	82 Persen	6.670.278.928			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Laporan	5.980.360.679			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13 Dokumen	15.409.415			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	142.753.290			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	531.755.544			
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	83 %	389.862.946			
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	83 %	164.896.348			
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	83 %	224.966.598			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH			16.552.049.018			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.161.822.868			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.633.985.598			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.826.697.270			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			701.140.000			
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.390.226.150			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.590.226.400			
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			199.999.910			
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			599.999.840			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DPRD			158.604.866.318			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	83.189.112.068			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	3 Dokumen	162.213.546			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terhimpun	12 Dokumen	10.263.226.426			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi umum yang terlaksana	6 Jenis	5.170.829.138			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	1 Jenis	119.655.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa penunjang kantor yang tersedia dalam setahun	3 Jenis	2.519.075.580			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	3 Jenis	3.919.418.996			
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana	3 Jenis	59.407.519.202			
Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	2 Jenis	1.627.174.180			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali	5 persen	75.415.754.250			
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan terhadap Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	14 Keputusan	8.678.304.300			
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah jenis pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	5 Jenis	4.428.883.940			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana	5 Jenis	15.778.735.564			
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	5 Jenis	10.775.481.008			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah jenis kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana	3 Jenis	26.871.819.430			
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan dan pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana	1 Jenis	493.084.496			
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis kegiatan dalam rangka fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	2 Jenis	8.389.445.512			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN			24.380.849.779			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	15.554.026.578			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	852 dokumen	300.181.172			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1686 dokumen	12.594.313.631			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Jenis	625.266.986			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 jenis	928.129.768			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	9 jenis	1.106.135.021			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	5.822.350.794			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen	3.197.432.160			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	761.917.542			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	6 Jenis	1.863.001.092			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	3.004.472.407			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12 Dokumen	1.075.821.545			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	9 dokumen	858.164.562			
Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	9 Dokumen	1.070.486.300			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Infrastruktur dan Wilayah	Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			1.210.181.023.520			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	19.043.772.616			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun	74 dokumen	31.381.270			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2252 dokumen	16.625.891.690			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu	7 dokumen	1.105.332.012			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1 jenis	852.505.012	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD disusun tepat waktu	4 dokumen	1.281.167.644			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan wak penyusunan Perda dan Pe APBD Provinsi serta SK Ev Ranperda/Ranperbup/Ra dan Penyerapan Anggaran Waktu	100 Persen	1.189.586.372.678			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	8 dokumen	2.744.360.392			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu	9 dokumen	287.855.450			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	246.936.050			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	4 dokumen	264.469.244			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	3 laporan	1.186.042.751.542			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100 Persen	1.550.878.226			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 laporan	1.550.878.226			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			6.027.017.233			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.643.136.513			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.539.524.516			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	5 dokumen	75.505.025			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	1.028.106.972			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100 Persen	2.383.880.720			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	2.383.880.720			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			82.942.731.911			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	80.766.204.781			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 %	20.621.700			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	72.811.105.592			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	2.359.833.725			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	2.069.710.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	653.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	2.851.933.764			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen	42.694.340			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100 %	42.694.340			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	2.133.832.790			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	100 %	2.133.832.790			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			9.535.534.851			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	6.312.864.803			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4.935.665.903			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	251.280.640			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	466.900.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	659.018.260			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	3.222.670.048			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	78 Nilai IKM	3.222.670.048			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			4.781.634.232			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	3.927.141.720			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.041.827.804			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	150.158.680			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	314.600.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	420.555.236			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	854.492.512			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	78 Nilai IKM	854.492.512			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			7.725.113.218			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	6.841.094.258			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	5.473.131.046			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	242.495.160			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	420.720.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	704.748.052			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	884.018.960			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	78 Nilai IKM	884.018.960			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
KEUANGAN			14.156.546.547			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	11.318.019.011			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	9.633.998.349			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	337.989.650			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	488.160.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	857.871.012			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	2.838.527.536			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	78 Nilai IKM	2.838.527.536			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			15.477.013.009			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	12.479.964.657			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	10.423.770.365			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	440.682.120			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	702.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	913.512.172			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	2.997.048.352			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	78 Nilai IKM	2.997.048.352			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			8.096.526.384			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	6.325.284.912			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4.874.198.100			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	233.283.940			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	430.900.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	786.902.872			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	1.771.241.472			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	78 Nilai IKM	1.771.241.472			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			5.386.120.613			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	4.389.809.413			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.495.834.793			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	160.723.240			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	271.500.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	461.751.380			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	996.311.200			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	78 Nilai IKM	996.311.200			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			5.973.031.780			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	5.153.920.716			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.494.236.838			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	288.196.810			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	339.400.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	1.032.087.068			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	819.111.064			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	78 Nilai IKM	819.111.064			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEUANGAN			5.601.663.714			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	4.828.707.650			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.921.056.416			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	218.873.850			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	280.300.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	408.477.384			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	772.956.064			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	78 Nilai IKM	772.956.064			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEPEGAWAIAN			15.970.174.268			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	13.328.651.554			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggar dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	13 dokumen	33.982.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	3 dokumen	10.365.918.161			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	6 jenis	607.641.240			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	2 jenis	48.135.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	3 jasa	1.281.938.205			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 pemeliharaan	991.036.948			
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,8 indeks	2.641.522.714			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 jenis	1.430.571.982			
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN	3 jenis	360.855.744			
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	4 jenis	273.731.344			
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah layanan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin Aparatur	4 jenis	576.363.644			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
KEPEGAWAIAN			2.679.315.168			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	2.293.119.368			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	3 laporan	1.969.222.512			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	2 administrasi	44.271.720			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	1 jasa	267.735.136			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 jenis	11.890.000			
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,8 indeks	386.195.800			
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	1 jenis	386.195.800			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			30.220.034.302			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15.744.802.246			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.999.750			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.942.110.056			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			224.134.440			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			213.908.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.469.372.512			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.878.277.488			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			14.475.232.056			
Pengembangan			1 176 978 304			
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			13.298.253.752			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			24.722.103.336			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	15.385.386.536			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	86.070.150			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	634 Dokumen	12.010.334.630			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	391.430.040			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 jenis	337.320.000			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	532.496.036			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2.027.735.680			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	75 persen	9.336.716.800			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	10 Dokumen	8.217.820.100			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	100 persen	745.000.000			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	100 persen	373.896.700			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PENGELOLAAN PENGHUBUNG			7.764.707.249			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	6.700.202.389			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	7 dokumen	4.877.200			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen administrasi keuangan	12 bulan	4.593.002.505			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	6 jenis	154.557.700			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	16 unit	23.610.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	1.049.692.636			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pemeliharaan BMD	3 jenis	874.462.348			
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Nilai	1.064.504.860			
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	jenis sub kegiatan pendukung indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	3 jenis	1.064.504.860			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH			27.462.267.274			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	23.510.352.081			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang	100 persen	24.999.750			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Kinerja Perangkat Daerah	tersusun tepat waktu					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 persen	20.233.120.126			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 persen	514.621.685			
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 persen	300.000.000			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 persen	590.857.588			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah						
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 persen	1.846.752.932			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	95 persen	2.599.991.228			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 persen	1.874.716.036			
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 persen	725.275.192			
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	90 persen	1.351.923.965			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengasawasan yang telah dilaksanakan	100 persen	591.971.224			
Pendampingan dan Asistensi	Persentasase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah telah dilaksanakan	100 persen	759.952.741			
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			22.430.358.877			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai evaluasi manajemen kinerja	83 nilai	10.029.278.757			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 dokumen	12.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70 dokumen	8.660.957.696			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerahh	100 %	269.365.045			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintah terealisasi	100 %	774.599.616			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah						
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	312.356.400			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			424.952.596			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi			424.952.596			

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran
		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi		
Pancasila dan Karakter Bangsa						
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78 persentase	11.328.522.836			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4 dokumen	11.328.522.836			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat	16,6% persentase	222.429.144			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	222.429.144			
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88 persentase	425.175.544			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 dokumen	425.175.544			
			4.760.200.427.351			

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6) sosial. Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	KESEHATAN			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	PEKERJAAN UMUM			
3.1	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
	kabupaten/kota.			
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	TRANTIBUMLIMNAS			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.
6	SOSIAL			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Bali Tahun 2022 menggunakan indikator kinerja makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali	75,69	76,44	0,99
2	Angka Kemiskinan	4,53	4,57	0,04
3	Angka Pengangguran	5,37	4,80	-0,57
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,46	4,48	7,30
5	PDRD Perkapita*	50,53	55,54	9,91
6	Ketimpangan Pendapatan	0,378	0,363	-0,015

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Pada tahun 2022, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 76,44 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,75 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,60 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,33 tahun, dari 9,06 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,39 tahun pada tahun 2022.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2022

tercatat sebesar 13,94 juta rupiah per tahun atau meningkat 122 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Kemiskinan, persentase penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebesar 4,53 persen. turun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebanyak 205,36 ribu orang, turun 0,32 ribu orang terhadap Maret 2022 dan turun 6,10 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 4,12 persen, turun 0,11 persen poin dari kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 5,58 persen, naik 0,19 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 5,39 persen. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2022 di daerah perkotaan turun sebanyak 2,24 ribu orang (dari 136,06 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 133,82 ribu orang pada September 2022). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di daerah perdesaan naik sebanyak 1,93 ribu orang (dari 69,62 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 71,55 ribu orang pada September 2022). Garis Kemiskinan di Bali pada September 2022 tercatat sebesar Rp515.037,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp357.640,- (69,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp157.398,- (30,56 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,29 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.209.509,-/rumah tangga miskin/bulan. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Pengangguran. Angkatan kerja pada Agustus 2022 tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 158,02 ribu orang dibandingkan Agustus 2021. Pada periode yang sama, TPAK juga mengalami kenaikan sebesar 3,32 persen poin menjadi 76,86% pada Agustus 2022. Pada Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,61 juta orang, meningkat 165,22 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat sebanyak 80,92 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,12 ribu orang. Sebanyak 1,21 juta orang (46,57%) bekerja pada kegiatan formal, meningkat 3,66 persen poin dibanding Agustus 2021. Pekerja di Bali pada Agustus 2022 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah dengan persentase sebesar 30,98% (807,73 ribu orang). Dibandingkan dengan Agustus 2021, persentase setengah pengangguran turun sebesar 4,60 persen poin menjadi 3,93%, sementara persentase pekerja paruh waktu sebesar 29,67 persen (turun 3,93 persen poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Agustus 2022 sebesar 4,80%, turun 0,57 persen poin

dibandingkan dengan Agustus 2021. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Badung sebesar 6,87%. Terdapat 151,21 ribu orang (4,24%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di Provinsi Bali pada Agustus 2022. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (7,32 ribu orang), menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (13,56 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (3,78 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (126,55 ribu orang). (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Pertumbuhan Ekonomi. Total perekonomian Bali pada triwulan III-2022 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 62,56 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 38,17 triliun. Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan III-2022 tercatat tumbuh sebesar 0,60 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan II-2022 (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) sebesar 9,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 88,41 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan III-2022 tercatat tumbuh sebesar 8,09 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 35,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 1.151,80 persen. Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2022 sampai dengan triwulan III- 2022, maka ekonomi Bali pada Januari-September 2022 tercatat tumbuh sebesar 4,19 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2022 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 18,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 53,71 persen. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Ketimpangan Pendapatan. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,363 dan turun 0,013 poin dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,375. Gini Ratio Bali di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,371. Capaian ini relatif sama dengan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,371 dan turun 0,008 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,379. Gini Ratio Bali di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,282. Capaian ini turun 0,012 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294 dan turun sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan kondisi

September 2021 yang tercatat sebesar 0,302. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran Bali pada September 2022 untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,81 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Bali pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,38 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Begitu juga untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,06 persen, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. (Sumber BPS Provinsi Bali)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	129	Data Dukung Pendidikan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Data Dukung Pendidikan
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Data Dukung Pendidikan
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14926	Data Dukung Pendidikan
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	23500	Data Dukung Pendidikan
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	6131	Data Dukung Pendidikan
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6704	Data Dukung Pendidikan
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	6131	Data Dukung Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6704	Data Dukung Pendidikan
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	22	Data Dukung Pendidikan
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	22	Data Dukung Pendidikan
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	2141	Data Dukung Pendidikan
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1686	Data Dukung Pendidikan
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1464	Data Dukung Pendidikan
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6255	Data Dukung Pendidikan
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	173	Data Dukung Pendidikan
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	166	Data Dukung Pendidikan
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	50	Data Dukung Pendidikan
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	31	Data Dukung Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	31	Data Dukung Pendidikan
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	237	Data Dukung Pendidikan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	14	Data Dukung Pendidikan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Data Dukung Pendidikan
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2239	Data Dukung Pendidikan
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	381	Data Dukung Pendidikan
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	369	Data Dukung Pendidikan
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	22	Data Dukung Pendidikan
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	156	Data Dukung Pendidikan
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	358	Data Dukung Pendidikan
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	16	Data Dukung Pendidikan
10	Urusan Pemerintahan	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan	29	Data Dukung Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	75	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	194	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	48618	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	13	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	1	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	129038	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	25	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	1	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	305,55	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	215,82	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	112,8	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	100	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	100	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	3485	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	50057	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	84793	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	140167	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	66,67	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	
5	Urusan Pemerintahan	Pekerjaan Umum dan	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM	5	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Penataan Ruang	dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah SPALD Regional	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total kapasitas SPALD Regional	51000	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	33462,15	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	2	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	743,34	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yg dibangun	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	6,753	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	743,34	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	3367,7	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	3	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1491	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	806	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang	1	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	806	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	27581	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	187	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	187	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	83375	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	81	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	187	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	81	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	187	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	158,68	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	81	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Data Dukung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	4	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	9877	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	42	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	22	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	2	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	3	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	2	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	0	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	2882	Bukti dukung IKK output BPBD dan Satpol PP
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	161	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	9	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	0	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	21	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	0	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			keluarga		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	585	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	43	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	82	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	20	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	43	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	43	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	0	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan	43	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			kesehatan dasar		
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	5	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	4	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	110	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	16	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	10	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	13	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	2	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	102	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	5	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	102	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga	313	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	2	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	26	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam	0	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Pelayanan Dasar		panti		
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	12658	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	12132	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	12024	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	649	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	-19,6	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	88,67	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	4,076	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penganggur yang dilatih	0,28	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	17,93	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan.	58,69	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	62,85	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total.	1393,81	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	1,7	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	45,86	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	218,033	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	46,33	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	125,23	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	0,428	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,537	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	2	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan hak	40	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	2	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan PHK	64	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1259	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	20	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	9	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	2516971	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	56,481	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	3734	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	14140	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	84	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	7	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	3734	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	100	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja	87	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.		
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	0	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	12	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	562	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	792	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	230	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	230	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	230	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	1	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	20098	Data Dukung Urusan Tenaga Kerja
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	15	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	1	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	20	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	5	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	2	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	93,44	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	30	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh	1	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Pelayanan Dasar	Anak	Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	67	data bukti dukung lppd tahun 2022
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	8	data bukti dukung lppd tahun 2022
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	0	data bukti dukung lppd tahun 2022
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	10	data bukti dukung lppd tahun 2022
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1	data bukti dukung lppd tahun 2022
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1	data bukti dukung lppd tahun 2022
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1	data bukti dukung lppd tahun 2022
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1	data bukti dukung lppd tahun 2022
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0	data bukti dukung lppd tahun 2022
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	63	data bukti dukung lppd tahun 2022
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Berkaitan Pelayanan Dasar				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0	
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	53,5	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,19	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	43,36	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	29	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	1	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	1493	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	2	Data pendukung IKK Output Lingkungan Hidup
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	Data dukung IKK Output Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	34	Data Dukung IKK Output Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	28	Data Dukung IKK Output Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5201	Data Dukung IKK Output Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	9	Data Dukung IKK Output Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,4	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	15,5	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Pelayanan Dasar				keluarga berencana
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	77,6	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	13	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	22,97	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43,26	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	78,17	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	42,46	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	56,95	Data Dukung IKK Output urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0	Data dukung LPPD IKK output 2.i.1 sampai 2.i.2
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah	82,05	Data dukung LPPD IKK output 2.i.1 sampai 2.i.2

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	52,93	Data dukung LPPD IKK output 2.i.1 sampai 2.i.2
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,22	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97,22	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	50	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	90,244	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam	90,244	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
	Pelayanan Dasar		dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	38,462	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	97,22	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	97,22	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	210	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10,86	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	81,97	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	71,57	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,23	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	60,06	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	6,39	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,64	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	16,61	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8,63	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,4	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	2,4	Terdapat data dukung yang belum berisi petunjuk IKK mana yang dibuktikan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	1	data dukung lppd tahun 2022
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	data dukung lppd tahun 2022
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	data dukung lppd tahun 2022
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	data dukung lppd tahun 2022
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	1	data dukung lppd tahun 2022

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2	data dukung lppd tahun 2022
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	10478	data dukung lppd tahun 2022
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	9943	data dukung lppd tahun 2022
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	-33,1	data dukung lppd tahun 2022
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	40	data dukung lppd tahun 2022
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	774	data dukung lppd tahun 2022
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	9943	data dukung lppd tahun 2022
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	file pendukung pemuda dan olahraga
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	file pendukung pemuda dan olahraga
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	file pendukung pemuda dan olahraga
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	file pendukung pemuda dan olahraga

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	72	file pendukung pemuda dan olahraga
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	25	file pendukung pemuda dan olahraga
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	file pendukung pemuda dan olahraga
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	7303	file pendukung pemuda dan olahraga
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	file pendukung pemuda dan olahraga
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	11	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	11	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	31,372	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	20261	Pendukung IKK
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	30	Pendukung IKK
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	13995	Pendukung IKK
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas	6198	Pendukung IKK

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			tata kelola)		
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	3304	Pendukung IKK
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	58860	Pendukung IKK
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Pendukung IKK
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	707	Pendukung IKK
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2093	Pendukung IKK
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	28708	Pendukung IKK
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	700	Pendukung IKK
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	700	Pendukung IKK
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	13	Pendukung IKK
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	Pendukung IKK

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	12	Pendukung IKK
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	75	Pendukung IKK
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	180	Pendukung IKK
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	4	Pendukung IKK
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7	Pendukung IKK
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,95826	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,09	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,003	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7,542	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	435	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	337	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	10	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	267	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	25	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	162	data dukung LPPD Perpustakaan tahun 2022
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	79,48	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	45,2	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100	
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	2	
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	4	
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	50	
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	48	
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kapal yang terdaftar	223	
6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0	
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	73,57	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	2	
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	0	
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	0	
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	0	
6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	0	
7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	37	
8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	27	
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	477	
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	101	
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	0	
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	0	
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	8013	
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	Rata-rata lama tinggal	2,54	

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
			wisatawan mancanegara		
7	Urusan Pilihan	Pariwisata	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,805	
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1778471	
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	8052974	
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	8	
11	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	
12	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	
13	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	61,4	
14	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	
15	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	9	
1	Urusan Pilihan	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	271	data pendukung IKK pertanian
2	Urusan Pilihan	Pertanian	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	52	data pendukung IKK pertanian
3	Urusan Pilihan	Pertanian	Dokumen pengawasan benih yang beredar	1	data pendukung IKK pertanian
4	Urusan Pilihan	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	153	data pendukung IKK pertanian
5	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	188028646	data pendukung IKK pertanian
6	Urusan Pilihan	Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	196471	data pendukung IKK pertanian
7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	1	data pendukung IKK pertanian
8	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan	100	data pendukung IKK pertanian
9	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	data pendukung IKK pertanian
10	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	0	data pendukung IKK pertanian
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	4	Data pendukung IKK Output Kehutanan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	4	Data pendukung IKK Output Kehutanan
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	21671,1	Data pendukung IKK Output Kehutanan
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0	Data pendukung IKK Output Kehutanan
5	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0	Data pendukung IKK Output Kehutanan
6	Urusan Pilihan	Kehutanan	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	87,5	Data pendukung IKK Output Kehutanan
7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	100	Data pendukung IKK Output Kehutanan
8	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	16	Data pendukung IKK Output Kehutanan
9	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	25,45	Data pendukung IKK Output Kehutanan
10	Urusan Pilihan	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	1	Data pendukung IKK Output Kehutanan
11	Urusan Pilihan	Kehutanan	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	25	Data pendukung IKK Output Kehutanan
12	Urusan Pilihan	Kehutanan	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	20	Data pendukung IKK Output Kehutanan
13	Urusan Pilihan	Kehutanan	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	3	Data pendukung IKK Output Kehutanan
14	Urusan Pilihan	Kehutanan	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	16	Data pendukung IKK Output Kehutanan
15	Urusan Pilihan	Kehutanan	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0,711	Data pendukung IKK Output Kehutanan
16	Urusan Pilihan	Kehutanan	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1	Data pendukung IKK Output Kehutanan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
4	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
5	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
6	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
7	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	2	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait IUJP	2	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
9	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
10	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
12	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
14	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	153	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
15	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
16	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
17	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	52	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
18	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0	Untuk data yang tidak tersedia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan dan pada data dukung IKK Output no.14 kami lampirkan Tabel Rekapitulasi (hasil akhir penjumlahan kedua rek
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	1	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	18	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	114	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	3	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Indeks Kinerja BPSMB	2	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	96	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah barang beredar yang diawasi	15	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1c	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1d	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,7	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERDAGANGAN
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	22,2	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERINDUSTRIAN
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERINDUSTRIAN
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERINDUSTRIAN
3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERINDUSTRIAN
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	24,07	DATA DUKUNG IKK OUTPUT PERINDUSTRIAN
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Untuk Data Dukung ketiga IKK Output urusan pilihan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kami lampirkan dalam

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)					
No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
					bentuk Surat Pernyataan.
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Untuk Data Dukung ketiga IKK Output urusan pilihan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan.
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0	Untuk Data Dukung ketiga IKK Output urusan pilihan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kami lampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 142014. Jumlah anak usia 16 (enam	73,99646	data diambil dari sumber buku profil pendidikan tahun 2022

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan = 191920		
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 1847. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 2748	67,21252	data diambil dari sumber buku profil pendidikan tahun 2022
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 8345. Jumlah Penduduk provinsi = 4287193	1,946495	
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 74. Jumlah RS provinsi = 74	62,16216	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 4380824. Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 4380824	100	
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 49532. Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 49532	100	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
1.c.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 305.55	100	Data luas kawasan permukiman rawan banjir masih sama seperti tahun lalu. Untuk studi terkait data luas permukiman tersebut tidak ada yang ada data luasan genangan dan panjang penangan infrastruktur pengendali banjir
1.c.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 114.83. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 215.82	56,59346	
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha) di tahun eksisting = 6808. Luas	73,43329	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					daerah irigasi kewenangan provinsi = 9271		
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota = 352. Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. = 620	56,77419	
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional = 33462. Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional = 51000	65,61176	
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap = 591.34. Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 743.34	79,55175	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
		Masyarakat			2. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 9		(PKD) di Kabupaten Bdg dan Kabupaten Karangasem
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 9. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 9	100	Laporan Akhir Sub Kegiatan Response Cepat Penanganan Darurat Bencana
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 161. Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 16820	100	
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 585. Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi	100	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					sosial dasar di dalam panti = 37585		
1.f.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 110. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 40696	100	
1.f.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 0. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 292	0	
1.f.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 12658. Populasi korban bencana alam dan sosial di	100	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 12658		
2.a.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja = 9. Jumlah kabupaten/kota = 9	100	yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan (dibuktikan dengan dokumen pendukung t
2.a.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 194178. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 2607070	7,448131	Jumlah tenaga kerja yg memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan rekapan peserta yg lulus uji kompetensi pada tahun 2010-2022. Data jumlah tenaga kerja keseluruhan berdasarkan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
							data BPS Provinsi Bali.
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 38169946.97. Jumlah tenaga kerja = 2607070	1464,094	Data Dukung berdasarkan data BPS Provinsi Bali
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 25168. Jumlah Perusahaan = 20098	100	data jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah berdasarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 16604. Jumlah pencaker yang terdaftar = 23361	71,07572	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
2.a.5	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun $n = 1596$. Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun $n = 20098$	7,941089	perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan adalah data perusahaan yang menerapkan norma kerja, kebebasan berserika, menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma waktu kerja dan waktu istirahat
2.b.1	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempua n dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 11100100. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 6102490842762	3,769791	
2.b.2	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempua n dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi = 198. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 1255000	10000	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
2.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 186. Jumlah penduduk perempuan = 2195500	8,471874	
2.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi = 0. Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan = 429	269,2308	data persentase cadangan pangan provinsi bali
2.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibandingkan dengan luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0	0	
2.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu = 0. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum = 0	0	
2.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan	0	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					peruntukkann ya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/ kota = 0. Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 0		
2.e.1	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkunga n Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		70,89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali 70,89
2.e.2	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkunga n Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhada p izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 0. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 6	0	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, 0 dari 6 perusahaan yang dilakukan pemeriksaaan
2.f.1. 1	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administra si Kependud ukan dan Pencatata n Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependuduka n skala Provinsi dalam 1 tahun = 2. 2 kali = 2	100	
2.f.1. 2	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administra si Kependud ukan dan Pencatata n Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	PD Provinsi yang telah memanfaatka n data kependuduka n berdasarkan perjanjian kerjasama =	19,35484	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					6. Kabupaten/Kota = 31		
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 0	0	Provinsi Bali mulai tahun 2018-2022 sudah tidak terdapat status Desa Tertinggal sesuai dengan data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2022
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 65	0	Belum terdapat desa berkembang yang memenuhi desa mandiri per tahun berjalan berdasarkan Data Indeks Desa Membangun
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,98	
2.h.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 321679. Jumlah Pasangan Usia Subur = 560737	57,36718	
2.h.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 107370. Jumlah Pasangan	17,87317	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					Usia Subur = 600733		
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi		0,797	
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,51	
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 35. Jumlah PD = 36	97,22222	
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 39. Jumlah Layanan Publik = 39	100	
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi = 2790191. Jumlah	65,33598	Data jumlah penduduk usia produktif untuk tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					penduduk = 4279129		
2.k.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 1869. Jumlah seluruh koperasi = 4260	43,87324	
2.k.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha = 11268. Jumlah usaha kecil keseluruhan = 42902	26,26451	
2.l	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di provinsi = -4291354393034. Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 12953960683117	-3,867623	Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2022 s/d TW III
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 443377. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 989618	44,80284	Data Pemuda Tahun 2022

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
2.m.2	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemuda an dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi = 923527. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 989618	93,32156	Data Pemuda Tahun 2022
2.m.3	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemuda an dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		56	daftar perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional tahun 2022
2.n.1	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 36. jumlah PD = 36	100	
2.n.2	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 36. jumlah PD = 36	100	
2.o	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 546. Jumlah area penilaian = 645	84,65116	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
2.p	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 3366. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan = 3366	100	sampai dengan tahun 2022
2.q.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		65,59	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat yang dilakukan oleh PERPUSNAS RI
2.q.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		70,88	Dari Hasil kajian IPLM yang dilakukan oleh PERPUSNAS RI, Nilai IPLM untuk Bali adalah 70.88
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		81,17	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		83,33	
3.a.1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi = 133667.74. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 124147.71	107,6683	
3.a.2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		0	
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah wisatawan tahun n-1) = 1778420. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 51	3487098	
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	(Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah	87,20915	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
			nusantara yang datang ke provinsi	nusantara yang datang ke provinsi	wisatawan tahun n-1) = 3751382. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 4301592		
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 7431405. Jumlah kamar yang tersedia = 30062874	24,71954	
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 31710000000 000. Total PDRB Berlaku = 1.2321E+14	25,73655	
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 782126. luas panen = 132944	588,3124	data produktivitas padi bersarkan data ASEM tahun 2022
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasu stahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 457. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 233	196,1373	data penyakit hewan menular tahun 2023
3.d.1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan	100	Jumlah KTH yang diberikan akses legal 120 KTH,

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
			pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	akses legal = 120. jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 120		dari total KTH yang terintegrasi 120 KTH.
3.d.2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak = 0. Jumlah hutan keseluruhan = 136827.05	0	Luas hutan yang rusak 0 dari luas hutan keseluruhan 136.827,05 Ha
3.d.3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) = 1600. Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) = 32770.12	4,882497	Luas lahan kritis yang direhabilitasi 1.600 Ha dari Luas Lahan Kritis 32.770,12 Ha
3.e.1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda = 20. jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi = 20	100	Rekapitulasi data pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang. Rekapitulasi data pemegang IUP OP yang masih berlaku : 20 pemegang IUP OP yang menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang
3.e.2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik = 716. Jumlah desa = 716	100	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 27191314.38. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 330970792.73	8,215624	Pertumbuhan ekspor non migas Provinsi Bali
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan = 18. Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan = 18	100	Rekapitulasi pengaduan yang ditangani tahun 2022
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan = 84. Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun = 84	100	Yang dimaksud dengan jumlah sampel sesuai dengan ketentuan adalah jumlah sampel dengan komoditi Kopi, Panili dan Kakao sesuai dengan ruang lingkup akreditasi Laboratorium UPTD.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
							BPSMB Disperindag Provinsi Bali
3.f.4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Tertib Usaha	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB = 22. Jumlah pelaku usaha MB TBB = 22	0	Rekap Rekomendasi Distributor SKMB 2022
3.f.5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 64239086. RDKK = 203499875	31,56714	Daftar Realisasi dan RDKK
3.f.6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 15. Jumlah barang beredar yang diawasi = 15	100	jumlah barang beredar yang diawasi
3.f.7	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		122	Laporan harga harian harga eceran rata-rata bahan pokok dan barang penting dan barang strategis di Denpasar
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1) = 0. Jumlah industri besar tahun n-1 = 65	0	jumlah industri besar tahun 2022 dan jumlah industri besar tahun 2021

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		1,59	Pertumbuhan IKM tahun 2022
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 270. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Jumlah IUI yang dipantau
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Surat Keterangan
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Surat Keterangan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
			dikeluarkan oleh instansi terkait	yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		16650	data informasi industri terkini
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi				0	Karena IKK outcome tidak tersedia pada sistem, kami lampirkan data dukung ikk output

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 836721641816.72. Jumlah APBD = 6741065092325	12,41231	
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Rasio PAD	Jumlah PAD = 3850887413337.4. Jumlah Pendapatan pada APBD = 5873474539905.5	65,56404	
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures =	50,80379	

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
			expenditures)		34247162523 67.2. jumlah belanja APBD = 6741065092325		
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		100	Opini Laporan Keuangan WTP dari BPK RI dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,42	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4.i.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.&nb bsp; yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.&nb sp; yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 40	0	Tidak ada pekerjaan insfrastruktur di atas 50M yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari s.d Maret)
4.i.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 12450. Jumlah pengadaan yang dilakukan	65,36069	Sumber : Laporan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
					tanpa metode kompetitif = 264		
4.i.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 3.978. total belanja operasi dan modal = 5.875	67,70211	Sumber : DPA Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
4.i.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	-	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 924.036. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 613.813	150,5403	Sumber : Analisa Data RUP pada SiRUP Tahun 2021 dan 2022
4.j.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 3256. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke	294,1283	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
			kesehatan)		bawah = 1107		kesehatan)
4.j.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 1100. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 4363	25,21201	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
4.j.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 451. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1100	41	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
4.k.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 67410650923 25. Total Belanja APBD = 75418215224 61	10,61755	
4.k.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 38508874133 37.4. Total PAD dalam APBD = 34941154185 72	10,21065	
4.k.3	Fungsi Penunjang	Manajemen Keuangan	Assets management	Assets management		100	Ada semua

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
	Urusan Pemerintahan						
4.k.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 85029634346 8.62. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 62706672176 46.3	13,5599	
4.l.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 36. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 36	96,99532	
4.l.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	100	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Bali pada masa mendatang masih menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perhatian pemerintah, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Bali beserta Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan taktis strategis, juga untuk

menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun anggaran dan RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sasaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebagai Laporan pencapaian sasaran Strategis Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan pencapaian Sasaran Strategis berupa analisis hasil Pengukuran pencapaian sasaran serta rangkuman hasil kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana telah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. LKjIP Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 2019;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 2022
- Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 adalah :

- 1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022;
- 2. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022;

C. Isu Strategis Provinsi Bali

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Enam isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, *sustainability*/keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.

Gambar 1.1 Isu Strategis Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023

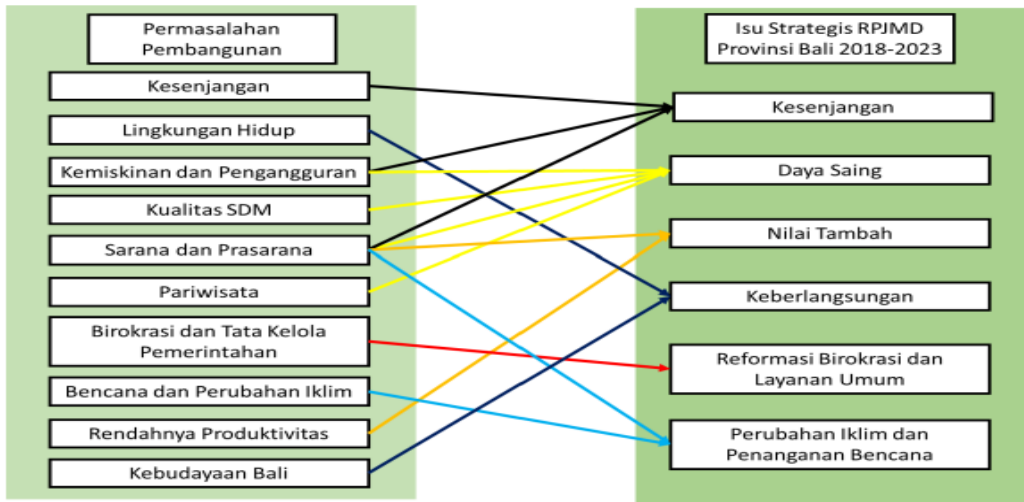


Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar isu strategis, terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Empat isu strategis yang dimaksud yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan keberlangsungan (*sustainability*). Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (*Targetted, Holistic, Integrated, dan Spatial*). Dalam hal ini, *targetted* berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. *Holistic* dan *integrated* berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *spatial* berarti adanya detail lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis

tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani, dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor eksternal yaitu kondisi geografis Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.

Gambar 1.2 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu Strategis Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023



Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Enam isu strategis tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, serta sarana dan prasarana sangat terkait dengan isu strategis kesenjangan. Sedangkan isu strategis daya saing terkait dengan permasalahan pembangunan kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta pariwisata. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta rendahnya produktivitas terkait dengan isu strategis nilai tambah. Permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Bali terkait erat dengan isu strategis keberlangsungan. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang menjadi permasalahan pembangunan sangat terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta bencana dan perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana.

Isu strategis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, namun berkaitan juga dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Permasalahan yang dimaksud yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Isu strategis keberlangsungan sangat terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana erat kaitannya dengan permasalahan alam Bali. Sedangkan isu strategis daya saing sangat terkait dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis nilai tambah terkait dengan permasalahan

manusia dan kebudayaan Bali. Isu strategis kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis yang terakhir yaitu reformasi birokrasi dan layanan umum terkait dengan isu strategis yang lainnya dan terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Enam isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya telah sinkron dengan lima prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali. Lima prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, yaitu (1) pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, (4) menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, (5) peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas. Keterkaitan isu strategis dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

ISU STRATEGIS	LINGKUP	PRIORITAS	PENDUKUNG
Kesenjangan	• Antar Wilayah (utara vs selatan) • Antar Sektor (pariwisata vs pertanian)	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar • pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Nilai Tambah & Produktivitas	• Produktivitas produksi, budaya dan lahan	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Daya Saing	• Destinasi & atraksi wisata • Produk lokal (<i>Made in Bali</i>) • Sumber Daya Manusia • Investasi	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar	• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Sustainability/ Keberlangsungan	• Daya Dukung Lingkungan • Ketahanan Budaya • Kualitas Sumber Daya Manusia	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum	• Reformasi Birokrasi • Administrasi Publik • Tata Kelola • Ketertiban	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas	
Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana	• Mitigasi dampak perubahan iklim • Penataan lingkungan • Kebencanaan	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • peningkatan pelayanan dasar

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Provinsi Bali Tahun 2022 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018. Visi “***Nangun Sad Kerthi Loka Bali***” dengan 22 misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi

penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip:

1. Pembangunan yang mengandung dimensi *sekala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat Holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali;
3. Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota, bukan membangun di Kabupaten/Kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Membangun Kabupaten/Kota artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung;
5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan bersifat Kultural. Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarkhi dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;
7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali. Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan

kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin* Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.

12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bal

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan Dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai bagi Kehidupan Krama Bali	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan Kualitas yang layak	Tingkat Infasi Bali	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	Ketersediaan Pangan Utama
2	Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTTP)
				Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan pertanian krama bali	Nilai Tukar Petani (NTP)
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)
3	Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas serta didukung dengan pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali berbasis Kecataman	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya Standar kualitas Pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
4	Memastikan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Terwujudnya Wajib belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18
				Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah
5	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas, Bermutu, Profesuonal dan Bermoral serta memiliki Jatidiri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	Terwujudnya Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Provinsi Bali
6	Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Lahir, Tumbuh dan berkembang sampai akhir masa Kehidupannya	Terwujudnya Kesejahteraan sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
7	Menghasilkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kompetensi tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
8	Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan Luar Negeri Secara Bersinergi antar Kota/Kabupaten Se- Bali dengan mengembangkan Kreatifitas Inovasi	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di Pasar Domestik dan Global	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata
9	Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan secara Komprehensif	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepariwisataan	indeks kepuasan wisatawan	Meningkatnya kualitas kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara
10	Membangun dan mengembangk-an pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kab/Kota Bali dengan memberdaya-kan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi bali	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA DAN PMDN diluar wiayah SARBAGITA
11	Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali	Berkembang-nya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		
12	Mmeningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat,Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas		
13	Mengembang-kan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka kriminalitas

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
14	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada
15	Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
					Indeks kualitas udara
					Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)
					Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
16	Mengembang-kan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif,terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Eksternal Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Bali, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem pembiayaan *cost sharing* dengan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara konsisten.
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pengawasan program-program pembangunan.
4. Mengembangkan instrumen regulasi yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
5. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
6. Melaksanakan advokasi ke pemerintah pusat untuk kemungkinan mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan

pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Indikator Makro Tahun 2022

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 :

No.	Indikator Makro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Penduduk	4,2 Juta	4,30 juta	4,32 juta	4,32 juta	4,29 Juta	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,63	-9,31	4,52	4,19	
3.	PDRB Perkapita (ADHK)	34 juta	36 juta	32 juta	36 juta	38,17 juta	
4.	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	50 juta	58 juta	51 juta	51 Juta	50,8	
5.	Inflasi	3,13	1,57	0,8	1,09	5,39	
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	3.91	3,79	4,45	4,71	4,57	
7.	Jumlah Penduduk Miskin	171,76	163,85	165,19	201.97	205.68	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,4	1,57	5,63	5,37	4,80	
9.	Gini Ratio	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	
10.	IPM	74,46	74,77	75,50	75,69	76,44	
11.	Investasi	5,57 juta	22.343.296	n/a	21.15	23,52	
12.	Jumlah Ekspor	n/a	US\$ 59	US\$ 41	110	347,26	

Sumber : BPS Provinsi Bali & SIPD Provinsi Bali (Data diolah B. Organisasi 2022)

D. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada umumnya sering disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2022, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 secara rinci disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah). Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek, fokus, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Provinsi Bali berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2022
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	33
3	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105.5
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	118.5
4	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,5
5	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10.84
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	83.11
6	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.91
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	76.93
8	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	69.09
9	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	4.25
10	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	3.19
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.55
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73.98
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	20.86
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	2.642.000
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	83
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	3.10
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12.5
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,4
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	2,731
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	81
		Indeks Pemberdayaan gender	64.9
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,64
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.77
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	14.8
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.2
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	74

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2022.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penetapan target kinerja atas program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: *input*, *output*, dan *outcome*. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 disetujui dan ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input*, *output*, maupun *outcome*. Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Bali, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, akan berusaha dilakukan, hal ini terkendala dari keterbatasan data yang dimiliki. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian *output* dengan capaian *input*. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran secara umum adalah termasuk kategori efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang belum efisien, ketidak efisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan antara lain:

- Kelemahan dalam penetapan target pada indikator output, yang terlalu tinggi.
- Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun realisasi fisik kegiatan masih kurang dari yang ditargetkan.
- Kegiatan tidak optimal terealisasi karena pengesahan DPA perubahan baru turun pada bulan Nopember 2022.
- Pembatalan pembangunan fisik.
- Gagal tender dan tender ulang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang belum efisien ini, akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, sehingga kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih efisien, antara lain :

- Percepatan proses pengadaan barang/jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- Menyusun rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2022 baik itu bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan yang terintegrasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun Anggaran 2022.
- Mencermati kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun 2022, bila terdapat kesalahan baik substansi kegiatan maupun kode rekening agar segera direvisi.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut. Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

- a) Efektivitas individual kegiatan; Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

- b) Efektivitas terkait sasaran. Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1. Kegiatan Yang Efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome* minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2. Kegiatan Yang Kurang Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator *outcome*-nya di bawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung. Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/ketrampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Pemerintah Provinsi Bali memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab kegiatan.

2.3. Kegiatan Yang Belum Dapat Diukur Efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja *outcome*-nya. Selama tahun 2022, tidak terdapat terdapat kegiatan yang termasuk di dalam kategori ini. Jadi tidak terdapat hambatan dalam penentuan indikator kinerja, hal ini menunjukkan kemampuan pengelola kegiatan sudah memadai dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan lebih ditingkatkan pengelola kegiatan untuk lebih mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali (LKjIP) Tahun 2022 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Bali berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

1. Capaian Indikator Makro

Tujuan pembangunan Provinsi Bali telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat.

Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali
Tahun 2021 s.d.Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk	4,32 juta	4,29 juta	4,29 Juta	100%	4,5 juta	95,33
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	3,10	4,19	135,16%	5,00	83,8
3	PDRB Perkapita (ADHK)	36 juta	36 juta	38,17 juta	106.2%	44 juta	86,75
4	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	51 Juta	50 juta	50,8	101,6%	66 juta	76,96
5	Inflasi	1,09	3,00	5,39	55,65	3,00	55,65
6	Tingkat Kemiskinan (%)	4,71	4,25	4,57	97,99	1,00	21,88
7	Jumlah Penduduk Miskin	201.97	210.6	205.68	97,99	42,00	21,88
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37	3,19	4,80	66,45	0,90	18,75
9	Gini Ratio	0,37	0,32	0,36	88,88	0,25	69,44
10	IPM	75,69	76,93	76,44	99,36	80	95,55
11	Investasi	21.15	5.11	23,52	460,27	28,10	83,70
12	Jumlah Ekspor	110	312.00	347,26	111,30	684,662	50,76

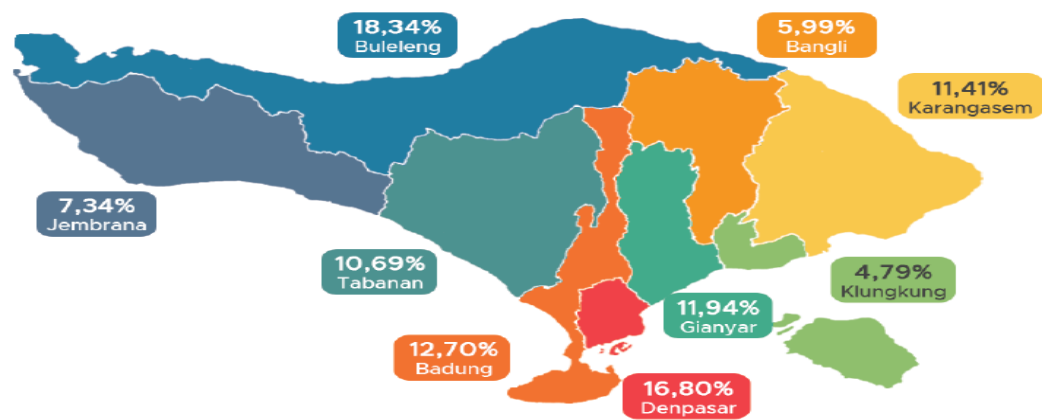
Sumber : Badan Pusat Statistik & Perangkat Daerah Prov.Bali, 2022 (data diolah B.organisasi Setda Prov.Bali 2022)

1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Bali

Dengan luas daratan Provinsi Bali sebesar 5.780,06 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Bali sebanyak 747 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Penduduk 2000 yang mencatat kepadatan penduduk Bali sebanyak 544 jiwa per kilometer persegi dan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang mencapai 673 jiwa per kilometer persegi.

Penduduk di Provinsi Bali tersebar pada 9 kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34 persen dari penduduk Bali. Kota Denpasar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 725.314 jiwa atau sebesar 16,80 persen. Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Tabanan merupakan kabupaten yang persentase sebaran penduduknya terhadap Bali di atas 10 persen. Kabupaten Jembrana, Bangli, dan Klungkung persentase sebaran penduduknya di bawah 8 persen. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan penduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 206.925 jiwa atau 4,79 persen dari total jumlah penduduk Bali.

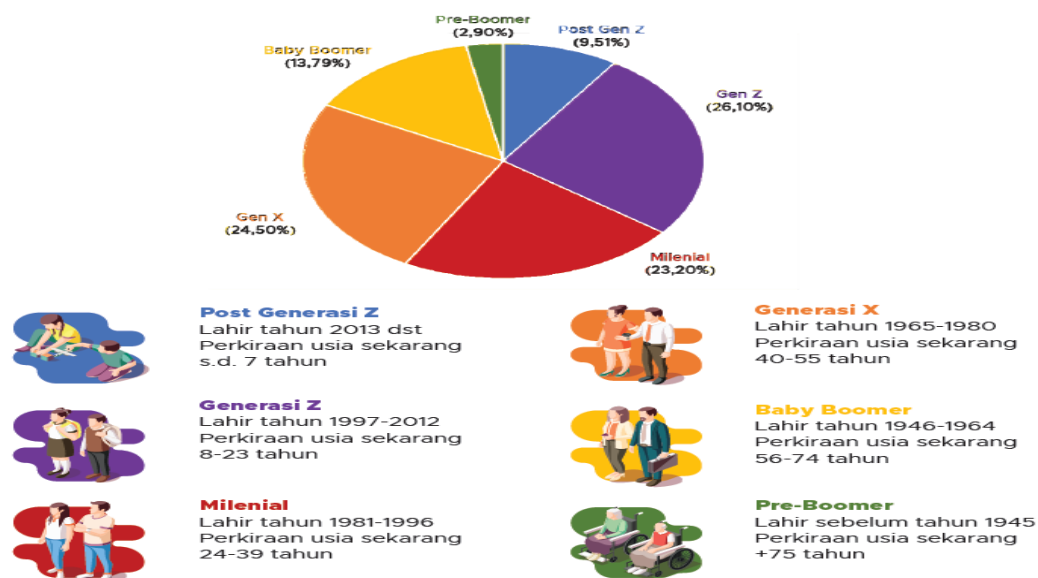
Gambar 3.1 Peta Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 42,66 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01 persen per tahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14 persen per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Komposisi Penduduk Bali Menurut Kondisi Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Dari 4,32 juta penduduk Bali sebesar 87,73 persen atau sekitar 3,79 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sementara sebesar 12,27 persen atau

sekitar 0,53 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK Jumlah ini merupakan indikasi adanya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK lagi.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat mayoritas penduduk Bali didominasi oleh generasi Z dan X. Proporsi generasi Z sebesar 26,10 persen dan generasi X sebesar 24,50 persen dari total populasi penduduk Bali. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Bali, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia khususnya Bali.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1980. Pada tahun 1980 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 56,31 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,96 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat semakin tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Bali masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,96 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

1.2 Laju Perekonomian Provinsi Bali, PDRB Perkapita (ADHK) dan PDRB Perkapita Nominal (ADHB)

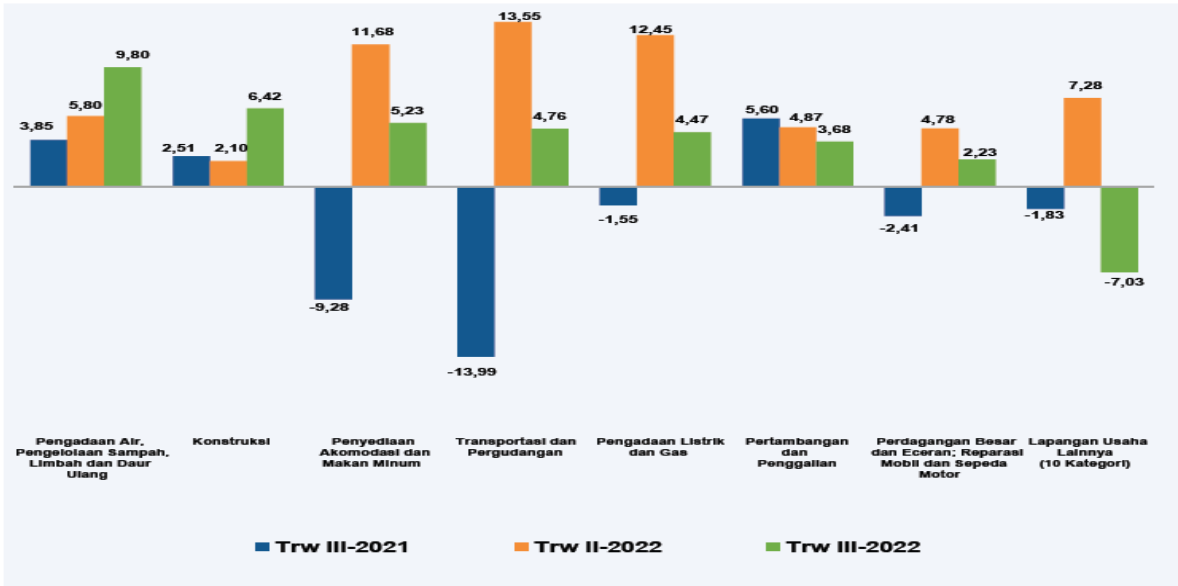


Ekonomi Bali pada Januari-September 2022 tercatat tumbuh sebesar 4,19 persen. Pada triwulan III-2022, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK), mencapai Rp. 38,17 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II-2022 yang tercatat hanya Rp. 37,94 triliun.

Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan III-2022 dibandingkan dengan triwulan II-2022 tercatat tumbuh sebesar 0,60 persen. Pertama, pelonggaran pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan.

Sejalan dengan rendahnya kasus harian Covid-19, aktivitas ekonomi di Bali pun berangsur-angsur menuju kondisi normal. Kembali dibukanya jalur penerbangan internasional ke Bali sejak 4 Februari 2022, juga menjadi momentum pergerakan roda perekonomian Bali. Persiapan menjelang perhelatan akbar G-20, berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Provinsi Bali dan melonjaknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali menjadi corak perekonomian di triwulan III-2022. Hal tersebut meningkatkan aktivitas produksi yang selanjutnya tercermin pada ekonomi Bali yang mampu tumbuh positif pada triwulan III-2022.

Grafik 3.2 Pertumbuhan Perekonomian Bali Selama Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Ditinjau dari seluruh 17 kategori lapangan usaha, hampir semua kategori lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif. Hanya terdapat 5 kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) sedalam 13,72 persen, Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sedalam 8,57 persen, Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) sedalam 2,30 persen, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) sedalam 1,00 persen, dan Kategori P (Jasa Pendidikan) sedalam 0,01 persen. Sementara, tiga pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) sebesar 9,80 persen, diikuti Kategori F (Konstruksi) sebesar 6,42 persen, dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 5,23 persen.

Pertumbuhan tertinggi yang tercatat pada lapangan usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) disebabkan peningkatan nilai tambah yang tercipta selama triwulan III-2022 dibandingkan dengan triwulan II-2022. Peningkatan nilai tambah tersebut utamanya bersumber dari peningkatan produksi air bersih di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali secara, seperti di Kabupaten Badung, Buleleng,

Karangasem, dan Kota Denpasar. Penyelenggaran berbagai upacara keagamaan seperti pernikahan serta upacara Ngaben massal yang diselenggarakan pada triwulan III-2022 diduga menjadi salah satu pendorong kenaikan permintaan air bersih dan pengelolaan sampah Pertumbuhan tertinggi berikutnya tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas). Seperti yang telah disinggung sebelumnya, konsumsi listrik pada segmen pelanggan industri tercatat mengalami peningkatan secara. Tidak hanya itu, konsumsi listrik pada segmen pelanggan lainnya juga turut mengalami peningkatan.

Peningkatan aktivitas pada lapangan usaha Kategori F (Konstruksi) secara kasat mata sangat jelas terlihat menjelang perhelatan G-20 di Bali pada triwulan III-2022 yang berbeda dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sejumlah persiapan dimatangkan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022. Preservasi jalan dan penataan *landscape* yang dipusatkan di Nusa Dua dilaporkan telah mencapai 83 persen. Proses *beautifikasi* pada Jalan Tol-Bali Mandara juga dilakukan untuk menyambut kedatangan para delegasi G-20. Berdasarkan data realisasi belanja modal pada triwulan III-2022 yang diperoleh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali tercatat meningkat drastis hingga sekitar 26,77 persen untuk jenis belanja Gedung dan Bangunan serta Jaringan) dibandingkan triwulan II-2022. Selain itu, berdasarkan indikator pengadaan semen di Bali tercatat mengalami peningkatan hingga 29 persen.

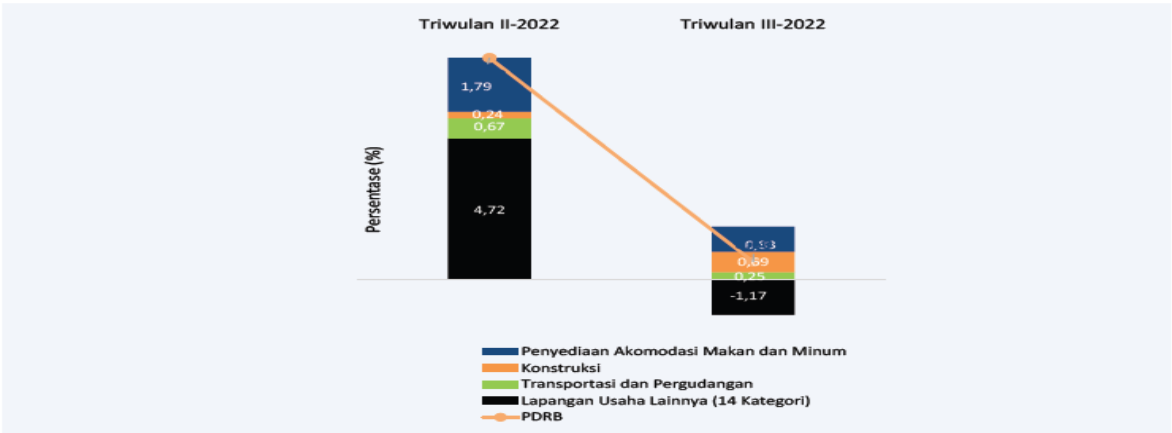
Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang juga merupakan corak perekonomian Bali turut mengalami peningkatan yang tinggi selama triwulan III-2022 sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Peningkatan nilai tambah yang tercipta pada lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) ditopang oleh sub kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Pola ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali. Pelonggaran kebijakan bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dan luar negeri (PPLN) mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Pada triwulan III-2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 814.325 kunjungan atau meningkat sekitar 129,02 persen dibandingkan triwulan II-2022 yang hanya tercatat sebanyak 355.571 kunjungan. Kendati demikian, tingkat kunjungan wisman tersebut masih jauh di bawah kondisi saat sebelum terjadi pandemi Covid-19 yang mencapai lebih dari satu juta kunjungan tiap triwulannya.

Peningkatan jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Bali selain bertampak pada tingkat kunjungan ke tempat-tempat daya tarik wisata tentunya membawa dampak pada peningkatan permintaan terhadap jasa akomodasi (hotel) dan restoran/rumah makan yang tercakup dalam lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum). Kondisi tersebut terkonfirmasi berdasarkan data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada triwulan III-2022 tercatat meningkat sebesar 29,04 persen untuk hotel bintang dan 54,36 persen untuk hotel non-bintang dibandingkan dengan capaian pada triwulan II-2022. Meningkatnya penerimaan realisasi pajak restoran di Kabupaten Badung yang merupakan sentra pariwisata di Bali hingga lebih dari 70 persen dibandingkan triwulan II-2022 turut berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 0,60 persen bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan sebesar 0,83 persen, Kategori F (Konstruksi) sebesar 0,69 persen, dan Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 0,25 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan sebesar -1,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III-2022.

Grafik 3.3 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II-2022 dan Triwulan III-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Pertumbuhan Ekonomi Bali, PDRB Perkapita (ADHK) dan PDRB Perkapita Nominal (ADHB) Tahun 2022 terhadap Tahun 2021

Ekonomi Bali pada triwulan III-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 8,09 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yaitu pada triwulan I-2022 yang hanya tercatat sebesar 1,43 persen dan triwulan II-2022 sebesar 3,05 persen. Hal tersebut sejalan dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada triwulan III-2022 ini sejumlah momentum mampu mendorong ekonomi Bali untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan III- 2021 walaupun masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Adanya peningkatan beberapa aktivitas seperti mulai diperbolehkannya aktivitas dengan

massa dalam jumlah besar, pelaksanaan upacara agama perkawinan dan ngaben masal, hingga digelarnya *side-event* dan pertemuan berskala nasional maupun internasional di Provinsi Bali dan bertambahnya jalur-jalur penerbangan internasional yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisman. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III- 2022.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 14 kategori mencatatkan pertumbuhan positif, namun menyisakan tiga kategori yang tercatat tumbuh negatif (kontraksi) pada triwulan III-2022 yaitu Kategori P (Jasa Pendidikan), Kategori J (Informasi dan Komunikasi) dan Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib). Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yaitu sebesar 35,37 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yaitu sebesar 25,69 persen, dan pertumbuhan pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 22,46 persen.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) selama triwulan III-2022 dibandingkan triwulan III-2021 bersumber dari meningkatnya aktivitas angkutan udara dan angkutan sungai danau dan penyeberangan. Penerbangan internasional mengalami lonjakan *traffic* yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar Bali, jumlah keberangkatan penumpang rute penerbangan internasional mengalami peningkatan lebih dari 200 persen dan begitupun dengan penerbangan domestik yang tercatat naik lebih dari 300 persen selama triwulan III-2022 dibandingkan dengan triwulan III-2021. Selain itu, peningkatan aktivitas juga nampak dari laporan dari ASDP Gilimanuk dan Karangasem yang mencatat terjadi peningkatan sampai 900 persen pada jumlah penumpang yang melintas pada triwulan III-2022 dibandingkan kondisi triwulan III-2021.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) selama triwulan III-2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong dari sisi permintaan yang mengalami penambahan dari aktivitas pariwisata wisman yang mulai ramai pada triwulan III- 2022 ini. Imbas dari melonjaknya kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali otomatis menambah permintaan akan jasa akomodasi baik hotel dan penginapan. Berdasarkan capaian indikator TPK, peningkatan yang sangat drastis terjadi baik untuk hotel bintang maupun hotel non bintang. TPK hotel bintang pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 40,39 meningkat dari TPK triwulan III-2021 yang hanya sebesar 6,74 persen. Sementara itu, TPK hotel non-bintang pada triwulan III-2022 sebesar 22,12 dibandingkan dengan triwulan III-2021 yang hanya 4,62. Peningkatan nilai tambah pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga diperkuat berdasarkan catatan dari *Google Mobility* aktivitas pada pusat perbelanjaan dan tempat

wisata meningkat pada kisaran 500 persen dan di taman aktivitas meningkat hingga 698 persen pada triwulan III-2022.

Seperti disebutkan sebelumnya, pada triwulan III-2022 indikator PDRB Provinsi Bali atas dasar harga berlaku tercatat senilai Rp62,56 triliun. Mengalami peningkatan dibandingkan capaian triwulan II-2022 yang sebesar Rp60,68 triliun. Sementara berdasarkan atas harga konstan tahun 2010 (ADHK), PDRB Bali triwulan III-2022 tercatat sebesar Rp38,17 triliun. Lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan II-2022 yang tercatat sebesar Rp37,94 triliun.

Jika pada bagian sebelumnya uraian disampaikan menggunakan kerangka pengukuran PDRB dari sisi Produksi menurut kategori lapangan usaha, maka selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan diuraikan melalui sisi pandang konsumsi atau penggunaannya. Jika sebelumnya PDRB dilihat dari sisi “dari mana volume ekonomi dihasilkan” maka selanjutnya PDRB akan dilihat dari arah “untuk apa saja volume ekonomi yang terbentuk itu, digunakan”.

Dari sisi pengeluaran, pada PDRB Provinsi Bali triwulan III-2022, masih menempatkan komponen “pengeluaran konsumsi rumah tangga” sebagai pengguna terbesar PDRB Bali. Pada pengukuran atas dasar harga berlaku (ADHB) terjadi peningkatan sedangkan pada pengukuran atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami penurunan. Peningkatan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat dari Rp33,16 triliun (triwulan II-2022) menjadi Rp33,60 triliun (triwulan III-2022). Sedangkan secara ADHK (atas dasar harga konstan) 2010, terjadi penurunan dari Rp21,17 triliun (triwulan II-2022) menjadi Rp21,08 triliun (triwulan III-2022).

Pada triwulan ini, Komponen Ekspor Luar Negeri tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan positif komponen ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekspor barang luar negeri serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkatkan nilai ekspor jasa luar negeri. Pada periode ini tercatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebagai pengguna terbesar PDRB dari sisi pengeluaran tercatat mengalami kontraksi setelah pada triwulan II-2022 mengalami peningkatan. Puncak konsumsi masyarakat terjadi pada Hari Raya Idul Fitri dan Galungan Kuningan yang jatuh pada triwulan II, kenaikan harga BBM bersubsidi pada triwulan ini turut membatasi pertumbuhan komponen PK-RT.

Pada triwulan III-2022 tercatat Komponen Impor Luar Negeri mengalami peningkatan sebesar 51,23 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan impor luar negeri ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas impor barang

luar negeri serta meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Bali yang melakukan perjalanan keluar negeri (outbond). Pada periode ini tercatat penduduk Provinsi Bali yang keluar negeri mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) pada triwulan ini diduga didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial.

Jika dilihat dari sumber penciptaan pertumbuhan triwulan III-2022, Komponen Ekspor Luar Negeri tercatat sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan sumbangan sebesar 10,58 persen. Berikutnya adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi) yang berkontribusi sebesar 2,69 persen, sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) berkontribusi sebesar 0,13 persen. Sementara komponen pengeluaran lainnya secara gabungan menyumbang sebesar minus 12,81 persen.

Ekonomi Bali pada triwulan III-2022 jika dibandingkan dengan triwulan III-2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,09 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada Komponen Impor Luar negeri tercatat mencapai ribuan persen; Komponen Ekspor Luar negeri tercatat sebesar 810,01 persen; Komponen Pengeluaran LNPR (PK-LNPR) sebesar 14,81 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi) tercatat sebesar 9,42 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tercatat sebesar 4,53 persen. Sedangkan untuk Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tercatat mengalami kontraksi sedalam minus 8,41 persen.

Struktur PDRB Bali menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hanya saja, sumbangan komponen ekspor luar negeri semakin meningkat. Perekonomian Bali masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Bali yaitu sebesar 53,71 persen; diikuti oleh komponen PMTB/Investasi sebesar 31,11 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 22,68 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 11,12 persen; Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPR) sebesar 1,54 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,23 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 3,39 persen. Sedangkan Net Ekspor Antar Daerah tercatat menyumbang dalam bentuk net impor yakni minus 16,99 persen.

Peningkatan aktivitas transportasi udara internasional selama triwulan III-2022 tercatat telah meningkatkan kunjungan wisatawan internasional ke Bali sejalan dengan persiapan pelaksanaan KTT G-20. Bahkan keberangkatan penumpang internasional pada triwulan III-2022 tercatat meningkat hingga ratusan ribu persen jika dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan juga tercatat pada kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Meningkatnya berbagai aktivitas ini diduga sedikit demi sedikit telah mengembalikan pariwisata sebagai motor pendorong ekonomi Bali. Selain itu, nilai impor barang luar negeri tercatat mengalami peningkatan sebesar 348,43 persen dan didominasi oleh komoditas mesin/pesawat mekanik yang diduga terkait pelaksanaan KTT G-20. Begitupula dengan sejumlah infrastruktur yang dibangun guna menunjang pelaksanaan KTT G-20 secara tidak langsung telah mendorong pertumbuhan positif komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali triwulan III-2022 Komponen Ekspor Luar Negeri merupakan komponen penyumbang pertumbuhan positif tertinggi yaitu sebesar 21,57 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/ Investasi) tercatat menyumbang pertumbuhan sebesar 3,01 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tercatat berkontribusi sebesar 2,59 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya tercatat berkontribusi sebesar minus 19,08 persen.

Tabel 3.2 Nilai PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Konstan 2010 (ADHK), Triwulan III-2021, Triwulan II-2022 dan Triwulan III-2022

(triliun rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku (ADHB)			Harga Konstan 2010 (ADHK)		
		Trw III-2021	Trw II-2022	Trw III-2022	Trw III-2021	Trw II-2022	Trw III-2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,63	9,03	9,26	5,31	5,41	5,44
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,55	0,56	0,58	0,35	0,35	0,36
C.	Industri Pengolahan	3,48	4,26	3,68	2,29	2,70	2,33
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,13	0,14	0,07	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,08	0,08	0,09
F.	Konstruksi	6,14	6,43	6,99	4,01	4,06	4,32
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,07	5,56	5,80	3,49	3,70	3,78
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,83	4,27	4,91	1,54	1,99	2,08
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,63	10,70	11,53	5,06	6,05	6,36
J.	Informasi dan Komunikasi	3,70	3,77	3,74	3,16	3,17	3,14
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,88	2,97	1,56	1,69	1,72
L.	Real Estat	2,52	2,59	2,67	1,88	1,90	1,92
M,N.	Jasa Perusahaan	0,61	0,70	0,73	0,40	0,45	0,46
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,64	3,38	2,18	2,38	2,17
P.	Jasa Pendidikan	3,40	3,28	3,31	2,27	2,16	2,16
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	1,65	1,63	1,06	1,10	1,07
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,93	1,09	1,11	0,60	0,68	0,68
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		53,93	60,68	62,56	35,31	37,94	38,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022.

Tabel 3.3 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2022 Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
	Trw III-2022 Terhadap Trw II-2022 (q-to-q)	Trw III-2022 Terhadap Trw III-2021 (y-on-y)	Kum Trw-III 2022 Terhadap Kum Trw-III 2021 (c-to-c)	Trw III-2022 Terhadap Trw II-2022 (q-to-q)	Trw III-2022 Terhadap Trw III-2021 (y-on-y)	Kum Trw-III 2022 Terhadap Kum Trw-III 2021 (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,57	2,44	0,19	0,08	0,37	0,03
B. Pertambangan dan Penggalian	3,68	2,18	2,62	0,03	0,02	0,02
C. Industri Pengolahan	-13,72	2,01	10,32	-0,98	0,13	0,68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,47	22,46	15,25	0,009	0,04	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,80	11,50	5,66	0,02	0,03	0,01
F. Konstruksi	6,42	7,63	4,35	0,69	0,87	0,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,23	8,20	5,79	0,22	0,81	0,56
H. Transportasi dan Pergudangan	4,76	35,37	15,88	0,25	1,54	0,75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,23	25,69	11,12	0,83	3,68	1,67
J. Informasi dan Komunikasi	-1,00	-0,77	-0,20	-0,08	-0,07	-0,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	9,64	6,43	0,06	0,43	0,28
L. Real Estat	0,98	2,21	1,06	0,05	0,12	0,06
M,N. Jasa Perusahaan	1,51	13,89	7,26	0,02	0,16	0,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-8,57	-0,18	-6,14	-0,54	-0,01	-0,38
P. Jasa Pendidikan	-0,01	-4,75	-3,93	-0,001	-0,31	-0,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,30	1,65	1,06	-0,07	0,05	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,14	13,55	8,41	0,00	0,23	0,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,60	8,09	4,19	0,60	8,09	4,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022.

Tabel 3.4 Struktur PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2021, Triwulan II 2022 dan Triwulan III-2022 (persen)

Lapangan Usaha		Struktur PDRB		
		Triwulan III-2021	Triwulan II-2022	Triwulan III-2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,01	14,89	14,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,03	0,92	0,93
C.	Industri Pengolahan	6,46	7,03	5,89
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,23
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	0,18	0,19
F.	Konstruksi	11,39	10,60	11,18
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,41	9,17	9,28
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,24	7,04	7,86
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,00	17,63	18,43
J.	Informasi dan Komunikasi	6,87	6,21	5,97
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	4,75	4,75
L.	Real Estat	4,67	4,27	4,27
M,N.	Jasa Perusahaan	1,12	1,16	1,16
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	6,00	5,40
P.	Jasa Pendidikan	6,31	5,41	5,29
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	2,72	2,60
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,73	1,80	1,78
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Tabel 3.5 Nilai PDRB Bali Menurut Komponen Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Konstan 2010 (ADHK) Triwulan III-2021, Triwulan II-2022 dan Triwulan III-2022 (triliun rupiah)

Komponen		Harga Berlaku (ADHB)			Harga Konstan 2010 (ADHK)		
		Trw III-2021	Trw II-2022	Trw III-2022	Trw III-2021	Trw II-2022	Trw III-2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30,04	33,16	33,60	20,17	21,17	21,08
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,78	0,93	0,96	0,51	0,57	0,58
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,36	6,79	6,95	4,40	3,98	4,03
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,13	17,71	19,47	11,28	11,32	12,34
5.	Perubahan Inventori	0,12	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07
6.	Ekspor Luar Negeri	1,56	7,51	14,19	0,94	4,54	8,56
7.	Impor Luar Negeri ¹⁾	0,16	1,38	2,12	0,10	0,85	1,28
8.	Net Ekspor Antar Daerah	-2,90	-4,18	-10,63	-1,94	-2,87	-7,22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		53,93	60,68	62,56	35,31	37,94	38,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Keberhasilan laju perekonomian Bali di Tahun 2022 dan langkah percepatan pencapaian target di Tahun 2023

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian/Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	3,10	4,19	135,16%	5,00	83,8
2	PDRB Perkapita (ADHK)	36 juta	36 juta	38,17 juta	106.2%	44 juta	86,75
3	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	51 Juta	50 juta	50,8	101,6%	66 juta	76,96

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali

Terlihat dari target yang tertuang pada RPJMD semesta berencana 2018 s.d 2023, pada tahun 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 3,10% terealisasi sebesar 4,16%, dengan capaian terhadap target sebesar 135,16%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan akhir RPJMD di Tahun 2023 capaian terhadap 2022 sebesar 83,8%. Realisasi Tahun 2022 dapat menggambarkan Pemerintah Provinsi Bali berhasil meningkatkan laju perekonomian setelah 2 tahun dilanda PANDEMI Covid-19, target tahun 2022 sebesar 3,10% yang ditetapkan pada RPJMD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat tercapai 135,16%, Pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik mendorong laju pemulihan ekonomi Bali. Ruang untuk berproduksi bagi lapangan usaha di Bali menjadi semakin luas dengan perbaikan tingkat permintaan yang selanjutnya menyebabkan aktivitas ekonomi Bali mengalami peningkatan secara kumulatif pada Tahun 2022. Hal tersebut tercermin pada laju pertumbuhan tertinggi yang tercatat pada lapangan usaha Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,88 persen, diikuti Kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,25 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tumbuh tingginya ketiga kategori lapangan usaha tersebut semakin menjadi penegas bahwa roda ekonomi Bali kembali berputar setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai meningkat drastis. Selama Januari- September 2022 keberangkatan penumpang rute penerbangan internasional tercatat sebesar 1.200.405 jauh meningkat dibanding Januari-September 2021 yang hanya 448. Hal yang sama terpantau juga dari laporan penyeberangan penumpang (ASDP) melalui Gilimanuk dan Padangbai pada periode Januari-September 2022 yang meningkat sampai 133.014 dibandingkan Januari-September 2021 yang hanya sebesar 51.461.

Dibukanya kembali jalur penerbangan internasional berdampak signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Selama Januari-September 2022, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 1.185.829 kunjungan meningkat hingga lebih dari 2 juta persen dibandingkan periode Januari- September 2021 yang hanya tercatat sebanyak 43 kunjungan wisatawan mancanegara. Selain wisatawan mancanegara, peningkatan nilai tambah pada kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Bali juga disumbangkan oleh kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatatkan jumlah wisnus pada Januari-September 2022 sebanyak 5.746.042 kunjungan meningkat dibandingkan Januari-September 2021 yang hanya 2.689.694 kunjungan. Belajar dari pademi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali kembali menata pembangunan daerah, bila melihat tahun 2020 s.d 2021 laju perekonomian Bali sangat terpuruk, dan sector pariwisata menjadi paling terpuruk yang menyebabkan ekonomi Bali berkontraksi sangat dalam. Bercermin dari hal tersebut **Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2023** fokus mengimplementasikan program “**Ekonomi Kerthi Bali**” sektor prioritas yang terdiri dari enam pilar sektor unggulan diantaranya :

1. Sektor Pertanian dengan Pertanian Organik;
2. Sektor Keluatan dan Perikanan;
3. Sektor Industri Manufaktur dan Industri Budaya Branding Bali;
4. Sekor Industri Kecil Menengah (IKM), UMKM dan Koperasi;
5. Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan
6. Sektor Pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pemerataan perekonomian bali diantaranya :

1. Pembangunan Fasilitas Seni Pusat Kebudayaan Bali yang bertempat di Kabupaten Klungkung;
2. Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani, shortcut yang mempercepat perjalanan dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng yang berada di ujung Utara Provinsi Bali;
3. Pembangunan Jembatan Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
4. Pembangunan Embung Unda sebagai penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;
5. Penataan Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
6. Pembangunan Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli;
7. Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli;

- 8. Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Gunaksa, sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan di Kabupaten Klungkung;
- 9. Pembangunan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem; dan
- 10. Pembangunan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng.

1.3 Laju Inflasi Bali

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umumInflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Melihat pengertian Inflasi secara umum, perkembangan Inflasi Provinsi Bali dapat tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian/Realisasi Inflasi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inflasi	1,09	3,00	5,39	55,65	3,00	55,65

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali, data diolah

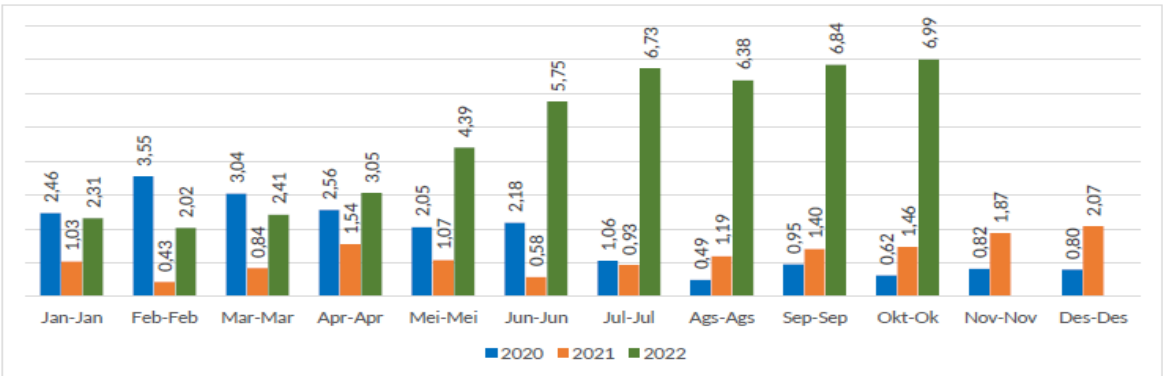
Tingkat inflasi tahun kalender Provinsi Bali (Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja) pada Oktober 2022 sebesar 5,39 persen yang didapat dari membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulan Oktober 2022 terhadap IHK Bulan Desember 2021. Dengan cara yang sama diperoleh hitungan inflasi tahun kalender bulan Oktober tahun 2020 dan Oktober 2021 masing - masing sebesar -0,10 persen dan 0,55 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun tercatat setinggi 6,99 persen. Selanjutnya, tingkat inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota pada bulan Oktober tahun 2020 dan Oktober 2021 masing - masing sebesar 0,62 persen dan 1,46 persen.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan 2022 tercatat sebesar 5,39%, menurun dibandingkan realisasi inflasi pada triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 6,85%. Realisasi inflasi Bali tahun 2022 juga tercatat lebih rendah dari pada realisasi inflasi Nasional yaitu sebesar 5,51%.

Pada Bulan Oktober 2022, perkembangan harga berbagai komoditas (barang dan jasa) konsumsi di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar dan Kota Singaraja secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang dan jasa di dua kota tersebut, pada Oktober 2022 tercatat deflasi sedalam 0,05 persen yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Harga Konsumen dari 112,45 pada September 2022 menjadi 112,39 pada Oktober 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2022 sebesar 5,39 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun tercatat setinggi 6,99 persen.

Tabel 3.8 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja 2020–2022 (Persen)

Tingkat Inflasi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Oktober	-0.24	-0.19	-0.05
2. Tahun Kalender (Januari - Oktober)	-0.10	0.55	5.39
3. Tahun ke Tahun (Oktober terhadap Oktober tahun n-1)	0.62	1.46	6.99



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Dari 90 kota IHK, 61 kota tercatat mengalami deflasi dan 29 kota mengalami inflasi. Deflasi terdalam tercatat di Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) sedalam 1,48 persen, sementara deflasi terdangkal tercatat di Kota Sampit (Kalimantan Tengah) sedalam 0,01 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Manokwari (Papua Barat) setinggi 0,76 persen, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Cilacap (Jawa Tengah), Kota Sintang (Kalimantan Selatan), dan Kota Gorontalo (Gorontalo), masing-masing setinggi 0,01 persen.

Kedua kota IHK di Provinsi Bali mengalami deflasi, yaitu Kota Denpasar setinggi 0,04 persen dan Kota Singaraja setinggi 0,16 persen. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-58 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-38 dari 61 kota yang mengalami deflasi.

Tabel 3.9 Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi 90 Kota
Bulan Oktober 2022.

No	Kota	IHK	Inflasi mtm (%)	Inflasi yoy (%)	No	Kota	IHK	Inflasi mtm (%)	Inflasi yoy (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungsitoli	112,88	-1,48	5,65	31	Kotamobagu	113,18	-0,21	5,22
2	Mamuju	112,71	-1,44	5,26	32	Metro	116,97	-0,20	6,21
3	Tual	113,90	-1,35	4,14	33	Palu	114,75	-0,20	6,08
4	Bungo	113,91	-1,14	6,45	34	Bekasi	112,28	-0,19	5,75
5	Sibolga	113,44	-1,09	5,64	35	Lubuklinggau	110,75	-0,18	5,98
6	Tanjung Pandan	110,20	-1,00	4,92	36	Semarang	114,63	-0,18	5,35
7	Sorong	112,73	-0,90	3,94	37	Jambi	114,14	-0,16	7,17
8	Pekanbaru	112,00	-0,72	6,44	38	Singaraja	113,76	-0,16	5,83
9	Tembilahan	113,47	-0,70	4,26	39	Tarakan	117,02	-0,16	5,29
10	Padangsidempuan	110,61	-0,61	6,85	40	Sumenep	111,51	-0,15	6,36
11	Dumai	112,71	-0,59	5,60	41	Bengkulu	114,90	-0,14	6,58
12	Watampone	114,45	-0,58	6,21	42	Tangerang	112,42	-0,13	5,17
13	Pematang Siantar	113,53	-0,54	6,07	43	Mataram	114,20	-0,12	6,60
14	Bandar Lampung	110,82	-0,50	6,46	44	Manado	113,69	-0,12	4,65
15	Banda Aceh	112,83	-0,49	6,92	45	Ambon	111,42	-0,12	6,64
16	Palopo	109,62	-0,49	5,86	46	Malang	112,51	-0,11	6,76
17	Ternate	115,19	-0,49	3,32	47	Makassar	110,45	-0,11	6,06
18	Pare-Pare	112,98	-0,48	7,66	48	Palembang	112,91	-0,10	6,55
19	Medan	114,64	-0,47	5,56	49	Cirebon	113,93	-0,10	5,41
20	Luwuk	111,28	-0,47	7,51	50	Maumere	112,56	-0,08	5,53
21	Tanjung Pinang	111,29	-0,34	5,59	51	Tegal	113,02	-0,07	6,63
22	Waingapu	110,99	-0,34	3,60	52	Palangka Raya	112,54	-0,07	7,39
23	Pangkal Pinang	110,53	-0,30	6,98	53	Surakarta	112,20	-0,06	7,53
24	Jayapura	114,84	-0,30	7,43	54	Dki Jakarta	114,40	-0,05	4,47
25	Depok	114,18	-0,26	6,24	55	Tasikmalaya	114,31	-0,05	6,57
26	Cilegon	109,84	-0,26	6,34	56	Batam	112,34	-0,04	6,49
27	Bulukumba	112,73	-0,26	4,70	57	Sukabumi	112,83	-0,04	5,70
28	Bukittinggi	115,22	-0,25	7,49	58	Denpasar	114,37	-0,04	7,17
29	Padang	111,31	-0,22	7,92	59	Jember	112,96	-0,03	7,23
30	Kediri	112,03	-0,21	5,87	60	Madiun	111,90	-0,03	6,02

Lanjutan tabel 3.9

No	Kota	IHK	Inflasi mtm (%)	Inflasi yoy (%)	No	Kota	IHK	Inflasi mtm (%)	Inflasi yoy (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61	Sampit	116,56	-0,01	6,64	76	Banyuwangi	112,86	0,11	5,55
62	Cilacap	114,97	0,01	7,21	77	Bandung	114,16	0,12	5,79
63	Sintang	112,30	0,01	8,63	78	Merauke	112,19	0,12	4,97
64	Gorontalo	118,27	0,01	5,09	79	Singkawang	111,76	0,13	5,63
65	Purwokerto	115,09	0,02	6,84	80	Probolinggo	114,85	0,16	5,43
66	Kudus	112,46	0,02	6,69	81	Meulaboh	113,05	0,19	7,56
67	Lhokseumawe	113,45	0,04	5,66	82	Bima	111,44	0,20	6,46
68	Kotabaru	121,19	0,04	8,64	83	Samarinda	113,26	0,22	5,47
69	Serang	111,85	0,05	7,54	84	Tanjung	111,94	0,24	5,00
70	Surabaya	113,00	0,07	6,77	85	Kendari	112,06	0,27	6,68
71	Pontianak	114,08	0,07	5,74	86	Banjarmasin	113,19	0,28	7,30
72	Balikpapan	112,52	0,09	6,30	87	Tanjung Selor	118,68	0,32	9,11
73	Bogor	115,26	0,10	5,96	88	Kupang	112,56	0,37	8,06
74	Bau-Bau	111,03	0,10	7,36	89	Timika	114,70	0,73	6,52
75	Yogyakarta	111,68	0,11	6,67	90	Manokwari	115,74	0,76	4,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Pengendalian Inflasi Provinsi Bali di Tahun 2022

Selama Tahun 2022, koordinasi pengendalian inflasi daerah di Provinsi Bali melalui wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik level provinsi maupun kab/kota terus dilakukan secara aktif dengan intensitas yang semakin meningkat. Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali High Level Meeting (HLM) TPID tingkat Kota/Kab dengan rincian sebagai berikut :

- 1. HLM TPID Kabupaten Jembrana pada 20 Juli 2022
- 2. HLM TPID Provinsi Bali dan Sumatera Selatan pada 43 28 Juli 2022
- 3. HLM TPID se-provinsi Bali pada 16 Agustus 2022
- 4. HLM TPID Kota Denpasar pada 18 Agustus 2022
- 5. HLM TPID Provinsi Bali pada 6 September 2022
- 6. HLM TPID Kabupaten Badung pada 7 September 2022

Topik pembahasan dalam HLM TPID pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bali secara umum berfokus pada antisipasi tekanan harga yang lebih tinggi pada komoditas volatile food khususnya seiring dengan peningkatan permintaan di tengah kurangnya supply dari wilayah pemasok, upaya peningkatan KAD baik intra provinsi maupun antar provinsi, merancang tindak lanjut dari Rakornas TPID, serta

menciptakan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mendorong pengendalian inflasi di Provinsi Bali khususnya menjelang pelaksanaan event internasional KTT G20. Adapun sejumlah rekomendasi yang dihasilkan pada HLM di antaranya adalah sebagai berikut.

A. Jangka Pendek :

1. Keterjangkauan Harga: Optimalisasi program operasi pasar (bahan pokok dan hortikultura penyumbang inflasi, seperti minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah).
2. Ketersediaan pasokan: gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah (kerja sama dengan PKK dan bantuan benih).
3. Kelancaran distribusi: peningkatan kerja sama antar daerah (antar perusda/perumda dan B to B), khususnya intra Provinsi Bali.
4. Komunikasi Efektif: peningkatan koordinasi antar stakeholders dan komunikasi kepada masyarakat.

B. Jangka Panjang:

1. Keterjangkauan Harga: Optimalisasi peran perusda sebagai aggregator untuk mengurangi rantai distribusi.
 2. Ketersediaan Pasokan: Modernisasi pertanian dan efisiensi biaya produksi dan Pemanfaatan Controlled Atmosphere Storage (CAS) dan pengembangan industri pengolahan produk hortikultura di Kabupaten yang menjadi sentra produksi.
 3. Kelancaran Distribusi: pembangunan Pasar Induk untuk Komoditas Bahan Pokok dan Hortikultura, pengembangan digitalisasi pasar hortikultura (balai lelang) untuk meningkatkan harga di level petani, monitoring distribusi di pintu masuk dan keluar pelabuhan.
 4. Komunikasi efektif: Penggunaan media informasi mengenai perkembangan harga.
- Dalam rangka mengantisipasi tekanan harga pada komoditas strategis, TPID se-Balinusra juga secara aktif melakukan kegiatan pasar murah dan pemantauan harga serta pasokan di pasar.

1.4 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2022

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Sejalan dengan berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Bali, kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada Maret 2022 tercatat meningkat. Hal ini terkonfirmasi dari persentase penduduk miskin pada Maret 2022 yang tercatat sebesar 4,57%, atau sejumlah 205,68 ribu orang, menurun dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 4,72% atau sejumlah 211,46 ribu orang. Berdasarkan daerah tinggal, jumlah penduduk miskin, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, tercatat menurun. Pada bulan Maret 2022, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan adalah sebesar 4,23%, lebih rendah dibandingkan periode September 2021 sebesar 4,33% Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 5,39% dari total penduduk di pedesaan yang juga menurun dibandingkan dengan periode September 2021 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,68%.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskian Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,71	4,25	4,57	97,99	1,00	21,88
2	Jumlah Penduduk Miskin	201.97	210.6	205.68	97,99	42,00	21,88

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan data Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali tercatat sebesar 0,63, lebih rendah dari data periode September 2021 yang tercatat sebesar 0,76. Kondisi ini menjelaskan bahwa ratatotal pengeluaran penduduk miskin di Bali berada semakin dekat dengan garis kemiskinan (Rp485.022 per kapita per bulan), sehingga tingkat pengeluaran penduduk miskin di Bali membaik dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan mulai meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami akselerasi.

Seiring dengan hal tersebut, Indeks Keparahan Kemiskinan (juga menurun dari 0,17 pada September 2021 menjadi 0,13 pada Maret 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Provinsi Bali semakin menyempit dan kesenjangan pengeluaran yang dialokasikan per bulannya semakin menipis.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, indeks P1 pada Maret 2022 di perkotaan tercatat lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. Nilai indeks P1 di perkotaan 2. Indeks P1 merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,62, sedangkan di daerah perdesaan

tercatat sebesar 0,64. Berbeda dengan indeks P1, indeks P2 di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,14 sedangkan indeks P2 di perdesaan sebesar 0,11. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi Bali di wilayah perkotaan lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di daerah perdesaan. Sementara itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di wilayah perdesaan pada Maret 2022 semakin kecil dan lebih baik dibandingkan ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan. Hal ini terjadi seiring dengan semakin membaiknya penerimaan penduduk di perdesaan yang juga terkonfirmasi dari Nilai Tukar Petani.

Bila indikator Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan dilihat dari 34 Provinsi di Seluruh Indonesia. Provinsi Bali dengan persentase 4,72% lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,06%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,93%, Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38% dan D.I Yogyakarta sebesar 11,34%. Serta apabila di bandingkan dengan Nusa Tenggara, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 13,83% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 20,05%, Provinsi Bali berhasil menekan tingkat kemiskinannya walupun secara target yang tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 di Tahun 2022 tingkat ketercapaiannya sebesar 97,99%.

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2021 –Maret 2022

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	195,47	193,32	654,79	613,49	850,26	806,82
2. Sumatera Utara	725,04	739,86	548,03	528,33	1.273,07	1.268,19
3. Sumatera Barat	134,53	137,61	205,39	197,60	339,93	335,21
4. Riau	190,99	181,82	305,67	303,21	496,66	485,03
5. Jambi	126,10	127,34	153,75	152,03	279,86	279,37
6. Sumatera Selatan	393,38	371,50	723,23	673,18	1.116,61	1.044,69
7. Bengkulu	98,83	100,69	192,97	196,54	291,79	297,23
8. Lampung	236,48	234,78	770,54	767,63	1.007,02	1.002,41
9. Kep. Bangka Belitung	27,28	26,48	42,43	40,30	69,70	66,78
10. Kepulauan Riau	119,31	122,60	18,44	29,08	137,75	151,68
11. DKI Jakarta	498,29	502,04	-	-	498,29	502,04
12. Jawa Barat	2.951,07	3.010,36	1.053,79	1.060,63	4.004,86	4.070,98
13. Jawa Tengah	1.847,09	1.818,25	2.086,92	2.013,20	3.934,01	3.831,44
14. DI Yogyakarta	331,71	315,46	142,78	139,30	474,49	454,76
15. Jawa Timur	1.768,91	1.721,46	2.490,69	2.459,83	4.259,60	4.181,29
16. Banten	576,62	566,49	275,66	247,54	852,28	814,02
17. Bali	137,60	136,06	73,86	69,62	211,46	205,68
18. Nusa Tenggara Barat	387,67	381,84	347,64	350,09	735,30	731,94
19. Nusa Tenggara Timur	120,58	126,80	1.025,70	1.004,83	1.146,28	1.131,62
20. Kalimantan Barat	89,04	85,04	264,96	265,21	354,00	350,25
21. Kalimantan Tengah	57,86	59,84	83,17	85,26	141,03	145,10
22. Kalimantan Selatan	80,35	77,77	117,41	117,93	197,76	195,70
23. Kalimantan Timur	121,28	123,59	111,85	112,66	233,13	236,25
24. Kalimantan Utara	23,88	26,55	25,61	22,91	49,49	49,46
25. Sulawesi Utara	70,14	70,42	116,41	114,72	186,55	185,14
26. Sulawesi Tengah	86,67	90,26	294,54	298,09	381,21	388,35
27. Sulawesi Selatan	198,84	208,53	566,62	568,91	765,46	777,44
28. Sulawesi Tenggara	71,02	69,94	252,25	239,85	323,26	309,79
29. Gorontalo	21,51	21,01	163,09	164,43	184,60	185,44
30. Sulawesi Barat	27,72	27,99	138,27	137,73	165,99	165,72
31. Maluku	49,02	45,12	245,94	245,45	294,97	290,57
32. Maluku Utara	17,60	19,09	63,58	60,79	81,18	79,87
33. Papua Barat	28,19	29,47	193,10	189,31	221,29	218,78
34. Papua	49,23	50,67	895,26	871,46	944,49	922,12
Indonesia	11.859,34	11.820,06	14.644,30	14.341,10	26.503,65	26.161,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Tabel 3.12 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2021–Maret 2022

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	10,58	10,31	18,04	16,87	15,53	14,64
2. Sumatera Utara	8,68	8,76	8,26	7,98	8,49	8,42
3. Sumatera Barat	4,83	4,95	7,23	6,86	6,04	5,92
4. Riau	6,72	6,34	7,19	7,08	7,00	6,78
5. Jambi	10,50	10,51	6,28	6,19	7,67	7,62
6. Sumatera Selatan	11,99	11,23	13,28	12,31	12,79	11,90
7. Bengkulu	14,73	14,88	14,28	14,49	14,43	14,62
8. Lampung	8,50	8,31	13,18	13,14	11,67	11,57
9. Kep. Bangka Belitung	3,22	3,09	6,57	6,26	4,67	4,45
10. Kepulauan Riau	5,37	5,68	10,45	10,68	5,75	6,24
11. DKI Jakarta	4,67	4,69	-	-	4,67	4,69
12. Jawa Barat	7,48	7,57	9,76	9,88	7,97	8,06
13. Jawa Tengah	10,16	9,92	12,44	12,04	11,25	10,93
14. DI Yogyakarta	11,20	10,56	13,99	13,65	11,91	11,34
15. Jawa Timur	7,99	7,71	13,79	13,69	10,59	10,38
16. Banten	6,04	5,73	7,72	7,46	6,50	6,16
17. Bali	4,33	4,23	5,68	5,39	4,72	4,57
18. Nusa Tenggara Barat	14,54	14,10	13,12	13,24	13,83	13,68
19. Nusa Tenggara Timur	8,57	8,84	24,42	23,86	20,44	20,05
20. Kalimantan Barat	4,72	4,44	8,05	8,06	6,84	6,73
21. Kalimantan Tengah	5,08	5,17	5,23	5,36	5,16	5,28
22. Kalimantan Selatan	3,81	3,64	5,28	5,31	4,56	4,49
23. Kalimantan Timur	4,74	4,80	9,63	9,64	6,27	6,31
24. Kalimantan Utara	5,32	5,66	9,31	8,75	6,83	6,77
25. Sulawesi Utara	5,09	5,14	10,07	9,77	7,36	7,28
26. Sulawesi Tengah	8,82	9,03	13,71	13,87	12,18	12,33
27. Sulawesi Selatan	4,89	5,07	11,55	11,63	8,53	8,63
28. Sulawesi Tenggara	7,14	6,95	14,34	13,57	11,74	11,17
29. Gorontalo	4,06	3,97	24,38	24,42	15,41	15,42
30. Sulawesi Barat	9,72	9,76	12,39	12,26	11,85	11,75
31. Maluku	6,13	5,82	24,34	23,50	16,30	15,97
32. Maluku Utara	4,83	5,18	7,00	6,66	6,38	6,23
33. Papua Barat	6,44	6,96	33,50	31,42	21,82	21,33
34. Papua	4,94	5,02	36,50	35,39	27,38	26,56
Indonesia	7,60	7,50	12,53	12,29	9,71	9,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam Menekan Tingkat Kemiskinan Tahun 2022

Penurunan tingkat kemiskinan di Bali juga didukung oleh beragam stimulus program pengentasan kemiskinan, yang disalurkan baik melalui penyaluran dana APBN maupun APBD. Selama tahun 2022 sudah terdapat 8 (delapan) jenis bantuan sosial yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di antaranya Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Gaji, BLT Minyak Goreng, BLT UMKM, Bansos PKH, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), Bantuan Modal Usaha, Kartu Prakerja, serta BLT Dana Desa. Secara spasial, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yakni melalui pengalokasian anggaran untuk masyarakat miskin

melalui pemberian bantuan keuangan dalam bentuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemberian bantuan sosial tunai dan sumbangan pembinaan pendidikan (BST-SPP), hingga perluasan Program Padat Karya.

1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Terdapat perubahan pola penyerapan tenaga kerja Bali pada Agustus 2022, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada Agustus 2021 menyerap tenaga kerja paling banyak, namun Agustus 2022 penyerapan tenaga kerja tertinggi ada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak di Provinsi Bali adalah Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 21,23%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 19,89%; dan Industri Pengolahan sebesar 15,48%.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37	3,19	4,80	66,45	0,90	18,75

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Agustus 2022 dalam tren menurun didukung oleh pembukaan kembali kegiatan usaha di tengah aktivitas pariwisata yang semakin membaik. Perbaikan TPT juga tercermin pada tren job vacancy index yang kian membaik. Lapangan usaha dengan pertumbuhan serapan tenaga kerja tertinggi adalah lapangan usaha terkait Pariwisata, khususnya lapangan usaha Akomodasi dan lapangan usaha Transportasi, sementara lapangan usaha dengan pangsa serapan tenaga kerja terbanyak adalah lapangan usaha Perdagangan, menggeser dominasi lapangan usaha Pertanian.

Sejalan dengan membaiknya TPT, kondisi kesejahteraan masyarakat di Bali juga menunjukkan peningkatan, yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, serta membaiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Bali. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan.

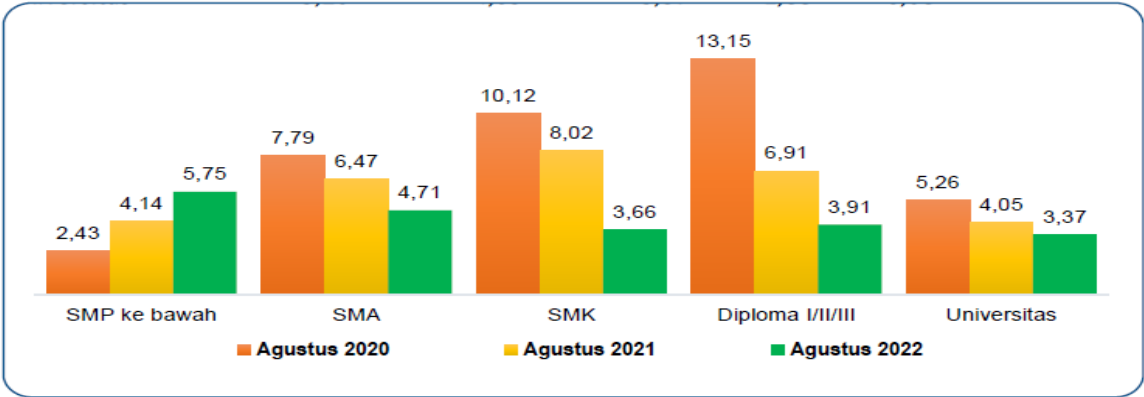
Pada Agustus 2022, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali membaik dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 4,84% pada Februari 2022 menjadi 4,80% pada Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Tahun 2022 tercapai 66,08% dilihat dari target yang ditetapkan pada awal Tahun 2022 sebesar 3,19% dan terealisasi 4,80%, walaupun realisasi tidak tercapai akan tetapi bila dibandingkan dengan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2021 sebesar 5,37% mengalami penurunan realisasi di Tahun 2022. Penurunan TPT terutama ditopang oleh membaiknya aktivitas pariwisata seiring kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mendorong pembukaan kembali (reopening) sejumlah usaha. Penurunan jumlah pengangguran juga sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja yang tercermin pada tren job vacancy index yang terus membaik sejak triwulan II 2022.

Sejalan dengan membaiknya kinerja pariwisata, jumlah serapan tenaga kerja pada lapangan usaha terkait pariwisata, yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan, lapangan usaha Transportasi, dan lapangan usaha Perdagangan, tercatat tumbuh meningkat dengan pertumbuhan pada masing-masing lapangan usaha sebesar 34,62% , 49,40%, dan 8,22% pada Agustus 2022. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2022 sebesar 5,99% , (-39,69%) , dan 4,56% pada masing-masing lapangan usaha. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada lapangan usaha Konstruksi seiring dengan upaya akselerasi penyelesaian sejumlah proyek Pemerintah dan swasta, khususnya dalam rangka menyambut perhelatan puncak KTT G20 Presidensi Indonesia. Di sisi lain, lapangan usaha Pertanian mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada Agustus 2022 seiring dengan preferensi masyarakat lokal yang lebih memilih kembali ke lapangan usaha penunjang pariwisata di tengah prospek pariwisata yang membaik.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2022 tertinggi pada jenjang pendidikan SMP ke bawah sebesar 5,75%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan Universitas yang tercatat sebesar 3,37%. Pada periode Agustus 2021 – Agustus 2022, TPT dari tamatan SMP ke bawah mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen poin. Sementara pada periode yang sama TPT pada tingkat pendidikan lainnya tercatat mengalami penurunan. Sepanjang

periode Agustus 2020 - Agustus 2022, TPT pada pendidikan SMA, SMK, Diploma I/II/III serta Universitas menunjukkan tren yang menurun, sebaliknya TPT pada pendidikan SMP ke bawah terus meningkat.

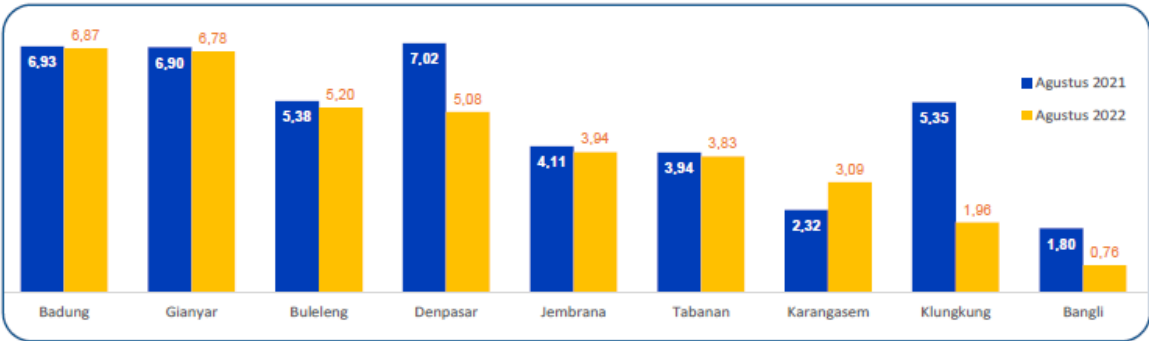
Grafik 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Pada Agustus 2022, kabupaten/kota dengan TPT terendah terdapat pada Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,76% dan tertinggi terdapat pada Kabupaten Badung yang tercatat sebesar 6,87%. Dibandingkan Agustus 2021, terdapat penurunan TPT hampir di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Bali, kecuali pada Kabupaten Karangasem yang meningkat sebesar 0,77 persen poin.

Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 berdasarkan hasil Sakernas dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) Pengangguran karena COVID-19; (2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; (3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.

Tabel 3.14 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021–Agustus 2022.

Komponen	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2021 - Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Pengangguran ¹⁾ Karena COVID-19	48,89	7,32	-41,57	-85,03
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ²⁾ Karena COVID-19	33,41	13,56	-19,85	-59,41
c. Sementara Tidak Bekerja ³⁾ Karena COVID-19	38,15	3,78	-34,38	-90,10
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	593,75	126,55	-467,21	-78,69
Total	714,21	151,21	-563,00	-78,83
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.509,09	3.563,14		
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	20,35	4,24	-16,11	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Pada Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 151,21 ribu orang, berkurang sebanyak 563,00 ribu orang (78,83%) dibandingkan dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 7,32 ribu orang; menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 13,56 ribu orang; sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 3,78 ribu orang; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 126,55 ribu orang. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar pada komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 yang berkurang sebanyak 467,21 ribu orang.

Solusi Permasalahan

Salah satu upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan program pemerintah “kartu prakerja1”. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dari Pemerintah Pusat berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

1.6 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian/Realisasi Gini Ratio Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gini Ratio	0,37	0,32	0,36	88,88	0,25	69,44

Indeks kesejahteraan penduduk juga dapat diukur melalui tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, yang tercermin melalui indeks Rasio Gini. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Bali pada periode Maret 2022 melanjutkan tren penurunan dibandingkan Maret 2021 maupun September 2021. Pada Maret 2022 indeks Rasio Gini Provinsi Bali tercatat sebesar 0,363, lebih rendah dibandingkan periode September 2021 yang tercatat sebesar 0,375. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,371, lebih rendah dibandingkan periode September 2021 yang tercatat sebesar 0,379.

Sementara di daerah perdesaan, indeks rasio gini pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,294, lebih rendah dibandingkan periode September 2021 yang tercatat sebesar 0,302. Penurunan rasio gini masyarakat di Provinsi Bali terjadi sejalan dengan semakin besarnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 40% terbawah di Provinsi Bali, yaitu sebesar 18,82% pada Maret 2022, meningkat dibanding periode September 2021 sebesar 18,04%. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Provinsi dengan *Gini Ratio* tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,439. Sementara itu, provinsi dengan *Gini Ratio* terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,236. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,384; terdapat enam provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,439), DKI Jakarta (0,423), Gorontalo (0,418), Jawa Barat (0,417), Papua (0,406), dan Sulawesi Tenggara (0,387).

Tabel 3.16 *Gini Ratio* Menurut Provinsi, Maret 2021–Maret 2022.

Provinsi	Maret 2021			September 2021			Maret 2022		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,362	0,275	0,324	0,357	0,282	0,323	0,348	0,272	0,311
Sumatera Utara	0,344	0,250	0,314	0,339	0,257	0,313	0,343	0,249	0,312
Sumatera Barat	0,329	0,254	0,306	0,327	0,252	0,300	0,329	0,247	0,300
Riau	0,367	0,279	0,326	0,369	0,276	0,327	0,363	0,282	0,326
Jambi	0,354	0,288	0,321	0,347	0,284	0,315	0,351	0,292	0,320
Sumatera Selatan	0,360	0,315	0,341	0,363	0,314	0,340	0,358	0,311	0,339
Bengkulu	0,384	0,264	0,326	0,381	0,258	0,321	0,370	0,262	0,315
Lampung	0,346	0,288	0,323	0,342	0,288	0,314	0,341	0,284	0,314
Bangka Belitung	0,265	0,221	0,256	0,259	0,215	0,247	0,248	0,206	0,236

Kepulauan Riau	0,341	0,256	0,343	0,337	0,253	0,339	0,342	0,247	0,342
DKI Jakarta	0,409	-	0,409	0,411	-	0,411	0,423	-	0,423
Jawa Barat	0,423	0,321	0,412	0,417	0,324	0,406	0,428	0,322	0,417
Jawa Tengah	0,398	0,326	0,372	0,393	0,324	0,368	0,404	0,322	0,374
DI Yogyakarta	0,448	0,334	0,441	0,443	0,325	0,436	0,446	0,332	0,439
Jawa Timur	0,387	0,324	0,374	0,379	0,319	0,364	0,388	0,323	0,371
Banten	0,369	0,280	0,365	0,365	0,278	0,363	0,367	0,287	0,363
Bali	0,387	0,301	0,378	0,379	0,302	0,375	0,371	0,294	0,363
Nusa Tenggara Barat	0,413	0,332	0,381	0,420	0,331	0,384	0,406	0,325	0,373
Nusa Tenggara Timur	0,327	0,311	0,346	0,322	0,306	0,339	0,324	0,304	0,334
Kalimantan Barat	0,341	0,267	0,313	0,337	0,268	0,315	0,342	0,265	0,314
Kalimantan Tengah	0,353	0,292	0,323	0,356	0,284	0,320	0,348	0,292	0,319
Kalimantan Selatan	0,359	0,265	0,330	0,352	0,257	0,325	0,345	0,263	0,317
Kalimantan Timur	0,339	0,288	0,334	0,337	0,281	0,331	0,334	0,283	0,327
Kalimantan Utara	0,289	0,272	0,292	0,284	0,264	0,285	0,269	0,269	0,272
Sulawesi Utara	0,365	0,352	0,365	0,359	0,347	0,359	0,362	0,354	0,365
Sulawesi Tengah	0,343	0,279	0,316	0,351	0,278	0,326	0,343	0,272	0,308
Sulawesi Selatan	0,392	0,338	0,382	0,387	0,334	0,377	0,388	0,336	0,377
Sulawesi Tenggara	0,411	0,347	0,390	0,402	0,353	0,394	0,404	0,352	0,387
Gorontalo	0,398	0,397	0,408	0,407	0,390	0,409	0,409	0,395	0,418
Sulawesi Barat	0,446	0,321	0,356	0,451	0,326	0,366	0,448	0,322	0,362
Maluku	0,301	0,258	0,314	0,302	0,250	0,316	0,297	0,259	0,301
Maluku Utara	0,298	0,265	0,300	0,295	0,256	0,278	0,300	0,247	0,279
Papua Barat	0,322	0,407	0,380	0,313	0,399	0,374	0,294	0,411	0,370
Papua	0,301	0,422	0,397	0,307	0,419	0,396	0,315	0,427	0,406
INDONESIA	0,401	0,315	0,384	0,398	0,314	0,381	0,403	0,314	0,384

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Capain Gini Ratio Provinsi Bali bila dibandingkan dengan Nasional, Gini Ratio Provinsi Bali masih lebih bagus dari target Nasional, ini tercermin bahwa ketimbangan di Provinsi Bali dapat di kendalikan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana 2018-2023.

Solusi Permasalahan :

Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai Upaya pemerataan Ekonomi di Provinsi Bali, langkah yang dilaksanakan meliputi :

1. Pembangunan Desrinasi Pariwisata Baru di Kabupaten Klungkung dengan membangun Pengembangan Pusat Kebudayaan Bali;
2. Mempercepat askses penyaluran komoditas dari kabupaten ke Kota, dengan mebangun Shortcut Singaraja-Mengwitani;
3. Mengembangkan Badara Udara Baru di Utara Provinsi Bali;

4. Mengembangkan jalan Tol Gilimanuk-mengwi;
5. Mempercepat proyek Pelabuhan Segitiga Sanur- Nusa Penida-Nusa Ceningan
6. Membina dan memberikan bimbingan UMKM malai tahap Produksi, Promosi dan Pemasaran;
7. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Desa Adat di seluruh Desa di Provinsi Bali;

1.7 Investasi dan Jumlah Ekspor Provinsi Bali Tahun 2022

Kinerja komponen investasi mengalami akselerasi pada triwulan III 2022. Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) tercatat sebesar 9,43%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh moderat 3,96%. Akselerasi tersebut sejalan dengan keberlanjutan pembangunan proyek strategis yang semakin gencar dilaksanakan, serta berlanjutnya proyek Perpres No.116/2021 dalam rangka menyambut puncak perhelatan KTT G20 Presidensi Indonesia. Peningkatan kinerja investasi terkonfirmasi melalui hasil pencatatan BKPM yang menunjukkan adanya kenaikan kegiatan investasi oleh pelaku usaha asing melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi PMA di Bali pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 102 ribu US\$ atau tumbuh 139,59%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,54%. Berdasarkan sektor, realisasi PMA di Bali masih didominasi oleh sektor tersier, terutama sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran (pangsa 37,17%) serta hotel dan restoran (pangsa 24,73%). Di sisi lain, investasi oleh pihak Pemerintah dan swasta juga masih berjalan *ontrack*, di antaranya keberlanjutan pembangunan berbagai PSN dan pengembangan KEK Kesehatan di Sanur.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian/Realisasi Investasi, Ekspor dan Impor Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

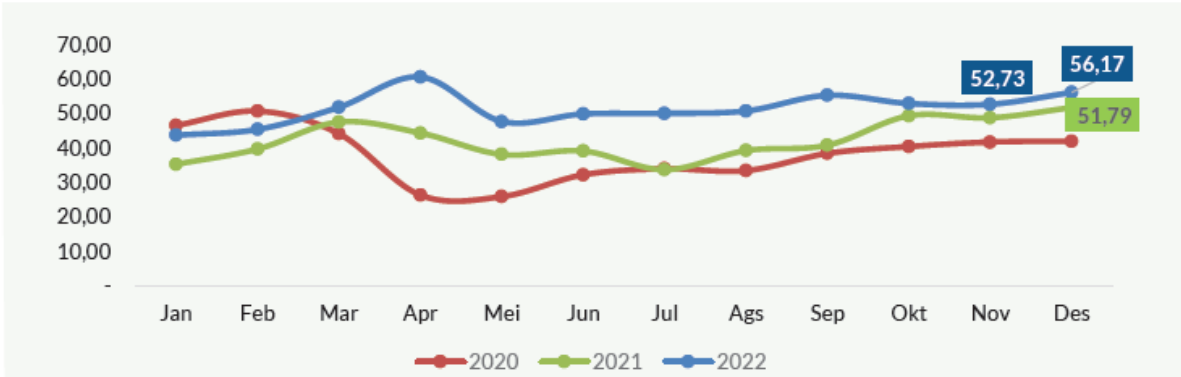
NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investasi	21.15	5.11	23,52	460,27	28,10	83,70
2	Jumlah Ekspor	110	312.00	347,26	111,30	684,662	50,76

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Akselerasi kinerja investasi juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) serta peningkatan impor barang modal. Indikator kondisi investasi pada SKDU di Bali menunjukkan peningkatan realisasi investasi dari 12,36% (Saldo Bersih Tertimbang/SBT) pada triwulan II 2022 menjadi 17,57% (SBT) pada triwulan laporan. Adapun peningkatan terjadi pada LU Industri Pengolahan, LU Akmamin, dan LU Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, impor barang modal juga tumbuh signifikan pada triwulan III 2022 sebesar 759,59%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 103,06%.

Kinerja ekspor Bali pada bulan Desember 2022 tercatat berada di atas capaian bulan Desember **dua tahun** sebelumnya. Nilai ekspor Bali pada bulan Desember **2022** tercatat sebesar US\$ 56.165.313, naik setinggi 6,52 persen dibandingkan nilai ekspor bulan November 2022 yang tercatat sebesar US\$ 52.729.107. Secara *year on year*, nilai ekspor Bali pada bulan Desember 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2021 atau naik 8,45 persen.

Grafik 3.4 Perkembangan Nilai Ekspor Barang Provinsi Bali, 2020-2022 (Juta US\$).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Dari sepuluh negara tujuan utama ekspor barang Provinsi Bali di bulan Desember 2022, secara *month to month* tujuh negara tujuan tercatat menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan paling tinggi secara persentase tercatat pada tujuan Tiongkok (232,87 persen) yang didominasi naiknya nilai ekspor produk ikan, krustasea, dan moluska (HS 03). Jika dibandingkan dengan catatan bulan Desember 2021 (*y-o-y*), dari sepuluh tujuan utama ekspor Bali, nilai ekspor pada enam negara tujuan utama tercatat naik, dengan peningkatan tertinggi tercatat pada nilai ekspor ke Singapura (108,79 persen) yang didominasi naiknya ekspor produk pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) (HS 62). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.18.

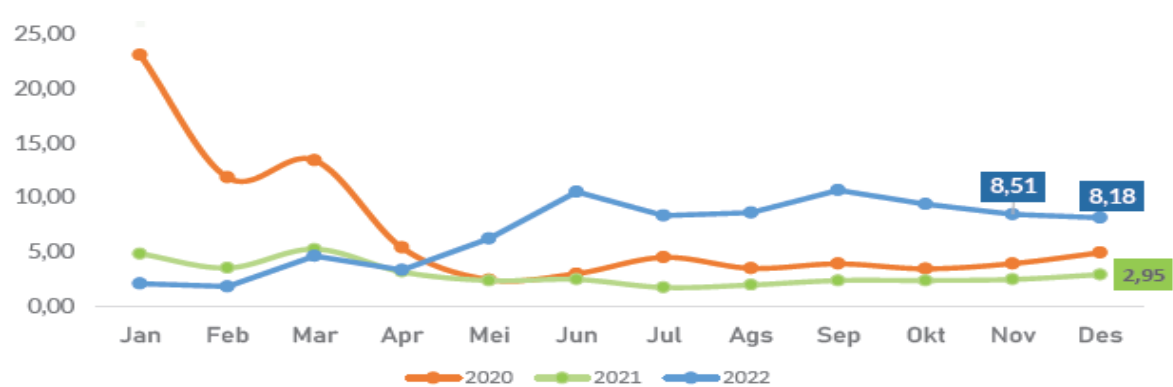
Tabel 3.18 Ekspor Barang Provinsi Bali Menurut 10 Negara Tujuan Utama Keadaan bulan Desember 2021, November 2022 dan Desember 2022

No.	Negara Tujuan	Desember 2021 (US\$)	November 2022 (US\$)	Desember 2022 Nilai (US\$)	%	Perubahan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Des 21 ke Des 22	Nov 22 ke Des 22
1	AMERIKA SERIKAT	16.652.473	13.435.145	14.882.937	26,50	-10,63	10,78
2	SINGAPURA	3.232.125	7.000.800	6.748.493	12,02	108,79	-3,60
3	AUSTRALIA	3.362.494	7.985.178	5.566.634	9,91	65,55	-30,29
4	TIONGKOK	5.591.632	1.347.312	4.484.817	7,99	-19,79	232,87
5	TAIWAN	3.857.982	1.057.214	2.920.651	5,20	-24,30	176,26
6	PERANCIS	1.216.360	1.608.252	2.054.981	3,66	68,95	27,78
7	JEPANG	1.940.962	3.262.367	1.954.524	3,48	0,70	-40,09
8	THAILAND	1.155.764	1.523.728	1.667.661	2,97	44,29	9,45
9	KANADA	1.419.447	908.511	1.576.948	2,81	11,10	73,58
10	BELANDA	1.735.410	871.295	1.528.484	2,72	-11,92	75,43
11	LAINNYA	11.623.448	13.729.306	12.779.184	22,75	9,94	-6,92
Total		51.788.098	52.729.107	56.165.313	100,00	8,45	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Porvinsi Bali Tahun 2022

Nilai impor barang Provinsi Bali dari luar negeri di bulan Desember 2022 berada di atas capaian nilai impor di bulan yang sama pada dua tahun sebelumnya. Nilai impor bulan Desember 2022 tercatat sebesar US\$ 8.180.356 turun sedalam 3,92 persen jika dibandingkan catatan bulan November 2022 (m-t-m) yang tercatat sebesar US\$ 8.513.774. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan Desember 2021 (y-o-y), nilai impor Bali tercatat naik setinggi 176,93 persen.

Grafik 3.5 Perkembangan Nilai Ekspor Barang Provinsi Bali, 2020-2022 (Juta US\$).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Dari sepuluh negara utama asal impor di bulan Desember 2022, secara *month to month*, nilai impor dari empat negara tercatat turun, dengan penurunan paling dalam secara nilai tercatat pada nilai impor yang berasal dari Jerman (-40,14 persen) yang didominasi oleh turunnya impor produk logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71).

Tabel 3.18 Impor Barang Provinsi Bali Menurut 10 Negara Asal Utama Keadaan Bulan Desember 2021, November 2022 dan Desember 2022

No.	Negara Asal Barang	Desember 2021 (US\$)	November 2022 (US\$)	Desember 2022		Perubahan (%)	
				Nilai (US\$)	%	Des 21 ke Des 22	Nov 22 ke Des 22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	AMERIKA SERIKAT	398.386	1.954.915	2.010.277	24,57	404,61	2,83
2	TIONGKOK	412.965	1.185.709	1.359.852	16,62	229,29	14,69
3	AUSTRALIA	415.393	1.080.174	931.518	11,39	124,25	-13,76
4	HONGKONG	116.100	1.234.679	784.278	9,59	575,52	-36,48
5	PERANCIS	10.428	109.946	589.561	7,21	5553,63	436,23
6	THAILAND	133.351	222.069	429.321	5,25	221,95	93,33
7	JERMAN	599.716	688.927	412.389	5,04	-31,24	-40,14
8	ITALIA	5.160	193.729	240.074	2,93	4552,60	23,92
9	SINGAPURA	817.597	227.014	175.776	2,15	-78,50	-22,57
10	INGGRIS	-	70.712	135.618	1,66	∞	91,79
11	LAINNYA	44.900	1.545.900	1.111.692	13,59	2375,93	-28,09
Total		2.953.996	8.513.774	8.180.356	100,00	176,93	-3,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Nilai ekspor Bali pada bulan November 2022 jika dilihat dari jenis komoditasnya, ekspor Bali didominasi oleh produk ikan, krustasea, dan moluska (HS 03), yang tercatat sebesar US\$ 15.938.646 dengan *share* sebesar 28,38 persen dari total ekspor. Dari 10 besar komoditas utama ekspor, enam komoditas tercatat naik dengan peningkatan tertinggi tercatat pada nilai ekspor produk karya seni, barang kolektor, dan barang antik

(HS 97) yakni naik hingga 376,96 persen, yang utamanya naik ke Singapura. Jika dibandingkan dengan capaian bulan Desember 2021, nilai ekspor lima komoditas utama tercatat naik, dengan peningkatan tertinggi tercatat pada ekspor produk karya seni, barang kolektor, dan barang antik (HS 97).

Tabel 3.19 Ekspor Barang Provinsi Bali Menurut 10 Komoditas Utama Keadaan Bulan Desember 2021, November 2022 dan Desember 2022

No.	Komoditas	Desember 2021 (US\$)	November 2022 (US\$)	Desember 2022		Perubahan (%)	
				Nilai (US\$)	%	Des 21 ke Des 22	Nov 22 ke Des 22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	15.544.399	10.228.027	15.938.646	28,38	2,54	55,83
2	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	5.694.763	9.119.726	8.662.096	15,42	52,11	-5,02
3	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	5.901.535	7.891.482	5.176.560	9,22	-12,28	-34,40
4	Kayu dan barang dari kayu (44)	3.908.201	3.287.068	3.783.524	6,74	-3,19	15,10
5	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	3.102.033	1.782.038	2.877.354	5,12	-7,24	61,46
6	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	2.237.463	2.576.362	2.675.877	4,76	19,59	3,86
7	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	2.742.321	2.915.673	2.617.179	4,66	-4,56	-10,24
8	Barang anyaman (46)	1.726.052	1.552.001	1.466.477	2,61	-15,04	-5,51
9	Barang dari kulit samak (42)	1.034.313	964.091	1.051.986	1,87	1,71	9,12
10	Karya seni, barang kolektor, dan barang antik (97)	184.812	157.358	750.534	1,34	306,11	376,96
11	Lainnya	9.712.206	12.255.280	11.165.080	19,88	14,96	-8,90
Total		51.788.098	52.729.107	56.165.313	100,00	8,45	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Dari sisi nilai impor, produk mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) tercatat sebagai komoditas impor dengan nilai terbesar pada bulan Desember 2022 dengan *share* 23,39 persen dari total impor Bali. Dari sepuluh komoditas utama impor, empat di antaranya tercatat mengalami penurunan dengan yang terdalam tercatat pada impor produk kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) sedalam 34,87 persen.

Jika dibandingkan dengan catatan bulan Desember 2021, dari sepuluh komoditas utama impor, seluruhnya tercatat meningkat dengan peningkatan tertinggi tercatat pada impor produk minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) setinggi 10.273,32 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Impor Barang Provinsi Bali Menurut 10 Komoditas Utama Keadaan bulan Desember 2021, November 2022, dan Desember 2022

No.	Komoditas	Desember 2021 (US\$)	November 2022 (US\$)	Desember 2022		Perubahan (%)	
				Nilai (US\$)	%	Des 21 ke Des 22	Nov 22 ke Des 22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	318.610	1.810.635	1.913.771	23,39	500,66	5,70
2	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (84)	1.106.752	1.533.295	1.140.767	13,95	3,07	-25,60
3	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	9.139	343.537	948.018	11,59	10.273,32	175,96
4	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	704.419	953.801	883.636	10,80	25,44	-7,36
5	Barang dari kulit samak (42)	100.853	338.639	351.337	4,29	248,37	3,75
6	Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)	38.587	323.490	326.096	3,99	745,09	0,81
7	Jam dan arloji serta bagiannya (91)	123.779	313.830	294.441	3,60	137,88	-6,18
8	Kendaraan udara dan bagiannya (88)	259.214	426.566	277.837	3,40	7,18	-34,87
9	Plastik dan barang dari plastik (39)	19.631	168.032	185.899	2,27	846,97	10,63
10	Barang dari besi dan baja (73)	40.602	116.739	184.115	2,25	353,46	57,72
11	Lainnya	232.410	2.185.210	1.674.439	20,47	620,47	-23,37
Total		2.953.996	8.513.774	8.180.356	100,00	176,93	-3,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Posisi nilai neraca perdagangan Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 tercatat surplus sebesar US\$ 47.984.957. Jika dibandingkan dengan posisi bulan November 2022 yang tercatat surplus US\$ 44.215.333, sumbangan surplus neraca perdagangan Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 tercatat naik sebesar US\$ 3.769.624. Jika dibandingkan dengan sumbangan neraca perdagangan di bulan Desember 2021 yang sebesar US\$ 48.834.102, surplus neraca perdagangan Provinsi Bali bulan Desember 2022 tercatat lebih rendah. Meskipun demikian, pada bulan Desember 2022, Bali kembali menyumbang surplus pada neraca perdagangan (luar negeri) Nasional.

Strategis arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor, Impor dan Investasi :

Sejalan dengan upaya mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu Bali yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahter dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945, maka strategi pengembangan industri dan perdagangan, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan Kompetensi Inti Daerahnya masing-masing. Peningkatan keterampilan para pengrajin melalui pelatihan dan magang. Selain itu pula menggunakan sistem kluster dan fokus pada satu desa satu produk (OVOP).
2. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku industri kerajinan. Memfasilitasi adanya kerjasama dengan daerah lain sebagai penghasil bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengrajin.
3. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri, menyarankan agar para pengusaha/pengrajin mau dan dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG) sehingga terwujud efisiensi produksi.
4. Mengupayakan bantuan tenaga ahli teknik dan desain untuk diversifikasi produk. Memfasilitasi agar para pengrajin mendapat bantuan tenaga yang ahli dibidang teknik dan desain produk kerajinan, sehingga mampu menghasilkan inovasi produk dengan desain yang memenuhi selera pasar dan dapat bersaing dipasar global.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melakukan sosialisasi dan bimbingan melalui pembentukan klinik HKI.
6. Melakukan fasilitasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok industri kreatif, meliputi 15 sub sektor yaitu periklanan, arsitektur, animasi, kerajinan, desain,

fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi & radio, riset dan pengembangan.

7. Memfasilitasi peningkatan promosi maupun pemasaran. Mengupayakan agar para produsen/pedagang dapat mempromosikan sekaligus menjual produknya di beberapa daerah di Indonesia, serta di beberapa negara lain yang dipandang potensial sebagai pangsa pasar ekspor. Selain itu sebaiknya Provinsi Bali mempunyai fasilitas tempat pameran bertaraf internasional sehingga para pengusaha dapat melakukan pameran/promosi di Bali dan tidak harus berpameran di daerah lain atau negara lain. Bahkan daerah lainpun dapat berpameran di Bali, hal ini disebabkan nama Bali yang sudah terkenal di tingkat nasional dan internasional, dimana Bali dapat menjadi market point. Dengan terbangunnya pameran bertaraf internasional pameran/promosi dapat ditingkatkan jumlah pesertanya maupun intensitas pelaksanaannya dengan biaya yang lebih ringan, dapat pula pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi selera pasar juga dapat direncanakan untuk membangun sebuah design centre sebagai tempat pengembangan design yang mengikuti selera pasar.
8. Memfasilitasi Peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan Mengupayakan peningkatan perlindungan konsumen, dan memperkuat sistem pengawasan barang dan jasa. Pelaksanaannya dilakukan melalui program perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama barang-barang yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, lingkungan (K3L), tertib usaha, dan tertib ukur. Optimalisasi peran laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang. Mengupayakan adanya integritas pasar yang baik, tertib, teratur, dipercaya dan pembentukan harga yang transparan merupakan salah satu cerminan terhadap tingkat efektivitas mekanisme pasar. Lancarnya distribusi barang, tersedianya stock secara berkesinambungan serta tidak adanya beban distribusi yang tidak resmi dan berlebihan merupakan wujud dari mekanisme perdagangan yang efisien.
9. Memfasilitasi pengembangan ekspor. Selain komoditi kerajinan yang sangat potensial sebagai komoditi ekspor, di Bali juga diupayakan pengembangan komoditi agro, mengingat pangsa pasar yang cukup banyak, lahan pertanian untuk agro bisnis cukup luas dan cukup subur.
10. Peningkatan peran kelembagaan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada eksportir dan importir.
11. Pembinaan untuk peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
12. Peningkatan akses pasar ke negara-negara target ekspor melalui promosi.
13. Melakukan pengembangan pasar dengan pengamatan terhadap pasar potensial, segmen pasar, pemasok dan pesaing.

14. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan *Stakeholders* dalam rangka masukan untuk kerjasama perdagangan internasional

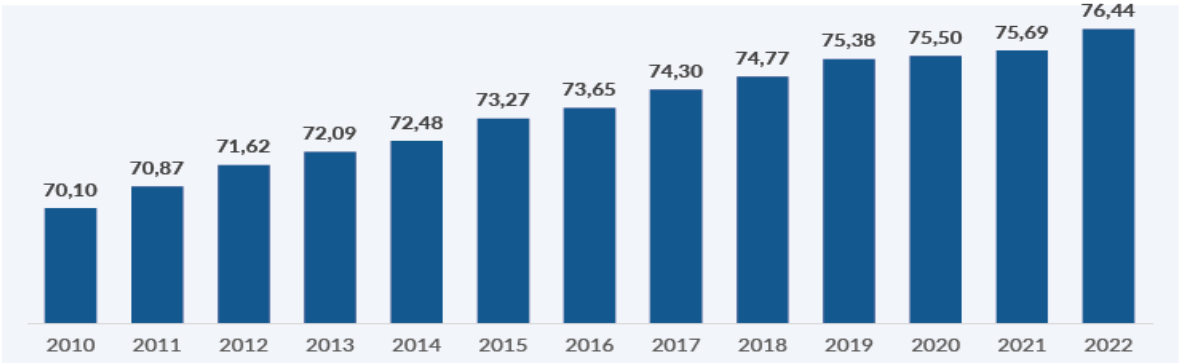
Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mencapai keberhasilan perlu ditetapkan kebijakan yang ditempuh melalui sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait guna menentukan kebijakan, diantaranya :

1. Mengembangkan Industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.
2. Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan informasi industri.
4. Menetapkan target ekspor Daerah, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitasi pelayanan publik, memanfaatkan hasil kerjasama perdagangan internasional, mendorong para pengusaha untuk menjadi eksportir dan meningkatkan partisipasi pengusaha Bali dalam jaringan global dan promosi.
5. Menjaga ketersediaan dan distribusi serta stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting
6. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan perlindungan konsumen.

1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2022. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 76,44 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,72 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali.

Grafik 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali, 2010-2022



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap dimensi penyusunnya. Tabel 3.21 menunjukkan perkembangan IPM secara periodik yang pada tahun 2022 menunjukkan keseluruhan dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan.

Grafik 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Menurut Dimensi Penyusunnya, 2010-2022

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,61	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,71	12,12	12,26	12,4	12,64	12,97	13,04	13,21	13,23	13,27	13,33	13,40	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,77	8,05	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.074	12.307	12.530	12.738	12.831	13.078	13.279	13.573	13.886	14.146	13.929	13.820	13.942
IPM		70,10	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44
Pertumbuhan IPM	%	-	1,10	1,06	0,66	0,54	1,09	0,52	0,88	0,63	0,82	0,16	0,25	0,99

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022 (Data diolah Biro Organisasi)

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian/Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IPM	75,69	76,93	76,44	99,36	80	95,55

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

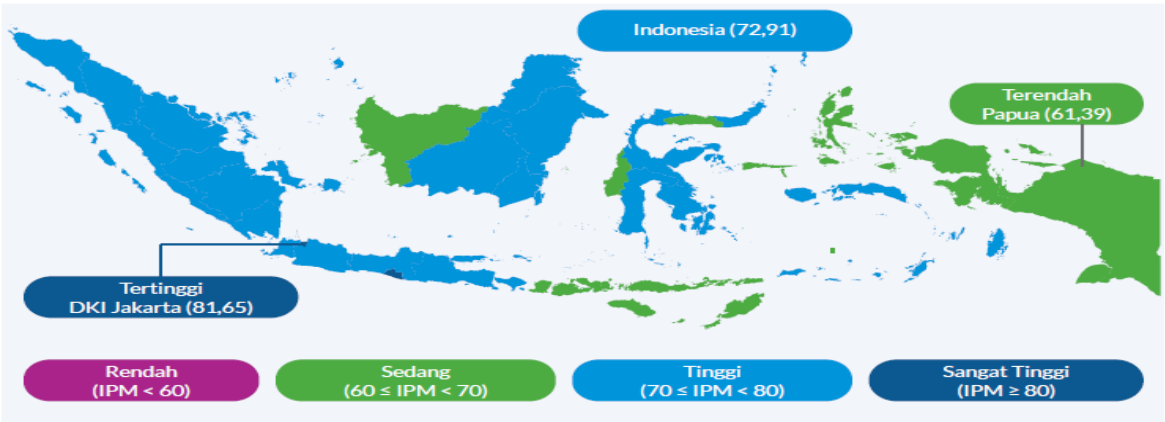
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2022 semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan nasional. IPM Bali tahun 2022 tercatat sebesar 76,44, lebih tinggi dibanding 75,69 pada tahun sebelumnya dan IPM nasional sebesar 72,91. Peningkatan IPM Bali didorong oleh peningkatan hampir pada seluruh indikator pembentuk IPM, yaitu

Umur Harapan hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,15%, 0,53%, dan 1,23%. Sementara itu, indikator pengeluaran per kapita tercatat menurun 0,78%.

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi. Terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Peringkat Kalimantan Tengah bertukar dengan Kalimantan Utara. Peringkat Kalimantan Tengah turun dari urutan ke-21 menjadi urutan ke-22, sementara Kalimantan Utara meningkat dari urutan ke-22 menjadi urutan ke-21. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (61,39), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,65).

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Gambar 3.2 IPM Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Dari beberapa Instrumen yang terdapat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Keberhasil provinsi bali dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akan dijelaskan pada halaman berikutnya.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disajikan dalam table terlampir, dan pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00	5,39
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	92,11
2	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	33	14,81
3	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105.5	97,05
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	118.5	98,13
4	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,5	72,60
5	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10.84	9,39
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	83.11	83,84
6	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.91	12,43
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	76.93	76,44
8	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	69.09	69.09
9	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	4.25	4,57
10	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	3.19	4.80
11	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.55	76.86
12	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73.98	71,44
13	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	20.86	17,64
14	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	2.642.000	1.223.000
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	83	84,5
16	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	3.10	3.05
17	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12.5	13.5
18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,4	2.5
19	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	2.731	1.793
20	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	81	75.35
21		Indeks Pemberdayaan gender	64.9	72.17
22	Meningkatnya keharmonisan tata	Persentase Daya dukung	17,64	45,42

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
	kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	lingkungan		
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.77	70,89
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	14.8	7.44
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.2	1.26
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	74	72,16

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tahun 2022 (data diolah B.organisasi

Tabel 3.23 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Inflasi Bali	1,09	3.00	5,39	55,65	3,00	55,65
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	92,11	92,11	100.00	92,11
3	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	31	33	14,81	44,87	35.00	42,31
4	Nilai Tukar Petani (NTP)	93,40	105.5	97,05	92,38	106.00	91,55
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101.50	118.5	98,13	82,81	119.20	82,32
6	Umur Harapan Hidup	72.24	72,5	72,60	100,13	72.5	100,13
7	Rata-rata lama sekolah	9,06	10.84	9,39	86,62	11,40	82,36
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,96	83.11	83,84	100,87	83,30	100,64
9	Angka harapan lama sekolah	13,40	13.91	12,43	92,55	14,05	88,46
10	Indeks Pembangunan Manusia	75.69	76.93	76,44	99,93	80	95,55
11	Indeks Daya Saing SDM Bali	67	69.09	69.09	100	75	92,12
12	Persentase Kemiskinan	4,71	4.25	4,57	92,57	3,75	82,05
13	Tingkat pengangguran terbuka	5,37	3.19	4.80	66,45	2,32	48,33
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.54	76.55	76.86	100.40	76,80	97.53
15	Indeks Kebahagiaan	73,98	73.98	71,44	96.56	74,98	95.27
16	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	15.32	20.86	17,64	84.56	25.93	68.02
17	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620	2.642.000	1.223.000	46,29	3,323,470	36.79
18	Indeks Kepuasan wisatawan	81	83	84,5	101.80	85	99.41
19	Pertumbuhan Ekonomi	4,52	3.10	3.05	98.38	5.00	61
20	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,50	12.5	13.5	108	13	103.84
21	Indeks konektivitas	2.5	2,4	2.5	104.16	2.3	108.69
22	Angka Kriminalitas	2.923	2,731	1.793	152.31	2.262	126.15
23	Indeks demokrasi	82,37	81	75.35	93.02	81	93.02

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdhp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Indeks Pemberdayaan gender	94.01	64.9	72.17	111.20	65	111.03
25	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46	17,64	45,42	257.48	17.82	254.88
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,98	63.77	70,89	111.16	64,34	110.18
27	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3	14.8	7.44	198.92	15	201.61
28	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14	1.2	1.26	105	1.4	90
29	Indeks Reformasi Birokrasi	70.10	74	72.16	97.51	76	94.94

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tahun 2022 (data diolah B. Organisasi)

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali 2022

Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022, ada beberapa ada beberapa indikator kinerja utama tidak dijabarkan dibawah, dikarenakan indikator tersebut telah dijelaskan pada Capaian Kinerja Makro pada halaman diatas, seperti : **Inflasi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi**. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 dijabarkan secara umum, mengingat indikator satu dengan yang lain sama-sama mendukung sasaran pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023.

Tabel 3.19 Sasaran : “Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak, Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan local, Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali” **Perbandingan Capaian/Realisasi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdhp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama	100	100	92,11	92,11	100.00	92,11
2	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	31	33	14,81	44,87	35.00	42,31
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	93,40	105.5	97,05	92,38	106.00	91,55
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101.50	118.5	98,13	82,81	119.20	82,32

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Ketersediaan Pangan utama dapat dilihat dari komponen peningkatan produktifias tanaman pangan dan holtikultura, Peningkatan produktifitas perkebunan, peningkatan populasi ternak. Dalam halnya Produktivitas Padi pada tahun 2022 untuk Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,58%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2022 seluas 105.201 Ha dibandingkan tahun 2021 seluas 90,908 Ha. Sedangkan Produksi Padi tahun 2022 dengan jumlah 681.911 Kuintal meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 532.618 Kuintal.

Pada Produktivitas komoditas Jagung mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2022 sebesar 34,39 Ku/Ha dibandingkan tahun 2021 sebesar 36,83 Ku/Ha atau 6,61% hal ini disebabkan oleh adanya anomali iklim yang menyebabkan panen jagung tidak optimal.

Pada produktivitas komoditas Kedelai mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2022 sebesar 17,68 Ku/Ha, dibandingkan tahun 2021 sebesar 18,81 Ku/Ha atau 5,99% hal ini disebabkan oleh terjadinya anomali iklim yakni terjadinya musim hujan hampir sepanjang tahun.

Produktivitas komoditas bawang mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 17,06% dibandingkan tahun 2021, hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen dan produksi, pada tahun 2022 luas panen seluas 1.382 Ha dibandingkan tahun 2021 seluas 990 Ha. Produksi bawang pada tahun 2022 sebesar 232.151 Kuintal meningkat dari tahun 2021 sebesar 142.074 kuintal, hal ini disebabkan adanya inovasi penerapan teknologi budidaya pertanian, petani bawang melakukan penyesesuaian penanaman dengan anomali iklim yang terjadi. Sedangkan produktivitas tanaman cabe mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 11,60% dibandingkan tahun 2021, hal ini disebabkan oleh terjadinya anomali iklim berupa curah hujan hampir sepanjang tahun sehingga menyebabkan tanaman cabe mengalami fusarium, hal ini berakibat turunya produksi sebesar 61.564 kuintal, yang mana pada tahun 2021 produksi komoditas cabe sebesar 353.313 kuintal dan pada tahun 2022 sebesar 291.749 kuintal, berikut data realisasi produktifitas perkomoditi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26 Realisasi Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	komoditas	Luas Panen		Produksi		Produktivitas		persentase (-/+)
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	
1	Padi	105,201	90,982	618,911	532,168	58.83	58.49	0.58
2	Jagung	18,162	15,945	62,462	58,722	34.39	36.83	(6.61)
3	Kedelai	1,672	1,244	2,956	2,339	17.68	18.81	(5.99)
1	Bawang	1,382	990	232,151	142,074	168	144	17.06
2	Cabe	3,499	3,746	291,749	353,313	83	94	-11.60
	Jumlah	129,916	112,907	1,208,230	1,088,617	9	10	-3.54

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketangan Pangan Tahun 2022

Perbandingan produktivitas padi sawah di Bali sebesar 58,83 Ku/Ha lebih besar dibandingkan rata – rata produktivitas nasional hanya sebesar 52,26 Ku/Ha hal ini disebabkan oleh penerapan inovasi teknologi dalam penanaman padi, meskipun pada tahun 2022 terjadi anomali iklim yakni beriklim basah. Rata – rata Produktivitas Padi secara nasional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.26 Tabel Produktivitas Padi nasinoal tahun 2022

NO	Provinsi	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi		
		Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
		2022	2022	2022
1	ACEH	276622.14	55.03	1533138.00
2	SUMATERA UTARA	423522.28	52.00	2131672.00
3	SUMATERA BARAT	288510.67	48.36	1422874.00
4	RIAU	54317.04	40.98	227346.30
5	JAMBI	63760.91	46.29	289276.80
6	SUMATERA SELATAN	516259.59	51.44	2759343.00
7	BENGKULU	58663.78	48.67	290155.90
8	LAMPUNG	516910.01	50.77	2661363.00
9	KEP. BANGKA BELITUNG	15908.70	38.57	62641.49
10	KEP. RIAU	196.53	31.65	589.68
11	DKI JAKARTA	535.63	58.03	2741.38
12	JAWA BARAT	1685295.13	56.81	9620534.00
13	JAWA TENGAH	1699436.08	56.69	9579069.00
14	DI YOGYAKARTA	112148.00	51.77	580686.00
15	JAWA TIMUR	1704759.48	56.02	9686760.00
16	BANTEN	338454.39	50.38	1776812.00
17	BALI	114790.87	58.83	691818.90
18	NUSA TENGGARA BARAT	269827.26	51.39	1456923.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	185737.54	41.85	776867.10
20	KALIMANTAN BARAT	272115.99	31.90	814743.30
21	KALIMANTAN TENGAH	109756.22	30.28	353864.60
22	KALIMANTAN SELATAN	225483.04	39.97	873130.30
23	KALIMANTAN TIMUR	64031.22	36.92	232143.50
24	KALIMANTAN UTARA	10550.13	33.74	37966.25
25	SULAWESI UTARA	59081.54	39.35	253478.90
26	SULAWESI TENGAH	173238.56	47.59	771524.90
27	SULAWESI SELATAN	1042107.35	51.67	5341021.00
28	SULAWESI TENGGARA	119662.53	41.57	494855.90
29	GORONTALO	48497.60	48.12	249708.90
30	SULAWESI BARAT	71470.11	52.05	364683.20
31	MALUKU	23991.26	41.24	92640.14
32	MALUKU UTARA	6408.19	36.05	24705.38
33	PAPUA BARAT	5475.82	41.98	24031.60
34	PAPUA	48987.63	44.05	191109.20
	INDONESIA	10606513.22	52.26	55670219.00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketangan Pangan Tahun 2022

Walaupun Indikator Ketahanan Pangan Utama yang ditargetnya pencapaian 100% pada 2022, terealisasi sebesar 92,11% dengan tingkat tercepatan 92,11%, ketersediaan pangan Provinsi Bali masih sangat aman sehingga kelangkaan yang mengakibatkan harga pangan naik di Bali masih tidak terjadi seperti daerah lain di Indonesia.

Perkembangan indeks **Nilai Tukar Petani (NTP)** Provinsi Bali tercatat 96,59 pada bulan November 2022, naik 0,74 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 95,88. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima petani (**It**)

sebesar 1,06 persen yang lebih besar dibandingkan kenaikan pada indeks yang dibayar petani (**Ib**) yang tercatat sebesar 0,32 persen. **It** tercatat naik dari 108,47 menjadi 109,62 pada bulan November 2022 dan **Ib** juga tercatat naik dari 113,13 menjadi 113,50.

Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali pada bulan November 2022 masih berada dibawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri atas dua hal pokok, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Dari 5 subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP, tercatat hanya 1 subsektor yang mampu mencapai angka 100 di bulan November 2022, yaitu subsektor peternakan. 5 subsektor yang menjadi komponen Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai berikut :

1. NTP Tanaman Pangan (NTPP)

November 2022, indeks nilai tukar petani subsektor tanaman pangan tercatat naik 1,14 persen dari 93,47 pada bulan Oktober 2022 menjadi 94,53. Kenaikan pada indeks NTP subsektor tanaman pangan disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani (**It**) sebesar 1,42 persen, lebih besar daripada naiknya indeks yang dibayar petani (**Ib**) yang tercatat sebesar 0,28 persen.

It tercatat naik dari 105,85 menjadi 107,35 pada bulan November 2022. Kenaikan pada **It** dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok padi (gabah) setinggi 1,59 persen. Sedangkan, indeks kelompok palawija tercatat turun sedalam 0,94 persen.

Sementara itu, **Ib** tercatat naik dari 113,24 menjadi 113,56. Hal ini disebabkan oleh naiknya indeks kelompok konsumsi rumah tangga setinggi 0,36 persen dan naiknya indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) setinggi 0,04 persen.

2. NTP Tanaman Hortikultura (NTPH)

Indeks NTP Subsektor Hortikultura (NTPH) pada bulan November 2022 tercatat naik sebesar 2,47 persen, dari 94,18 pada bulan sebelumnya menjadi 96,50. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya Indeks yang Diterima Petani (**It**) sebesar 2,73 persen yang lebih besar dibandingkan Indeks yang Dibayar Petani (**Ib**) yang tercatat naik sebesar 0,25 persen.

Kenaikan yang terjadi pada **It** disebabkan oleh naiknya indeks pada seluruh kelompok penyusunnya. Kenaikan paling tinggi tercatat pada indeks kelompok sayur-sayuran yang naik setinggi 4,39 persen, disusul indeks kelompok tanaman obat-obatan yang naik setinggi 1,31 persen, dan indeks kelompok tanaman buah-buahan yang naik setinggi 0,14 persen. Komoditas yang dominan berpengaruh pada naiknya **It**, antara lain tomat, bawang merah, dan jeruk.

3. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Pada November 2022, indeks NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) tercatat sebesar 94,46 atau naik 0,42 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh **It** yang naik setinggi 0,74 persen, lebih besar dari **Ib** yang naik setinggi 0,32 persen.

Kenaikan indeks harga yang diterima petani (**It**) dari 105,60 menjadi 106,38 pada bulan November 2022 dominan disebabkan oleh naiknya indeks harga komoditas perkebunan rakyat, khususnya kopi dan kakao/coklat biji.

Sementara itu, kenaikan pada **Ib** dari 112,25 menjadi 112,61 dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,41 persen dan naiknya indeks BPPBM sebesar 0,03 persen.

4. NTP Peternakan (NTPT)

Indeks NTP subsektor peternakan (NTPT) pada bulan November 2022 tercatat turun sedalam 0,21 persen, dari 100,27 menjadi 100,06. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya **It** sebesar 0,20 persen, lebih rendah dari **Ib** yang tercatat naik setinggi 0,41 persen.

It naik dari 113,47 menjadi 113,69, dipengaruhi oleh naiknya tiga indeks kelompok penyusunnya, yaitu indeks kelompok hasil ternak (khususnya telur itik/bebek) yang naik paling tinggi sebesar 0,92 persen, disusul indeks kelompok unggas (khususnya ayam ras pedaging) yang naik 0,51 persen, dan indeks kelompok ternak besar (khususnya sapi potong) yang naik 0,11 persen. Sebaliknya, indeks kelompok ternak kecil (khususnya babi) tercatat turun sedalam 0,78 persen.

Pada sisi **Ib** tercatat naik dari 113,16 menjadi 113,62 disumbang oleh indeks konsumsi rumah tangga naik setinggi 0,28 persen dan indeks BPPBM naik setinggi 0,56 persen.

5. NTP Perikanan (NTNP)

Subsektor perikanan mencakup kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Indeks NTP Subsektor Perikanan (NTNP) bulan November 2022 tercatat naik setinggi 0,56 persen dari kondisi bulan lalu yang tercatat 98,72 menjadi 99,27. Hal ini terjadi karena **It** naik setinggi 0,70 persen, lebih tinggi dari **Ib** yang tercatat naik setinggi 0,14 persen.

It yang tercatat naik dari 114,26 menjadi 115,06 disebabkan oleh naiknya indeks kelompok perikanan tangkap sebesar 0,73 persen dan indeks kelompok perikanan budidaya yang tercatat naik sebesar 0,49 persen.

Selanjutnya, kenaikan pada **Ib** dari 115,74 menjadi 115,90 terjadi karena naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,24 persen dan naiknya indeks BPPBM sebesar 0,04 persen.

Tabel 3.24 Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali serta Persentase Perubahannya, Oktober 2022 - November 2022.

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan Indeks
	Oktober 2022	November 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan (NTPP)	93,47	94,53	1,14
a. Indeks Diterima Petani	105,85	107,35	1,42
- Padi	105,55	107,23	1,59
- Palawija	110,10	109,06	-0,94
b. Indeks Dibayar Petani	113,24	113,56	0,28
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,39	113,80	0,36
- Indeks BPPBM	112,79	112,84	0,04
2. Hortikultura (NTPH)	94,18	96,50	2,47
a. Indeks Diterima Petani	107,15	110,07	2,73
- Sayur-sayuran	109,54	114,35	4,39
- Buah-buahan	103,69	103,83	0,14
- Tanaman Obat-Obatan	94,24	95,48	1,31
b. Indeks Dibayar Petani	113,77	114,06	0,25
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,44	113,73	0,26
- Indeks BPPBM	115,35	115,60	0,22
3. Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	94,07	94,46	0,42
a. Indeks Diterima Petani	105,60	106,38	0,74
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	105,60	106,38	0,74
b. Indeks Dibayar Petani	112,25	112,61	0,32
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	112,65	113,11	0,41
- Indeks BPPBM	110,89	110,93	0,03
4. Peternakan (NTPT)	100,27	100,06	-0,21
a. Indeks Diterima Petani	113,47	113,69	0,20
- Ternak Besar	120,57	120,70	0,11
- Ternak Kecil	101,51	100,71	-0,78
- Unggas	105,92	106,46	0,51
- Hasil Ternak	123,78	124,92	0,92
b. Indeks Dibayar Petani	113,16	113,62	0,41
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,11	113,43	0,28
- Indeks BPPBM	113,21	113,84	0,56
5. Perikanan (NTNP)	98,72	99,27	0,56
a. Indeks Diterima Petani	114,26	115,06	0,70
- Tangkap	113,95	114,79	0,73
- Budidaya	116,69	117,26	0,49
b. Indeks Dibayar Petani	115,74	115,90	0,14
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,13	113,40	0,24
- Indeks BPPBM	118,86	118,90	0,04
NTP Gabungan	95,88	96,59	0,74
a. Indeks Diterima Petani	108,47	109,62	1,06
b. Indeks Dibayar Petani	113,13	113,50	0,32
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,14	113,51	0,33
- Indeks BPPBM	113,02	113,27	0,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Bulan November 2022, indeks **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** tercatat sebesar 98,71 naik setinggi 0,60 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 98,13. Kenaikan ini disebabkan oleh **It** yang naik setinggi 0,73 persen, lebih besar dibandingkan **Ib** yang tercatat naik setinggi 0,13 persen.

Kenaikan **It** dari 113,95 menjadi 114,79 disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok penangkapan ikan di laut (khususnya ikan cakalang, cumi-cumi, dan ikan

tengiri) setinggi 0,73 persen. Sementara itu, indeks kelompok penangkapan ikan di perairan umum tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, **Ib** yang tercatat naik dari 116,13 menjadi 116,28 disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,23 dan kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,02 persen.

Indeks NTPi bulan November 2022 naik setinggi 0,26 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya, dari 103,60 menjadi 103,87. Hal ini terjadi karena kenaikan **It** setinggi 0,49 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan **Ib** setinggi 0,23 persen. **It** yang naik dari 116,69 menjadi 117,26 disebabkan oleh naiknya indeks kelompok budidaya air tawar setinggi 0,58 persen khususnya ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele.

Sedangkan, indeks kelompok budidaya air payau tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, **Ib** yang tercatat naik dari 112,63 menjadi 112,89 dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,36 dan naiknya indeks BPPBM sebesar 0,14 persen.

Tabel 3.24 Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan Provinsi Bali dan Persentase Perubahannya, Oktober 2022 - November 2022.

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	Oktober 2022	November 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,13	98,71	0,60
a. Indeks Diterima Petani	113,95	114,79	0,73
- Penangkapan Di Perairan Umum	117,92	117,92	0,00
- Penangkapan Di Laut	113,94	114,78	0,73
b. Indeks Dibayar Petani	116,13	116,28	0,13
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,10	113,36	0,23
- Indeks BPPBM	119,69	119,72	0,02
Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	103,60	103,87	0,26
a. Indeks Diterima Petani	116,69	117,26	0,49
- Budidaya Air Tawar	116,67	117,34	0,58
- Budidaya Air Payau	116,77	116,77	0,00
b. Indeks Dibayar Petani	112,63	112,89	0,23
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	113,30	113,71	0,36
- Indeks BPPBM	112,16	112,31	0,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Indeks NTP Januari--November 2022 menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan. Indeks NTP Januari--November 2022 tercatat lebih tinggi 2,82 persen dibandingkan indeks NTP Tahun 2021 pada periode yang sama. Kenaikan NTP paling tinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik setinggi 9,85 persen, diikuti kenaikan pada subsektor hortikultura yang naik setinggi 8,38 persen dan kenaikan subsektor perikanan yang naik setinggi 0,47 persen. Sementara itu, indeks NTP subsektor tanaman pangan turun sedalam 0,98 persen. Searah dengan penurunan indeks subsektor tanaman pangan, indeks subsektor peternakan juga tercatat turun sedalam 0,37 persen. Indeks NTP Januari--November 2022 terbesar tercatat pada Subsektor Perikanan yakni

sebesar 100,60 dan terendah terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan yakni sebesar 91,18.

Secara nasional indeks NTP gabungan bulan November 2022 tercatat 107,81, naik 0,50 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) nasional sebesar 0,66 persen lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang tercatat naik sebesar 0,15 persen.

Tabel 3.25 Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional serta Persentase Perubahannya, Oktober 2022 - November 2022

Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	Oktober 2022	November 2022	%	Oktober 2022	November 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks yang Diterima Petani	108,47	109,62	1,06	122,18	122,98	0,66
Indeks yang Dibayar Petani	113,13	113,50	0,32	113,90	114,07	0,15
NTP	95,88	96,59	0,74	107,27	107,81	0,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

a. Keberhasilan dalam peningkatan Ketahanan Pangan Utama, NTP, NTN

Pada tahun 2022 di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali diterpa pandemi wabah Covid -19 hal ini menyebabkan terjadinya pembatasan sosial sehingga penurunan tingkat pendapatan masyarakat terutama petani dan peternak untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah – langkah strategis antara lain :

1. Melaksanakan reconfusing anggaran baik APBD dan APBN yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 -2021.
2. Program padat karya bangunan embung dan rehabilitasi jaringan irigasi.
3. Program Fasilitas asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha tani temak (AUTT).
4. Melakukan vaksinasi secara gratis dan pembatasan masuknya hewan dari luar provinsi dalam usaha penanggulangan penyakit PMK.

b. Faktor Penghambat Ketahanan Pangan, NTP, NTN

Ketidak tercapaian Indikator di sebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya :

Ketahanan Pangan Utama dan Nilai Tukar Petani

1. Komoditi pangan strategis khususnya cabe , bawang merah, minyak, beras, mengalami fluktuasi harga berbeda setiap hari yang mengakibatkan terjadinya inflasi;
2. Koordinasi dan ketersediaan pangan yang berkaitan dengan Neraca Pangan yaitu kesulitan pengumpulan data stok untuk setiap komoditas serta ketimpangan data yang diinput enumerator dengan kondisi riil di lapangan;

3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan yaitu tidak lengkapnya data sekunder yang tersedia;
4. Penyampaian laporan bulanan secara berjenjang dari kelompok ke Kabupaten, laporan triwulan dari kabupaten ke provinsi belum tertib seringkali terlambat sehingga data yang ada bukan data terbaru hal ini mengakibatkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan

Nilai Tukar Nelayan

Capaian target kinerja dari skala nilai perangkat kinerja masih sangat rendah untuk produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, olahan dan garam ini karena data yang disampaikan oleh Kabupaten dan Kota tersebut belum tervalidasi 100% pada satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih dijumpai tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan terkait capaian jumlah produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, olahan dan garam :

1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial
2. Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2021
3. Alih fungsi lahan potensial untuk perikanan budidaya dan garam
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan

Upaya meningkatkan Ketahanan Provinsi Bali, NTN, NTP ada beberapa langkah yang dilaksanakan diantaranya :

1. Menurunkan tingkat inflasi di Provinsi Bali pada pelaksanaan kegiatan pasar murah komoditi yang dijual dibawah harga pasar. Pasar murah tetap dilaksanakan agar ketersediaan, keterjangkauan/distribusi tersedia kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar.
2. Melaksanakan pengembangan sistem untuk menunjang pemanfaatan data yang cepat dan akurat, baik berupa data spasial maupun data tekstual yang mampu mengintegrasikan data-data yang dilengkapi dengan *artificialintelligen*, sehingga mampu menyajikan peta digital berbasis SIG, data berupa tabel, data spasial, data multi media dan data report.
3. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan yang konsekuen dan berkesinambungan, diharapkan produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah atau nilai jual serta tujuan akhirnya pendapatan petani lebih meningkat dan dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani serta pangan aman dikonsumsi.
4. Pengadaan paket-paket produksi;
5. Pengendalian hama dan penyakit ikan;
6. Pendampingan teknologi terapan;

7. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan.

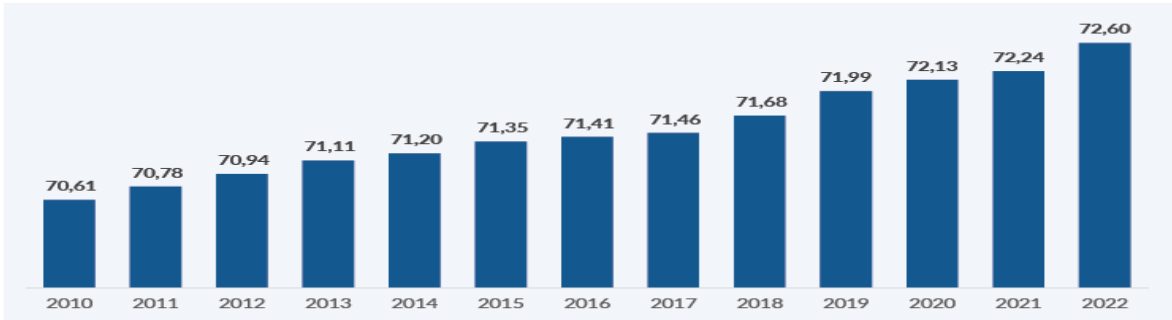
Tabel 3.26 Sasaran : “Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali, Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas, Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi dan Meningkatkan daya saing SDM Krama Bali” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdg 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umur Harapan Hidup	72.24	72,5	72,60	100,13	72.5	100,13
2	Rata-rata lama sekolah	9,06	10.84	9,39	86,62	11,40	82,36
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,96	83.11	83,84	100,87	83,30	100,64
4	Angka harapan lama sekolah	13,40	13.91	13,48	96,83	14,05	95,94
5	Indeks Pembangunan Manusia	75.69	76.93	76,44	99,93	80	95,55
6	Indeks Daya Saing SDM Bali	67	69.09	69.09	100	75	92,12

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 1,99 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Bali adalah 70,61 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 72,60 tahun.

Grafik 3.7 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Bali, 2010-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

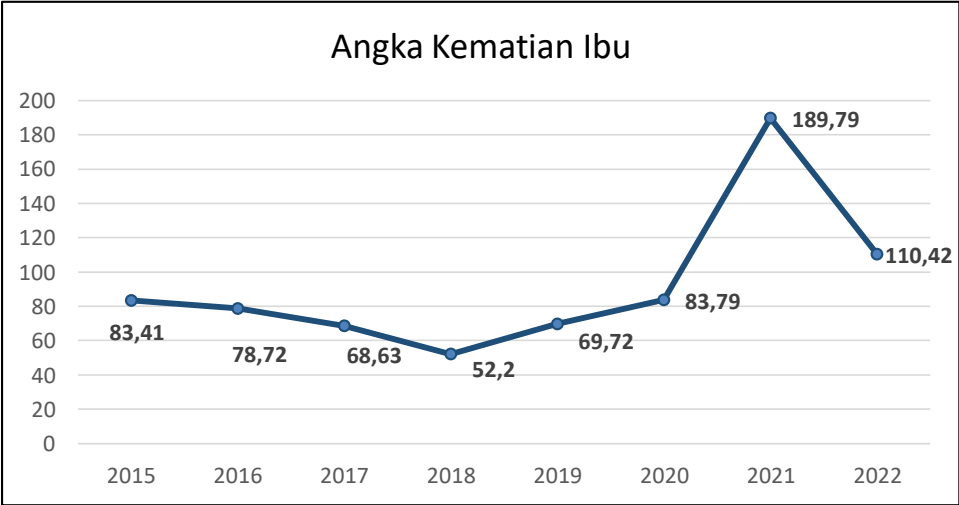
Dilihat dari Capaian Kinerja pada Tahun 2022, Umur Harapan hidup Provinsi Bali tercapai 72,60%, ini melampaui target yang diperjanjikan pada tahun 2022 sebesar 72,50% dengan tingkat ketercapaian 100,13%, bila diukur dari target tahun 2023 sebesar 72,50% maka realisasi Tahun 2022 sudah menuntaskan target yang perjanjikan di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023.

Keberhasilan Pemerintah Bali dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup Masyarakat dari Tahun ke Tahun tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan Dinas

Kesehatan Provinsi Bali seperti menurunkan morbiditas dan mortalitas penduduk seperti menekan Angka Kematian Ibu per 100.000KH, Angka Kesakitan Penyakit Menular, Proporsi Balita Gizi Buruk/Kurang.

Kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu masyarakat, yang kejadiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun aspek-aspek non kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan kontribusi yang besar terhadap kesehatan secara umum termasuk kesehatan maternal maupun neonatal. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya peningkatan kematian ibu yang sangat signifikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, puncaknya pada tahun 2021.

Grafik 3.8 Angka Kematian Ibu Provinsi Bali Tahun 2015-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu terjadi penurunan dari tahun 2015-2018, pada tahun 2015 sebesar 83,41 per 100.000 KH, tahun 2016 sebesar 78,72 per 100.000 KH, tahun 2017 sebesar 62,69 per 100.000 KH, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 54,03 per 100.000 KH. Mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,72 per 100.000 KH, tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 83,79 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,65 per 100.000 KH, akan tetapi di tahun 2022 mampu diturunkan menjadi 110,42 per 100.000 KH.

Peningkatan kematian ibu pada tahun 2021 secara absolut menjadi 125 kasus, dan peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota. Namun di tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 68 kasus, penurunan kematian terjadi di 8 kabupaten/kota hanya di Kabupaten Karangasem jumlah kematiannya tetap yaitu 10 kasus. Jumlah kematian ibu per kabupaten/kota kami sajikan dalam tabel 3.28 di bawah ini.

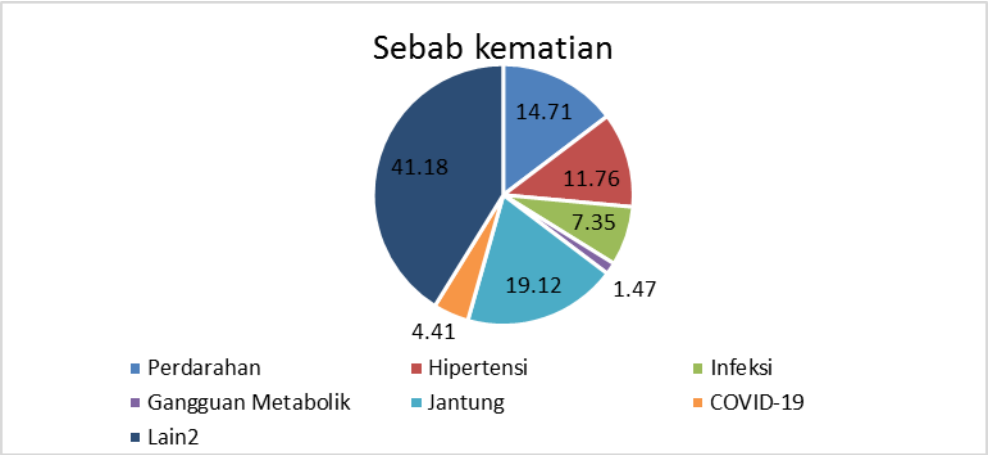
Tabel 3.28 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota 2016-2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEMATIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jembrana	5	5	3	5	5	8	7
2	Tabanan	7	3	4	4	4	18	6
3	Badung	0	5	3	3	12	19	8
4	Gianyar	7	3	2	7	4	13	6
5	Klungkung	1	2	4	5	2	5	1
6	Bangli	3	4	1	6	6	5	2
7	Karangasem	7	6	4	4	8	10	10
8	Buleleng	13	9	10	9	7	27	10
9	Denpasar	7	8	4	2	8	20	18
10	Prov. Bali	50	45	35	45	56	125	68

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Walaupun kematian ibu di tahun 2022 sudah berhasil diturunkan namun masih berada di atas target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 66 per 100.000 KH. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kematian ibu yang merupakan bagian dari kegiatan Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Respons penyebab kematian ibu masih didominasi oleh masalah kesehatan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas, yang kita sebut sebagai penyebab non obstetri, dapat dilihat pada grafik 3.9 di bawah ini.

Grafik 3.9 Penyebab kematian ibu di Provinsi Bali Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Masalah non obstetrik yang dimaksud antara lain gangguan metabolik 1,42%, COVID-19 sebesar 4,42%, penyakit jantung 19,12% dan yang terbesar adalah lain-lain (kumpulan sebab kematian) 41,18%. Yang menjadi perhatian kita bersama adalah masih ada kematian ibu disebabkan oleh karena perdarahan sebesar 14,71%, hipertensi 11,76% dan infeksi sebesar 7,35%.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal yang dilakukan di kabupaten/kota, secara umum kasus kematian oleh karena obstetrik sesungguhnya masih bisa dicegah, jika melakukan upaya yang sesuai standar. Deteksi dini faktor risiko kepada calon ibu sangat penting dilakukan sehingga kehamilan dapat direncanakan pada kondisi kesehatan ibu yang cukup baik. Demikian pula saat kehamilan hendaknya melakukan pemeriksaan sedini mungkin (kontak ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan < 12 minggu) maka deteksi dini masalah/penyakit yang diderita ibu dapat dilakukan melalui antenatal terpadu bekerjasama dengan lintas program dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter umum serta pemeriksaan penunjang laboratorium sesuai dengan standard. Skrining kehamilan dengan USG dasar terbatas dilakukan oleh dokter umum di fasilitas kesehatan dasar merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi secara dini masalah sehingga penanganan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.

Kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi sehingga setiap ibu hamil akan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan obstetri baik pada penanganan awal maupun lanjutan. Peran dokter umum di dalam pelayanan kesehatan ibu juga sangat penting untuk melakukan deteksi dan intervensi terhadap masalah-masalah terkait kesehatan pada ibu hamil.

Kematian ibu sebagian besar terjadi di rumah sakit yaitu 92,65% masih ada kasus kematian dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan sebesar 5,88% dan di rumah ibu sebesar 1,47%. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan sudah cukup baik. Menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan perbaikan pada fasilitas kesehatan baik fasilitas primer maupun rujukan. Kematian di fasilitas rujukan juga ditentukan oleh kemampuan stabilisasi pra rujukan. Kesiapan fasilitas rujukan baik dari faktor tenaga kesehatan, fasilitas maupun manajemen masih menjadi tantangan.

Kematian ibu yang terjadi di masyarakat atau di rumah merupakan kematian yang tidak bisa dicegah, kejadiannya sangat mendadak seperti serangan jantung. Demikian pula kematian yang terjadi dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengetahui secara dini masalah lain yang dihadapi terkait dengan kehamilan. Upaya dalam mendeteksi secara dini masalah kesehatan secara umum yang menyertai kehamilan, faktor utama yang harus dilakukan dengan melibatkan dokter umum di puskesmas sehingga bisa dilakukan rujukan dini untuk menentukan diagnosa, dan tatalaksana kasus dengan melibatkan tim spesialis terkait.

a. Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan

Secara geografis Bali merupakan pulau yang kecil dengan 8 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk 4.380.824 jiwa. Hampir semua wilayah dapat terjangkau dengan transportasi modern, termasuk daerah kepulauan di Kecamatan Nusa Penida. Fasilitas Kesehatan di tiap kecamatan terdapat antara 1-6 Puskesmas, setiap desa terdapat minimal satu Bidan di Desa. Setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah yang semuanya mampu PONEK ditambah dengan beberapa Rumah Sakit Swasta yang juga mampu PONEK serta Provinsi Bali juga memiliki satu Rumah Sakit Umum Pusat sebagai pusat rujukan Regional Timur.

Selain keadaan geografis, adanya tenaga kesehatan profesional sangat memadai untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu, antara lain dokter spesialis kebidanan dan kandungan di tiap rumah sakit daerah minimal ada 3 bahkan sampai 9 orang, dokter spesialis anaestesi minimal satu orang dan dokter spesialis anak minimal ada 2 orang.

Komitmen pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait juga melakukan upaya-upaya seperti adanya penyusunan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal yang diatur dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng dan Jembrana. Sementara kabupaten/kota yang lain diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pendampingan fasilitas kesehatan secara berjenjang mulai dari pendampingan dokter spesialis (RSUD) ke Puskesmas yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan RS PONEK dan Organisasi POGI. Pendampingan terhadap RSUD juga dilakukan oleh RS vertikal yaitu RSUP Prof. IGN Ngurah difasilitasi oleh Direktorat Kesehatan Gizi dan KIA, dilaksanakan secara bertahap, akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Terbentuknya Tim Audit Maternal Perinatal di kabupaten baik melalui SK Bupati maupun Peraturan Bupati juga memegang peranan penting dalam pembahasan kasus-kasus kematian ibu dan neonatal serta kasus-kasus *niemiss* yang akhirnya bisa merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut Audit Maternal Perinatal. Rekomendasi bisa dalam bentuk advokasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan atau pembinaan secara individual kepada tenaga kesehatan yang bisa dilakukan oleh atasan langsung maupun organisasi profesi.

Pola pembiayaan terkait kesehatan ibu dan bayi baru lahir sudah semakin membaik, melalui dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik sumber dana APBD, APBD maupun mandiri. Jaminan Kesehatan Persalinan (Jampersal) mulai ditata melalui registrasi eKohort sehingga bisa ditindaklanjuti menggunakan JKN.

b. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan

Kematian Ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor tidak hanya oleh sistem kesehatan tetapi faktor-faktor non kesehatan juga sangat penting mendapat perhatian, antara lain :

- 1) Pelayanan kesehatan belum memenuhi standar.

Walaupun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudah baik, tetapi belum semuanya memenuhi standar, yaitu belum semua ibu hamil akses pada awal kehamilan < 12 minggu, ini mempengaruhi kualitas pelayanan yang harus diterima;

- 2) Distribusi sumber daya manusia kesehatan belum merata.

Sumber daya manusia kesehatan sudah mencukupi, namun distribusi dan pembagian tugas sesuai dengan kompetensinya belum merata dan maksimal untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi;

- 3) Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar belum optimal. Walaupun kita memiliki puskesmas dan jaringannya yang sudah cukup banyak, namun kesiapan dalam memberikan pelayanan sesuai standar belum optimal. Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap standar dan tatalaksana kegawatdaruratan dan stabilisasi pra rujukan belum optimal. Keterbatasan tenaga, sarana juga menjadi perhatian seperti pendukung laboratorium.

- 4) Kesiapan Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan belum optimal.

Kesiapan fasilitas rujukan juga belum optimal, walaupun dari segi jumlah sudah memadai. Sering ditemukan bahwa fasilitas rujukan yang ada di kabupaten/kota belum mampu melakukan penanganan kegawatdaruratan tepat waktu (tindakan SC kurang dari 30 menit). Rumah sakit PONEK belum sepenuhnya menerapkan waktu kerja 24 jam 7 hari.

c. Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil Dan Melahirkan

Permasalahan di atas menjadi tantangan bagi kita semua, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga seperti kelas mulai dilaksanakan secara virtual menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Kegiatan tatap muka dan posyandu mulai berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan orientasi program, baik manajemen maupun teknis yang dilakukan baik secara virtual maupun tatap muka. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM selain dilakukan provinsi dan kabupaten/kota juga dilakukan oleh kementerian kesehatan. Untuk kabupaten lokus ada peningkatan kapasitas dokter umum dalam upaya penurunan kematian ibu

melalui *blended learning* yaitu metode pembelajaran dengan virtual dan tatap muka melalui OJT di RSUD maupun puskesmas;

- 3) Peningkatan kapasitas rumah sakit melalui pendampingan RSUD oleh rumah sakit vertikal (RSUP Prof.Ngoerah). Pemantauan dilakukan melalui sistim informasi kesehatan maternal dan neonatal (Simatneo);
- 4) Kegiatan manajemen program melalui penguatan PWS-KIA, penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Respons. Beberapa rekomendasi yang berdasarkan hasil AMP di kabupaten/kota antara lain :
 - a) Meningkatkan pemantauan terutama kasus-kasus risiko tinggi, yang dilakukan oleh Puskesmas sebagai penganggungjawab wilayah bekerja sama dengan fasilitas rujukan melalui penerapan rujukan balik dan WhatsApp Group;
 - b) Peningkatan peran dokter umum dalam upaya mendeteksi masalah kesehatan pada ibu hamil serta tatalaksana kasus sedini mungkin;
 - c) Penguatan Tim PONED dalam penanganan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal fokus pada stabilisasi pra rujukan;
 - d) Penguatan Tim PONEK di rumah sakit baik dari jumlah tim maupun manajemen yang mendukung terhadap kesiapan rumah sakit. Peningkatan peran lintas sektor dalam menggerakkan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembinaan anggotanya;
 - e) Review terhadap Manual Rujukan Maternal dan Neonatal, menyesuaikan dengan kondisi fasilitas kesehatan (penambahan jumlah dan kemampuan rumah sakit) dan sistem pembiayaan;
 - f) Mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil di kabupaten/kota.

Angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. *Incidence Rate* adalah untuk melihat frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit di masyarakat pada kurun waktu tertentu (1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Selama lima tahun *Incidence Rate* DBD berfluktuatif dan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 506,80 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018 *Incidence Rate* DBD mencapai target yaitu sebesar 20,93 per 100.000 penduduk, dimana target dalam RPJMD adalah sebesar 100 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali tahun 2018 ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 93,99 per 100.000 penduduk.

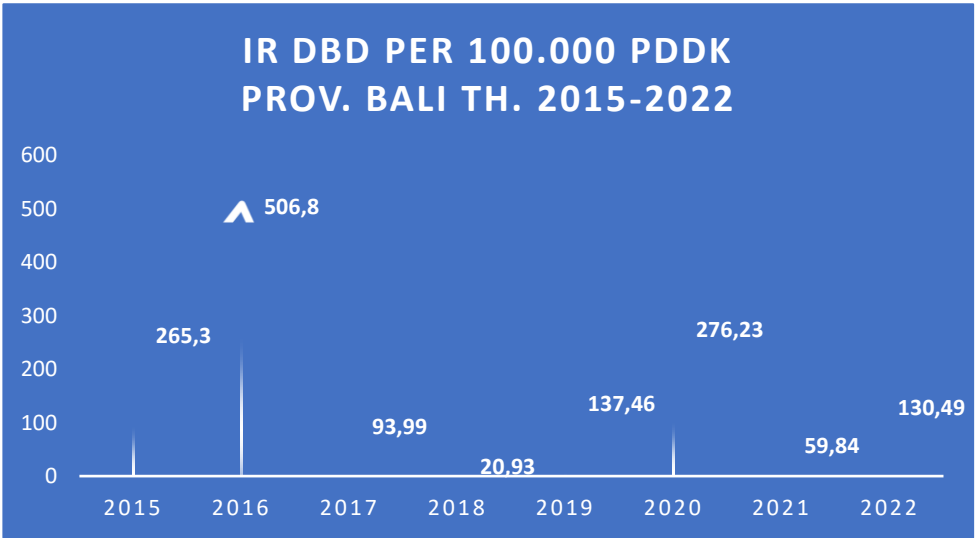
Namun pada tahun 2019 realisasi pencapaian IR DBD Provinsi Bali adalah 137,46 /100.000 penduduk. Ini artinya target yang dipasang belum dapat tercapai sebab program menargetkan IR kasus DBD ini adalah 100 per 100.000 penduduk.

Demikian juga halnya yang terjadi pada tahun 2020, Incidence Rate (IR) DBD Provinsi Bali belum bisa mencapai target. IR DBD pada tahun 2020 ini adalah sebesar 276,23/100.000 penduduk jauh lebih tinggi dari target yaitu 108/100.000 penduduk. Sedangkan *Incidence Rate* tahun 2021 sebesar 59,84 per 100.000 penduduk atau target yang ditetapkan sebesar 100/100.000 pddk dapat tercapai.

Incidence Rate DBD tahun 2022 adalah sebesar 130.49 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa kasus DBD di Provinsi Bali masih tinggi, karena dalam RPJMD target yang ditetapkan adalah setiap 100.000 penduduk maksimal yang boleh terjangkit DBD adalah 100 orang saja. Pada masa Pandemi COVID-19 memang focus kita sedikit berkurang untuk penanganan penyakit menular lainnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM. Tetapi seiring dengan sudah mampunya kita mengendalikan laju penularan COVID-19 diharapkan kasus-kasus penyakit menular lain dapat kita tangani secara maksimal.

Meskipun *Incidence Rate DBD* beberapa tahun terakhir belum mencapai target, tetapi Angka kematian atau *Case Fatality Rate (CFR)* DBD Provinsi Bali rata rata dibawah 1 % setiap tahunnya, dimana target *CFR DBD* yang ditetapkan dibawah 1% (< 1%). Target ini dapat dilihat baik dalam Renstra maupun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022. Tren *Inciden Rate* DBD di Provinsi Bali, dapat dilihat pada grafik 3.10 dibawah ini.

Grafik 3.10 *Tren Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Bali Tahun 2015-2022*



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

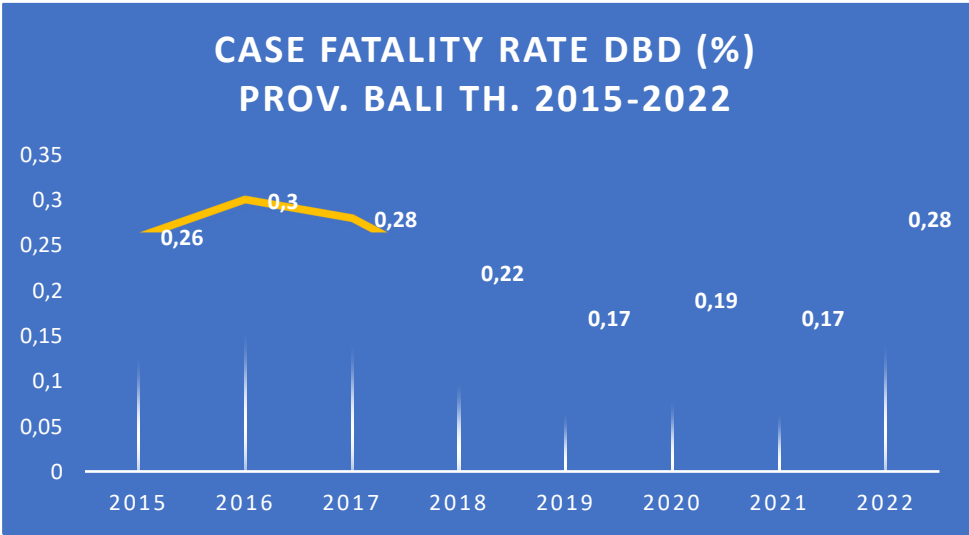
Grafik diatas menggambarkan adanya tren peningkatan dan penurunan angka kesakitan atau *incidence rate* kasus DBD selama periode waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Target IR DBD yaitu 100/100.000 penduduk sesuai yg ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Bali hanya tercapai pada Tahun 2017, 2018, dan 2021 saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan target *Incidence Rate*

DBD Nasional yaitu sebesar 47/100.000 penduduk hanya tercapai pada tahun 2018 saja. Beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya IR DBD di Provinsi Bali adalah :

1. Peran serta masyarakat dalam melakukan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangat kurang dan tidak dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Kegiatan PSN secara serentak yang dilakukan oleh masyarakat sendiri hampir tidak ada, kegiatan PSN hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan para Jumantik yang ada di masing-masing desa atau banjar-banjar. Keberadaan Jumantik pun tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Ada kabupaten atau kota yang punya Jumantik disetiap banjar, tapi ada kabupaten yang ditingkat desapun keberadaan tenaga jumantiknya tidak merata. Jika seluruh masyarakat melaksanakan kegiatan PSN secara serentak dan berkesinambungan dapat dipastikan kasus akan menurun secara signifikan;
2. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu; Perubahan cuaca juga sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan dan kepadatan populasi nyamuk. Musim hujan yang tidak menentu akan dapat memberikan kesempatan nyamuk untuk berkembang biak sehingga kepadatan nyamuk (vektor) pun akan meningkat dan resiko masyarakat akan tergigit nyamuk juga akan lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan penularan penyakit DBD di masyarakat;
3. Mobilisasi penduduk yang tinggi; Mobilisasi penduduk di Bali sangat tinggi. Masyarakat dari pedesaan khususnya dari daerah ketinggian dan berhawa dingin pada siang hari banyak yang mencari penghidupan di perkotaan dimana daerah perkotaan merupakan daerah endemis DBD. Saat ini kasus DBD sudah kita temukan pada daerah-daerah ketinggian krn adanya penduduk yang tertular di daerah endemis saat mereka bekerja di siang hari dan sore/malam baru balik ke daerahnya;
4. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan; Banyak pembangunan fisik yang dikerjakan tdk berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan banyak genangan air yang memudahkan nyamuk untuk berkembang biak.

Meskipun angka kesakitan DBD sangat tinggi dari tahun ke tahun, kita mampu menekan angka kematiannya. Secara Nasional angka kematian atau *Case Fatality Rate* DBD ditetapkan dibawah 1%, dan Provinsi Bali sudah mencapai target ini. CFR DBD tahun 2015 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10 *Tren Case Fatality Rate (CFR) DBD di Provinsi Bali Tahun 2015-2022*



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Grafik diatas menggambarkan angka kematian kasus DBD di Provinsi Bali tidak pernah mencapai angka 1%, selalu dibawah 1%. Kondisi ini disebabkan karena fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit sudah mampu melakukan tatalaksana kasus DBD dengan baik. Disamping itu masyarakat sudah semakin waspada terhadap gejala penyakit ini sehingga segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) terdekat. Dari hasil Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan terhadap semua kasus kematian karena DBD sebagian besar kematian diakibatkan keterlambatan untuk mencari pertolongan ke faskes. Rata-rata sudah dalam kondisi yang sangat berat baru mencari pertolongan ke faskes sehingga sulit untuk diselamatkan.

PMK No 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyatakan **indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)** menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (*possible risk of overweight*). Kondisi gizi buruk diperparah dengan adanya penyakit infeksi dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

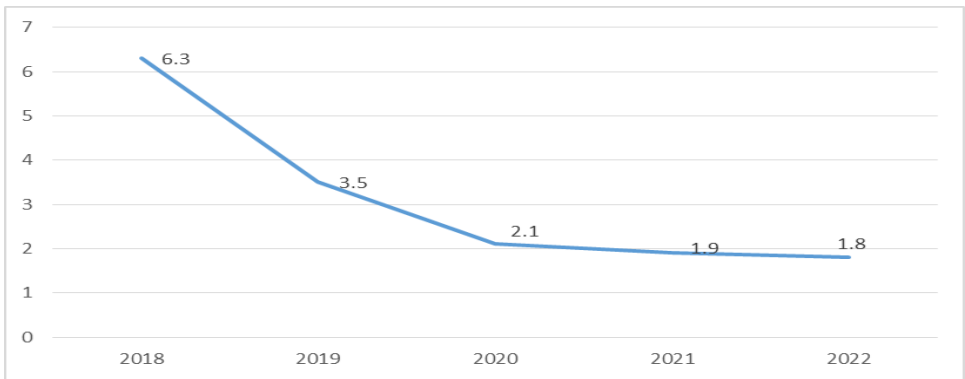
Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah disebut mengalami masalah gizi masyarakat jika proporsi balita gizi kurang >5%. Masalah ini dianggap serius bila proporsi balita gizi kurang sebesar 10,1% - 15,0%, dan dianggap kritis bila proporsi balita gizi kurang di atas 15,0%.

Perjalanan seorang balita menjadi stunting memerlukan waktu yang cukup lama, yang diawali dari kondisi balita mengalami kenaikan berat badan tidak adekuat

(*weight faltering*). Bila kondisi ini tidak segera ditangani, balita dapat menderita berat badan kurang yang akan berlanjut menjadi gizi kurang, gizi buruk dan pada akhirnya dapat menjadi stunting. Kondisi balita *weight faltering* sebenarnya sudah terdeteksi diawal pada saat balita tersebut melakukan pemantaua pertumbuhan di posyandu. Jadi kita ditemukan balita dengan kenaikan berat badan tidak adekuat (tidak sesuai standar), maka balita tersebut harus dirujuk ke puskesmas untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, prevalensi balita stunting di Provinsi Bali menduduki peringkat terendah di tingkat nasional dengan prevalensi stunting berturut-turut 10,9% dan 8,0%. Walaupun sudah terjadi penurunan, tetap diperlukan surveilans gizi yang optimal untuk dapat segera mengetahui balita yang mengalami masalah gizi sehingga akan lebih cepat dilakukan upaya intervensi sesuai masalah yang ada.

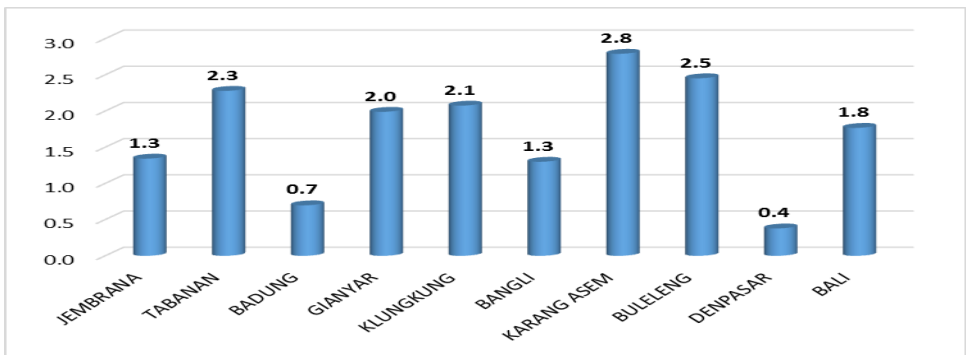
Grafik 3.11 Proporsi balita gizi buruk/kurang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat, bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1%, tahun 2021 menjadi 1,9% dan pada tahun 2022 turun menjadi 1,8%.

Grafik 3.12 Proporsi balita gizi kurang per Kab/kota Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa capaian balita gizi kurang (gizi kurang dan gizi buruk) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 9,0%. Namun demikian, kegiatan surveilans gizi secara rutin harus lebih dioptimalkan termasuk pemantauan pertumbuhan balita di posyandu dalam upaya mempercepat penanganan masalah gizi.

a. Faktor Pendukung Meningkatkan Gizi Balita

Sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting menjadi 7% pada tahun 2024, pemerintah telah memberi perhatian yang serius terhadap upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat. Pembiayaan adalah dukungan terbesar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik serta Dana Desa terhadap peningkatan status gizi balita di Provinsi Bali. Upaya yang dilakukan adalah :

- 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang untuk menambah nilai gizi;
- 2) Pemenuhan alat-alat antropometri kit Posyandu oleh Kemenkes untuk meningkatkan deteksi tumbuh kembang bayi dan balita;
- 3) Pemenuhan tenaga gizi di Puskesmas dalam mendukung percepatan input data e-PPGBM;
- 4) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan gizi;
- 5) Pelaksanaan pertemuan koordinasi/konvergensi LP LS, kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan gizi.

b. Faktor Penghambat Meningkatkan Gizi Balita

Permasalahan gizi khususnya gizi kurang pada balita disebabkan oleh banyak faktor baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk mengetahui penyebab tersebut, dilakukan surveilans gizi sehingga mendapatkan informasi yang cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan. Kegiatan surveilans gizi yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal untuk analisis faktor determinan. Data faktor determinan yang menyebabkan masalah gizi balita belum dikumpulkan dan dikaji dengan baik sehingga kurang mampu merumuskan aksi yang tepat sasaran dan efektif.

c. Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Kesehatan Gizi Balita

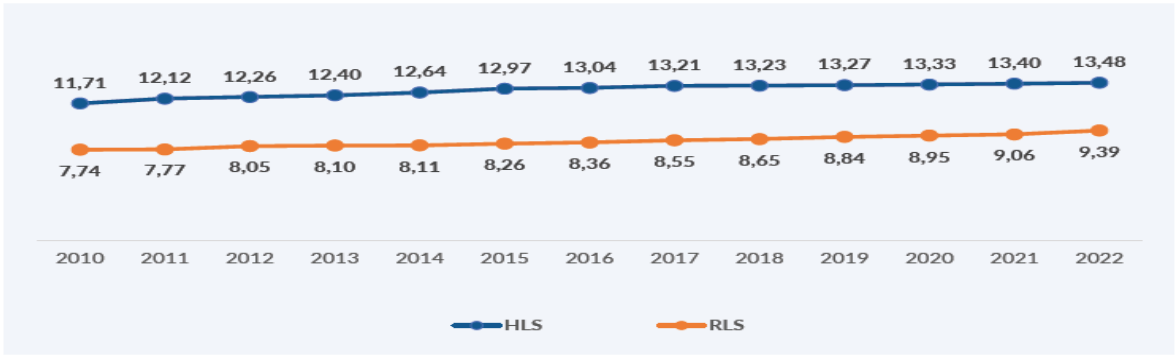
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan status gizi balita antara lain :

- 1) Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi secara rutin kepada petugas gizi di Kabupaten/Kota dan Puskesmas terkait pelaksanaan surveilans gizi terutama pelaporan gizi secara elektronik menggunakan aplikasi e-PPGBM;

- 2) Melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi penanganan masalah gizi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di tingkat Provinsi;
- 3) Melaksanakan kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan gizi di Kabupaten/Kota dan Puskesmas;
- 4) Menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan gizi di Provinsi Bali.

Dimensi pengetahuan pada **IPM** dibentuk oleh dua indikator, yaitu **Harapan Lama Sekolah (HLS)** penduduk usia 7 tahun ke atas dan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat meningkat sebesar 1,77 tahun, sementara Rata-Rata Lama Sekolah tercatat meningkat 1,65 tahun.

Grafik 3.12 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Bali, 2010- 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Selama periode 2010 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas secara rata-rata tercatat tumbuh sebesar 1,18 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin besar peluang anak-anak mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat 13,48 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau semester dua di tingkat universitas.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali tercatat tumbuh 1,63 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Bali yang lebih baik. Pada tahun 2022, secara rata-rata penduduk Bali usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal selama 9,39 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP sederajat.

Rata-rata lama sekolah dilihat dari target yang diperjanjikan pada Tahun 2022 di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 dengan target kinerja 10,84%, terealisasi 9,39% dengan tercapaian 86,62% di tahun 2022

dibandingkan dengan capaian realisasi target ditahun 2021 sebesar 9,06%, capaian kinerja ditahun 2022 mengalami peningkatan, walupun pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan, dan apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 11,40% bilang dibandingkan dengan realisasi ditahun 2022 dengan tingkat ketercapaian mencapai 82,36%.

Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 14,48% dengan tingkat ketercapaian mencapai 96,83%, hal ini menggambarkan bahwa target pada tahun 2022 sebesar 13,91% tidak tercapai, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 13,40%, realiasai di Tahun 2022 melampaui realisasi capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja pada Tahun 2022 terbilang meningkat, ini menggambarkan bahwa penduduk Bali berpottensi menempuh pendidikan hingga Diploman II.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun di Provinsi Bali mengalami peningkatan dengan ketercapaian pada Tahun 2022 mencapai 100,87% dengan peningkatan 0,2% dari tahun 2021, bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun ahkir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023, realisasi pada Tahun 2022 telah melapaui dengan tingkat ketercapaian sebesar 100,64%. Ini mengidentifikasi bahwa Program Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mendorong wajib belajar 12 Tahun.

Ketidak tercapaian target ini menjadi focus perbaikan pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali untuk perbaikan guna meningkatkan capain kinerja, langka yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas pendidikan melalui bantuan sarana prasarana sekolah seperti pembangunan Unit Sekolah Baru, Penambahan Ruang Kelas, meningkatkan kualitas dan ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang lebih proporsional sehingga akan meningkatkan minat anak untuk bersekolah
2. Pemberian dana pendamping BOSDA untuk membantu biaya operasional sekolah dan bantuan dana pendidikan khusus bagi siswa kurang mampu sehingga diharapkan akan menekan jumlah siswa putus sekolah
3. Secara intensif melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah - daerah terpelosok guna mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan
4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disdikpora Kabupaten/Kota untuk menjaring dan mengarahkan siswa putus sekolah agar melanjutkan ke Pendidikan non formal (Paket A, B, C).

Indeks Daya Saing SDM Bali merupakan indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing SDM Krama Bali, yang diformulasikan melalui **3 pilar utama** yaitu kesehatan, pendidikan dan pemuda olahraga, serta pilar keterampilan. 3 pilar utama Indeks Daya Saing ada 2 indikator yang telah dijelaskan pada keterangan capaian diatas yaitu **Umur Harapan Hidup** mengukur kesehatan masyarakat Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali) dan **Rata-rata Lama Sekolah** mengukur pendidikan (Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali) dan **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan** mengukur keterampilan (Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM).

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja.

Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan bagi tatanan social maupun perekonomian dalam skala global tidak terkecuali bagi Bali. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, sehingga berimplikasi juga pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan, mengurangi jam kerja pekerja, mengurangi gaji karyawan tertentu, merumahkan sebagian pekerja, dan bahkan ada yang dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 57,00. Berbagai strategi/kebijakan melalui program/kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, dan realisasi capaian

kinerja atas indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar 61,21 (107,38%).

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,45 maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,76%. Pencapaian tahun 2022 sangat baik jika dibanding dengan target yang ditetapkan, tetapi pencapaian tersebut masih pada kategori menengah bawah, sehingga strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan.

Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali salah satunya diupayakan melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali. Sertifikasi Tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, professional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.

Secara umum digabungkan oleh 3 Pilar Utama Indeks Daya Saing SDM Bali pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 69.09%, terealisasi sebesar 69.09% dengan tingkat ketercapaian 100%, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 67%, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan, disebabkan pada 3 pilar utama dimasing-masing indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan Daya Saing SDM Bali sangat baik.

Guna meningkatkan Daya Saing SDM Bali khusus diketerampilan ada beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali diantaranya :

1. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
2. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.
4. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
5. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.

Tabel 3.29 Sasaran : “Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing, Meningkatnya kompetensi tenaga dan Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat pengangguran terbuka	5,37	3.19	4.80	66,45	2,32	48,33
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.54	76.55	76.86	100.40	76,80	97.53
3	Indeks Kebahagiaan	73,98	73.98	71,44	96.56	74,98	95.27

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2023

Capaian Kinerja khusus Indikator **Tingkat Pengangguran terbuka** untuk analis keberhasilan dan kegagalan dapat di baca pada capaian makro di atas, disini akan menjelaskan ketercapaian indikator **Tingkat Partisipasi Angkata Kerja (TPAK)** Provinsi Bali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%, mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021 dengan tingkat ketercapain pada tahun 2022 sebesar 100,40%.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2022 tercatat sebesar 84,06%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 69,62%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 4,62 persen poin dan 2,01 persen poin.

Tabel 3.30 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020 –Agustus 2022.

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	3.455,13	3.509,09	3.563,14	53,96	1,56	54,05	1,54
Angkatan Kerja	2.567,92	2.580,52	2.738,54	12,60	0,49	158,02	6,12
- Bekerja	2.423,42	2.441,85	2.607,07	18,43	0,76	165,22	6,77
- Pengangguran	144,50	138,67	131,47	-5,83	-4,04	-7,20	-5,19
Bukan Angkatan Kerja	887,21	928,57	824,60	41,36	4,66	-103,96	-11,20
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,32	73,54	76,86	-0,78		3,32	
- Laki-Laki	80,75	79,44	84,06	-1,31		4,62	
- Perempuan	67,86	67,61	69,62	-0,25		2,01	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, Pemerintah Provinsi Bali memiliki Strategi –strategi dalam mendukung hal tersebut seperti :

1. Meningkatkan Kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan :
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan.
 - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
2. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan :
 - a. Membuat/Melaksanakan/Mengevaluasi regulasi/peraturan-peraturan terkait urusan tenaga kerja, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
 - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali
 - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali

Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 71,44. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 72,40, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 68,48 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 76,32; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 71,71; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 73,27. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Pada Tahun 2022 indeks kebahagiaan provinsi bali tidak mencapai target dengan ketercapaian 96,56%, bila dibandingkan dengan tahun 2021, indeks kebahagiaan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dan bilan dibandingkan

dengan tahun 2023 di akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 tercapai sebesar 95,27%.

Indikator penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik radar (spider chart). Indeks indikator tertinggi adalah kepuasan terhadap kondisi keamanan 80,16 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 63,75 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Masih terdapat beberapa indikator lain yang memiliki nilai indeks dibawah 70, yaitu Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama, Perasaan Tidak Khawatir/Cemas, Pengembangan Diri, dan Pendapatan Rumah Tangga. Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada tingkatan 75,28, sementara yang terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 68,37. Pada Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Tujuan Hidup (76,23), sebaliknya yang terendah adalah Pengembangan Diri (67,73). Dapat disimpulkan, bahwa penduduk Provinsi Bali pada umumnya telah merasa optimis dengan masa depannya pada level 76,23. Sementara itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya relatif rendah yaitu 67,73.

Dari data BPS Nasional Terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu untuk kawasan Sumatera. Untuk kawasan Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang turut mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan yaitu: DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk kawasan kalimantan terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur.

1. Provinsi Banten : 68,08
2. Provinsi Bengkulu : 69,74
3. Provinsi Papua : 69,87
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat : 69,98
5. Provinsi Jawa Barat : 70,23
6. Provinsi Nusa Tenggara Timur : 70,31
7. Provinsi Sumatera Utara : 70,57
8. DKI Jakarta : 70,68
9. Provinsi Aceh : 71,24
10. Provinsi Sumatera Barat : 71,34
- 11. Provinsi Bali : 71,44**

Dari data diatas tergambar bahwa, walaupun Provinsi Bali mengalami penurunan indeks Kebahagiaan, akan tetapi rata-rata nilai dari Provinsi Bali di Seluruh Indonesia masih tinggi, dan bila dibandingkan dengan rata – rata capaian nasional Provinsi Bali masih diatas capaian indeks kebahagiaan nasional.

Dari penurunan itu, akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan capain kinerja ditahun selanjtnya seperti :mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Bali, meningkatkan konektivitas antar daerah di Provinsi Bali, melaksanakan pengimplementasian kebijakan Pemerintah Provinsi Bali ke Pemerintah Kabuptaen Kota se Bali.

Tabel 3.31 Sasaran : “Meningkatnya pasar Periwisata Bali, Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global dan Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	15.32	20.86	17,64	84.56	25.93	68.02
2	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620	2.642.000	1.223.000	46,29	3,323,470	36.79
3	Indeks Kepuasan wisatawan	81	83	84,5	101.80	85	99.41

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

Pada bulan September 2022, terdapat 291.162 kunjungan wisawatan mancanegara yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2022, terjadi peningkatan kedatangan wisman setinggi 5,24 persen. Wisman yang melalui pintu masuk udara tercatat sebanyak 291.115 kunjungan, sementara yang melewati pintu masuk laut tercatat sebanyak 47 kunjungan.

Wisman yang tercatat paling banyak datang ke Bali pada bulan September 2022 yaitu wisman yang berasal dari Australia (86.057 kunjungan), India (22.964 kunjungan), Inggris (18.320 kunjungan), Jerman (16.537 kunjungan), dan Amerika Serikat (14.313 kunjungan). Dari 10 besar kedatangan wisman, wisman asal Singapura tercatat mengalami peningkatan tertinggi secara month to month yakni sebesar 64,33 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.32.

Tabel 3.32 Kedatangan Wisman Langsung Ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan September 2022, Agustus 2022, dan September 2021

No.	Kebangsaan	Wisman September 2022				Wisman Agustus 2022	Wisman September 2021	Perubahan Wisman September 22 Thd Agustus 22 (%)	Perubahan Wisman September 22 Thd September 21 (%)
		Bandara	Pelabuhan Laut	Total	Persentase (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	AUSTRALIA	86.056	1	86.057	29,56	79.102	0	8,79	-
2	INDIA	22.964	0	22.964	7,89	20.731	0	10,77	-
3	INGGRIS	18.301	19	18.320	6,29	18.642	0	-1,73	-
4	JERMAN	16.537	0	16.537	5,68	15.555	0	6,31	-
5	AMERIKA SERIKAT	14.313	0	14.313	4,92	13.217	0	8,29	-
6	SINGAPURA	14.267	0	14.267	4,90	8.682	0	64,33	-
7	MALAYSIA	14.239	0	14.239	4,89	9.460	0	50,52	-
8	PERANCIS	13.403	5	13.408	4,60	19.235	0	-30,29	-
9	KOREA SELATAN	8.191	0	8.191	2,81	7.073	0	15,81	-
10	BELANDA	7.861	0	7.861	2,70	7.613	0	3,26	-
11	Lainnya	74.983	22	75.005	25,76	77.349	0	-3,03	-
Jumlah		291.115	47	291.162	100,00	276.659	0	5,24	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Pada Periode Januari-September 2022, tercatat sebanyak 1.185.829 kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan periode Januari-September 2021, jumlah wisman tercatat meningkat hingga jutaan persen (2.757.641,86 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.33.

Tabel 3.33 Kumulatif Kedatangan Wisman yang Datang Langsung Ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Januari-September 2022 dan Januari-September 2021.

No.	Kebangsaan	Wisman Januari-September 2022				Wisman Jan-September 2021 (Orang)	Perubahan Wisman Jan-September 22 Thd Jan-September 21 (%)
		Bandara (Orang)	Pelabuhan Laut (Orang)	Total (Orang)	Persentase (%)		
1	AUSTRALIA	352.395	49	352.444	29,72	0	-
2	INDIA	93.182	0	93.182	7,86	0	-
3	INGGRIS	78.545	40	78.585	6,63	0	-
4	PERANCIS	65.495	15	65.510	5,52	0	-
5	AMERIKA SERIKAT	61.814	11	61.825	5,21	7	883.114,29
6	JERMAN	61.772	4	61.776	5,21	1	6.177.500,00
7	SINGAPURA	58.835	1	58.836	4,96	1	5.883.500,00
8	MALAYSIA	42.364	0	42.364	3,57	1	4.236.300
9	BELANDA	35.141	0	35.141	2,96	0	-
10	VIETNAM	30.466	0	30.466	2,57	0	-
11	Lainnya	305.498	202	305.700	25,78	33	926.263,64
Jumlah		1.185.507	322	1.185.829	100,00	43	2.757.641,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali pada bulan September 2022 tercatat sebesar 46,45 persen, meningkat 8,08 poin dibandingkan dengan TPK pada bulan Agustus 2022 yang tercatat sebesar 38,37 persen. Peningkatan TPK (m-t-m) tertinggi tercatat pada TPK Hotel Bintang 5 sebesar 16,06 poin. Bila dibandingkan dengan TPK pada bulan September 2022, TPK pada bulan September 2022 mengalami peningkatan sebesar 36,99 poin. Peningkatan TPK tercatat pada seluruh kelas hotel berbintang, dengan peningkatan tertinggi tercatat pada kelas hotel bintang 1 sebesar 47,25 poin.

Tabel 3.34 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di Bali September 2021, Agustus 2022 dan September 2022.

No.	RLMT	Periode			Sep 2022 thd Ags 2022 (m-t-m) (Poin)	Sep 2022 thd Sep 2021 (y-o-y) (Poin)
		September 2021	Agustus 2022	September 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RLMT Asing	2,14	2,29	2,66	0,37	0,52
	Bintang 1	1,33	3,12	2,36	-0,76	1,03
	Bintang 2	1,74	1,86	2,31	0,45	0,57
	Bintang 3	2,13	2,68	2,47	-0,21	0,34
	Bintang 4	2,08	2,50	2,85	0,35	0,77
	Bintang 5	2,26	2,07	2,66	0,59	0,40
2	RLMT Indonesia	1,82	1,87	2,14	0,27	0,32
	Bintang 1	1,33	1,50	1,68	0,18	0,35
	Bintang 2	1,47	1,62	1,59	-0,03	0,12
	Bintang 3	1,86	1,79	1,95	0,16	0,09
	Bintang 4	1,72	1,92	2,14	0,22	0,42
	Bintang 5	1,97	2,02	2,58	0,56	0,61
3	RLMT Total	1,83	2,04	2,36	0,31	0,52
	Bintang 1	1,33	1,60	1,72	0,11	0,38
	Bintang 2	1,47	1,73	1,85	0,12	0,38
	Bintang 3	1,88	2,04	2,12	0,09	0,24
	Bintang 4	1,73	2,14	2,39	0,25	0,66
	Bintang 5	1,98	2,05	2,63	0,58	0,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

Pada bulan September 2022, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel berbintang tercatat selama 2,36 hari, naik 0,31 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap pada bulan Agustus 2022 yang tercatat selama 2,04 hari. Jika dilihat dari kelompok tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang bulan September 2022 tercatat selama 2,66 hari, lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang tercatat selama 2,14 hari.

Bila dilihat menurut kelas hotelnya, rata-rata lama menginap tamu asing di bulan September 2022 tertinggi tercatat pada hotel bintang empat (2,85 hari). Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu Indonesia tertinggi di bulan September 2022 tercatat pada hotel bintang lima (2,58 hari). Dibandingkan dengan September 2022, rata-rata lama menginap tamu total (asing dan Indonesia) mengalami peningkatan setinggi 0,52 poin yaitu dari 1,83 hari pada bulan September 2021 menjadi 2,36 hari pada bulan September 2022.

TPK hotel non bintang pada bulan September 2022 tercatat mencapai 22,18 persen, mengalami penurunan sedalam 0,69 poin dibandingkan bulan Agustus 2022 yang tercatat sebesar 22,87 persen. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu pada hotel non bintang di bulan September 2022 tercatat selama 2,09 hari, naik 0,03 poin dibandingkan bulan Agustus 2022. Jika dilihat dari klasifikasi tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing di bulan September 2022

tercatat selama 2,48 hari, lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang tercatat selama 1,60 hari.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2022 terealisasi sebesar 17,64 %, dengan target 20,86% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 84,56%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 15,32%, capaian kinerja di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,32%. Dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 maka ketercapaian terhadap target sebesar 68,02%.

Jumlah Devisa sektor pariwisata Tahun 2022 terealisasi sebesar 1.223.000, dengan target 2.642.000 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 46,29%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 968.000 capaian kinerja di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 255.000. Dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 maka ketercapaian terhadap target sebesar 36,79%.

Indeks Kepuasan wisatawan Tahun 2022 terealisasi sebesar 84,5%, dengan target 83% sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 101,80%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 81% capaian kinerja di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,5%. Dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 maka ketercapaian terhadap target sebesar 99,41%.

Sejalan dengan pemerataan pariwisata Provinsi Bali serta pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pemerataan Pariwisata Bali diantaranya :

1. Pembangunan Fasilitas Seni Pusat Kebudayaan Bali yang bertempat di Kabupaten Klungkung;
2. Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani, shortcut yang mempercepat perjalanan dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng yang berada di ujung Utara Provinsi Bali;
3. Pembangunan Jembatan Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
4. Pembangunan Embung Unda sebagai penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;
5. Penataan Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
6. Pembangunan Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli;
7. Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli;
8. Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Gunaksa, sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan di Kabupaten Klungkung;

- 9. Pembangunan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem; dan
- 10. Pembangunan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.35 Sasaran : “Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali, Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali, Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru, Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya, Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,52	3.10	3.05	98.38	5.00	61
2	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,50	12.5	13.5	108	13	103.84
3	Indeks konektivitas	2.5	2,4	2.5	104.16	2.3	108.69
4	Angka Kriminalitas	2.923	2,731	1.793	152.31	2.262	126.15
5	Indeks domokrasi	82,37	81	75.35	93.02	81	93.02
6	Indeks Pemberdayaan gender	94.01	64.9	72.17	111.20	65	111.03

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

Kontribusi KUMKM Terhadap PDRB Bali pada tahun 2022 terealisasi 13.5% dari target 12.5% dengan tingkat ketercapaian 108%, bila dibandingkan dengan capaian kontribusi KUMKM terhadap PDRB pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali telah melampau target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 103.84%.

Keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan Kinerja KUMKM Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (off taker/buyer), dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.
2. Peningkatan Produktivitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi serta Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS) yang di gagas Gubernur Bali.
3. Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga

incubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM.

Digitalisasi KUMKM adalah upaya untuk mengubah cara kerja manajemen koperasi pada umumnya menjadi manajemen koperasi secara digital, hal ini akan mempermudah koperasi dalam menjalankan bisnisnya, dan juga dalam memberikan pelayanan bagi seluruh anggotanya melalui Aplikasi Koperasi Digital dan bagi UMKM adanya digitalisasi koperasi akan mempermudah para UMKM untuk mencari tambahan modal dalam pengembangan usahanya, digitalisasi koperasi memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pengajuan pinjaman modal tanpa harus berurusan dengan bank yang biasanya memiliki bunga yang tinggi.

Selain itu, adanya digitalisasi koperasi akan membuat transparansi penyaluran dana serta catatan mengenai keanggotaan lebih mudah dan jauh lebih aman untuk diakses, pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya pun jauh lebih mudah dengan adanya digitalisasi koperasi. Serta adanya digitalisasi koperasi akan memudahkan dalam menghubungkan antara pelaku UMKM dengan pembelinya melalui aplikasi berbasis digitalisasi, yang mana dengan adanya hal tersebut para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas ekonominya dan produksinya. Peran Pemerintah Provinsi Bali adalah membentuk ekosistem Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan sehat dalam menjalankan kegiatan dan usahanya dengan Cara baru dan Manajemen Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Corporate Governance) Serta Memiliki Daya Saing dan Adaptif terhadap Perkembangan Zaman.

Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya. Namun dampak pandemi Covid-19 masih terasa sampai dengan saat ini, dimana berkurangnya SHU dan Modal koperasi yang disebabkan penurunan tingkat perekonomian pesertasehingga transaksi-transaksi menjadi macet serta banyak peminjam belu dapat mengembalikan pjamannya sehingga Koperasi mengalami penurunan modal usahanya.

Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah :

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti market place, e-commerce atau platform digital lainnya.
3. Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

Indeks Konektivitas pada tahun 2022 terealisasi 2.5% dari target 2.4% dengan tingkat ketercapaian 104.16%, bila dibandingkan dengan capaian indeks konektivitas pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 indeks konektivitas Bali telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 108.69%.

Indeks konektivitas berarti **daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah**. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. Dalam meningkatkan indeks konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali telah melaksanakan langkah sebagai berikut :

1. Membangun Fasilitas Seni Pusat Kebudayaan Bali yang bertempat di Kabupaten Klungkung;
2. Membangun Shortcut Singaraja-Mengwitani, shortcut yang mempercepat perjalanan dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng yang berada di ujung Utara Provinsi Bali;
3. Membangun Jembatan Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
4. Membangun Embung Unda sebagai penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;
5. Menata Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
6. Membangun Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli;
7. Membangun Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli;
8. Membangun Pelabuhan Penyebrangan Gunaksa, sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan di Kabupaten Klungkung;

9. Membangun Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem; dan
10. Membangun Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng.

Angka Kriminalitas pada tahun 2022 terealisasi 1.793 dari target 2.731 dengan tingkat ketercapaian 152.31%, bila dibandingkan dengan capaian angka kriminalitas pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Angka Kriminalitas telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 126.15%.

Penurunan Angka Kriminalitas di Provinsi Bali tidak terlepas dari sinergitas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, dengan menekan kasus kriminal yang ada di wilayah Bali, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Bali seperti :

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat adalah dengan menciptakan inovasi berupa Sistem Informasi Data Konflik (SIPELIK). SIPELIK ini pada tahun 2021 sudah berjalan dan sudah disosialisasikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk dapat digunakan.

Dalam pengoperasiannya SIPELIK ini mampu memberikan data mengenai potensi konflik yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sampai pada tingkat Kecamatan. Sehingga dengan hadirnya SIPELIK ini pencapaian sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi sudah dapat direalisasikan sesuai target di Tahun 2022.

Pencapaian kinerja sebesar salah satunya adalah dukungan dari capaian kegiatan dari Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan yang menitikberatkan kepada kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal untuk melakukan pengamanan di Provinsi Bali. Pengamanan di Provinsi Bali yang dilaksanakan sesuai dengan Tim Kerja yang dibentuk seperti :

1. Tim Kewaspadaan Dini di Daerah;
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
3. Tim Pemantauan Orang Asing dan
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.

Pembentukan Tim Kerja tersebut dilakukan bersama Instansi Vertikal dan OPD yang terkait seperti : Kodam IX Udayana, Polda Bali, Korem 163 Wira Satya,

Kejati Bali, BINDA Bali, Kanwil KumHam Bali, Kanwil Kemenag Bali, Lanal, Lanud, Bais TNI, OPD Terkait.

Adapun Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam terus menjaga keamanan seperti :

1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
2. Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
4. Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.

Indeks Demokrasi pada tahun 2022 terealisasi 75.35% dari target 81% dengan tingkat ketercapaian 93.02%, bila dibandingkan dengan capaian indeks demokrasi pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Indeks Demokrasi belum melampau target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 93.02%.

Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada Tahun 2022 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi.

Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat Provinsi dan Nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 menghasilkan indeks tingkat Provinsi, Pusat, dan Nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2021 dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut :

1. Aspek Kebebasan (84,62%)
2. Aspek Kesenjangan (77,25%)
3. Aspek Kapasitas Lembaga Daerah (63,92%)

Target kinerja Indeks demokrasi yang tidak tercapai di Tahun 2022 salah satunya diakibatkan oleh rendahnya nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin. Akan tetapi aspek kebebasan sudah memberikan sumbangsih yang cukup baik yang bernilai 84,62 poin. Walaupun target kinerja

tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam meningkatkan Capaian Nilai IDI sudah dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik.

Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya *Focus Group Discussion (FGD)* IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2021. Walaupun capaian indikator IDI yang tidak mencapai target, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2022 tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung dari pencapaian kinerja pada Tahun 2022 untuk peningkatan pendidikan masyarakat sehingga nantinya menjelang Pemilu di Tahun 2024 dapat menjamin hak memilih dan dipilih dari masyarakat tersebut. Terjaminnya hak memilih dan dipilih masyarakat tersebut tentunya akan dapat meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat.

Walaupun capaian indikator IDI yang tidak mencapai target, namun Pemerintah Provinsi Bali tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung dari pencapaian kinerja pada Tahun 2022 untuk peningkatan pendidikan masyarakat sehingga nantinya menjelang Pemilu di Tahun 2024 dapat menjamin hak memilih dan dipilih dari masyarakat tersebut. Terjaminnya hak memilih dan dipilih masyarakat tersebut tentunya akan dapat meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan upaya :

1. Pemantauan dan perkembangan politik di Daerah;
2. Melaksanakan pendidikan politik di masyarakat;
3. Membentuk Tim Kerja meningkatkan indeks demokrasi Provinsi Bali.

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2022 terealisasi 72.17% dari target 64.9% dengan tingkat ketercapaian 111.20%, bila dibandingkan dengan

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Indeks Demokrasi telah melampau target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 93.02%.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan provinsi masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di daerah-daerah timur Indonesia. nilai IPG tahun 2022 tertinggi terdapat di provinsi Yogyakarta yaitu sebesar 94,80 sedangkan terendah terdapat di provinsi Papua sebesar 79,59 atau perbedaan sebesar 15,21 poin. Empat provinsi lain yang mempunyai nilai IPG tertinggi lainnya di Indonesia adalah DKI Jakarta (94,63), Sulawesi Utara (94,42), Sumatera Barat (94,17) dan Bali (93,79). Sebaliknya empat provinsi yang mempunyai nilai IPG terendah adalah Papua Barat (82,91), Kalimantan Timur (85,70), Kalimantan Utara (86,67) dan Gorontalo (86,73). Secara umum menunjukkan sudah 34 provinsi yang memiliki nilai IPG diatas 80, 20 provinsi yang memiliki nilai IPG diatas 90, dan 4 provinsi yang memiliki nilai IPG diatas 94.

Bali sebagai salah satu wilayah yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang amat kental tak dapat meniadakan peran perempuan-perempuan Bali. Kegiatan adat dan agama tentu merupakan ajang eksistensi bagi kesetaraan gender di Bali.

Walau dalam kenyataannya terlihat ada pengkotak-kotakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi mereka selalu bekerja sama dengan baik untuk memperlancar prosesi keagamaan. Sungguh suatu harmonisasi yang harus tetap dijaga.

Langkah nyata Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan perempuan, maka akan menekan angka pernikahan dini yang dalam hal ini tentu saja tidak menguntungkan. Pernikahan dini (utamanya yang menikah dengan usia dibawah 18 tahun), selain berefek negatif terhadap kesehatan perempuan itu sendiri, akan berujung pada pembentukan generasi yang tidak lebih baik dari orang tuanya karena minimnya pengetahuan akan berbagai hal mengenai pengasuhan anak, kehilangan masa potensial yang lebih produktif, dan lain sebagainya. Dengan peningkatan

Pemberdayaan yang lebih luas dengan pemberdayaan perempuan pada gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan berguna dan mengembangkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Tabel 3.36 Sasaran : “Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan dan Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46	17,64	45,42	257.48	17.82	254.88
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,98	63.77	70,89	111.16	64,34	110.18
3	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3	14.8	7.44	198.92	15	201.61
4	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14	1.2	1.26	105	1.4	90

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Persentase Daya dukung lingkungan pada tahun 2022 terealisasi 45.42% dari target 17,64% dengan tingkat ketercapaian 257.48%, bila dibandingkan dengan Persentase daya dukung lingkungan pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Persentase daya dukung lingkungan telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 254.88%.

Ketercapaian pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan mendapat dukungan penuh dari hasil kajian dari Pusat Pengendalian

Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara yang mencakup wilayah Provinsi Bali (Dokumen Status daya Dukung Air Pulau Bali, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antar keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Salah satu pendekatan dalam perhitungan daya dukung daya tampung adalah daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem. Jasa ekosistem secara konsep dibedakan menjadi 4 fungsi jasa, yaitu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Distribusi luas daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif jasa penyediaan air bersih Pulau Bali dominan berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 253.586,19 Ha (45,42% dari total luas Pulau Bali). Kondisi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Pulau Bali dominan berada pada kategori sedang yaitu sebesar 269.699,94 Ha (45,31% dari total luas Pulau Bali). Kondisi jasa ekosistem pengaturan pemurnian air di Pulau Bali dominan berada pada kategori sedang yaitu sebesar 240.289,44 Ha (43,03% dari total luas Pulau Bali).

Dalam rangka meningkatkan sumber daya lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berkerjasama secara Pemerintah Pusat terkait dengan data-data urusan kehutanan dan lingkungan hidup, karena keterbatasan kemampuan daerah untuk menyajikan data yang dimaksud.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 terealisasi 70.89% dari target 63.77% dengan tingkat ketercapaian 111.16%, bila dibandingkan dengan Persentase daya dukung lingkungan pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Persentase daya dukung lingkungan telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 110.18%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bali terdiri atas komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2022 yaitu 70,89. Komponen yang telah melebihi target yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,19, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 88,49 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) 43,36. Rendahnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dipengaruhi oleh masih lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan serta tindak lanjut pemantauan terhadap kualitas air sungai, danau dan mata air

serta air laut. IKLH Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 70,70. Meningkatnya capaian IKLH Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan capaian IKLH Nasional Tahun 2022 yaitu 72,42. Indikator yang masih di bawah capaian nasional yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 3.37 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Komponen	Provinsi Bali Tahun 2022	
	Target	Capaian
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,38	89,19
Indeks Kualitas Air (IKA)	68,03	53,5
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,49	43,36
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	62,24	88,49
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,21	70,89

Sumber : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2022

Komponen Indeks Kualitas lahan (IKL) berada di bawah target dan capaian nasional, hal ini disebabkan karena ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di Bali sangat terbatas dibanding dengan luas Provinsi Bali. Pemantauan kualitas air dilaksanakan terhadap 3 sungai yaitu Tukad Melangit, Tukad Unda dan Tukad Jinah, masing-masing dilakukan pemantauan pada hulu, tengah dan hilir sebanyak 2 (dua) periode. Hasil pengukuran pemantauan kualitas air berdasarkan data Status Mutu memenuhi yang disyaratkan untuk Kelas 2 dengan status cemar ringan.

Dalam Rangka Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan upaya seperti :

1. Melaksanakan Gerakan kebersihan yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait, yang dilaksanakan di sekitar sungai, danau, pantai mangrove dan tempat ibadah;
2. Melaksanakan pemantauan kualitas air secara berkesinambungan.

Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2022 terealisasi 7.44% dari target 14.80% dengan tingkat ketercapaian 198.92%, bila dibandingkan dengan Persentase Mitigasi Gas Rumah Kaca pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami penikatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 mitigasi gas rumah kaca telah melampau target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 201.61%. ini mengidentifikasi bahwa mitigasi Gas rumah kaca di Provinsi Bali telah teratasi dengan baik.

Pembangunan Rendah Karbon merupakan Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau. PPRK mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, disisi lain paradigma PRK mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Terdapat lima kebijakan utama dalam pembangunan rendah karbon yakni, terkait energi terbarukan, perlindungan hutan dan restorasi gambut, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga, peningkatan produktivitas pertanian, serta perbaikan kelembagaan maupun tata kelola. Kategori sumber emisi/serapan GRK dalam perhitungan PRK yaitu(1) pertanian, kehutanan, penggunaan lahan lain; (2) energi; (3) limbah; (4) ekosistem pesisir dan kelautan.

Berdasarkan perhitungan IGRK menunjukkan bahwa besaran emisi sebelum Covid (2020) ada kecenderungan emisi GRK terus meningkat dan mengalami penurunan tajam pada saat puncak pandemic Covid-19 mencapai puncaknya pada Tahun 2020. Hal ini adalah wajar karena pada saat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kinerja perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata dan ada berbagai pembatasan kegiatan keluar rumah sehingga menjadikan kontribusi emisi dari sub sektor transportasi juga mengalami penurunan. Sektor energi tetap menyumbang emisi terbesar, dalam kisaran 80% kemudian disusul oleh sektor pertanian, sektor limbah dan sektor kehutanan.

Dalam mengendalikan Mitigasi Gas Rumah Kaca, Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan kolaborasi dengan UPT Kementerian LHK serta dukungan seluruh stakeholder.
2. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan hutan melalui pelaksanaan patrol perlindungan hutan yang dilakukan oleh seluruh UPTD KPH se-Bali.
3. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi tentang Pergub 97 Tahun 2018 dan Pergub 47 Tahun 2019 kepada seluruh stakeholder di Kabupaten/Kota, Instansi vertikal, Sekolah, Pasar Modern, Toko Retail, Distributor Plastik, Produsen Plastik.
4. Dibentuknya Tim Kerthi Bali Sejahtera di setiap Desa di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali, sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pergub 97 Tahun 2018, Pergub 47 Tahun 2019 dan Pergub 24 Tahun 2020.
5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber dan melakukan pemilahan sampah di TPS 3R dan TPST di Desa/Kecamatan/ Kabupaten se-Bali, agar meminimalisir pembuangan sampah ke TPA.

6. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah, serta Instansi Vertikal yang terkait. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di TPA Sarbagita dengan sarana prasarana yang ada seoptimal mungkin.

Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 terealisasi 1.26% dari target 1.2% dengan tingkat ketercapaian 105%, bila dibandingkan dengan Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan pada tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 90%. Ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Provinsi Bali ingin dimasa depan Bali Menjadi Mandiri Energi.

Inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali adalah: Rasio Elektrifikasi; Persentase Bauran EBT; dan Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral. Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%, dan diharapkan dapat tetap terjaga sebesar 100 %, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga, dan sampai dengan tahun 2022 masih dapat tetap terjaga 100%.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dan daerah dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Energi Bersih tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, serta menjaga keanekaragaman hayati.

Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi Energi Bersih untuk dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca, serta pemberdayaan potensi daerah dengan optimal. Pada tahun 2022, Jumlah kapasitas Energi Bersih

dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi

Daerah (RUED) adalah sebesar 10,6 MW, di bawah target yang ditetapkan yaitu 11 MW. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

yaitu 8,62 MW, akan tetapi persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 2,27% menjadi 1,26% di tahun 2022. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya penambahan kategori pada perhitungan DEN (Dewan Energi Nasional), serta penggunaan bahan bakar fosil (BBM & Batubara) cenderung lebih tinggi dari pada EBT. Walaupun demikian, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali menorehkan prestasi di Tingkat Nasional dalam bidang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dewan Energi Nasional (DEN) menganugerahkan dua penghargaan yaitu:

- 1. Penghargaan Terbaik Kedua Kategori “Daerah yang Melaksanakan Transisi Energi, dan
- 2. Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Daerah Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.

Arah Strategi Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan penggunaan energy bersih sebagai berikut :

- 1. Membuat/menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- 2. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral
- 3. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
- 4. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Tabel 3.38 Sasaran : “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan” Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 s.d. Tahun 2022.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdh 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70.10	74	72.16	97.51	76	94.94

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022 terealisasi 72.16% dengan target yang diperjanjikan 74% dengan ketercapaian 97.51%, realisasi indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 tidak mencapai target yang tercantum pada RPJMD Semesta Berencana 2018 s.d 2023, akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021, indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan 2,06%.

Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen Pengungkit. Namun pada kompinen hasil mengalami penurunan pada sub komponen Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Organisasi.

Tabel 3.39 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2016 s.d 2022

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks RB	64,44	66,16	67,29	69,31	69,49	70,10	72,16
Predikat	B	B	B	B	B	BB	BB

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Tren kenaikan Indeks RB dari tahun ke tahun meningkat positif namun kenaikannya kecil, hal ini disebabkan proses penilaian RB yang semakin ketat untuk meningkatkan kualitas Indeks RB di K/L/Pemda. Dimana tahun 2020 terjadi perubahan model penilaian RB yaitu memperkenalkan sub komponen Pemenuhan dan Reform pada komponen Pengungkit

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB tahun 2021, yaitu sbb:

1. Telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Reformasi Birokrasi kepada Kabupaten/Kota se-Bali, khususnya bagi kabupaten yang masih memperoleh nilai C yaitu Jembrana, Gianyar dan Karangasem.
2. Telah menetapkan tata kerja antara JPT, jabatan administrasi dan jabatan fungsional untuk menunjang kinerja utama organisasi.
3. Melaksanakan asistensi penyempurnaan peta proses bisnis sampai level peta lintas fungsi.
4. Melaksanakan monev pembangunan SPBE baik dari segi aplikasi, SDM, kebijakan, infrastruktur dan keamanan informasi.
5. Seluruh perangkat daerah telah menyusun pohon kinerja.
6. Melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali dan dijadikan dasar perbaikan pelayanan.

Guna mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, berikut upaya-upaya yang dapat kami laksanakan sebagai tindak lanjut, sbb:

1. Melaksanakan rapat Tim RB Provinsi pada **minggu ke-4** bulan Februari untuk menindaklanjuti 5 rekomendasi hasil evaluasi RB sesuai dengan poin nomor 4. Rapat dimaksud akan dirangkaikan dengan rapat Monev RB Provinsi Bali Semester II Tahun 2022. Apabila Bapak berkenan, mohon dapat memberikan

arahan untuk memperkuat komitmen dan sinergi antar Tim RB Provinsi dalam meningkatkan Indeks RB. Tim RB Provinsi terdiri dari 9 Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.

2. Dalam rangka meyajikan profil RB level PD dan level Provinsi akan dilakukan asistensi penginputan data RB melalui aplikasi Simonev Reform dan aplikasi Strata Reborn agar lebih akurat dan valid. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada **minggu ke-1** bulan Maret 2023. Aplikasi dimaksud mendapatkan apresiasi dari KemenpanRB terkait pengelolaan RB Pemprov.
3. Bali dan akan dilaporkan kepada KemenpanRB sebagai salah satu *best practice* RB kategori Tata Kelola Pemerintahan. Hasil asistensi selanjutnya akan kami presentasikan kepada Bapak Sekda untuk mengetahui perkembangan RB level PD dan level Provinsi.
4. Melaksanakan konsultasi teknis dengan evaluator dari Kemenpanrb terkait dengan tindak lanjut rekomendasi evaluasi RB tahun 2022 sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sesuai dengan arahan Kemenpanrb..
5. Menelaah metode baru proses evaluasi RB yaitu memakai RB Tematik yang berfokus pada penyelesaian masalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan digitalisasi administrasi pemerintah). Kebijakan RB Tematik yang dikeluarkan oleh Kemenpanrb akan segera disosialisasikan kepada Tim RB Provinsi Bali dan seluruh PD dilingkungan.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Provinsi Bali 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.40 dibawah ini :

Tabel 3.40 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

URAIAN	REFF CALK	TA 2022			REALISASI TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	6.1.1	5.596.479.850.692,00	5.905.037.523.797,34	105,51	5.923.153.297.394,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.1.1.1	3.494.115.418.572,00	3.862.875.261.848,23	110,55	3.117.070.012.473,76
Pajak Daerah	6.1.1.1.1	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
Retribusi Daerah	6.1.1.1.2	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.1.1.1.3	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73
Lain-lain PAD yang Sah	6.1.1.1.4	383.496.351.484,00	397.364.504.900,76	103,62	483.528.722.641,03
PENDAPATAN TRANSFER	6.1.1.2	2.047.466.392.120,00	2.037.237.485.177,00	99,50	2.801.186.284.925,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.1.1.2.1	2.047.466.392.120,00	2.037.237.485.177,00	99,50	2.801.186.284.925,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG	6.1.1.3	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
Pendapatan Hibah	6.1.1.3.1	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
BELANJA DAERAH	6.1.2	7.541.821.522.461,00	6.749.127.037.109,59	89,49	6.270.667.217.646,29
BELANJA OPERASI	6.1.2.1	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08
Belanja Pegawai	6.1.2.1.1	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15
Belanja Barang dan Jasa	6.1.2.1.2	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30
Belanja Bunga	6.1.2.1.3	-	-	-	2.775.000.000,00
Belanja Subsidi	6.1.2.1.4	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	-
Belanja Hibah	6.1.2.1.5	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63
Belanja Bantuan Sosial	6.1.2.1.6	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	-
BELANJA MODAL	6.1.2.2	1.800.399.412.612,00	1.451.748.423.386,86	80,63	839.010.470.016,80
Belanja Modal - Tanah	6.1.2.2.1	770.002.219.242,00	623.659.331.572,00	80,99	439.080.181.058,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	6.1.2.2.2	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	6.1.2.2.3	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.1.2.2.4	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	6.1.2.2.5	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00
Belanja Modal Aset Lainnya	6.1.2.2.6	75.000.000,00	65.229.150,00	86,97	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.1.2.3	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
Belanja Tidak Terduga	6.1.2.3.1	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
TRANSFER DAERAH	6.1.2.4	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41
Belanja Bagi Hasil	6.1.2.4.1	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93
Belanja Bantuan Keuangan	6.1.2.4.2	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48
SURPLUS/DEFISIT		(1.945.341.671.769,00)	(844.089.513.312,25)	43,39	(347.513.920.251,53)

URAIAN	REFF CALK	TA 2022			REALISASI TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PEMBIAYAAN DAERAH	6.1.3	1.945.341.671.769,00	1.193.798.304.068,62	61,37	1.197.855.592.021,05
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.3.1	2.050.341.671.769,00	1.293.798.304.068,62	63,10	1.242.855.592.021,05
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.1.3.1.1	850.341.671.769,00	850.296.343.468,62	99,99	192.855.592.021,05
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.1.3.1.2	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	1.050.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.1.3.1.3	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.1.3.2	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	6.1.3.2.1	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	-
Penyertaan Modal Daerah	6.1.3.2.2	5.000.000.000,00	-	-	45.000.000.000,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN	6.1.4	-	349.708.790.756,37	-	850.341.671.769,52

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali Tahun 2022

2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan

perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponenkomponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pencapaian target kinerja dari 22 Sasaran Strategis 2018-2023 untuk tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.541.821.522.461,- dan terealisasi Rp 6.749.127.037.109,-

atau 89.49%, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 4.076.148.648.130,- dengan realisasi Rp 3.791.897.703.325,- atau 93.03%, Belanja Modal sebesar Rp 1.800.399.412.312,- dengan realisasi Rp 1.451.748.423.386,- atau 80,63% dan Belanja Tidak Terduga Rp. 7.848.875.371,- dengan realisasi Rp. 4.759.779.107,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 792.694.485,- Data Per 6 Maret 2022.

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali tahun 2022 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari visi, misi serta tujuan dan sasaran yang diukur dengan 40 Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 92.5% atau kategori **“Sangat Baik”**.

Dari data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali ini, terlihat bahwa realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022 telah berada pada jalur yang benar (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023. Capaian kinerja indikator-indikator bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemiskinan sudah berada di atas capaian nasional.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Semesta Berencana Tahun 2018-2023.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut. Atas dasar hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengatur mengenai penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP, penyelenggaraan Tugas Pembantuan, pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

2.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali

3.1.1 Target Kinerja

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2022 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu :

a) Kementerian Pertanian

Total Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah Rp67.732.697.000,00 dan realisasi

keuangannya sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp63.778.917.085,00 (94,16%) dengan sisa anggaran Rp3.953.779.915,00 (5,84%) dan realisasi fisik terealisasi 100%.

b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali untuk penanganan jalan dan irigasi. Tugas Pembantuan diberikan bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Pemerintah Pusat. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.922.534.000,00 dengan rincian SKPD-TP Sumber Daya Air sebesar Rp6.332.449.000,00 dan SKPD-TP Bina Marga Rp4.590.085.000,00.

3.1.2 Realisasi

a) Kementerian Pertanian

1. Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pagu anggaran Rp35.502.589.000,00 realisasi anggaran Rp32.418.476.655,00 (91,31%), sisa anggaran Rp3.084.112.345,00 (8,69%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) (5891) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan pagu anggaran Rp210.000.000,00 realisasi anggaran Rp203.943.192,00 (97,11%), realisasi fisik 100%.
- b) (1783) Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan pagu anggaran Rp70.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp69.409.918,00 (99,15%), realisasi fisik 100%.
- c) (1784) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu Rp24.596.100.000,00 realisasi anggaran Rp23.157.726.800,00 (94,15%), realisasi fisik 100%.
- d) (1785) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu Rp9.603.315.000,00 realisasi anggaran Rp8.074.498.907,00 (84,08%), realisasi fisik 100%.
- e) (1786) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pagu anggaran Rp499.000.000,00 realisasi anggaran Rp428.638.023,00 (85,89%), realisasi fisik 100%.
- f) (1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu anggaran Rp524.174.000,00 realisasi anggaran Rp484.259.815,00 (92,39%), realisasi fisik 100%.

2. Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp6.065.789,000,00 realisasi anggaran Rp5.581.737.364,00 (92,01%), sisa anggaran Rp484.051.636,00 (7,99%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) EC. 5885. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.059.950.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.933.400.310,00 (93,86) realisasi fisik 100%.
- b) HA.1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp773.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp763.046.000,00 (98,65%), realisasi fisik 100%.
- c) HA.1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan dengan pagu Rp590.000.000,00 realisasi anggaran Rp388.664.286,00 (65,88%), realisasi fisik 100%.
- d) HA.4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.070.500.000,00 realisasi anggaran Rp1.944.461.350,00 (93,91%), realisasi fisik 100%.
- e) WA.1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp571.839.000,00 realisasi anggaran Rp552.165.418,00 (96,56%), realisasi fisik 100%

3. Hortikultura

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu anggaran Rp4.272.524.000,00 realisasi anggaran Rp4.181.415.432,00 (97,87%), sisa anggaran Rp91.108.568,00 (2,13%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) EC.5887 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan pagu anggaran Rp1.712.624.000,00 realisasi anggaran Rp1.702.698.554,00 (99,42%), realisasi fisik 100%.
- b) HA.1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pagu anggaran Rp2.100.000.000,00 realisasi keuangan Rp2.033.737.940,00 (96,84%) realisasi fisik 100%.
- c) HA.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan pagu anggaran Rp359.900.000,00 realisasi keuangan Rp350.572.696,00 (97,41%), realisasi fisik 100%.
- d) WA.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 realisasi keuangan Rp94.406.242,00 (94,41%), realisasi fisik 100%.

4. Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan pagu anggaran Rp5.121.279.000,00 sedangkan realisasi anggaran Rp4.944.426.321,00 (96,55%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) (EC.1777) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan Pagu Anggaran Rp2.732.450.000,00 realisasi anggaran Rp2.658.764.240,00 (97,30%) dan realisasi fisik 100%.
- b) (EC.1779) Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp895.475.000, realisasi anggaran Rp875.701.321,00 (97,79%), realisasi fisik 100%.
- c) (EC.5889) Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu anggaran Rp887.260.000 dan realisasi Rp854.389.202 (96,30%), realisasi fisik 100%.
- d) (EC.5890) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan pagu anggaran Rp407.545.000 dan realisasi Rp370.275.336,00 (90,86%), realisasi fisik 100%.
- e) (WA.1780) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan pagu anggaran Rp198.549.000,00 dan realisasi Rp185.296.222,00 (93,33%) realisasi fisik 100%

5. Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pagu Keseluruhan Rp16.770.516.000,00 Realisasi Anggaran Rp16.652.861.313,00 (99,64%) dan sisa dana Rp117.654.687,00 (0,36%). Realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) HA.1794 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp12.920.000.000,- realisasi anggaran Rp12.841.047.150,00 (99,39%), realisasi fisik 100%, realisasi fisik 100%.
- b) HA.1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan pagu anggaran Rp1.500.000.000,- realisasi Anggaran Rp1,483,533,82,00 (98,90%), realisasi fisik 100%, realisasi fisik 100 persen.
- c) HA. 1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp180.000.000,00 realisasi anggaran Rp172.351.480,00 (95,75%), realisasi fisik 100%, dengan realisasi fisik 100 persen
- d) HA. 3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran Rp1.258.325.000,00 realisasi anggaran Rp1,252,691,412,00 (99,55%), realisasi fisik 100%.
- e) HA. 3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan pagu anggaran Rp140.171.000,00 realisasi anggaran Rp138,930,606,00 (99,12%), realisasi fisik 100%.

- f) WA. 1979 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp772.020.000,00 realisasi anggaran Rp764,306,843,00 (99,00%), realisasi fisik 100%.

b) Kementerian Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air

Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp6.332.449.000,00 bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi dengan tetap menjaga agar sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik. Target kinerja program ini sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6,331,130,000,00 (99,98%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air adalah:

- a. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana melakukan operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Tukad Ayung untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air merupakan dukungan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan.

2. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran sebesar Rp4.590.085.000,00 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.575.997.000,00 (99,69%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan adalah:

a. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dilaksanakan bertujuan untuk merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan nasional lintas provinsi serta melakukan pemeliharaan rutin dan berkala ruas-ruas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan seperti drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan pagu anggaran sebesar Rp4.590.085.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.575.997.000,00 (99,69%).

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Bidang Pertanian	Satker 229102/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		35,502,589,000.00	100	32,418,476,655.00	91,31	-	-
			5891.Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	210,000,000.00	100	203,943,192.00	97,11		
			1783.Peningkatan Produksi Pakan Ternak	70,000,000.00	100	69,409,918.00	99,15		
			1784.Pengendalian dan Peanggulungan Penyakit Hewan	24,596,100,000.00	100	23,157,726,800.00	94,15		
			1785.Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	9,603,315,000.00	100	8,074,498,907.00	84,08		
			1786.Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	499,000,000.00	100	428,638,023.00	85,89		
			1787. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	2,580,523,000.00	100	484,259,815.00	92,39		
		Satker 229099/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		6,065,789.00	100	5,581,737,364.00	92,01	-	-
			EC. 8558.Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	2,059,950,000.00	100	1,933,400,310.00	93,86		
			HA.1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	773,500,000.00	100	763,046,000.00	98,65		
			HA.1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan	590,000,000.00	100	388,664,286.00	65,88		
			HA.4579. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	2,070,500,000.00	100	1,944,461,350.00	93,91		
			WA.1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	571,839,000.00	100	552,165,418.00	96,56		
		Satker 229100/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (04)	4,272,524,000.00	100	4,181,415,432.00	97,87	-	-
			EC.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1,712,624,000.00	100	1,702,698,554.00	99,42		
			HA.1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	2,100,000,000.00	100	2,033,737,940.00	97,42		
			HA.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	359,900,000.00	100	350,572,696.00	93,04		
			WA.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100,000,000.00	100	94,406,242.00	94,41		
		Satker 229101/ Dinas Pertanian dan Ketahanan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (05)	5,121,279,000.00	100	4,944,426,321.00	96,55	-	-

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Pangan							
			EC. 1777. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	2,732,450,000.00	100	2,658,764,240.00	97,30		
			EC. 1779.Penguatan Perlindungan Perkebunan	895,475,000.00	100	875,701,321.00	97,79		
			EC. 5889.Pasca Panen,Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	887,260,000.00	100	854,389,202.00	96,30		
			EC. 5890.Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	407,545,000.00	100	370,275,336.00	90,86		
			WA.1780. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	198,549,000.00	100	185,296,222.00	93,33		
		Satker 229108/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Sarana dan Prasarana Pertanian	16,770,516,000.00	100	16,652,861,313.00	99,64	-	-
			HA. 1794.Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian	12,920,000,000.00	100	12,841,047,150.00	99,39		
			HA.1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1,500,000,000.00	100	1,483,533.00	98,90		
			HA. 1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	180,000,000.00	100	172,351,480.00	95,75		
			HA. 3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1,258,325,000.00	100	1,252,691,412.00	99,55		
			HA.3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	140,171,000.00	100	138,930,606.00	99,12		
			WA. 1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana Sarana Pertanian	772,020,000.00	100	764,306,843.00	99,00		
2	Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	SKPD-TP SUMBER DAYA AIR						
			Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen	6,332,449,000.00	140,37 Km	6,331,130,229.00	140,37 Km	-	-
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	6,332,449,000.00	140,37 Km	6,331,130,229.00	140,37 Km		
			Irigasi yang dioperasi dan dipelihara	5,791,810,000.00	140,37 Km	5,791,011,285.00	140,37 Km		
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	540,639,000.00	2 Layanan	540,118,944.00	2 Layanan		
			SKPD-TP BINA MARGA						
			Program Penyelenggaraan Jalan	4,590,085,000.00		4,575,997,000.00		-	-
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	4,590,085,000.00		4,575,997,000.00			
			Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	1,423,500,000.00	33,83 Km	1,420,733,000.00	33,83 Km		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	334,876,000.00	0,11 Km	329,608,000.00	0,11 Km		
			Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Padat Karya)	738,513,000.00	0.2 Km	738,513,000.00	0.2 Km		
			Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	524,000,000.00	524 M	523,642,000.00	524 M		
			Preservasi Jembatan	419,747,000.00	16 M	419,747,000.00	16 M		
			Preservasi Jembatan (Padat Karya)	803,349,000.00	180.2 M	803,349,000.00	180.2 M		
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	312,386,000.00	1 Layanan	311,036,000.00	1 Layanan		
			Layanan Umum	33,714,000.00	1 Layanan	29,369,000.00	1 Layanan		

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2022 di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Kementerian Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya reconfusing anggaran berulang kali
- b. Adanya pagu kegiatan yang diblokir hingga awal desember
- c. Adanya pergantian KPA, PPSPM dan PPK

2. Kementerian Pekerjaan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat berjalan dengan baik. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD-TP Sumber Daya Air maupun SKPD-TP Bina Marga yaitu:

- a. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada SKPD-TP Bina Marga sehingga tugas tersebut diambil oleh staf pada Sub Unit Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga;
- b. Kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan SKPD-TP Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sumber Daya Air (SDA).

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Upaya Mengatasi Permasalahan pada Kementerian Pertanian :

- a. Melakukan koordinasi serta percepatan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten
- b. Melakukan koordinasi dengan unit ES II kementerian terhadap pagu yang masih terblokir

2. Upaya Mengatasi Permasalahan pada Kementerian Pekerjaan Umum :

Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan di tahun ini menjadi hal yang sangat berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya akibat adanya pandemi *Covid-19*. Dengan mengikuti *time schedule* dan protokol kesehatan yang baik, pelaksanaan kegiatan pada SKPD-TP Sumber Daya Air serta SKPD-TP Bina Marga tidak mengalami permasalahan yang berarti, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

- 1. Pelayanan pendidikan menengah
- 2. Pelayanan pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan pendidikan menengah	100 %	2022
2	Pelayanan pendidikan khusus	100 %	2022

4.1.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator SPM	Target	Capaian	%	Keterangan
1.	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	191.920 orang	142.014 siswa	74	Buku Profil Pendidikan
2	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	1,85	1,95	105	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
3	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	1,75	1,77	101	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
4	Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1,85	1,91	103	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
5	Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1,75	1,74	99	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
6	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	52	27,87	53,60	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
7	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja	70,9	82,5	116	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
8	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	2.748 orang	1.847 siswa	67,21	Buku Profil Pendidikan
9	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,8	1,81	100,5	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
10	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,8	1,91	106	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
11	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	1,85	1,95	105	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
12	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen	1,7	1,64	96,48	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023

No	Indikator SPM	Target	Capaian	%	Keterangan
	Nasional				
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,7	1,74	102	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023
14	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	1,75	1,77	101	Rapor Pendidikan rilis bulan Maret 2023

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Anggaran
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Rp. 865.312.916.116	APBD
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	Rp. 24.947.753.550	APBD

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2022 total sebanyak 9.016 orang terdiri dari 6.392 orang (70,89%) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.624 orang (29,10%) dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terkonsentrasikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 221 orang (3,46%) dan terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 6.171 orang (96,54%). Keadaan Tenaga Kontrak sebanyak 2.624 orang (26,10%) terdistribusikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 239 orang (9,10%) dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan sebanyak 2.385 orang (90,89%). Secara administrasi Disdikpora Provinsi Bali memiliki tanggungjawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 358 sekolah, yang terdiri atas 89 SMA Negeri, 77 SMA Swasta, 56 SMK Negeri, 122 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 2 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Disdikpora Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Khusus (usia 4-18 tahun) sebesar 100%.
- b) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri masih belum memenuhi target dan capaiannya masih kecil.

2. Solusi

- a) Memantapkan peningkatan akses pendidikan melalui bantuan sarana prasarana sekolah (USB, RKB, Pematik (Pembelajaran berbasis TIK), pemberian dana pendamping BOSDA dan rencana pemberian bantuan dana pendidikan khususnya bagi siswa kurang mampu untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah;
- b) Berkoordinasi lebih intensif dengan Disdikpora Kabupaten/Kota agar pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar (usia 6-12 tahun dan usia 13-15 tahun) dapat mencapai 100%, yang akan berkontribusi dalam penuntasan capaian APS Pendidikan Menengah;
- c) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan;
- d) Lebih mengintensifkan penguatan Pendidikan vokasi melalui Revitalisasi SMK yaitu peningkatan kerjasama dengan DU/DI, bantuan sarana prasarana praktek siswa sesuai dengan kebutuhan DU/DI, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan DU/DI, pemagangan siswa SMK di DU/DI, dan sertifikasi kompetensi.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	100 %	2022
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2022

4.2.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Kunci Outcome/Output	Target Pencapaian 2021	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	100%	
		IKK OUTPUT :			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Paket	4 Paket	
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	194 pos	194 pos	
		Jumlah SDM kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	48.618 tenaga	48.618 tenaga	
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	13 tenaga	13 tenaga	
		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	100 %	100%	
		IKK OUTPUT :			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	129.038 pcs	129.038 pcs	
		Jumlah SDM Kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	25 tenaga	25 tenaga	
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB Lintas Kabupaten/Kota	1 kajian	1 kajian	

Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Tahun 2022

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	4.380.824	4.380.824	10

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
	Akibat Bencana Provinsi	jiwa	jiwa	0
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	49.532 jiwa	49.532 jiwa	100

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi. Penanggulangan Krisis Kesehatan ada 3 Fase :

1. Mitigasi
2. Tanggap Darurat
3. Rehabilitasi
 - Kegiatan pada fase Mitigasi bertujuan untuk penguatan seluruh komponen kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut dapat langsung kepada masyarakat ataupun tidak langsung.
 - Kegiatan pada fase Tanggap darurat hanya dilakukan apabila terjadi bencana atau krisis kesehatan dan dinyatakan oleh pimpinan daerah sebagai tanggap darurat bencana sehingga kegiatan pada tahun 2022 fokus untuk penguatan pada fase mitigasi dengan mengadakan Kegiatan :
 - Peningkatan Kapasitas Tim DMT
 - Workshop Pembentukan Tim DMT Provinsi Bali
 - Pelaksanaan Sosialisasi pengenalan stratifikasi 9
 - Workshop Penguatan Akademik Health System
 - Monev SPA di Fasyankes

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) maka Kewaspadaan Dini KLB dan Respons adalah kesatuan kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan masalah kesehatan berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat, dengan menggunakan teknologi surveilans.

Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
- b) Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.

- c) Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
- d) Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.
- e) Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya.
- f) Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- g) Angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 menyatakan bahwa penanggulangan KLB harus dilakukan secara terpadu antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penanggulangan KLB/Wabah meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Dalam keadaan KLB/wabah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka penderita serta Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan/alat pendukung lainnya.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Dana
1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp. 14.106.000,-	APBD

		Rp. 229.264.000,-	APBN
2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Rp. 520.090.200,-	APBD

Anggaran tahun 2022 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk anggaran APBD sebesar Rp. 520.090.200,-, dan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada APBD sebesar Rp. 14.106.000,- dan APBN sebesar Rp. 229.264.000,- .

4.2.5 Dukungan Personil

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
 Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dibutuhkan dukungan personil dari seluruh fasilitas kesehatan, yang bila dimaksimalkan berasal dari: 72 rumah sakit dan 120 puskesmas.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
 Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan yang ditemukan :
- a) Kejadian Luar Biasa tidak dapat diprediksi setiap tahunnya sehingga sulit untuk memperkirakan kebutuhan logistik penanggulangan KLB.
 - b) Kejadian KLB bisa disebabkan oleh berbagai jenis penyakit baik yang termasuk *Emerging Disease* ataupun *Reemerging Disease*.
 - c) Penduduk yang bersiko berbeda-beda sesuai kejadian penyakit yang berpotensi KLB
 - d) Kurangnya tenaga SDM terkait KLB.
 - e) Dengan keterbatasan anggaran maka harus dipilih kegiatan prioritas yang sesuai dengan jumlah anggaran yang dimiliki.
- Solusi :

- a) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan.
- b) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (new emerging disease) melalui pelatihan maupun refreasing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas.
- c) Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan.
- d) Menyiapkan logistik sesuai dengan jenis penyakit berpotensi KLB.
- e) Melakukan mitigasi sebelum terjadinya KLB.
- f) Menyusun prioritas kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2022 adalah seperti tabel berikut:

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	CAPAIAN	
					2020	2021
1	2	3	4	5	7	8
	UPTD PAM					
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100 %	100 %
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022	100 %	100 %
	UPTD PAL					

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	CAPAIAN	
					2020	2021
1	2	3	4	5	7	8
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100 %	100 %
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022		

4.3.3 Realisasi

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2022

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2022	2022	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPTD PAM								
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100%	65,37 %	-	Rp.31.632.828.045,55 (Anggaran di UPTD. PAM)	1. Serapan air curah oleh PDAM Kab/Kota belum optimal karena PDAM masih memanfaatkan hasil pengolahannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. 2. Kendala teknis pada jaringan distribusi utama, khususnya pada tekanan air yang masih kurang sesuai permintaan PDAM, karena dengan tekanan air kurang distribusi ke masyarakat yang diujung atau elevasinya tinggi tidak optimal 3. Terganggunya suplai air baku dan kualitas air baku pada beberapa spam khususnya pada musim hujan, sehingga mengganggu produksi air curah
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022	100%	100 %			
	UPTD PAL								
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100%	100 %		Rp.11.148.098.400,(Anggaran di UPTD. PAL)	

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2022	2022	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lintas kabupaten/kota	b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022	100%	100 %			

4.3.4 Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2022 adalah:

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2022

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2022	2022	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPTD PAM								
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; d) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 % 100 %	2022 2022	100% 100%	65,37 % 100 %	-	Rp.31.632.828.045,55 (Anggaran di UPTD. PAM)	4. Serapan air curah oleh PDAM Kab/Kota belum optimal karena PDAM masih memanfaatkan hasil pengolahannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. 5. Kendala teknis pada jaringan distribusi utama, khususnya pada tekanan air yang masih kurang sesuai permintaan PDAM, karena dengan tekanan air kurang distribusi ke masyarakat yang diujung atau elevasinya tinggi tidak optimal 6. Terganggunya suplai air baku dan kualitas air baku pada beberapa spam khususnya pada musim hujan, sehingga mengganggu

									produksi air curah
	UPTD PAL								
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; d) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022	100%	100 %	-	Rp.11.148.098.400,(Anggaran di UPTD. PAL)	

4.3.5 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 672 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang terdiri dari:

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	17 Orang
7	Sub Koordinator Unit Subtansi	Eselon IV	9 Orang
Staf			
1.	Administrasi dan Teknis	Golongan IV	1
2.	Administrasi dan Teknis	Golongan III	87 Orang
3.	Administrasi dan Teknis	Golongan II	56 Orang
4.	Administrasi dan Teknis	Golongan I	1 Orang
	Tenaga Non PNS	-	487 Orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:
 1. Pelayanan air bersih baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat ketidakmerataan sumber air baku dan kurang profesionalnya kondisi pengelolaannya;
 2. Terganggunya pendistribusian air SPAM Penet ke PDAM Kota Denpasar dengan daerah layanan wilayah Denpasar Barat dan PDAM Kabupaten Badung dengan daerah layanan wilayah Petitenget, Kuta yang diakibatkan oleh sering bocornya bendung karet pada *Long Storage* Tukad Penet sehingga SPAM Penet tidak bisa berproduksi;

3. Distribusi SPAM Guyangan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (produksi air kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat) akibat pompa pada mata air guyangan yang bisa beroperasi hanya 1 unit disebabkan kurangnya catu daya listrik PLN;
 4. Belum Optimalnya penyerapan air SPAM Petanu oleh PDAM Denpasar, Badung dan Gianyar (*idle capacity* sekitar 50%) karena PDAM Badung dan Denpasar masih mampu menyediakan air melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimilikinya. PDAM Gianyar belum secara optimal mengembangkan sambungan rumah khususnya di wilayah Saba dan sekitarnya akibat terkendala elevasi;
 5. Terjadi beberapa kali kebocoran pada Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu sehingga mengganggu pendistribusian air wilayah Denpasar Timur, Saba, Ketewel dan wilayah Kuta Selatan.
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota baik pada jaringan perpipaannya maupun instalasi pengolahannya (IPAL) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan system setempat sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kondisi prasarana instalasi pengelolaan air limbah terpusat yang ada (sewerage/ lagoon);
 2. Kesadaran pelanggan kategori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40 % yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi;
 3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke House Inlet (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah diareal rumah atau di jalan raya. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk kedalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan raya;
 4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor

- pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.
5. Kondisi kolam aerasi (*aerasi pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimentasi pond*) sudah penuh dengan endapan pasir dan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal;
 6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak. Akibatnya sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian instalasi.
- a. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan SPAM lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
1. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui Balai wilayah sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan penggantian karet bendung pada *Long Storage* Tukad Penet dan optimalisasi perangkat pendukung;
 2. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS-Bali Penida telah merencanakan optimalisasi SPAM Guyangan diantaranya menaikkan catu daya listrik PLN, pergantian pipa transmisi dari PVC ke GIP, perbaikan beberapa pompa yang tidak optimal;
 3. Percepatan pengkoneksian pipa PDAM Denpasar (Taping Serangan) dengan Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu untuk menambah penyerapan air SPAM Petanu;
 4. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali akan membangun jaringan tersendiri dari IPA Petanu ke Wilayah Guwang untuk menambah penyerapan dari PDAM Gianyar. Peningkatan pemantauan kondisi jaringan dan aksesoris dan menyediakan lebih banyak suku cadang untuk mempercepat penanganan kebocoran/kerusakan.
- b. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah;
 2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL;
 3. Melakukan rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran;
 4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan;

5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT;
6. Perlu direncanakan pembangunan permukaan Bak Kontrol di masing-masing rumah agar elevasinya dibuat lebih tinggi dari existing halaman untuk mengurangi lumpur (sendimen masuk ke Bak Kontrol)

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut:

**Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022**

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	CAPAIAN	
					2020	2021
1	2	3	4	5	7	8
2	Bidang Perumahan					
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100 %	100 %
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022	100	100

4.4.3 Realisasi

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut:

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2022

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2021	2021	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bidang Perumahan								
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; • Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	e) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100%	93,33%	-	Rp. 998,770,806- (Anggaran di Bidang Perumahan)	Karena tidak terpenuhinya indikator : Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan Subsidi uang sewa pada Sistem E-SPM
		f) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2022	100%	100 %			

4.4.4 Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut :

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2022

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2021	2021	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bidang Perumahan								
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; • Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	g) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2022	100%	93,33%	-	Rp. 998,770,806- (Anggaran di Bidang Perumahan)	Karena tidak terpenuhinya indikator : Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan Subsidi uang sewa pada Sistem E-SPM

4.4.5 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 672 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang terdiri dari:

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2022

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III a	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III b	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	17 Orang
7	Sub Koordinator Unit Subtansi	Eselon IV	9 Orang
Staf			
1.	Administrasi dan Teknis	Golongan IV	-
2.	Administrasi dan Teknis	Golongan III	87 Orang
3.	Administrasi dan Teknis	Golongan II	56 Orang
4.	Administrasi dan Teknis	Golongan I	1 Orang
	Tenaga Non PNS	-	487 Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang di hadapi dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut :

- a. Pada layanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi, yang tidak mendapatkan anggaran, karena tidak ada kewenangan provinsi setelah adanya Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah dan Permendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah Sehingga tidak tercapainya target 100%;
- b. Keterlambatan proposal yang masuk ke Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPRKIM Provinsi Bali yang menangani SPM Perumahan;
- c. Perkembangan pembangunan permukiman, terutama di perkotaan dan areal yang cepat berkembang tidak mampu diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai;
- d. Prasarana permukiman banyak yang belum memadai, seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sarana olah raga sementara daerah-daerah kumuh terus bertambah;
- e. Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- f. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU).

Solusi

- a. Solusi yang dapat diambil untuk Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah melakukan pendataan dan pemantauan Pemenuhan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait;

- b. Melakukan koordinasi dan pendataan terkait program pemerintah yang menimbulkan dampak kepada rumah masyarakat sehingga harus dilakukan relokasi;
- c. Proposal permohonan bantuan yang terlambat masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Bidang Perumahan akan dilaksanakan pemenuhannya di tahun berikutnya.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

4.5.3 Realisasi

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10
	Pelayanan ketenteraman danketertiban umum Provinsi.	100	100	100	210	210	100	100	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2022 seluruhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

4.5.5 Dukungan Personil

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 191 Orang, dengan status :

PNS = 114 Orang

Non PNS = 90 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- 1) Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, anggota Satpol PP Provinsi Bali belum dapat melakukan pendataan perkiraan rekapitulasi jumlah warga Negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada, karena kurangnya kerjasama dari masyarakat khususnya dalam memberikan data kependudukannya (seperti NIK, No KK)
- 2) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga berdampak terhadap kepastian hukum.
- 3) Kemajuan Teknologi Informasi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

b) Solusi :

- 1) Melakukan kerjasama (MoU) dengan Disdukcapil Provinsi untuk dapat mengakses data kependudukan warga Negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri) maupun dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.
- 3) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;
- 4) Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta

anggaran

- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

JENIS PELAYANAN DASAR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 2022

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian 2022
1	2	3	4	5	6
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%
		b) Standar jumlah dan	100%	2022	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian 2022
1	2	3	4	5	6
	Provinsi	kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan			
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%

4.6.2 Realisasi

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran APBD
1	2	3	4	5	2022 6	2022 7	8
6	Bidang Sosial						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 379.899.555,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 829.269.255,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 750.268.555,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 3.284.398.200,-

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran APBD
					2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengemis didalam panti	b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 255.939.600,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali pada Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Indikator yang Sesuai Target dan Tidak Sesuai Target :

- 6.1
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2022 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% capaian realisasi tersebut 100% dicapai melalui anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2022 ditargetkan 100% dengan capaian 100%, SDM Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Disabilitas , Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2022 ditargetkan 100% realisasi capaian 100%.
- 6.2
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2022 target 100% capaian realisasi 100% capaian realisasi tersebut dicapai dari anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2022 ditargetkan 100% dengan

- realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- 6.3
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2022 target 100% dengan capaian realisasi 100 % . Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2022 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Asistensi Lanjut Usia, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Tahun 2022 ditargetkan 100 % dengan realisasi capaian 100%.
- 6.4
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2022 target 100% capaian realisasi 100%. Provinsi Bali belum mempunyai Panti Gelandangan dan Pengemis namun dalam penanganan orang terlantar menyediakan asrama untuk penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Daerah asal. Penanganan Gepeng ditangani oleh Instansi Sosial Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi .
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2022 ditargetkan 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- 6.5
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi dengan target 100 % telah memenuhi standar dengan realisasi 100%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM tersebut terdiri ASN pada instansi Sosial, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesos dan relawan yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dari

target 100% telah tersedia dengan realisasi 100%.

4.6.3 Alokasi Anggaran

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran APBD
					2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bidang Sosial						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 379.899.555,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 829.269.255,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 750.268.555,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2022	100%	100%	Rp. 3.284.398.200,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial	a) Standar jumlah dan kualitas	100%	2022	100%	100%	Rp. 255.939.600,-

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran APBD
					2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	barang dan atau jasa;					
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2022	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2022	100%	100%	

4.6.4 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari:

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	4 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	5 Orang
6.	Sub Koordinator	Setara Eselon IV	14 Orang
Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	1 Orang
2.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
3.	Penyuluh Sosial	Golongan III	3 Orang
4.	Pranata Komputer	Golongan III	1 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	-
2.	Umum	Golongan III	71 Orang
3.	Umum	Golongan II	33 Orang
4.	Tenaga Administrasi	-	102 Orang

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Kendala

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya Fungsional Kesejahteraan Sosial dalam panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Permasalahan

Terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, sehingga tidak dapat terlayannya seluruh sub-sub kegiatan dalam pencapaian SPM tahun 2022.

Solusi

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas
		2. Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus

4.7.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2022 seperti yang tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB Provinsi yang tertangani <18 Jam

4.7.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum (UPTD. Pengelolaan Air Minum)

UPTD. Pengelolaan Air Minum (UPTD. PAM) merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengelola Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota guna memberikan pelayanan air minum untuk kawasan regional. Saat ini UPTD. PAM mengelola 5 (lima) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu SPAM Petanu (melayani Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kota Denpasar), SPAM Penet (melayani Kab. Badung dan Kota Denpasar), SPAM Telagawaja (melayani Kab. Karangasem) dan SPAM Guyangan (melayani Kab. Klungkung) SPAM Burana (melayani Kab. Buleleng dan Kab. Jembrana) Pelayanan air minum meliputi produksi dan pendistribusian air minum kepada Kabupaten/Kota melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ruang Lingkup SPM pada UPTD. Pengelolaan Air Minum yang sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2017 tentang SPM UPTD. Pengelolaan Air Minum ini adalah menggambarkan capaian-capaian dalam pelaksanaan produksi dan distribusi air curah untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Adapun hasil/output penerapan Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Air Minum adalah sebagai berikut:

Hasil/Output Penerapan SPM Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
1	Pelayanan Teknis a. Kualitas air	Input	Frekuensi pengambilan sampel air per hari	2 kali per ha	4	4	
			Jumlah sampel air yang diambil dari sambungan pelanggan per hari	1 – 3 % per wilayah/zon	7%	7%	
		Proses	Pemeriksaan fisika : bau, rasa, kekeruhan dan pH	< 5 menit,dilakukan di titik pengambilan	4 menit	4 menit	
			Pemeriksaan kualitas air di laboratorium (parameter wajib)	< 5 hari kerja	10 hari	10 hari	Uji Lab Mikro biologi min. 10 hari
			Pemeriksaan sisa chlor pada titik Off	< 5 menit,dilakukan	2 menit	2 menit	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			Take.	an di titik Off take			
		Output	Kualitas air di pelanggan (fisik): tidak bau, tidak berasa, tidak keruh	100 %	100%	100%	
			1. Kualitas air sesuai parameter wajib (sesuai Permenkes nomor 492/2010)	100%	100%	100%	
			a. Sisa Chlor $\geq$ 0,2 ppm	100%	100%	100%	
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %	89.81%	90.81%	
			2. Tidak terjadi wabah penyakit karena air	100 %	100%	100%	
2	Pelayanan Teknis b. Kuantitas air	Input	Pembacaan pemakaian air pada meter induk off take	100%	100%	100%	
			Perhitungan pemakaian air di tiap off take	100%	100%	100%	
		Proses	Memenuhi kebutuhan air minimal per bulan	100%	100%	100%	
		Output	Semua pelanggan mendapatkan air	100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80%	89.81%	90.81%	
3. a	Pelayanan Teknis - b.Kontinuitas air pelayanan SPAM Petanu dan Penet	Input	Mengoperasikan SPAM selama 24 jam /hari	100%	66,67%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum rata2 24 jam/hari,	100%	24 jam/100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %	89.81%	90.81%	
3. b	Pelayanan Teknis – Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Telagawaja	Input	Mengoperasikan SPAM selama 2 jam /hari , kapasitas 2 x 115 l/det	100 %	100%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM Kab. Karangasem 24 jam / hari	100%	24 jam/100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	$\geq$ 80 %	89.81%	90.81%	
3.c	Pelayanan Teknis –	Input	Mengoperasikan SPAM selama 14	100 %	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
	Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Guyangan		jam /hari				
		Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM 14 jam/hari	100%	86%	100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	50%	50%	12 jam/hari
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
4	Pelayanan Laboratorium standar minimal	Input	Fasilitas dan peralatan laboratorium air	sesuai standar minimal	Ada	Ada	
		Proses	1. Waktu tunggu proses hasil laboratorium 2. Kemampuan memeriksa parameter standar minimal (Kekeruhan, pH, sisa chlor), air baku, air hasil olahan IPA, dan air di pelanggan.	≤ 120 menit	90	90	
				100 %	100%	100%	
				Bar Tes (proses pengolahan air)	Ada	Ada	
				Tersedia tenaga laboratorium	Ada	Ada	
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian dosis bahan kimia 2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu	100 %	100%	100%	
				100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	91.00%	
5	Pelayanan Teknis – tekanan air di pelanggan	Input	Fasilitas dan peralatan pengukuran tekanan air dalam pipa	sesuai standar	Ada	Ada	
			Pengukuran tekanan air di JDU	sesuai standar	Ada	Ada	
			Pengukuran tekanan air pelanggan di titik off take	sesuai standar	Ada	Ada	
		Proses	Tekanan air di pelanggan (Off Take) minimal sebesar 0.5 bar	100 %	96%	100%	
		Output	Tidak adanya kejadian air di pelanggan tidak mengalir	100 %	98.7%	98.7%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
6	Pelayanan Teknis – Kehilangan air	Input	Tersedia peralatan deteksi kebocoran air	Kondisi baik	Belum Ada	Belum Ada	Dengan Sistem Manual, membandingkan WM pada Out Induk Reservoir dan pada

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
							Tapping
			Program penurunan kehilangan air (NRW)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Proses	Kehilangan air	25 %	<18%	<18%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
			Kehilangan air makin menurun	≤ 20%	<18%	<18%	
7	Pelayanan gangguan/ pengaduan dari pelanggan	Input	Adanya kebijakan untuk pelayanan gangguan dan pengaduan dari pelanggan	Ada	Ada	Ada	
			Waktu penerimaan pengaduan	24 jam/hari	24 jam/hari	24 jam/hari	
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi pengaduan 2. Tanggapan / respon terhadap pengaduan 3. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada pelanggan	≤ 15 menit < 24 jam 100%	≤ 15 menit 12 jam 100%	≤ 15 menit 12 jam 100%	
			1. Penyelesaian pengaduan besaran tagihan 2. Semua jenis pengaduan pelanggan dilayani	< 2 hari 100%	1 hari 100%	1 hari 100%	
		Output					
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
8	Pengelolaan limbah	Input	Adanya penanggung jawab pengelola limbah olahan IPA	Ada	Ada	Ada	
			Ketersediaan fasilitas bangunan pengolahan limbah olahan IPA (sludge drying bad / SDB)	Ada	Ada	Ada	
		Proses	Air hasil SDB, dialirkan ke badan air	100%	100%	100%	
			Limbah padat hasil SDB, dikeringkan dan diangkut secara berkala	100%	100%	100%	
		Outcome	Limbah cair tidak mencemari lingkungan	Ya	Ya	Ya	
			Limbah padat dapat dimanfaatkan	Ya	Ya	Ya	
9	Administrasi dan	Input	Adanya peraturan karyawan	Ada	Konsep	Konsep	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
	Manajemen		Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada (belum sepenuhnya)	Ada (PNS Daerah)	Pegawai Kontrak Daerah tidak ada urutan kepangkatan
			Adanya SOP disetiap unit kerja	Ada	Ada	Ada	
		Proses	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	
			Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	
			Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	
			Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pelanggan	≤ 1 jam	30 menit	30 menit	
			SOP dipatuhi dan diletakkan ditempat kerja	100%	100%	100%	
		Output	Cost recovery	≥ 20 %	≥ 20 %	≥ 20 %	
			Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	
			Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	≥ 60%	0%	0%	Tidak ada pelatihan karena situasi pandemi
			Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	
			Laporan harian, berkala dan bulanan sesuai SOP	100%	100%	100%	
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana SPAM	Input	Adanya Penanggung Jawab sarana dan prasarana pelayanan SPAM	K Kepala Dina	Ada	Ada	
			Ketepatan waktu pemeliharaan masing-masing sarana dan prasarana	100%	100%	100%	
			Tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan SPAM	100%	100%	100%	
		Output	Alat ukur (meter induk dan meter air pelanggan) dan alat laboratorium air dikalibrasi secara berkala dan tepat waktu	100%	50%	0%	
			Peralatan Mekanikal dan	100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			Elektrikal dioperasikan dengan benar sesuai SOP dan Instruksi Kerja.				
11	Pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja	Input	Ketersediaan APD lengkap	≥60 %	80%	80%	
		Proses	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 %	80%	80%	
		Outcome	Tidak terjadi kecelakaan kerja	100 %	100%	100%	
12	Promosi/ Pemasaran		Sosialisasi kepada pelanggan	100%	100%	100%	
			Pengelola Promosi/pemasaran pelanggan	Ada	Belum ada	Belum ada	Pelanggan UPTD. PAM ditentukan dengan PKS, sehingga belum diperlukan promosi

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah (UPTD. Pengelolaan Air Limbah)

Peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Bali, khususya di Kota Denpasar dan (Wilayah Pusat Kota Denpasar dan Sanur) Kabupaten Badung (wilayah Kuta dan sekitarnya) sangat diperlukan, mengingat Provinsi Bali adalah ikon pariwisata nasional dan daerah tujuan utama wisata berskala internasional. Perkembangan pariwisata di Bali berdampak pula pada pesatnya laju pertumbuhan penduduk namun kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara yang selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dikhawatirkan akan dapat memberikan dampak buruk terhadap menurunnya kualitas lingkungan sehingga pengelolaan lingkungan, khususnya sanitasi menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Bali. Selain berasal dari kegiatan penduduk di permukiman, penyediaan akomodasi bagi para wisatawan juga menimbulkan peningkatan produksi air limbah domestik. Air limbah domestik yang dibuang langsung ke badan air dapat mencemari badan air dan menurunkan kualitas air serta lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Regional atau yang lebih dikenal dengan DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*). Sistem pengolahan air limbah perpipaan terpusat dimana air limbah domestic DSDP merupakan sistem

pembuangan air limbah domestik buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) hotel, restaurant, fasilitas Umum, Kantor dan lain-lain disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat melalui sistem perpipaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air.

DSDP saat ini dikelola oleh UPTD. Pengelolaan Air Limbah (UPTD.PAL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dengan wilayah pelayanan mencakup wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta-Legian-Seminyak dengan total pelanggan saat ini sebanyak 15.296 pelanggan, terdiri dari kategori rumah tangga 13.312 pelanggan, hotel dan penginapan 501 pelanggan, restaurant dan niaga 1.263 pelanggan, dan sisanya perkantoran, fasilitas umum dan sosial sebanyak 220 pelanggan.

Disamping mengelola DSDP, UPT. PAL juga mengoperasikan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), yaitu instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja). Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik di rumah-rumah masyarakat belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di cubluk dan tangki *septictank* secara reguler dikuras atau dikosongkan kemudian diangkut oleh Penyedia Jasa Kuras ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. Saat ini perhari truk tinja yang masuk ke IPLT sekitar 50 - 70 truk/hari. Untuk meningkatkan pelayanan air limbah kepada masyarakat/pelanggan DSDP, saat ini UPTD. PAL telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sejak 1 Januari 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 663/01-F/HK/2016 tentang Penerapan Badan layanan Umum Daerah Pada UPT. Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Dengan menjalankan PPK-BLUD diharapkan UPT. PAL akan lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang sehat guna memenuhi tuntutan pelayanan prima dari pelanggan DSDP.

4.7.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Bidang Perumahan (Program Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana-Dampak Proyek Pemerintah Provinsi)

Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana-Dampak Proyek Pemerintah Provinsi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Hakekat dari *rumah layak huni* adalah rumah yang menjamin keamanan dan ketenangan/kenyamanan bagi

penghuninya khususnya terhadap kondisi sekitar baik alam atau lingkungan, sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang membuat penghuninya merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan ini dapat disebabkan oleh lokasi yang rawan bahaya atau dari bangunan itu sendiri karena adanya kerusakan konstruksi, penggunaan bahan bangunan yang tidak berkualitas dan berbahaya, luas ruang yang tidak cukup atau sistim sanitasi yang buruk.

2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

1. Pengertian

- a. “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer;
- b. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan;
- c. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus;
- e. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. JDIH Kementerian PUPR;
- f. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- g. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. Jenis Pelayanan

- a. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
1) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau

- 2) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi.

4.7.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM.

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2022, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Pebruari 2021 dengan melibatkan beberapa *Stakeholder*, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 331.1/1353/Satpol PP, tanggal 22 Pebruari 2021, dimana untuk susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara eksisting tidak mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 2 (dua) Program yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

Sub Kegiatan :

- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

4.7.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Pengasuhan
- Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak
- Penyediaan sandang
- Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- Akses ke layanan pendidikan
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemulasaraan
- Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan :

- Pemulangan ke daerah asal

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :

- Penanganan khusus bagi kelompok rentan

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2022, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 telah berjalan dengan baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat pula ditingkatkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2022 ini tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik bagi pemerintah daerah maupun Kepala Daerah yang memimpinya. Kinerja yang baik dan optimal akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada upaya-upaya pemerintah dalam berkinerja untuk menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance*. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan Misi ke 22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Bali, 15 Maret 2023